



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 38 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33  
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA MADIUN TAHUN 2022**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2022;

**Memperhatikan** : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur tanggal 25 Februari 2022 Nomor: 1.B/LHP/XVIII.SBY/02/2022 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2022.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Madiun Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2022 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 21 Juli 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 21 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**

**Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 38/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 berperan sangat strategis bagi Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan pembangunan pada Tahun 2022. Dokumen ini merupakan penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah. RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2022. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Perubahan kebijakan anggaran perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah Tahun 2022 berdampak secara langsung terhadap APBD Tahun Anggaran 2022. Sementara kinerja pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun Anggaran 2022. Demikian pula dengan kinerja masing-masing Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2024. Dalam menyikapi proyeksi perubahan-perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu disesuaikan dengan amanah RPJMD dan mengakomodir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu perlu penyesuaian terhadap perubahan dalam pengalokasian dana bantuan penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya serta dana penyesuaian.

Perubahan terhadap RKPD perlu dilakukan sesuai dengan perubahan dinamika pembangunan. Dengan mempertimbangkan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan APBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, yang meliputi :

1. Perubahan Asumsi ekonomi Makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;

2. penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2019-2024,
3. perubahan kebijakan pusat,
4. proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang mendesak serta adanya penyesuaian beberapa program/kegiatan, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap perencanaan program kegiatan dan penganggaran daerah dalam bentuk perubahan RKPD.

**Penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 ini dilakukan dengan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.** Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343. Berdasarkan regulasi tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

**Berdasarkan regulasi tersebut, maka pada triwulan II dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD.** Jika terdapat perubahan dalam asumsi makro, kebijakan pemerintah, potensi pendapatan dan belanja daerah, maka penting untuk disusun dokumen Perubahan RKPD. Perubahan dalam dokumen RKPD memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, pergeseran (penambahan atau pengurangan) pagu indikatif pada masing-masing SKPD/urusan/prioritas beserta hal-hal yang mendasari perubahan tersebut. Tujuannya, agar tercipta kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

**Perubahan RKPD Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.** Perubahan RKPD akan menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, dokumen tersebut akan akan disepakati bersama antara Bupati engan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kota Madiun Tahun 2022 dilandasi oleh:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

**Maksud dari penyusunan dokumen** Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2022 **adalah sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi makro, kondisi dan kapasitas fiskal, serta kebijakan pada tahun berjalan.** Disamping itu, perubahan RKPD juga dimaksudkan untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya, rincian tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kota Madiun dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.

### 1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi memuat/menjelaskan latar belakang dan dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika dokumen.

#### **BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Bab ini menguraikan tentang kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

#### **BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Pada bab III menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan perubahan tahun berjalan, yang antara lain mencakup perubahan indikator pertumbuhan ekonomi daerah, perubahan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

**BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini akan memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

**BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan daerah tersebut mencakup semua rencana Perubahan program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Perubahan RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Perubahan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Sebagai wujud implementasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Kota Madiun menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD dan APBD Kota Madiun Tahun 2022 dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, sebagaimana capaian indikator kinerja tujuan berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Indikator Kinerja Tujuan Kota Madiun Tahun 2020-2021**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Baseline</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
1	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,69	6,74	6,87
2	Tingkat Kemiskinan	4,98	4,56	5,09
3	Livable City	80,65	81,45	89,40
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,91	80,63	81,25
5	Indeks Pembangunan Gender	94,38	94,39	94,38
6	Indeks Ketentraman	76,05	78	78,74
7	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	B (66)	B (67)	(B) 66,26

*Sumber Data: Perangkat Daerah dan BPS*

Penjelasan terhadap tabel diatas adalah:

1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kota Madiun mengalami peningkatan tahun 2020 sebesar 6,69 menjadi 6,87 pada tahun 2021. Nilai IPEI Kota Madiun 2021 melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu sebesar 6,74.
2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya covid-19 dan masih berlangsung sampai tahun 2021. Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan meningkat dari 4,98 persen tahun 2020 menjadi 5,09 persen tahun 2021. Meskipun tingkat kemiskinan di targetkan 4,56 seiring perbaikan ekonomi namun target tersebut tidak tercapai salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tingkat pengangguran.

3. Kota layak huni atau livable city merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai variabel baik fisik maupun non-fisik. Kota layak huni tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan telah melibeh dari target yang ditetapkan. Peingkatan tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun termasuk dalam daerah dengan kota yang relatif nyaman untuk beraktivitas.
  4. Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 (80,91) ke tahun 2021 (81,25). Indeks tersebut juga telah melebihi target (80,63) yang ditetapkan.
  5. Seiring dengan peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Gender juga mengalami peningkatan meskipun dengan peingkatan yang relatif kecil. IPG Kota Madiun 2020 sebesar 94,38 meningkat menjadi 94,42 tahun 2021.
  6. Indeks ketentraman mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Tahun 2020 indeks ketentraman sebesar 76,87 meningkat menjadi 78,74 tahun 2021 dan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 76,95.
  7. Indeks reformasi birokrasi mengalami perbaikan dari tahun 2020 sebesar B (66) menjadi B (66,26) pada tahun 2021. Peningkatan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar (B) 67, meskipun tidak mencapai target tetapi masih dalam rentan kategori B, hal ini mengidentifikasikan kualitas birokrasi pemerintahan Kota Madiun telah mengalami perbaikan.
- Kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Madiun pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Makro Kota Madiun Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,91	81,25
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-3,39	4,73
3	Inflasi	Persen	1,86	2,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,32	8,15
5	Kemiskinan	Persen	4,98	5,09

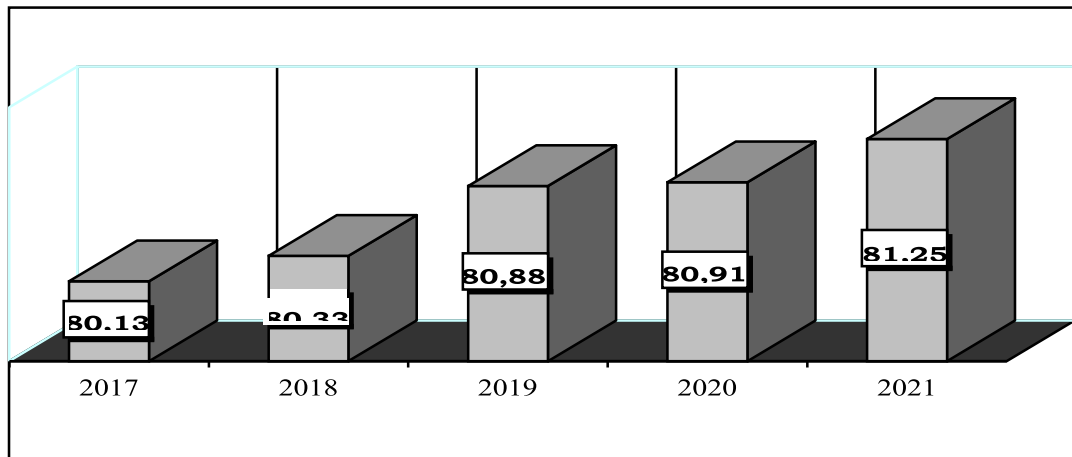
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini pembangunan manusia di Kota Madiun terus mengalami kemajuan. Pandemi Covid-19 hanya membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Kota Madiun. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 80,91 atau tumbuh 0,04 persen dibanding tahun sebelumnya, dan merupakan pertumbuhan terkecil disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/kapita/tahun yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang kecil sekitar 0,01 sampai 0,06 poin. Setelah intensitas Pandemi Covid-19 berangsur menurun serta geliat ekonomi memulih, berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021 mencapai 81,25 atau tumbuh sebesar 0,42 persen terhadap tahun 2020. Bila disandingkan dengan IPM Provinsi dan IPM Nasional perkembangan IPM Kota Madiun masih di atas Provinsi dan Nasional yaitu sebesar 72,14 untuk IPM provinsi Jawa Timur dan 72,29 untuk IPM Nasional.

**Grafik 2. 1**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun, 2017-2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

**Tabel 2.3**  
**Komponen IPM Kota Madiun**

Tahun	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Paritas Daya Beli
<b>2017</b>	72,48	14,20	11,10	15.415
<b>2018</b>	72,59	14,21	11,10	15.616
<b>2019</b>	72,75	14,39	11,13	16.040
<b>2020</b>	72,81	14,40	11,14	16.018
<b>2021</b>	72,83	14,41	11,37	16.095

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Umur harapan hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2017 hingga 2021, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,48 tahun (2017) menjadi 72,83 tahun (2021) atau naik sebesar 0,35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.



**Gambar 2. 1**  
**IPM Kota Madiun Tahun 2021**

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Selama periode 2017 hingga 2021, HLS Kota Madiun meningkat dari 14,20 tahun (2017) menjadi 14,41 tahun (2021) atau naik sebesar 0,21 tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2021, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,41 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

Sementara rata-rata lama sekolah juga meningkat dari 11,10 tahun (2017) menjadi 11,37 tahun (2021) atau naik 0,27 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kota Madiun usia 25+ setara dengan tingkat pendidikan SMA kelas XI.



Pertumbuhan yang positif, baik RLS maupun HLS, menjadi modal manusia penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin membaik dari sisi tingkat pendidikan, proses pembangunan secara umum juga akan berlangsung lebih baik.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Madiun yang disesuaikan mencapai Rp 16,095 juta per tahun, naik tipis 0,48 persen dibanding tahun 2020 lalu. Akibat pandemi Covid-19, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Madiun tahun 2020 mengalami penurunan 0,14 persen dibanding tahun sebelumnya.

### **Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat data tentang pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

**Tabel 2. 4**  
**Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun**  
**2017-2021 (Miliar Rupiah)**

Tahun	PDRB (Rp)	
	ADHB	ADHK
2021	14.699,83	10.748,10
2020	14.107,90	10.262,44
2019	14.107,34	10.623,07
2018	13.128,89	10.051,29
2017	12.111,90	9.486,14

Sumber : BPS Kota Madiun

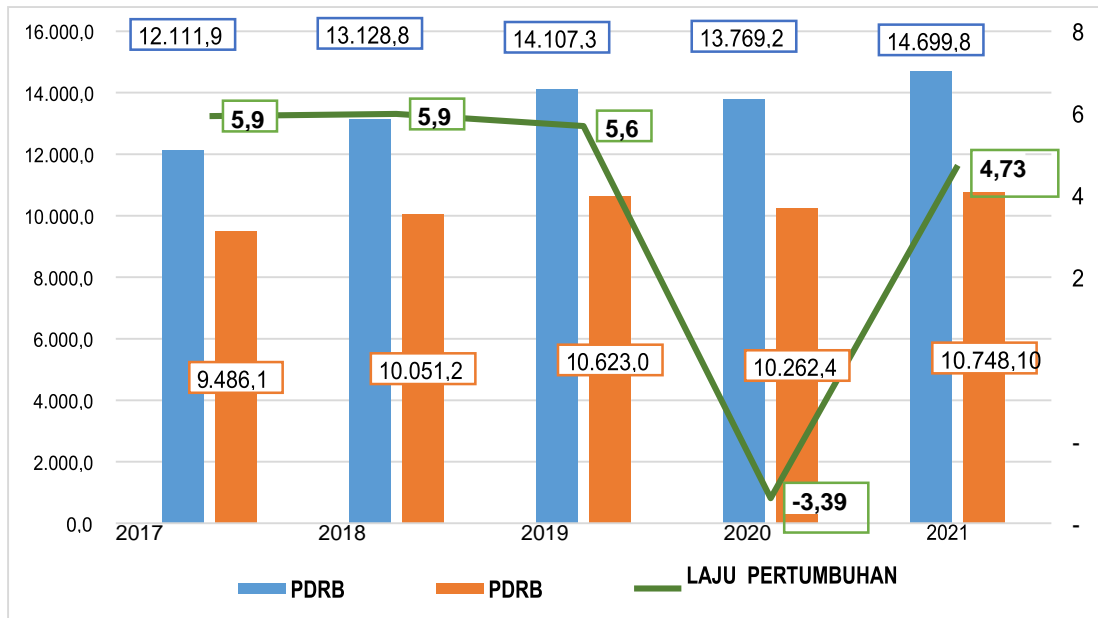
\*) Angka sementara

PDRB Kota Madiun selama periode 2017-2021 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2017 mencapai Rp 12,111 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 14,107 triliun. Namun, pada tahun 2020 PDRB ADHB mengalami penurunan hingga sehingga menjadi sebesar Rp. 13,769 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 14,699 triliun.

Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada tahun 2017 dari 9,486 triliun menjadi sebesar Rp 10,623 triliun pada tahun 2019. PDRB ADHK mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 10,262 triliun dan kembali mengalami kenaikan pada periode tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 10,748 triliun. Peningkatan nilai PDRB ADHK selama periode 2017-2021 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2017-2021 adalah sebesar 3,79%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 5,96%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 3,39%.

Pada Gambar di atas, terlihat dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 serta menurunnya daya beli masyarakat. Pada periode tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mulai membaik dan kembali positif sebesar 4,73.

**Grafik 2. 2**  
**Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2017-2021**



Sumber : BPS Kota Madiun

Secara terperinci pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 5**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2017-2021 (%)**

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021*
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,78	1,78	-0,94	11,57	-7,26
B Pertambangan dan Penggalian	2,31	1,07	2,41	-5,65	-4,12
C Industri Pengolahan	8,00	7,01	4,64	-12,84	6,44
D Pengadaan Listrik dan Gas	4,91	5,45	6,69	1,98	2,95
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,84	4,44	4,52	4,86	6,28
F Konstruksi	5,57	2,03	4,90	-4,71	-0,90
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,83	7,54	6,20	-11,18	10,16
H Transportasi dan Pergudangan	8,18	8,48	9,11	-4,38	7,17
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	9,23	8,86	-7,98	3,21
J Informasi dan Komunikasi	6,77	5,34	4,58	16,12	4,75
K Jasa Keuangan dan Asuransi	3,88	4,08	4,79	-0,66	0,47
L Real Estate	4,22	3,57	5,96	0,33	1,19
M, N Jasa Perusahaan	6,34	5,31	6,1	-3,18	0,77
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,46	4,48	3,85	-2,23	-0,99

Kategori		2017	2018	2019	2020	2021*
P	Jasa Pendidikan	4,50	4,21	7,65	1,97	0,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,93	7,38	7,52	9,98	5,46
R, S, T, U	Jasa lainnya	4,14	5,74	6,92	-10,68	4,08
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,93</b>	<b>5,98</b>	<b>5,69</b>	<b>-3,39</b>	<b>4,73</b>

Sumber : BPS Kota Madiun

\*) Angka Sementara



**Gambar 2. 2**

**Kontribusi Lapangan Usaha Terbesar Terhadap PDRB 2021 (%) dan Pertumbuhan PDRB 2021 Menurut Kategori Lapangan Usaha (%)**

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2017-2021 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 2. 6**

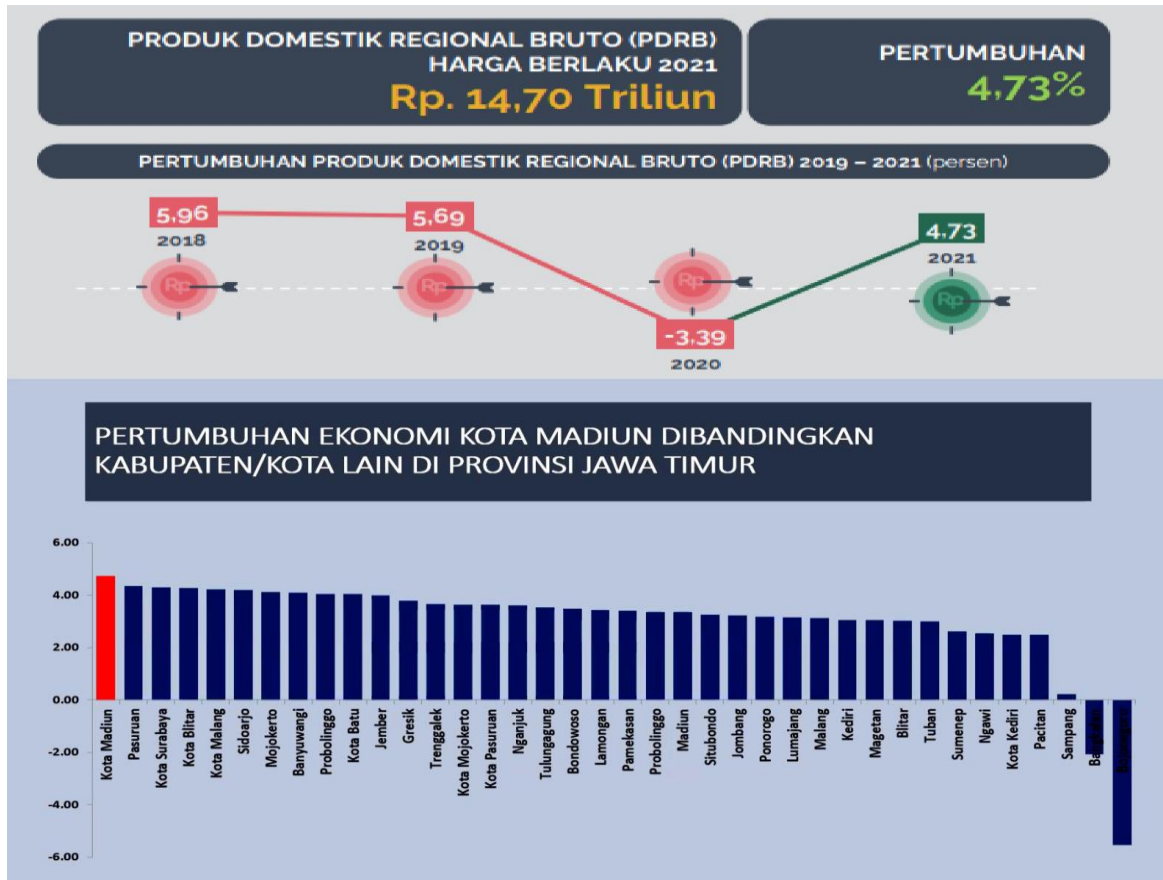
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kota Madiun</b>	<b>5,93</b>	<b>5,96</b>	<b>5,69</b>	<b>-3,39</b>	<b>4,73</b>
Madiun	5,42	5,10	5,42	-1,69	3,34

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Magetan	5,09	5,25	5,04	-1,64	3,04
Ngawi	5,07	5,26	5,05	-1,69	2,55
Pacitan	4,98	5,51	5,08	-1,84	2,49
Ponorogo	5,10	5,31	5,01	-0,90	3,19

Sumber : BPS Kota Madiun

\*) Angka Sementara



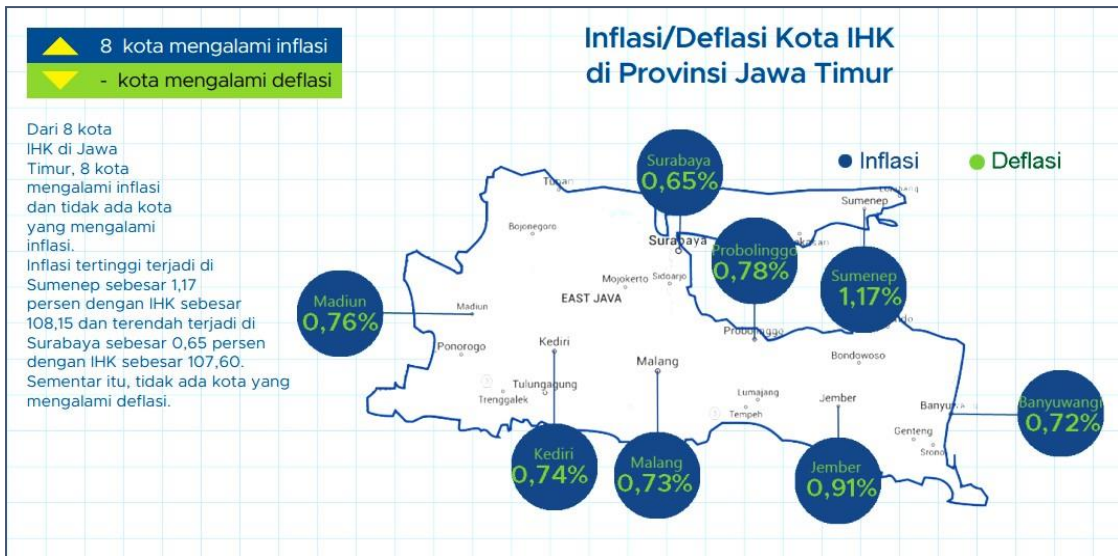
**Gambar 2. 3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Dibandingkan Kabupaten/Kota Lain di Provinsi Jawa Timur**

Sumber : BPS Kota Madiun

### Inflasi

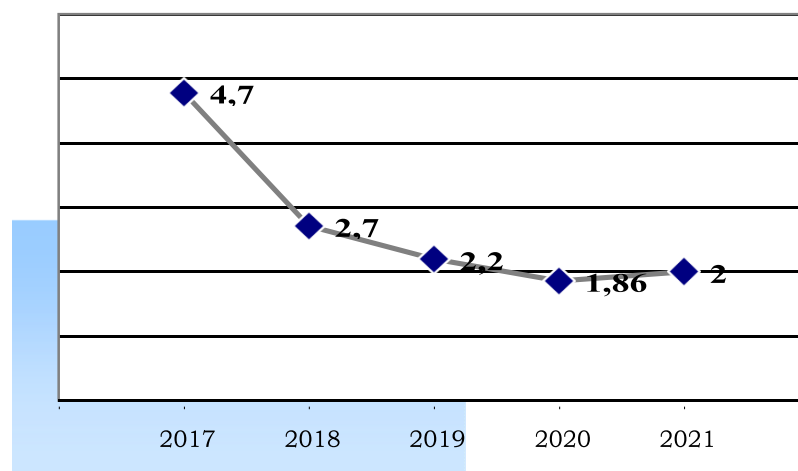
Tingkat inflasi yang berfluktasi tinggi menggambarkan besarnya ketidakpastian nilai uang, tingkat produksi, distribusi dan arah perkembangan ekonomi, sehingga dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2. 4**  
**Inflasi/ Deflasi Kota IHK di Provinsi Jawa Timur**



Tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2021 terhadap sebesar 2,00 persen. Adapun pada Bulan Desember 2021 sendiri terjadi inflasi sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,44. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 1,17 persen dengan IHK 108,15 dan inflasi terendah terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,65 persen dengan IHK 107,60. Adapun secara umum Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,69 persen dan Nasional mengalami inflasi sebesar 0,57 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun kalender Nasional dari tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) masing-masing sebesar 1,87 persen.

**Grafik 2. 3**  
**Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2017-2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Inflasi di Kota Madiun dipicu karena adanya kenaikan harga barang dan jasa yang ditunjukkan dengan naiknya indeks harga konsumen (IHK) kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,98 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,07 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen. Sementara itu beberapa kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga diantaranya kelompok kesehatan turun sebesar 1,33 persen; kelompok transportasi sebesar 0,06 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen. Sedangkan kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks.

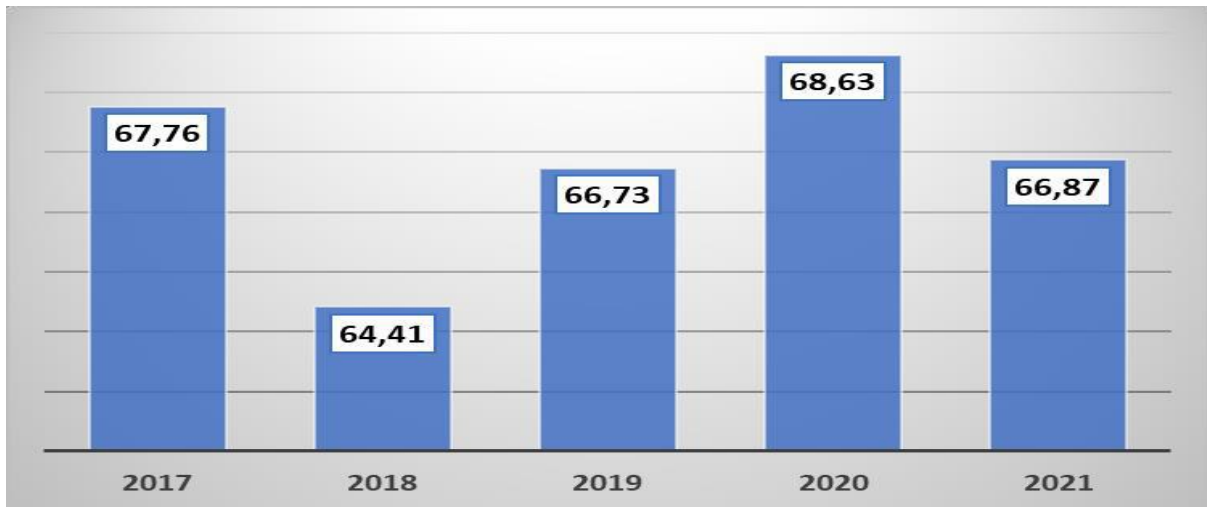
### **Ketenagakerjaan**

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Madiun. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 144.219 ribu orang, naik sebanyak 658 orang dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 96,44 ribu orang (66,87 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 88,58 ribu orang penduduk yang bekerja dan 7,86 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 2,09 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami penurunan sebanyak 1,75 ribu orang dan pengangguran juga turun sebanyak 336 orang.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 66,87 persen, turun 1,76 persen poin dibanding Agustus 2020. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 75,16 persen lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 59,31 persen. Apabila dibandingkan Agustus 2020, baik TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan mengalami penurunan, yaitu masing-masing turun sebesar 3,64 persen poin untuk TPAK laki-laki dan 0,04 persen poin untuk TPAK perempuan.

**Grafik 2. 4**  
**TPAK Laki-Laki dan Perempuan Tahun 2017-2021**



### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Pengangguran terbuka atau sering disebut dengan pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

**Tabel 2. 7**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2021**

<b>KEGIATAN</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ANGKATAN KERJA</b>	98.529	96.439
- <b>BEKERJA</b>	90.334	88.580
- <b>PENGANGGURAN</b>	8.195	7.859
<b>BUKAN ANGKATAN KERJA</b>	45.032	47.780
<b>PENDUDUK USIA KERJA</b>	<b>143.561</b>	<b>144.219</b>

Apabila dilihat dari tabel di atas, dari tahun 2020 ke 2021 didapati penurunan jumlah angkatan kerja yang disertai dengan menurunnya jumlah penduduk bekerja serta jumlah pengangguran. Pada tahun 2020 jumlah penduduk bekerja turun sebanyak 1.754 jiwa atau turun sebesar 1,94 persen. Sedangkan pengangguran turun dari 8.195 menjadi 7.859 jiwa, dengan jumlah penurunan sebanyak 336 jiwa atau 4,10 persen.



Kenaikan terjadi pada kelompok bukan angkatan kerja tahun 2021 dari 45.032 menjadi 47.780 jiwa, dengan jumlah kenaikan sebanyak 2.748 jiwa atau 4,8 persen. Jadi, Jumlah Penduduk Usia Kerja secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 143.561 jiwa menjadi 144.219 jiwa di tahun 2021, dengan persentase kenaikan sebesar 0,46 persen.

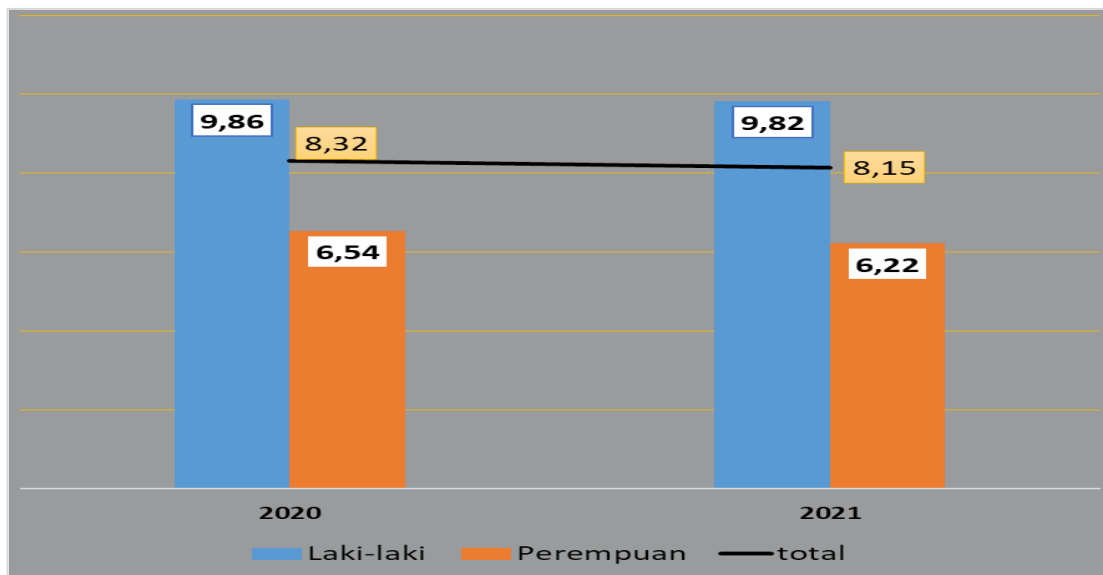
**Grafik 2. 5**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun ini masih merupakan akibat dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan, salah satu fenomenanya adalah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan jumlah pengangguran masih tinggi. TPT laki-laki sebesar 9,82 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,22 persen.

**Grafik 2. 6**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2021**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bulan Agustus 2021 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2020, dimana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki dan perempuan turun masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,23 persen poin. Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: (a) Pengangguran Karena COVID-19; (b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19; (c) Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19; dan (d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19. Kondisi (a) dan (b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi (c) dan (d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

**Tabel 2. 8**  
**Penduduk Usia Kerja yang Terdampak Covid-19**

<b>KOMPONEN</b>	<b>2021</b>
a. Pengangguran Karena Covid-19	1.243
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	1.165
c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	2.057
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	19.920
<b>Total</b>	<b>24.385</b>
<b>Penduduk Usia Kerja (PUK)</b>	<b>144.219</b>
<b>Persentase terhadap PUK</b>	<b>16,91%</b>

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Adapun persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kota Madiun secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif masih dipicu oleh adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Madiun, persentase penduduk miskin Kota Madiun Periode Maret Tahun 2021 sebesar 5,09 persen dengan garis kemiskinan apabila dibandingkan pada periode tahun 2020, maka terjadi kenaikan 4,04 persen atau sekitar Rp 16.781,00 dimana Garis Kemiskinan Tahun 2020 berada pada level Rp 497.628,00 perkapita perbulan dan pada Tahun 2021 mencapai Rp 514.409,00 perkapita perbulan.

**Tabel 2. 9**  
**Profil Kemiskinan Tahun 2021 Kota Madiun**

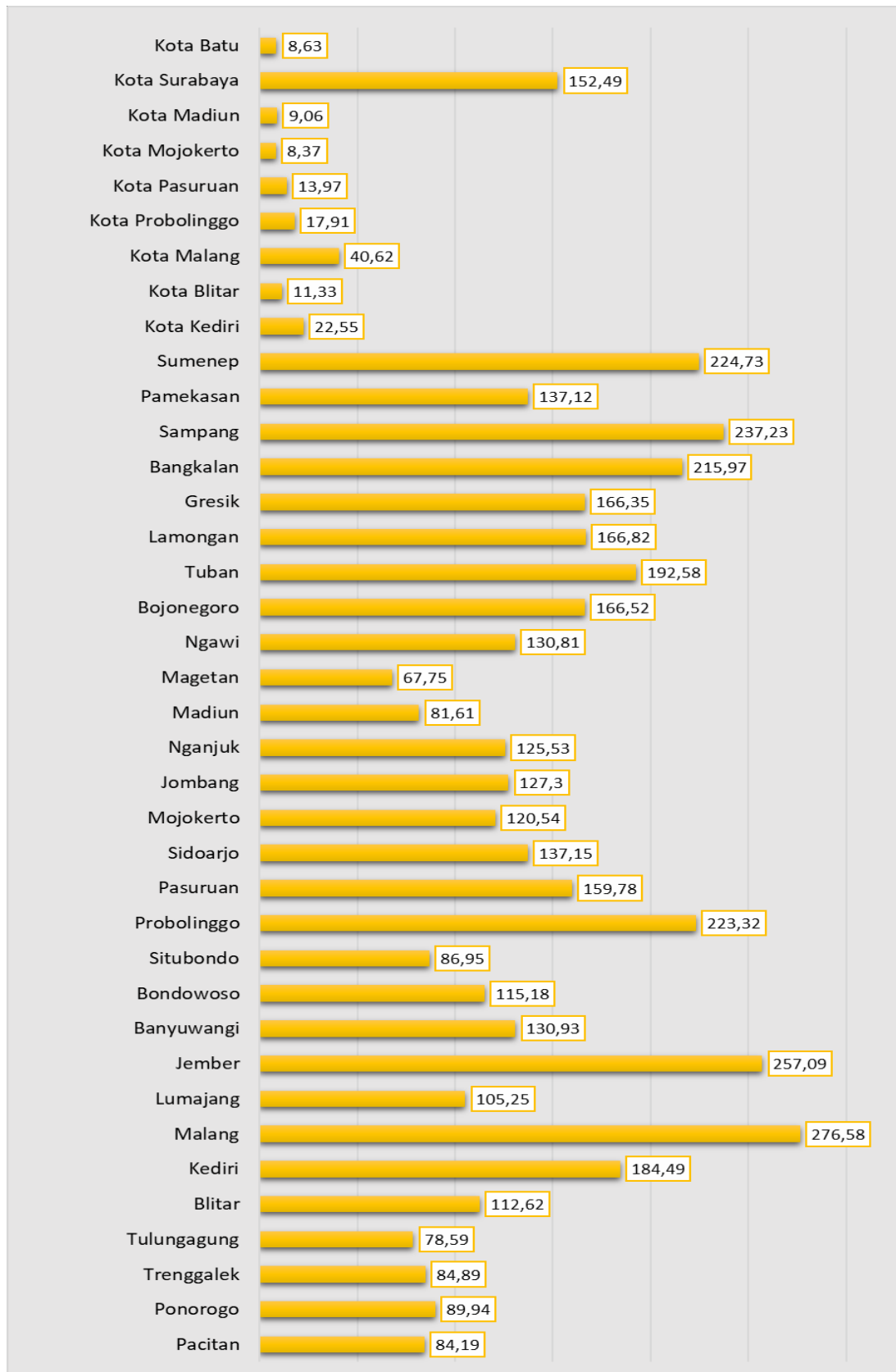
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	404.959,00	8.700	4,94
2018	446.525,00	7.920	4,49
2019	478.304,00	7.690	4,35
2020	497.628,00	8.830	4,98
2021	514.409,00	9.060	5,09

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun, data diolah

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata diberbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil.

Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun kembali mengalami peningkatan jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya guncangan situasi dan kondisi ekonomi yang sangat berat. Perubahan yang sangat ekstrim terjadi di lapangan dengan adanya wabah Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan harga minyak dunia, ekspor menurun sejalan dengan kontraksi ekonomi global, sementara konsumsi rumah tangga dan investasi menurun sejalan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok dan hal-hal lain yang sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin.

**Grafik 2. 7**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 (Ribu Jiwa)**



Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

### Capaian Kinerja Tujuan Sasaran Kota Madiun Tahun 2021

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024 menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Secara umum terdapat perubahan tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen perubahan RPJMD 2019 – 2024. Tujuan pembangunan mengalami perubahan dari yang sebelumnya terdapat empat tujuan menjadi lima tujuan dengan narasi yang berubah. Tambahkan 1 tujuan tersebut adalah Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif. Selanjutnya sasaran pembangunan mengalami perubahan dari 14 menjadi 11 sasaran. Perubahan tersebut sejalan dengan refocusing pembangunan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terkini.

Konsistensi penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota Terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

**Tabel 2. 10**  
**Matriks Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		% Capaian		
				Target	Realisasi			
<b>Misi 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>								
<b>T.1</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	<b>IT</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>(B) 65,55</b>	<b>(B) 67</b>	<b>(B) 66,26</b>	98,90%
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (70,01)	BB (73)	BB (70,97)	97,22%
		IS1.2		Skor	3,3805	Tinggi	3,3805	100%

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		% Capaian
						Target	Realisasi	
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		(tinggi)		(sangat tinggi)	
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Tidak ada penilaian tahun 2020	2,83 (BAIK)	3,06	108,13%
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	85,501 (baik)	82,85 (baik)	86,456 (baik)	104,35%
		IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1892	1892	2.693	142%
<b>Misi 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>								
T.2	<b>Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b>	IT2.1	<b>Indeks Kenyamanan Kota (livable city)</b>	<b>Indeks</b>	<b>86,67</b>	<b>87,78</b>	<b>89,40</b>	<b>100,42%</b>
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks Infrastruktur	Indeks	96,85	98,06	97,99	98,77%
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,15	57,69	58,99	102,25%
<b>Misi 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>								
T.3	<b>Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	IT. 3.1	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks</b>	<b>80,91</b>	<b>80,92</b>	<b>81,25</b>	<b>100,40%</b>
		IT. 3.2	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Indeks</b>	<b>94,38</b>	<b>94,4</b>	<b>94,38</b>	<b>99,97%</b>
S.5	Meningkatnya kualitas	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,39	14,4	14,4	100%

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		% Capaian		
				Target	Realisasi			
pendidikan Masyarakat	IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,14	11,14	11,37	102,06%	
S.6 Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,81	72,83	72,83	100%	
S.7 Meningkatkan Pemberdayaan Gender	IS7.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	77,18	77,07	77,18	100,14%	
<b>Misi 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>								
<b>T.4</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	<b>IT 4.1</b>	<b>Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>	<b>Indeks</b>	<b>6,69</b>	<b>6,38</b>	<b>6,87</b>	<b>107,68%</b>
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS9 .1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,32	8,15	8,15	100%
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS8.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	-10,83	2,16	10,16	470,57%
		IS8.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	-0,93	0,58	11,32	1951,72%
<b>T.5</b>	<b>Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	<b>IT 5.1</b>	<b>Indeks Ketentraman</b>	<b>Indeks</b>	<b>76,87</b>	<b>76,95</b>	<b>78,74</b>	<b>102,32%</b>
		<b>IT 5.2</b>	<b>Indek Gini</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,39</b>	<b>0,38</b>	<b>0,345</b>	<b>109,21%</b>
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS1 0.1	Angka Kemiskinan	%	4,98	5,09	5,09	100%
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS1 1.1	Indeks Kerukunan	Indeks	B skor 74,0306 (Harmonis)	B skor 74,30 (Harmonis)	74,36 (Harmonis)	100,08%
		IS1 1.2	Indeks rasa aman	Indeks	76,05	76,15	81,00	106%

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024

**Tujuan 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities**

**IT 1.1 Indeks RB Kota Madiun**

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Evaluasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberika pelayanan publik yang semakin membaik. Selain juga untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 adalah 66,26 dengan kategori “B” dengan capaian kinerja sebesar 97,22%. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 11**  
**Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021**

<b>Komponen Penilaian</b>	<b>Bobot</b>	<b>2021</b>
<b>Komponen Pengungkit</b>		
<b>I. Pemenuhan</b>	20,00	13,53
<b>II. Hasil Antara Area Perubahan</b>	10,00	5,21
<b>III. Reform</b>	30,00	16,06
<b>Total Komponen Pengungkit</b>	<b>60,00</b>	<b>34,80</b>
<b>Komponen Hasil</b>		
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,90
Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,53
Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,80
Kinerja Organisasi	10,00	5,23
<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>31,46</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>	<b>100,00</b>	<b>66,26</b>



**Tabel 2.12**  
**Hasil Antara**

No	Hasil Antara	Nilai	Sumber Data
1	Sistem Merit	130,50 ( Buruk )	KASN
2	ASN Profesional	47,39 ( Sangat Rendah)	BKN
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,06 ( baik )	PANRB
4	Kualitas Pengelolaan Arsip	59,01 ( Cukup )	ANRI
5	Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	23,79 ( Kurang )	LKPP
6	Kualitas Pelayanan Publik	4,17	PANRB
7	Kepatuhan Terhadap Standart Pelayanan Publik	78,47 ( Zona Kuning )	Ombudsman RI
8	Maturitas SPIP	3 ( Terdefinisi )	BPKP
9	Kapabilitas APIP	1,00 ( Initial )	BPKP

Sedangkan untuk Hasil Antara dari masing-masing *leading sector*, capaian dari komponen hasil Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2021 adalah 70,97 (Predikat BB) dan akuntabilitas keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPKRI.
2. Survey eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kota Madiun menunjukkan hasil :

**Tabel 2. 12**  
**Hasil Survey Eksternal Pelayanan Pemerintah Kota Madiun**  
**Tahun 2019-2021**

No	Hasil Survei	Indeks		
		2019	2020	2021
1	Survei Internal Organisasi	3,62	3,66	88,01
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,95	3,83	82,61

- Hasil Survey Survei Internal Organisasi tahun 2021 menunjukkan indeks 82,61, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil survey tahun sebelumnya yang sebesar 3,62. Perbedaan interval hasil penilaian yang cukup besar dikarenakan pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran, walaupun demikian upaya perbaikan kualitas layanan yang dilakukan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna layanan.

- Hasil survey persepsi anti korupsi tahun 2021 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 88,01. Perbedaan hasil pada tahun 2020 dengan tahun 2021 dikarenakan terdapat perubahan metode perhitungan yang digunakan oleh KPK dalam memberikan penilaian

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

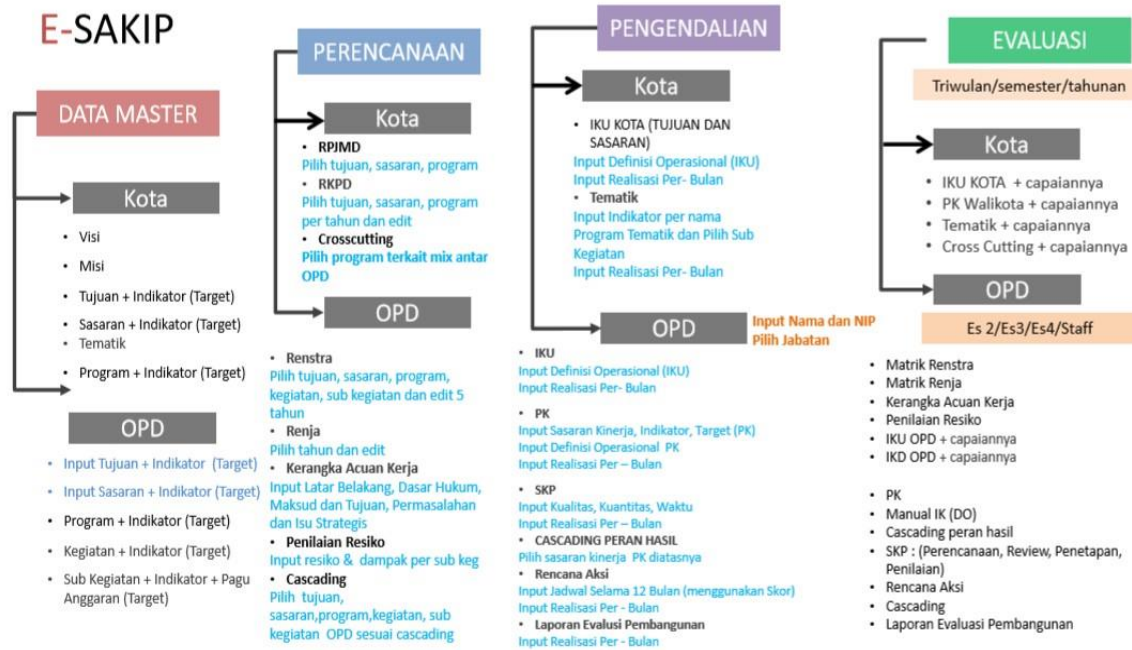
1. Kemauan dan komitmen politik yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
2. Kesamaan persepsi dan tujuan mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah
3. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan
4. Ketersediaan dana/anggaran, untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi, dan peningkatan kesejahteraan pegawai
5. Dukungan masyarakat, berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat

Sedangkan permasalahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun adalah :

1. Belum meratanya pemahaman pegawai terhadap program/kegiatan RB dan role model (agent of change) di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah
2. Belum adanya evaluasi mengenai kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis,
3. Sistem pola karir (career path) pegawai yang ada belum sepenuhnya berbasis hasil kerja/prestasi kerja
4. Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
5. Ukuran kinerja eselon III, IV, dan individu, serta mengukur dan mengaitkannya dengan remunerasi/penghargaan
6. Belum semua unit pelayanan publik yang ada memiliki dan menerapkan Maklumat Layanan (Service Level Agreement) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Madiun telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan workshop peningkatan kapasitas agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Walikota Madiun Nomor 060-401.021/122/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
2. Peningkatan pengelolaan arsip dengan melakukan pengawasan kearsipan interna terhadap perangkat daerah yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan ;
3. Di samping itu dengan menjadi simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah ;
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan inovasi pelayanan publik dalam rangka menciptakan inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat ;
5. Pemerintah Kota Madiun telah melakukan Peyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 166 Pejabat Struktural dan telah dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang langkah konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Adminisrasi ke dalam Jabatan Fungsional ;
6. Melakukan pengembangan e-Sakip dengan mengintegrasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Juga aplikasi <https://skp.madiunkota.go.id/> yang merupakan aplikasi pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;



**Gambar 2. 5**  
**Rancangan Pengembangan Aplikasi E-Sakip Pemerintah Kota Madiun**

- Melakukan Refreshment dan Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 kepada pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dan diperolehnya Sertifikasi ISO yaitu SNI ISO 9001:2015 terkait management *Quality System-Requirement* dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuaipan untuk Sekretariat Daerah Kota Madiun dan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuaipan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
- Melakukan pembinaan terhadap unit pelayanan dalam rangka persiapan terhadap pengusulan Unit Pelayanan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ;
- Penguatan kebijakan pengawasan internal dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu dengan mengadakan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ;
- Memberikan pembinaan dan panduan dalam rangka pengisian LHKASN pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

5. Penyusunan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun.

### **Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah**

#### **Daerah IS 1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun komponen-komponen penilaian SAKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 %
4. Evaluasi Internal dengan bobot 10%
5. Capaian Kinerja dengan bobot 20%

Berdasarkan surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tanggal 31 Maret 2021 Nomor : B/349/AA.05/2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, hasil evaluasi Pemerintah Kota Madiun mendapatkan nilai 70,01 dengan Predikat BB. Secara umum perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Dari hasil capaian pada kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut pada tahun 2020 merupakan tahun pertama Pemerintah Kota Madiun mendapat Predikat dengan nilai sebesar 70,01. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 95,90%.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan RPJMD Perubahan dan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan ;
2. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Perangkat Daerah mulai dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pelaksana dan penandatanganan Perjanjian Kinerja ;
3. Melakukan pendampingan penyusunan RENSTRA Tahun 2019-2024 beserta dokumen perencanaan masing-masing Perangkat Daerah dengan pendekatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan yang ingin dicapai dan keterkaitan dengan sasaran RPJMD serta tupoksi, untuk penyusunan lebih lanjut sesuai regulasi, bersamaan dengan review RPJMD dan RENSTRA tentang implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang berlaku secara serentak bagi pemerintah daerah ;
4. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan Cascading Perangkat Daerah Tahun 2019-2021 berdasarkan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Perubahan ;
5. Perencanaan penganggaran untuk kedepan akan difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan dan sasaran ;
6. Saat ini sedang dilakukan restrukturisasi skema dan eSakip ;
7. Melakukan asistensi/pendampingan penyusunan LKj Perangkat Daerah Tahun 2021 yang dilaporkan Tahun 2022, dengan penekanan pada analisis terhadap capaian kinerja serta rencana aksi/tindak lanjut tahun berikutnya, cascading dan peta proses bisnis Perangkat daerah ;
8. Meningkatkan kapasitas evaluator dengan akan dilakukannya BIMTEK bagi evaluator, melakukan pendampingan dengan Inspektorat Provinsi/ Biro Organisasi, dan study banding ;
9. Melakukan pengembangan aplikasi yang berbasis kinerja yaitu <https://skp.madiunkota.go.id/>.

### **IS 1.2 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Nilai EKPPD Tahun 2020 terhadap hasil LPPD Tahun 2019 yang sedianya diumumkan bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah tanggal 12 April 2021, dikarenakan kondisi pandemi Covid19 serta masa transisi perubahan nomenklatur yang mendasari pelaporan dan evaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, maka belum dapat dirilis sehingga capaian kinerjanya masih menggunakan data tahun lalu, yaitu Status Kinerja **Sangat Tinggi** dengan **Skor 3,3805**.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan (Kinerja Makro) maupun keberhasilan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menarik menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Makro dilakukan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja indikator, sebagai berikut :

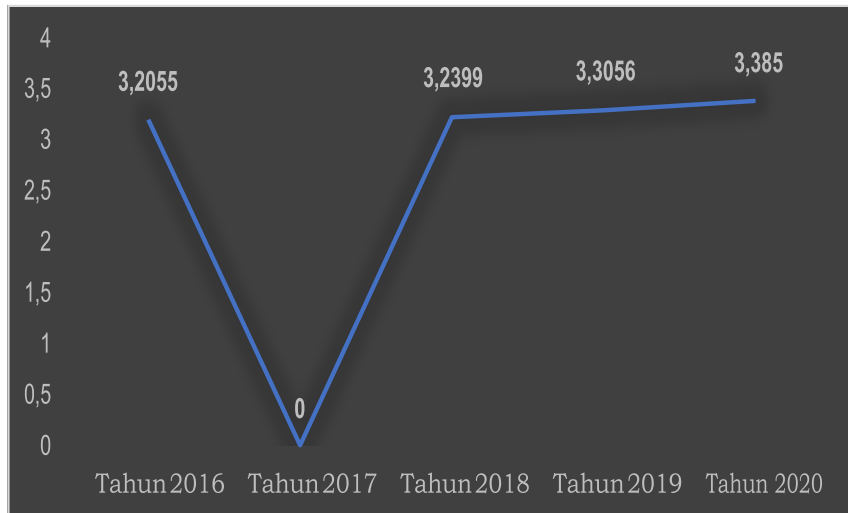
**Tabel 2. 13**  
**Evaluasi Kinerja Makro**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA MAKRO</b>	<b>BOBOT INDIKATOR</b>
<b>1</b>	Indeks Pembangunan Manusia	20%
<b>2</b>	Angka Kemiskinan	20%
<b>3</b>	Angka Pengangguran	15%
<b>4</b>	Pertumbuhan Ekonomi	10%
<b>5</b>	Pendapatan Perkapita	15%
<b>6</b>	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	20%

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi 105 IKK outcome, 488 IKK Output dan 18 IKK Fungsi Penunjang. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 meraih nilai 3,3850 dengan predikat Sangat Tinggi. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang memperoleh nilai 3,3056. Sedangkan di Tahun 2018 yang memperoleh nilai 3,2399 dan Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak ditampilkan (N/A, Not Available). Dan di Tahun 2016 skor 3,2055. Capaian kinerja indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah 100%. Hal ini merupakan bukti adanya partnership yang sangat baik antar stakeholder antara pemerintah eksekutif dengan legislatif dan juga partisipasi dari masyarakat.

**Grafik 2. 8**  
**Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**



### **IS 1.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka Nilai indeks SPBE Tahun 2021 sebesar 3,06 dengan predikat BAIK

Faktor pendorong :

1. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE



2. Dukungan kepala daerah dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun
3. Tersedianya layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang saling terintegrasi
4. Tersedianya layanan Publik Berbasis Elektronik dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya
5. Tersedianya infrastruktur dan jaringan TIK yang memadai Faktor Penghambat :
  1. Proses dokumentasi sistem informasi yang belum optimal
  2. Belum optimalnya integrasi layanan aplikasi (integrasi masih belum terlihat dilakukan secara menyeluruh)

Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (maturity level) penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses dokumentasi sistem informasi dengan rapi dan terstruktur
2. Meningkatkan integrasi pada layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur TIK
4. Meningkatkan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam penerapan SPBE

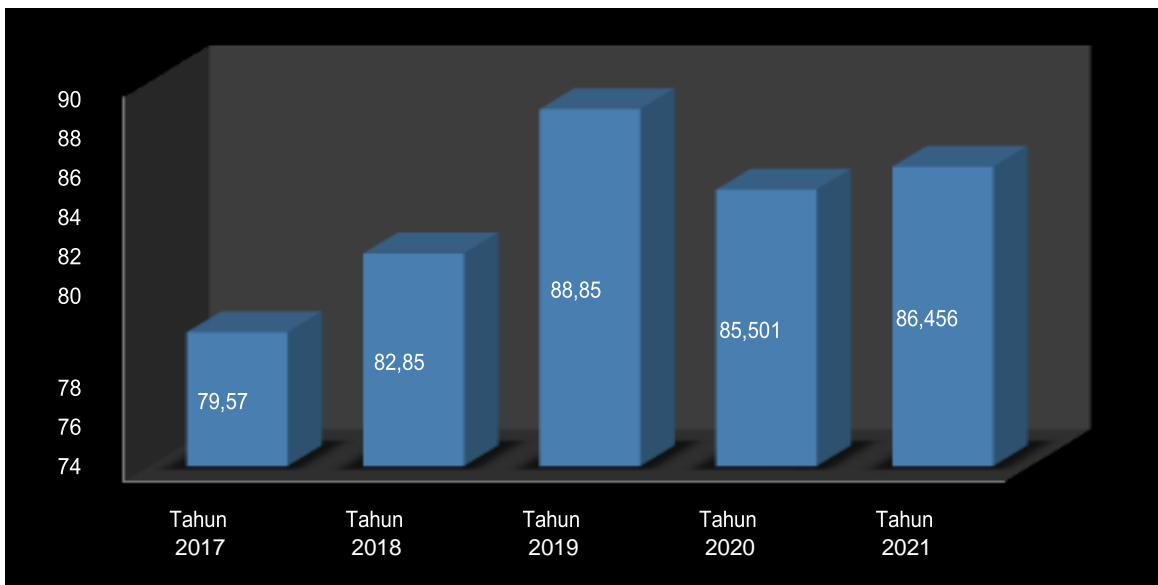
## **Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

### **IS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun**

Dalam rangka menjaga kepercayaan dari masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dari hasil atas Survey Kepuasan Masyarakat akan dibuat suatu penelitian dengan menggunakan analisis statistik atau metode tertentu. Dari hasil penelitian ini diperoleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehingga dapat diketahui kekurangan dari masing-masing unit tersebut yang kemudian dapat diperoleh saran perbaikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

**Grafik 2. 9**  
**IKM Tahun 2017-2021**



Pada tahun 2021, berdasarkan hasil survey pada beberapa perangkat daerah dan unit kerja, diperoleh nilai sebesar 86,456 dengan kategori nilai Baik, hal ini menunjukkan kenaikan nilai dibandingkan dengan nilai tahun 2020 dengan nilai sebesar 85,501 dengan capaian kinerja atas target sebesar 104%.

Tren Indeks Kepuasan Masyarakat mmulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan di Tahun 2020

terdapat penurunan nilai yang dikarenakan kondisi nasional yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga terdapat perubahan sistem pelayanan dan penyesuaian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan survey yang dilakukan secara online. Sedangkan pada Tahun 2021 terjadi kenaikan nilai yang dipengaruhi oleh pembiasaan atas pemberlakuan *new normal* dengan adanya pandemi covid-19 sehingga pemberian pelayanan ke Masyarakat bisa dilakukan secara optimal. Namun Pemerintah Kota Madiun melaksanakan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terutama di bidang pelayanan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Melakukan asistensi dan monitoring terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
2. Melakukan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
3. Melaksanakan dan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Madiun, Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional ;
4. Pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berprestasi
5. Melaksanakan pendampingan dan penyegaran ISO bagi Auditee dan Atuditor dengan menjalin kerjasama dengan BSN (Nota Kesepahaman antar Pemerintah Kota Madiun dengan Badan Standarisasi Nasional
6. Nomor 80/6/401.011/2019  
02/BSN/MoU/IV/2019 tentang Pembinaan dan Pengembangan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian) ;
7. Menjaln kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sehingga hasilnya lebih akurat ;
8. Menjaln kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Survey Evaluasi Pelayanan Publik sehingga hasilnya lebih akurat ;
9. Melaksanakan Sertifikasi ISO/SNI bagi Unit Pelayanan Publik (tahun 2021 dilaksanakan pada 2 Unit Pelayanan Publik yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

## **IS 2.2 Indeks Inovasi Daerah**

### **Indeks Inovasi Daerah**

Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau disebut *Innovative Government Award* merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat yakni Menteri Dalam Negeri untuk menghargai dan mendukung usaha Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam melakukan Inovasi Daerah. *Innovative Government Award* (IGA) bertujuan untuk memotivasi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota guna meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat. Penilaian tersebut berdasarkan kategorinya terdiri dari:

- i. Sangat Inovatif;
- ii. Inovatif;
- iii. Kurang Inovatif; serta
- iv. Tidak Dapat Dinilai.

Pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID)/ IGA dilakukan secara digital melalui sistem IGA Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dengan menghitung hasil input dari Indeks Satuan Inovasi Daerah yang terdiri dari 20 (dua puluh) indikator dan nilai Profil Satuan Pemerintah Daerah dengan 16 (enam belas) indikator.

Adapun faktor pendorong peningkatan skor yaitu:

- i. Wilayah geografis kota Madiun relatif kecil sehingga memiliki kemudahan dalam aksesibilitas ;
- ii. Dukungan fasilitas sarana prasarana digital yang memadai ;
- iii. Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia dari Perangkat Daerah yang cukup tinggi ;
- iv. Komitmen dari masing-masing Perangkat Daerah untuk menghasilkan inovasi ;
- v. Adanya *punishment* bahwa IID berdampak pada besaran pemberian TPP bagi ASN pemerintah daerah, yakni untuk daerah yang IID-nya masuk kategori Kurang Inovatif maka TPP akan dikurangi sebesar 3%.

Tahun 2022, dalam pelaksanaan IGA 2022, Bidang Litbang Kota Madiun selaku koordinator IGA 2022 di Kota Madiun melakukan beberapa hal seperti berikut:

- i. Sosialisasi persiapan IGA 2022 dengan melakukan Bimbingan Teknis dan sosialisasi melalui daring dan luring kepada Perangkat Daerah dan juga institusi di bawah kendali Perangkat Daerah seperti : RSUD Kota Madiun, Puskesmas, Sekolah (SD Negeri dan SMP Negeri) yang dilaksanakan pada 2 Maret 2022 dengan narasumber dari :
  - Walikota Madiun;
  - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) yang merupakan transformasi dari Badan Litbang Kemendagri; dan
  - Staf Ahli Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- ii. Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Kota Madiun (KIAT) 2022 yang dilaksanakan pada 1 April s.d 21 Juni 2022 guna menjaring inovasi yang akan diikuti dalam INOTEK *Award* 2022 dan sekaligus menginventarisasi proposal inovasi daerah dari Perangkat Daerah untuk IGA 2022;
- iii. Koordinasi dengan operator IGA Perangkat Dearah melalui media sosial (WA grup IGA Kota Madiun);
- iv. Pendampingan ke perangkat daerah sejak 1 April 2022 s.d sekarang;
- v. Konsultasi dan koordinasi dengan Balitbangprov maupun BSKDN Kemendagri.

Untuk tahapan IGA Tahun 2022 Kemendagri s.d saat ini masih belum ada informasi resmi terkait input data maupun teknis lainnya. Sedangkan untuk INOTEK Award 2022 oleh Badan Litbang Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 ini Kota Madiun meloloskan 3 (tiga) inovasi yang maju pada tahap 2 INOTEK Award 2022, dan masih dalam proses menunggu informasi terkait tahap selanjutnya. Sebagai informasi, bahwa pada INOTEK Award Provinsi Jawa Timur tahun 2021, Kota Madiun mampu meraih 3 (tiga) penghargaan.

Total capaian indikator inovasi daerah yang dinilai dari kecukupan data dukung dari Perangkat Daerah didapatkan nilai inovasi daerah sebesar 2.693 (dari potensi nilai maksimal 3.600, yakni nilai maksimal per proposal : 150 dikalikan 24 proposal). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mendapat 1.892, maka capaian tahun 2021 meningkat sekitar 42,34%. Sedangkan capaian nilai atas kecukupan data dukung indikator Profil Pemda dapat diamati dari tabel berikut :

**Tabel 2. 14**  
**Profil Pemda Kota Madiun IGA 2021**

NO	Indikator	Informasi	Keterangan	Nilai	Skala Skoring			
					0	1	2	3
1	Visi Misi	Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera		1	0	1	2	3
		Misi:						
		1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance);						
		2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;						
		3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;						
		4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun						

NO	Indikator	Informasi	Keterangan	Nilai	Skala Skoring			
2	<b>Tingkat Lembaga Kelitbangan</b>	Unit litbang ditangani setara eselon III		6	0	3	6	9
3	<b>APBD Tepat Waktu</b>	Penetapan APBD tepat waktu tiga tahun berturut-turut		6				
					0	2	4	6
4	<b>Kualitas Peningkatan Perizinan</b>	20,59%	2019 : 2803	5	0	5	1	1
			2020 : 3380					
5	<b>Jumlah Pendapatan Perkapita</b>	-2,61%	2019 : 79.700.000	2	0	1	2	3
			2020 : 77.620.000					
6	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	-4,36%	2019 : 3.96	0	0	3	6	9
			2020.08.32					
7	<b>Jumlah Peningkatan Investasi</b>	-66,18%	2019.00.00 968.702.041.674	0	0	3	6	9
			2020.00.00 327.632.796.023,96					
8	<b>Jumlah Peningkatan PAD</b>	-1,35%	2019.00.00 252.048.754.413,59	0	0	2	4	6
			2020.00.00 248.656.192.759,32					
		Wajar Tanpa Pengecualian						
9	<b>Opini BPK</b>	(WTP/unqualified Opinion)		3	0	1	2	3
10	<b>Nilai Capaian Lakip</b>	Nilai Capaian Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) pada kisaran B Tahun terakhir		2	0	1	2	3
11	<b>Penurunan Angka Kemiskinan</b>	-0,63%	2019.04.35	2	0	2	4	6
			2020 : 4.98					
12	<b>Jumlah Inovasi Daerah</b>	by sistem	48	6	0	3	6	9
13	<b>Nilai IPM</b>	0,04%	2019 : 80.88	2	0	2	4	6
			2020 : 80.91					

NO	Indikator	Informasi	Keterangan	Nilai	Skala Skoring			
14	<b>Penghargaan Bagi Inovator</b>	Pemberian Piagam Penghargaan dan Reward/insentif serta menerapkan ide inovasinya		3	0	1	2	3
15	<b>Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi</b>	1 - 3 Penelitian / Kajian		2	0	2	4	6
16	<b>Roadmap SiDA</b>	telah membuat dokumen SIDA dan ditetapkan dalam Perkada	Road Map Smart City	3	0	1	2	3

- tidak mendapat nilai (nilainya : 0) : 3 indikator
- nilai minimal : 4 indikator
- Nilai menengah : 5 indikator
- nilai tertinggi : 4 indikator

Dari tabel tersebut, total nilai untuk Profil Pemda hanya mencapai 43 (dari nilai maksimal 100). Dari akumulasi nilai Indikator Inovasi Daerah (2.693) dan nilai Profil Pemda (43), dengan menggunakan rumus Penghitungan Indeks Inovasi Daerah 2021 diatas, secara penilaian manual didapatkan indeks 62,08 (Kategori Pemda Sangat Inovatif).

**Tabel 2. 15**  
**Penilaian Manual IGA 2021**

Uraian	Skor SIM IGA	skor maksimal	%	proporsi penilaiasn	indeks	
<b>profil pemda (ISP)</b>	43	100	43	40%	17,20	
<b>indikator inovasi daerah (ISI)</b>	2.693	3.600	74,81	60%	<u>44,88</u>	
Penilaian Indeks ( <i>self assestment</i> ) tipe 1 (40% nilai profil pemda, 60% nilai indicator inovasi daerah)					<b>62,08</b>	<b>Kategori Sangat Inovatif</b>

Atau dengan perhitungan : ISP = 43

ISI = 2.693

Rata-rata ISI =  $2.693/24 = 112,21$  Skor Total

=  $43 + 112,21 = 155,208$

Indeks Inovasi Daerah/ IID =  $\text{Skor Total} / \text{Skor Total Maksimum} \times 100 = 155,208/250 \times 100 = 62,08$

Namun demikian, penilaian indeks IID dalam SIM IGA 2021 yang kemudian disahkan dengan Keputusan Mendagri Nomor : 002.6-5848 tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, Kota Madiun hanya mendapatkan indeks 52,99 dengan kategori Kota Inovatif.

## **Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan IT 2.1 Indeks Kenyamanan Kota (*Livable City*)**

Dalam pembangunan dan perkembangan perkotaan, akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Akibatnya muncul isu perkotaan baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif yang muncul akan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sedangkan dampak negatif akan menimbulkan permasalahan pada suatu kota. Masalah yang muncul cukup beragam seperti kemacetan, polusi lingkungan, tata kota yang tidak beraturan, maupun masalah sosial dan ekonomi. Banyaknya isu permasalahan akan menyebabkan daya hidup suatu kota berubah.

Perubahan yang terjadi cenderung berakibat pada daya hidup kota yang menurun. Tidak terkecuali pada kota-kota di Indonesia juga Kota Madiun. Kota Madiun memiliki sejarah perencanaan wilayah yang baik dan memiliki letak yang strategis.

Kondisi ini menjadi alasan penelitian tentang konsep *livable city* terhadap karakteristik ruang Kota Madiun, yang bertujuan untuk mengidentifikasi variabel, indikator, dan faktor yang mempengaruhi terbentuknya Kota Madiun yang *livable*.

Untuk menghasilkan kota yang layak huni, maka karakteristik ruang perkotaan yang berlaku harus memiliki standar daya hidup yang baik, dinamis, saling berpengaruh, berintegrasi dan ramah bagi lingkungan serta penghuninya. Konsep *livable city* bertujuan untuk menciptakan kondisi kota yang seimbang dalam interaksi antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan hasil analisis melalui penentuan kriteria dan tolok ukur tingkat *livability* di Kota Madiun, ditemukan bahwa kawasan Kota Madiun masih memiliki tingkat daya hidup yang baik, tetapi perlu lebih ditingkatkan lagi.

Kondisi ini masih dikategorikan *livable* dikarenakan perencanaan awal



kawasan yang baik sehingga daya hidup Kota Madiun masih dapat dipertahankan dan diharapkan berkelanjutan.

Kota yang *livable* membutuhkan indikator-indikator yang dapat menjadi suatu ukuran dalam mencapai kota yang layak huni. Indikator diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu indikator umum dan khusus. Indikator yang bersifat umum karena juga diterapkan di kota-kota besar dan metropolitan di Indonesia. Sementara itu, indikator tambahan lebih bersifat khusus pada Kota Madiun mengacu pada karakteristik kota.

Prinsip-prinsip dasar *livable city* :

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya, 6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

### **Indikator Umum**

#### I. Sarana Prasarana

1. Ketersediaan Angkutan/ Transportasi
2. Kualitas Angkutan/ Transportasi
3. Kondisi Jalan
4. Pedestrian
5. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan
6. Kualitas Fasilitas Kesehatan
7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan
8. Kualitas Fasilitas Pendidikan
9. Listrik
10. Ketersediaan Air Bersih
11. Kualitas Air Bersih
12. Telekomunikasi

#### II. Ekonomi

1. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
2. Biaya Hidup

#### III. Penataan Kota dan Pengelolaan Lingkungan

1. Tata Kota
2. RTH
3. Kebersihan

4. Persampahan
5. Pencemaran/ Polusi Udara dan Air

#### IV. Kehidupan Sosial

1. Kriminalitas
2. Ketersediaan Fasilitas Rekreasi
3. Kualitas Fasilitas Rekreasi
4. Akses Informasi Pelayanan Publik
5. Keamanan

### **Indikator Khusus**

#### I. Sarana Prasarana

1. Kantong Parkir
2. Permukiman/ hunian/ tempat tinggal (kondisi sanitasi, indikator kumuh, drainase, penerangan, ciri khas)
3. Ketersediaan Fasilitas Difabel dan Lansia
4. Desain fasilitas umum yang ramah anak, lansia, dan difabel
5. Jaringan Internet (WIFI)

#### II. Ekonomi

#### III. Iklim usaha/ investasi dalam perekonomian skala kecil dan menengah

#### IV. Kehidupan Sosial

1. Interaksi Sosial bera toleransi/ kerukunan antar penduduk/ agama
2. Ketersediaan *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
3. Kualitas *Public Space*/ Fasilitas Aktivitas Sosial
4. Komponen Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan (keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk perempuan dan lansia)
5. Event-event yang melibatkan dan menggerakkan masyarakat untuk aktif

#### V. Pengembangan warisan budaya sebagai pemicu dalam pengembangan variasi rekreasi, fasilitas sosial, tempat kuliner khas, dan museum

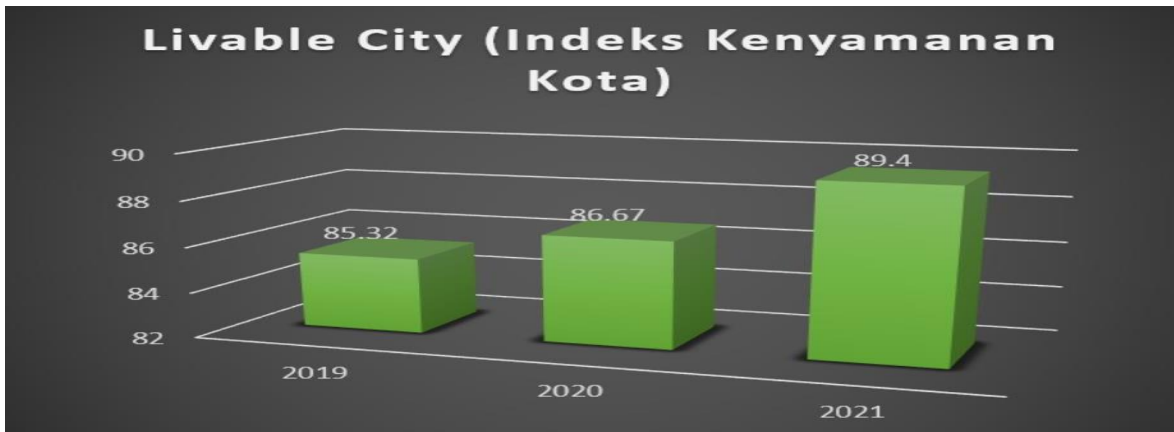
#### VI. Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai daya dukung lingkungan

#### VII. Kondisi Politik

#### VIII. *Smart City*

#### IX. Kualitas Hidup Penduduk

**Grafik 2. 10**  
**Indeks *Liveable City***



Sumber : Bapelitbangda Kota Madiun

Realisasi kinerja Indeks *Liveable City* Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 belum rilis, sehingga data yang digunakan adalah data sementara yaitu data realisasi tahun 2020. Target Tahun 2021 adalah 87,78, di tahun 2021 realisasi kinerjanya sebesar 89,40 dengan capaian sebesar 100,42%, sedangkan di tahun 2019 realisasi sebesar 86,67. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

### **Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan Infrastruktur Kota**

#### **IS 3.1 Indeks Infrastruktur**

Kota yang baik adalah kota yang mempunyai infrastruktur yang memadai dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan Indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 2020 sebesar 96%. Selain itu, persentase panjang jalan dapat menggambarkan kondisi infrastruktur daerah, kondisi panjang jalan dalam keadaan baik Kota Madiun pada tahun 2020 meningkat sebesar 94,02% dari total panjang jalan sepanjang 433,485 km. Meningkatnya pembangunan infrastruktur juga ditandai dengan meningkatnya sarana panjang jalan di Kota Madiun yang telah memiliki trotoar yaitu sepanjang 92,74 km. Namun demikian, secara keseluruhan indeks sarana prasarana Kota Madiun tahun 2020 sebesar 86,62 persen.

Salah satu aset paling penting dalam pembangunan daerah adalah infrastruktur. Secara umum kondisi infrastruktur di Kota Madiun cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh indeks infrastruktur Kota Madiun tahun 2021 sebesar 97,99%. Walaupun secara target Indeks Intrastruktur tidak tercapai, tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 96,85 maka mengalami kenaikan sebesar 1,14 poin.

Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendorong :

- 1) Adanya keinginan masyarakat Kota Madiun agar sarana dan prasana perkotaan representatif
- 2) Adanya aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani
- 3) Adanya pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan merata dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat;
- 4) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pelaksanaan konstruksi selesai tepat waktu sesuai kontrak yang berlaku;
- 5) Pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa konstruksi yang tepat, berkualitas dan kompeten sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan;
- 6) Adanya anggaran yang mencukupi sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

- 1) Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur
- 2) Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan / mempertahankan indeks Infrastruktur adalah:

- 1) Melaksanakan seleksi terhadap mitra DPUPR/ stakeholder pelaku jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan pemilihan penyedia telah dipersyaratkan tenaga teknis yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga tenaga yang berada di lapangan harus sesuai dengan dokumen pemilihan dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana yang akan dibangun dan yang telah terbangun untuk melakukan pemeliharaan secara berkala;
- 3) Merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran sesuai prioritas.

Perlu dilakukan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas diseluruh wilayah Kota Madiun. Sehingga dapat meminimalisir dampak negatif pada kelestarian lingkungan hidup (perubahan iklim mikro, menyusutnya daerah serapan air, berkurangnya sumber mata air, menurunnya kualitas air sebagai akibat intensitas yang tinggi dalam peningkatan pembangunan infrastruktur Terwujudnya infrastruktur kota juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

#### **Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

##### **IS 4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup yang didasarkan pada data Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan lahan. Adapun pembobotan untuk setiap indikator terdiri dari 30 % untuk pencemaran air, 30 % untuk pencemaran udara, dan 40 % untuk tutupan hutan.

Berdasarkan pengukuran IKLH Kota Madiun menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun hingga pada tahun 2021 sebesar 58,99. Indeks Lingkungan Hidup terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Capaian IKA Tahun 2021 yaitu 52,61, IKU Tahun 2021 yaitu 83,78 sedangkan IKTL Tahun 2021 yaitu 24,11.

Perhitungan IKLH Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan formula baru sebagai berikut :

$$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKTL})$$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Madiun Tahun 2020 yaitu 65,42 sedangkan nilai IKLH Kota Madiun di Tahun 2021 adalah 58,99, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan karena memang perhitungan IKA, IKU dan IKTL menggunakan rumus yang berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Angka indeks ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Madiun pada Tahun 2021 berada dalam posisi “sedang”. Diharapkan setiap tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun.

Faktor pendorong tercapainya IKLH Kota Madiun yaitu :

- a. Adanya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara
- b. Penambahan RTH yang menunjang peningkatan indeks kualitas

lahan Faktor penghambatnya yaitu :

- Kemungkinan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota Madiun yang berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air
- Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
- Pada awal tahun 2021 Kota Madiun mengalami banyak kegiatan pembaruan struktur yang menyebabkan adanya penebangan pohon lindung tepi jalan, sehingga nilai tutupan lahan karena tajuk vegetasi menjadi berkurang.
- Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam upaya menjaga kualitas lingkungan di Kota Madiun yaitu :

- a. Optimalisasi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Optimalisasi penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
- c. Optimalisasi penambahan RTH oleh OPD terkait
- d. Optimalisasi penanaman pohon lindung tepi jalan oleh OPD terkait.
- e. Optimalisasi pengelolaan sampah dan B3
- f. Optimalisasi pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup
- g. Optimalisasi peningkatan kapasitas lingkungan hidup

### **Tujuan 3 Terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing**

#### **IT 3.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

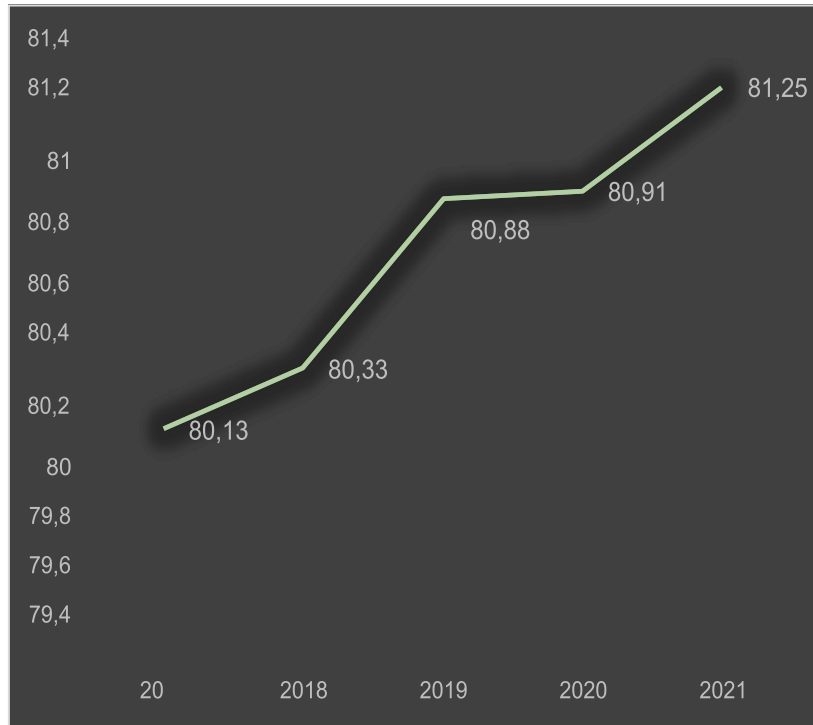
**Tabel 2. 16**  
**IPM Kota Madiun**

TAHUN	AHH	AHLS	ARLS	PARITAS DAYA BELI	DATA IPM
2017	72,48	14,20	11,10	15.415	80,13
2018	72,59	14,21	11,10	15.616	80,33
2019	72,75	14,39	11,13	16.040	80,88
2020	72,81	14,40	11,14	16.018	80,91
2021	72,83	14,41	11,37	16.095	81,25

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS Kota Madiun

Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2021 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 72,83 tahun, lebih lama 0,02 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) tahun 2021 tercatat sebesar 14,41, lebih tinggi 0,07 persen dibanding sebelumnya yaitu 14,40, sedangkan komponen pendidikan lainnya yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS 25thn+) tahun 2021 mencapai 11,37, atau meningkat 2,06 persen dibanding tahun lalu. Indikator Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan pada tahun 2021 mencapai Rp. 16.095.000 atau meningkat 0,48 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 16.018.000.

**Grafik 2. 11**  
**IPM Kota Madiun Tahun 2017 - 2021**



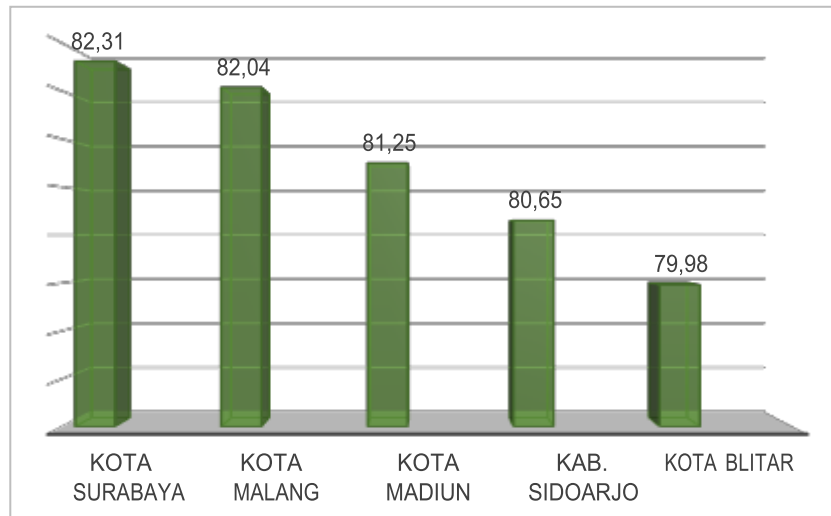
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Selama 2017 hingga 2021, IPM Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Hanya saja, peningkatan IPM terkecil terjadi di tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pertumbuhan komponen pengeluaran/ kapita/ tahun yang disesuaikan, sedangkan komponen lainnya masih tetap tumbuh positif meskipun dengan pertumbuhan yang kecil yaitu 0,06 poin. Setelah intensitas Pandemi COVID-19 berangsur menurun, geliat ekonomi memulih yang berpengaruh terhadap besarnya kenaikan IPM Tahun 2021.

Pemulihan ekonomi sosial di tengah Pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Kota Madiun. Hal ini terlihat dari peningkatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 dibanding tahun- tahun sebelumnya. IPM Kota Madiun tahun 2021 sebesar 81,25 atau tumbuh 0,42 persen (meningkat 0,34 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.



**Grafik 2. 12**  
**IPM Kota Madiun dan Kota Sekitar di Jawa Timur Tahun 2021**



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia di Kota Madiun pada tahun 2021 Kota Madiun menduduki peringkat ketiga dari 38 (Tiga Puluh Delapan) Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dengan angka 81,25. Ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi ini ditunjukkan dari predikat IPM Kota Madiun pada Tahun 2021 masih bertahan menjadi IPM berkategori “sangat tinggi”. Walaupun demikian, Pemerintah Kota Madiun tetap perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya.

### **IT 3.2 Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki-laki. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka Indeks Pembangunan Gender (IPG), karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 13**  
**IPG Kota Madiun Tahun 2017-2021**

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>TAHUN</b>	<b>INDEKS</b>
1.	Kota Madiun	2017	93,66
2.	Kota Madiun	2018	93,47
3.	Kota Madiun	2019	94,05
4.	Kota Madiun	2020	94,38
5.	Kota Madiun	2021	94,42

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Madiun Tahun 2021*

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir IPG Kota Madiun mengalami tren kenaikan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Indeks terendah ada pada tahun 2018 sebesar 93,47 dan yang tertinggi ada pada tahun 2021 sebesar 94,42. Dengan terus meningkatnya IPG Kota Madiun, menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
2. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

## **Sasaran 5 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat**

### **IS 5.1 Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 1,46 persen per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2021, harapan lama sekolah di Kota Madiun mencapai 14,40 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus D2.

## **IS 5.2 Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka meningkatkan dimensi pengetahuan pada IPM adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui penyediaan gedung sekolah yang representatif, bantuan laptop gratis, serta sarana dan prasarana belajar mengajar
2. Meningkatkan kualitas pendidikan
3. Meningkatkan Kualitas PAUD dan Pendidikan Dasar dengan pengembangan kurikulum dan melakukan pengelolaan Pendidikan
4. Meningkatkan pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan calon guru yang mengikuti seleksi Pendidikan Profesi guru

## **Sasaran 6 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat**

### **IS 6.1 Angka Harapan Hidup**

Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu daerah, maka menunjukkan semakin panjang pula tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang lahir di daerah itu pada kurun waktu tersebut. Angka Harapan Hidup (AHH) juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka harapan hidup warga Kota Madiun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahun, dan hal tersebut akan selalu di dukung oleh perangkat daerah terkait dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan sudah cukup baik di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Umur harapan hidup saat lahir yang mmerepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selama periode Tahun 2017 hingga 2021, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir dari 72,48 tahun (2017) menjadi 72,83 tahun (2021) atau naik sebesar 0,35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Kota Madiun.

Dari grafik dapat dilihat adanya tren kenaikan dari AHH di Kota Madiun, dari Tahun 2017 ke Tahun 2021, hal tersebut disebabkan karena dukungan faktor kesehatan berupa:

- a. Pemantauan status kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sudah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.
- b. Adanya skrining faktor resiko penyakit tidak menular (PTM) pada kelompok usia produktif dan lansia, dimana adanya transisi epidemiologi dimana penyakit tidak menular trennya meningkat daripada penyakit menular sehingga dengan diadakannya skrining faktor resiko PTM akan berdampak ditemukan sedini mungkin.

Peningkatan penemuan kasus pada penyakit menular untuk pengendalian penularan dan penurunan mortalitas akibat penyakit.

## **Sasaran 7 Meningkatnya Pemberdayaan Gender**

### **IS 7.1 Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG di Kota Madiun tahun 2017 sebesar 82,19% mengalami sedikit peningkatan menjadi 82,28% pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 menjadi 77,07 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 77,18. IPG Kota Madiun pada tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Sedangkan untuk Tahun 2020 mengalami kenaikan dari Tahun 2019 karena secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mencapai IDG Kota Madiun adalah sebagai berikut :

*Pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :

- a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai

tahapan, proses, dan bidang pembangunan melalui sosialisasi maupun pembinaan

- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender melalui sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat maupun dunia usaha

*Kedua*, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang dilakukan melalui strategi:

- a. Peningkatan pemahaman tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui sosialisasi maupun pembinaan
- b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan

*Ketiga*, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :

- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
- b. Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanganan tindak kekerasan
- d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
- g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

## **Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif**

### **IT 4.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. Pilar tersebut yaitu :

#### 1) PILAR 1 : Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan mempeluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

##### a. Sub-Pilar 1.1 : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Dengan indikator :

- Pertumbuhan PDRB rill per kapita
- Share manufaktur terhadap PDRB
- Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

##### b. Sub-Pilar 1.2 : Kesempatan Kerja

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Dengan indikator :

- Tingkat kesempatan kerja
- Persentase Penduduk Bekerja Penuh
- Persentase tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan menengah ke atas

##### c. Sub-Pilar 1.3 : Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target

pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator :

- Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN
- Persentase penduduk yang memiliki telepon genggam
- Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

2) PILAR 1 : Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

a. Sub-Pilar 2.1 : Ketimpangan

Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Dengan indicator :

- Rasio Pendapatan Gini
- Sumbangan Pendapatan Perempuan
- Rasio Rata-rata pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota

b. Sub-Pilar 2.2 : Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Dengan indicator:

- Persentase penduduk miskin
- Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari

3) PILAR 1 : Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas. Sub-Pilar 3.1 : Kapabilitas Manusia

Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Dengan indikator:

- Angka Harapan Lama Sekolah
- Persentase Balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- Persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan

b. Sub-Pilar 3.2 : Infrastruktur Dasar

Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.

Dengan Indikator :

- Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak
- Persentase rumah tangga dengan fasilitas tempat buang air sendiri

c. Sub-Pilar 3.3 : Keuangan Inklusif

Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dengan Indikator :

- Rasio jumlah rekening DPK terhadap penduduk usia produktif
- Rasio kredit perbankan UMKM

Indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator baru di RPJMD Kota Madiun yang baru ditargetkan di tahun 2021 sebesar 6,38, realisasi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada Tahun 2021 sebesar 6,87 mengalami kenaikan 0,49 poin yang tergolong kategori memuaskan dan menjadi peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri.

## **Sasaran 8 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka**

### **IS 8.1 Tingkat Pengangguran terbuka**

Pengangguran Terbuka atau sering juga disebut pengangguran penuh adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan penganggur. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.



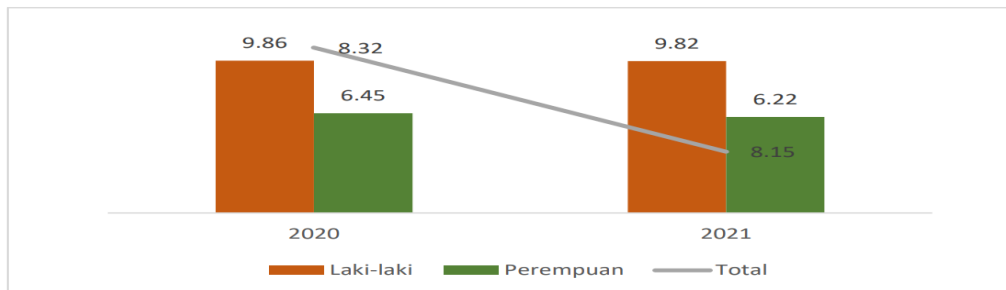
Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT Kota Madiun hasil

Sakernas Agustus 2021 sebesar 8,15 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar delapan orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17 persen poin dibandingkan Agustus 2020.

#### 1. TPT Menurut Jenis Kelamin

TPT Menurut Jenis Kelamin Pada Agustus 2021, TPT laki-laki sebesar 9,82 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,22 persen. TPT Agustus 2021 menurut jenis kelamin memiliki pola yang sama dengan TPT Agustus 2020, dimana TPT laki-laki lebih besar dari TPT perempuan. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki dan perempuan turun masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,23 persen poin.

**Grafik 2. 14**  
**TPT Menurut Jenis Kelamin**

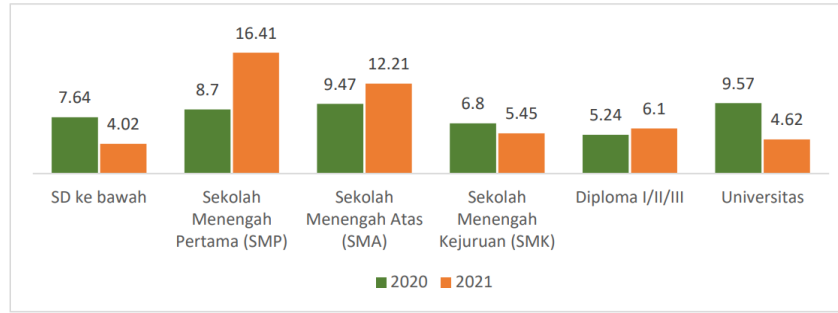


Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2021

#### 2. TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang sedikit berbeda antara Agustus 2021 dan Agustus 2020. Pada Agustus 2021, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 16,41 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 4,02 persen. Sedangkan pada tahun 2020 TPT paling tinggi didominasi tamatan Universitas dan TPT terendah adalah tamatan Diploma I/II/ III. Dibandingkan Agustus 2020, TPT kategori pendidikan mengalami peningkatan untuk tamatan SMP, SMA dan Diploma I/II/III yaitu naik sebesar 7,72 persen poin, 2,74 persen poin dan 0,86 persen poin. Sedangkan TPT yang mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020 adalah Tamatan SD kebawah, SMK dan Universitas yang masing masing turun sebesar 3,62 persen poin, 1,35 persen poin dan 4,95 persen poin.

**Grafik 2. 15**  
**TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**



Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2021

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- Pengangguran Karena COVID-19
- Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19
- Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19 dan
- Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19.

Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

**Tabel 2. 17**  
**Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Agustus 2020–Agustus 2021**

Komponen	Agustus 2020	Agustus 2021	Perubahan Ags 2020–Ags 2021	
	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Pengangguran <sup>1</sup> Karena COVID-19	1.437	1.243	-194	-13,50
b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) <sup>2</sup> Karena COVID-19	166	1.165	999	601,81
c. Sementara Tidak Bekerja <sup>3</sup> Karena COVID-19	855	2.057	1.202	140,58
d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19	20.709	19.920	-789	-3,81
<b>Total</b>	<b>23.167</b>	<b>24.385</b>	<b>1.218</b>	<b>5,26</b>
Penduduk Usia Kerja (PUK)	143.561	144.219	658	0,46
	persen	persen	persen poin	
Persentase terhadap PUK	16,14	16,91	0,77	

Sumber : BPS Kota Madiun Tahun 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 24.385 orang, mengalami kenaikan sebanyak 1.218 orang atau sebesar 5,26 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 1.243 orang pengangguran karena COVID- 19; 1.165 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 2.057 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 19.920 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19.

Keempat komponen tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2020. Kenaikan terbesar adalah komponen sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1.202 orang.

Faktor Pendorong Keberhasilan menurunnya tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun yaitu :

- a. Banyaknya formasi lowongan kerja yg tersedia
- b. Meningkatnya wirausaha baru
- c. Masyarakat lebih siap dan kompeten menghadapi pasar kerja
- d. Ada rekrutmen calon tenaga kerja baru oleh pemberi kerja.

Kesemuanya ini tidak lepas dari Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021. Adapun Faktor Penghambat yang berpengaruh pada Tingkat Pengangguran Terbuka saat ini adalah masih adanya Pandemi Covid 19 sehingga penyerapan Tenaga Kerja belum optimal. Memperhatikan sejumlah kondisi tersebut maka upaya- upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun untuk lebih menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2022 adalah :

- Meningkatkan kualitas pencari kerja dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
- Memberikan kesempatan uji kompetensi dan pemagangan bagi pendidikan dan pelatihan, sehingga dapat terserap di dunia kerja.
- Menyelenggarakan kegiatan job fair/bursa kerja secara online melalui Aplikasi SICAKER, untuk mempermudah pemberi kerja mendapatkan calon tenaga kerja, dan pencari kerja bisa dipertemukan langsung dengan pemberi kerja secara online.
- Melakukan pembinaan dan monitoring Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah, Lembaga Swasta dan atau Perguruan Tinggi guna terciptanya koordinasi dan kerjasama yang baik untuk dapat menempatkan alumni atau calon pencari kerja baru dengan pemberi kerja sesuai kompetensi masing-masing.
- Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)
- Melakukan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
- Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan
- Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
- Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
- Menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membuka peluang pekerjaan

- Updating data pengangguran tenaga kerja sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Madiun

## Sasaran 9 Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

### IS 9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Data realisasi pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2021 adalah 10,16. Sedangkan kondisi kinerja pada awal periode RPJMD pada tahun 2019 sebesar 5,82. Untuk tahun 2020 presentase pertumbuhan sebesar (-10,83) atau mengalami kenaikan sebesar 16,65. Faktor Penghambat penurunan dari 2019-2020 karena adanya pandemi global covid-19 dan menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan sebagian besar kegiatan usaha dan penerapan PSBB dan terbatasnya aktivitas produksi serta konstruksi menyebabkan capaian kinerjanya mengalami penurunan. Di tahun 2021 capaian pertumbuhan PDRB di Kota Madiun mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 470,37 % dibandingkan dengan target tahun 2021.

**Grafik 2. 16**  
**Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan**



Sumber : BPS Kota Madiun

### IS 9.2 Persentase pertumbuhan PDRB sektor Jasa

Pertumbuhan PDRB sektor jasa meliputi Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta Jasa Lainnya. Untuk data series pertumbuhan PDRB sector jasa menurut BPS pada tahun 2021 adalah sebesar 11,32 dengan capaian sebesar 1951,72% jika dibandingkan dengan target tahun 2021. Pertumbuhan PDRB di sektor jasa juga mengalami kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar -0,93 atau mengalami kenaikan sebesar 12,25.

Pemerintah Kota Madiun telah melakukan upaya Rem Covid-19 Gas Ekonomi dalam rangka memperbaiki Pertumbuhan PDRB di Kota Madiun antara lain :

- a) Melakukan Promosi Produk Perdagangan
- b) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan
- c) Melakukan Pengawasan Terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
- d) Meningkatkan Mutu Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
- e) Melakukan Pengawasan Perijinan Perdagangan
- f) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan PKL
- g) Membangun Jejaring Perdagangan Lintas Kota
- h) Melakukan Pendataan Volume Perdagangan Kota Madiun
- i) Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat
- j) Melakukan Promosi Pasar Rakyat
- k) Pembangunan Lapak UMKM di tiap Kelurahan (aplikasi pro UMKM)
- l) Pembangunan jalur sepeda wisata penghubunglapak
- m) Pembangunan dan pengembangan Pahlawan Street Center (PSC) sebagai pusat wisata baru di Kota Madiun

## **Tujuan 5 Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat**

### **IT 5.1 Indeks Ketentraman**

Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebagai salah satu alat pengukuran tingkat ketentraman dan ketertiban yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan tingkat ketentraman dan ketertiban. Penyusunan Survei Indeks Ketentraman dimaksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang nilai Indeks Ketentraman dari masyarakat di Kota Madiun. Berdasarkan hal tersebut diharapkan juga mampu menjadi bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun

Indeks ketentraman Kota Madiun tahun 2021 mencapai 101,99% dan ditargetkan pada akhir periode RPJMD 2019-2024. Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikator persentase penegakan Perda. Persentase penegakan perda tahun 2021 di Kota Madiun telah mencapai 102,68%. Peningkatan keamanan dan ketentraman juga akan meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat. Disisi lain, toleransi masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya menjaga kebersamaan dan keharmonisan kehidupan sosial bermasyarakat akan memicu terjadinya konflik sosial. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya perlu dioptimalkan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya sistematis, berkesinambungan, konsisten untuk meningkatkan toleransi dan peran/partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta mengurangi angka kriminalitas dan penggunaan NAPZA.

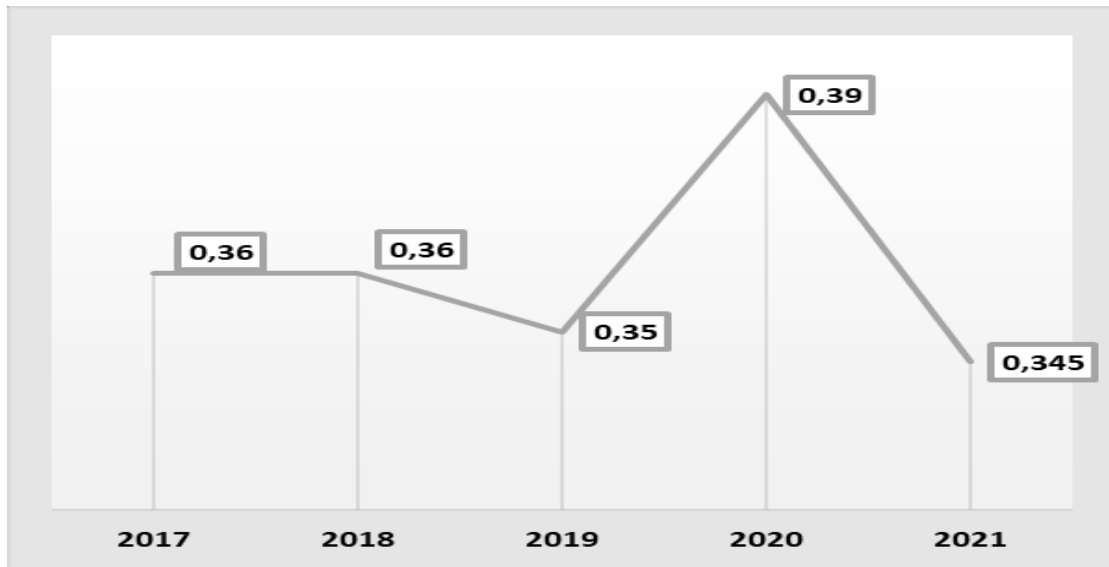
Terdapat empat dimensi pengukuran indeks ketentraman dan ketertiban:

1. Dimensi Pada Persepsi Keteraturan sesuai Hukum yang berlaku dan Norma- norma yang ada (Ketertiban Umum)
2. Dimensi Pada Persepsi Suasana Tenang
3. Dimensi Pada Persepsi Bebas dari Gangguan atau Kekacauan
4. Dimensi Pada Persepsi Aman

Berdasarkan hasil analisis penilaian persepsi masyarakat Kota Madiun tahun 2021 bahwa Indeks Ketentraman di Kota Madiun memperoleh nilai 3,07 (nilai konversi adalah 78,74) dengan predikat B atau status/ predikat “Kondusif” atau naik sebesar 1,87 jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 76,87. Sedangkan capaian tahun 2021 adalah sebesar 102,32% dibandingkan dengan target tahun 2021 yaitu sebesar 76,95. Untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 belum dilakukan penghitungan.

### **IT 5.2 Indeks Gini**

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu.



**Grafik 2. 17**

**Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2017 - 2021**

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2021

Indeks Gini Kota Madiun dari tahun ke tahun capaiannya semakin membaik, yang menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin mengecil. Di tahun 2020 terdapat kenaikan Indeks Gini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin melebar. Tetapi di tahun 2021 ketimpangan mengalami penurunan dengan Indeks Gini sebesar 0,345 yaitu dengan capaian sebesar 109% dari target yang telah ditetapkan. Atau terjadi penurunan ketimpangan sebesar 0,045.

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Air Bersih.
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian.
6. Bantuan Sosial kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA

## **Sasaran 10 Pengurangan Kemiskinan**

### **IS 10.1 Angka Kemiskinan**

Selama periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kota Madiun bertambah sebanyak 0,23 ribu jiwa, dari 8,83 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 9,06 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 2,66 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kota Madiun dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,21 persen, dari 4,98 persen pada Maret 2020 menjadi 5,09 persen pada Maret 2021.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kota Madiun miskin selama periode Maret 2021 antara lain adalah:

- a. Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih -0,13 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).
- b. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid-19, masyarakat di Kota Madiun masih banyak berdiam diri di rumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kota Madiun yang rata-rata masih 0,20 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

Tindak lanjut/langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah.
2. Bantuan Sosial Air Bersih.
3. Bantuan Sosial Lansia Tidak Potensial.
4. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar.
5. Bantuan Sosial Santunan Kematian.
6. Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya).
7. Bantuan Sosial untuk Janda Perintis.
8. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA
9. Meningkatkan Kualitas Keluarga melalui berbagai kegiatan sesuai kewenangan Dinsos PPPA



## **Sasaran 11 Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat**

### **IS 11.1 Indeks Kerukunan**

Capaian Indikator Indeks Kerukunan untuk Tahun 2021 adalah 74,36 dengan predikat Harmonis sehingga melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 74,30 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,08 %. Indikator tersebut diukur berdasarkan beberapa dimensi :

- a. Menghormati
- b. Menerima
- c. Jujur
- d. Teladan
- e. Kesetaraan

Sedangkan faktor pendorong peningkatan capaian kinerja :

1. Kerukunan antar umat beragama
2. Toleransi dalam menjalankan ibadah
3. Kerukunan antar suku yang ada di Kota Madiun
4. Saling menghargai dan menghormati dengan perbedaan
5. Deteksi dini akan timbulnya konflik sosial

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Kerukunan adalah :

1. Rakor Forkopimda untuk membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat
2. Sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan generasi muda tentang ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
3. Sarasehan Bela Negara
4. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama
5. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan
6. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini
7. Menyusun Peta Rawan Konflik
8. Fasilitasi/audiensi apabila timbul konflik sosial di masyarakat

**Tabel 2. 19**  
**Indeks Kerukunan**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>
1.	2019	2,65	3,70
2.	2020	2,77	3,7015
3.	2021	74,30	74,36

Sumber : BAKESBANGPOL Kota Madiun, Tahun 2021

## **IS 11.2 Indeks Rasa Aman**

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta dan kehormatan.

Indeks keamanan sebagai salah satu alat pengukuran tingkat keamanan dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan. Indeks Rasa Aman Kota Madiun mengadopsi metodologi penyusunan dan pengembangan Indeks Rasa Keamanan Manusia Indonesia yang merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia dengan mempertimbangkan konteks ke Indonesiaan yang terdiri dari 4 dimensi. Adapun empat dimensi dalam yang digunakan dalam pengukuran Indeks Rasa Aman yaitu :

- a. Dimensi Keamanan dari Bencana (Kebencanaan)
- b. Dimensi Pemenuhan Kesejahteraan Sosial (Kesejahteraan Sosial)
- c. Dimensi Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinnekaan (Kebhinnekaan)
- d. Dimensi Keamanan dari Kekerasan (Kekerasan)

Capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2020 adalah sebesar 76,05 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 100,06%.

Sedangkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Rasa Aman tahun 2021 adalah sebesar 81,00 dengan peringkat Aman, sehingga melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 76,15. Capaian Kinerja telah mencapai persentase sebesar 101,37%, sehingga Indeks Rasa Aman Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021 naik sebesar 4,95 poin.

**Tabel 2. 20**  
**Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2022) Murni		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di Evaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%) Murni		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV								
						8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x 100%									
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x 100%	K (%)	RP. (%)								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K (%)	RP. (%)			
1																				
1																				
1	1																			
1	1	2																		
1	1	2	2.0	1																
1	1	2	2.0	1	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	Lembaga	7	4.201.213.200	7	2.000.000				7	28.244.500	100%	1%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0	1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	360.480.445	0	57.928.314				0	98.931.040	0%	27%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0	1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	136.576.723	0	23.768.625				0	50.876.725	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0	1	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	208.175.500	0	19.651.005				0	41.222.804	0%	20%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7					8	9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	285.565.150	0	54.116.710						0	115.577.002	0%	40%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	167.915.638	0	28.158.372						0	53.942.193	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	310.973.000	0	56.915.116						0	97.212.578	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	128.625.965	0	26.187.811						0	48.175.486	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	297.487.320	0	57.372.542						0	104.739.189	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	117.946.400	0	19.610.141						0	37.855.385	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	154.184.250	0	33.986.457						0	66.724.405	0%	43%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	212.441.450	0	30.667.250						0	51.026.723	0%	24%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	204.491.885	0	30.957.599						0	58.040.362	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	280.000.533	0	39.534.156						0	68.987.957	0%	25%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sukosari)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	118.396.200	0	19.813.539						0	49.405.144	0%	42%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7					8	9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	175.596.200	0	31.297.076						0	65.810.679	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Pilangbango)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	361.728.250	0	57.771.879						0	116.103.164	0%	32%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	120.669.218	0	29.017.620						0	50.300.860	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kelun)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	167.888.240	0	29.799.665						0	42.438.534	0%	25%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	299.546.000	0	39.970.000						0	68.830.000	0%	23%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	268.426.113	0	52.371.318						0	72.401.434	0%	27%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	150.417.800	0	23.069.229						0	33.639.167	0%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	166.271.300	0	19.998.725						0	56.258.406	0%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	108.928.495	0	17.224.714						0	34.118.336	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	579.661.875	0	83.186.348						0	151.764.882	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	296.886.200	0	44.874.180						0	97.818.704	0%	33%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7				8				9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	407.673.500	0	54.165.760							0	103.723.271	0%	25%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	267.111.553	0	37.977.510							0	55.971.481	0%	21%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	151.727.225	0	32.211.790							0	49.157.801	0%	32%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	296.431.395	0	64.324.820							0	113.517.870	0%	38%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	125.281.715	0	14.317.856							0	38.011.401	0%	30%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	247.103.986	0	34.957.823							0	61.600.457	0%	25%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	132.349.750	0	32.749.480							0	51.669.395	0%	39%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Ngegong)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	102.975.600	0	18.424.402							0	33.150.685	0%	32%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Patihan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	250.205.150	0	48.836.271							0	105.208.042	0%	42%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	152.333.350	0	13.490.534							0	34.693.661	0%	23%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	330.011.468	0	75.898.476							0	117.195.577	0%	36%	Dinas Pendidikan	

1					2	3	4	5		6		7					8	9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Sogaten)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	136.464.705	0	39.946.226						0	57.292.798	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	364.180.863	0	71.588.600						0	101.551.750	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	135.707.585	0	24.059.570						0	52.200.231	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	224.678.350	0	25.194.812						0	55.075.926	0%	25%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	262.315.983	0	54.809.933						0	98.893.771	0%	38%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	392.289.950	0	74.622.700						0	114.114.684	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Banjarejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	394.878.770	0	80.260.896						0	118.787.064	0%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	202.044.700	0	37.433.786						0	56.406.539	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	422.377.865	0	98.153.627						0	156.575.100	0%	37%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	297.710.660	0	51.310.385						0	89.288.121	0%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	256.967.263	0	43.286.670						0	64.198.274	0%	25%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	178.486.620	0	38.398.755					0	60.466.443	0%	34%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	261.444.983	0	42.187.432					0	75.230.106	0%	29%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	149.302.075	0	22.948.401					0	45.603.060	0%	31%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	143.761.800	0	13.039.846					0	31.042.983	0%	22%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 01 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	219.139.700	0	22.041.755					0	57.077.917	0%	26%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 02 Josenan)	jumlah lembaga	Lembaga	1	150.900.750	0	39.375.479					0	53.810.037	0%	36%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN 03 Josenan)	jumlah lembaga	Lembaga	1	116.238.200	0	20.745.040					0	42.064.590	0%	36%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kejuron)	jumlah lembaga	Lembaga	1	156.213.850	0	21.462.769					0	49.391.417	0%	32%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SDN Kuncen)	jumlah lembaga	Lembaga	1	178.078.001	0	23.428.960					0	39.957.411	0%	22%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 5	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidang Kreatifitas	14	519.630.000		-					0	1.840.000	0%	0%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lembaga	73	569.814.551	73	2.740.000					73	56.730.305	100%	10%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	338.580.000	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	



1					2	3	4	5		6		7					8	9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	46.530.000	0	7.000.000						0	7.000.000	0%	15%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kartoharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	60.390.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	344.520.000	0	76.023.018						0	76.023.018	0%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	126.720.000	0	26.932.800			9.909.000			0	36.841.800	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	343.530.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Klegen)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	88.110.000	0	12.167.008			11.000.906			0	23.167.914	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Oro - Oro Ombo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	251.460.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	97.020.000	0	28.639.161			16.308.000			0	44.947.161	0%	46%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Rejomulyo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	52.470.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	78.210.000	0	12.082.500			8.546.160			0	20.628.660	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	162.360.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Kanigoro)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	163.350.000	0	39.228.707			7.739.930			0	46.968.637	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sukosari)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	34.500.000	0	8.314.758						0	8.314.758	0%	24%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Pilangbango)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	200.970.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	163.350.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Tawangrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	83.160.000	0	17.411.150			4.726.710			0	22.137.860	0%	27%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7				8		9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kelun)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	171.270.000	0	19.767.000						0	52.893.000	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manguharjo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	286.110.000	0	79.699.773						0	79.699.773	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	300.900.000	0	79.547.410						0	87.317.910	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	126.720.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	115.830.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	116.820.000	0	22.837.850						0	27.810.250	0%	24%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	493.020.000	0	103.691.000						0	103.691.000	0%	21%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	333.630.000	0	52.722.450						0	52.722.450	0%	16%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 05 Madiun Lor)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	445.500.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	123.750.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	92.070.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	323.730.000	0	85.599.347						0	85.599.347	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Nambangan Kidul)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	126.720.000	0	25.452.450						0	25.452.450	0%	20%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	322.740.000	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7				8	9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Winongo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	53.460.000	0	-				0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Ngegong)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	158.400.000	0	22.133.902				0	22.133.902	0%	14%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Patihan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	302.940.000	0	31.312.600			16.651.450	0	47.964.050	0%	16%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	72.270.000	0	18.414.000				0	18.414.000	0%	25%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pangongangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	299.970.000	0	31.480.330				0	31.480.330	0%	10%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Sogaten)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	171.270.000	0	8.452.000				0	8.452.000	0%	5%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	430.650.000	0	100.583.35 4			49.199.780	0	149.783.134	0%	35%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	76.230.000	0	3.411.050				0	3.411.050	0%	4%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Taman)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	105.930.000	0	15.216.415				0	15.216.415	0%	14%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	335.610.000	0	47.245.900				0	47.245.900	0%	14%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Pandean)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	317.790.000	0	61.650.000			33.687.000	0	95.337.000	0%	30%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Banjarejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	415.800.000	0	91.551.974				0	91.551.974	0%	22%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	101.970.000	0	12.038.508			13.527.500	0	25.566.008	0%	25%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Mojorejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	506.880.000	0	114.473.27 0			33.370.750	0	147.844.020	0%	29%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	334.620.000	0	40.897.850			55.219.450	0	96.117.300	0%	29%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	296.010.000	0	45.355.100			22.009.050	0	67.364.150	0%	23%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	164.340.000	0	-				0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	

1					2	3	4	5		6		7				8	9	10	11	12
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 04 Manisrejo)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	192.060.000	0	-	-				0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	131.670.000	0	17.492.510	38.310.030				0	55.802.540	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Demangan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	161.370.000	0	24.798.600	21.876.000				0	46.674.600	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 01 Josenan)	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	177.210.000	0	23.787.150	2.211.500				0	25.998.650	0%	15%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 02 Josenan)	jumlah lembaga	Lembaga	1	173.250.000	0	-	-				0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN 03 Josenan)	jumlah lembaga	Lembaga	1	88.110.000	0	10.697.800	-				0	10.697.800	0%	12%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kejuron)	jumlah lembaga	Lembaga	1	52.470.000	0	10.913.600	471.800				0	11.385.400	0%	22%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SDN Kuncen)	jumlah lembaga	Lembaga	1	76.230.000	0	20.572.270	13.134.955				0	33.707.225	0%	44%	Dinas Pendidikan
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>8.886.049.180</b>		<b>1.220.794.716</b>	<b>83.946.988</b>				<b>0</b>	<b>1.304.741.704</b>	<b>0%</b>	<b>15%</b>	
1	1	2	2.0 2	1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	Lembaga	2	4.590.763.000	0	-	8.429.300				0	8.429.300	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	Siswa	596	3.384.371.000	0	11.519.200	1.740.000				0	13.259.200	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 1)	jumlah lembaga	Lembaga	1	771.088.858	0	104.123.361	135.152.818				0	239.276.179	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 2)	jumlah lembaga	Lembaga	1	1.007.728.150	0	109.353.142	128.667.993				0	238.021.135	0%	24%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 3)	jumlah lembaga	Lembaga	1	532.463.100	0	91.495.970	93.847.500				0	185.343.470	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 4)	jumlah lembaga	Lembaga	1	689.638.950	0	92.561.017	109.115.244				0	201.676.261	0%	29%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7					8	9	10	11	12
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 5)	jumlah lembaga	Lembaga	1	614.326.505	0	131.535.08 9		81.336.764				0	212.871.853	0%	35%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 6)	jumlah lembaga	Lembaga	1	681.836.545	0	79.010.730		114.307.512				0	193.318.242	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 7)	jumlah lembaga	Lembaga	1	685.295.650	0	79.579.230		80.675.730				0	160.254.960	0%	23%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 8)	jumlah lembaga	Lembaga	1	411.846.760	0	49.531.930		77.878.191				0	127.410.121	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 9)	jumlah lembaga	Lembaga	1	638.529.255	0	43.462.722		79.383.282				0	122.846.004	0%	19%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 10)	jumlah lembaga	Lembaga	1	855.919.545	0	98.919.420		124.142.738				0	223.062.158	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 11)	jumlah lembaga	Lembaga	1	599.169.867	0	126.248.22 0		118.503.431				0	244.751.651	0%	41%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 12)	jumlah lembaga	Lembaga	1	697.774.350	0	73.235.726		98.272.995				0	171.508.721	0%	25%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 13)	jumlah lembaga	Lembaga	1	575.359.233	0	87.803.929		106.778.382				0	194.582.311	0%	34%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SMPN 14)	jumlah lembaga	Lembaga	1	415.520.818	0	42.415.030		80.207.443				0	122.622.473	0%	30%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	Lembaga	25	227.974.415	0	-		58.877.968				0	58.877.968	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	3 8	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	Bidang Kreatifitas	14	582.173.405	0	-		-				0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	Lembaga	25	100.767.360	0	-		14.899.720				0	14.899.720	0%	15%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah	jumlah lembaga	Lembaga	1	923.230.000	0	149.992.34 4		105.809.684				0	255.802.028	0%	28%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					Menengah Pertama (SMPN 1)																
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 2)	jumlah lembaga	Lembaga	1	930.490.000	0	-					0		-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 3)	jumlah lembaga	Lembaga	1	677.600.000	0	-					0		-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 4)	jumlah lembaga	Lembaga	1	986.150.000	0	133.357.03 6		119.687.036			0		253.044.072	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 5)	jumlah lembaga	Lembaga	1	532.400.000	0	88.991.283		74.868.610			0		163.859.893	0%	31%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 6)	jumlah lembaga	Lembaga	1	768.350.000	0	101.200.00 0		113.500.000			0		214.700.000	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 7)	jumlah lembaga	Lembaga	1	882.090.000	0	132.751.81 5		-			0		132.751.815	0%	15%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 8)	jumlah lembaga	Lembaga	1	648.560.000	0	132.852.25 0		141.424.330			0		274.276.580	0%	42%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 9)	jumlah lembaga	Lembaga	1	504.570.000	0	76.789.000		56.886.547			0		133.675.547	0%	26%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 10)	jumlah lembaga	Lembaga	1	613.470.000	0	75.810.530		25.322.180			0		101.132.710	0%	16%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 11)	jumlah lembaga	Lembaga	1	775.610.000	0	152.931.00 0		73.720.000			0		226.651.000	0%	29%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 12)	jumlah lembaga	Lembaga	1	767.140.000	0	107.372.11 8		1.000.000			0		108.372.118	0%	14%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 13)	jumlah lembaga	Lembaga	1	854.260.000	0	240.048.43 4		43.545.500			0		283.593.934	0%	33%	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMPN 14)	jumlah lembaga	Lembaga	1	425.920.000	0	69.223.421		118.929.692			0		188.153.113	0%	44%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	1	2	2.0 3		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Lembaga PAUD yang Terakreditasi</b>	%	100	8.563.920.185	100	18.962.480					100	63.861.730	100%	1%		
1	1	2	2.0 3	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga	Lembaga	1	-	1	-					1	-	100%	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 3	1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	Lembaga	1	319.425.865	1	15.112.480					1	56.511.730	100%	18%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 3	1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD dan pendidikan kesetaraan SD SMP	Orang	1000	3.600.000.000	0	-					0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 3	1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Prosentase lembaga paud yang berizin	%	30	4.644.494.320	0	3.850.000					0	7.350.000	0%	0%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 4		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Prosentase Lembaga Non Formal yang Terakreditasi</b>	%	100	900.371.630	0	1.160.000					0	40.389.500	0%	4%		
1	1	2	2.0 4	1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Lulus Ujian	Siswa	175	900.371.630	0	1.160.000					0	40.389.500	0%	4%	Dinas Pendidikan	
1	1	2	2.0 4	1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang bersertifikat	%	60	-	0	-					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
1	1	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP</b>	%	100	3.480.307.746	0	13.432.000					0	954.078.850	0%	27%		
1	1	3	2.0 1		<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>8 Standart Pendidikan pada Kualitas Standart Proses dan Penilaian Pendidikan</b>	%	100	2.885.323.588	0	13.432.000					0	953.704.850	0%	33%		
1	1	3	2.0 1	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	1.244.648.568	0	-					0	607.688.850	0%	49%	Dinas Pendidikan	
1	1	3	2.0 1	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	924.010.610	0	13.432.000					0	327.464.000	0%	35%	Dinas Pendidikan	
1	1	3	2.0 1	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	716.664.410	0	-					0	18.552.000	0%	3%	Dinas Pendidikan	

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					Lokal Pendidikan Dasar																	
1	1	3	2.0	2	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	<b>Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP</b>	%	100	594.984.158	0	-	374.000					0	374.000	0%	0%		
1	1	3	2.0	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	%	100	594.984.158	0	-	374.000					0	374.000	0%	0%	Dinas Pendidikan	
1	1	4			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi</b>	%	20	1.658.000.000	0	71.245.000	276.597.050					0	347.842.050	0%	21%		
1	1	4	2.0	1	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Prosentase Guru Kasek dan Pengawas Berkompentensi</b>	%	100	1.658.000.000	0	71.245.000	276.597.050					0	347.842.050	0%	21%		
1	1	4	2.0	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru berprestasi	%	100	1.292.000.000	0	71.245.000	253.694.550					0	324.939.550	0%	25%	Dinas Pendidikan	
1	1	4	2.0	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	%	100	366.000.000	0	-	22.902.500					0	22.902.500	0%	6%	Dinas Pendidikan	
1	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>																	
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN</b>	<b>Indeks Keluarga Sehat</b>	<b>Indeks</b>	41	50.882.156.157	0	771.480.700	0	19.722.491.363					0	20.493.972.063	0%	40%	



1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					<b>DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>																	
1	2	2	2.0 1		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	%	100	5.550.848.389	0	56.490.150	0	1.329.468.011					0	1.385.958.161	0%	25%	
1	2	2	2.0 1	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit (RSUD)	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	Unit	2	2.758.714.000	0	-	0	134.404.792					0	134.404.792	0%	5%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	1 2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Unit	3	2.285.228.971	0	-	0	57.664.000					0	57.664.000	0%	3%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Jenis	17	4.068.801.445	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2.262.483.464	0	5.242.400	1	46.044.750					1	51.287.150	50%	2%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Jenis	1	6.668.510.000	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	1 5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi	Jenis	24	101.444.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	Paket	1	2.334.796.000	0	51.247.750	0	383.064.665					0	434.312.415	0%	19%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat Vaksin (RSUD)	Jenis obat/vaksin yang diadakan	Jenis	2	1.998.121.800	0	-	0	900.358.596					0	900.358.596	0%	45%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7				8	9	10	11	12		
1	2	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	852.124.925	0	0	1	0					1	-	50%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 1	2 1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					0	0	0	0									Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</b>	%	100	45.331.307.768	0	714.990.550		18.393.023.352					0	19.108.013.902	0%	42%	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan kunjungan ibu hamil paripurna	%	100	341.250.020	24,33	7.896.000	50,04	17.979.850					50	25.875.850	50%	8%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Manguharjo)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100		0	-	100	2.983.400					100	2.983.400	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Ngegong)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		0	-	53,6	13.669.800					54	13.669.800	54%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Sukosari)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		0	-	41,8	1.117.500					42	1.117.500	42%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		0	-	50	5.795.750					50	5.795.750	50%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Puskesmas Banjarejo)	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		0	-	43,92	12.103.500					44	12.103.500	44%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100		0	-	49,9	1.353.750					50	1.353.750	50%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					Hamil (Puskesmas Demangan)																Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	59.001.600	23	7.732.000	48,8 3	17.208.600				49	24.940.600	49%	42%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Manguharjo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		0	-	100	0				100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Ngegong)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		0	-	42,9	2.000.000				43	2.000.000	43%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Sukosari)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		0	-	41,9	0				42	-	42%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		0	-	43	150.000				43	150.000	43%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Banjarejo)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		0	-	40,4	400.000				40	400.000	40%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Puskesmas Demangan)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		0	-	47,3 8	252.000				47	252.000	47%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	22.630.000	24,2 3	1.330.000	50,6 3	11.906.750				51	13.236.750	51%	58%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	%	100		0	-	100	0				100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					(Puskesmas Manguharjo)	kesehatan bayi baru lahir																
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Ngegong)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100			0	-	50,2	100.000				50	100.000	50%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Sukosari)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100			0	-	41,9	875.250				42	875.250	42%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Tawangrejo)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100			0	-	47	600.000				47	600.000	47%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Banjarejo)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100			0	-	40,8 2	100.000				41	100.000	41%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Puskesmas Demangan)	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100			0	-	49,7 7	0				50	-	50%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	204.380.050		25,6 2	0	55,5 8	150.000				56	150.000	56%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Manguharjo)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100			0	-	100	1.341.000				100	1.341.000	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Ngegong)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100			0	-	51,1	5.028.750				51	5.028.750	51%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Sukosari)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100			0	-	42,4	0				42	-	42%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Tawangrejo)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100		0	-	55	0				55	-	55%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Banjarejo)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100		0	-	61,0 4	2.800.000				61	2.800.000	61%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Puskesmas Demangan)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100		0	-	51,0 1	8.671.550				51	8.671.550	51%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	26.899.000	47,4 6	1.512.000	66,6 9	2.694.000				67	4.206.000	67%	16%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Manguharjo)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	100	0				100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Ngegong)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	74,1	3.549.600				74	3.549.600	74%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Sukosari)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	97,8	0				98	-	98%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	77	0				77	-	77%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Banjarejo)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	79,9 9	2.713.650				80	2.713.650	80%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7				8	9	10	11	12		
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Puskesmas Demangan)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	62,3 7		0				62	-	62%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	222.209.500	6,6	14.704.900	49,2 1		83.219.450				49	97.924.350	49%	44%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Sukosari)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	21,1		0				21	-	21%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	43		19.052.500				43	19.052.500	43%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Banjarejo)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	76,6 8		0				77	-	77%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (Puskesmas Demangan)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	52,5 1		2.011.500				53	2.011.500	53%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	52.593.100	11,0 8	360.000	69,0 7		19.435.000				69	19.795.000	69%	38%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Manguharjo)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	100		0				100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	76		3.113.750				76	3.113.750	76%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12	
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Banjarejo)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	61,9		350.000				62	350.000	62%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (Puskesmas Demangan)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		0	-	100		4.259.450				100	4.259.450	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (dinas kesehatan)	%	100	9.477.000	9	0	14,7 2		0				15	-	15%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	29.020.000	41	0	64,6 1		0				65	-	65%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	171.966.200	19,1 7	0	88,7 8		11.929.000				89	11.929.000	89%	7%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Manguharjo)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		0	-	90		0				90	-	90%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Ngegong)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		0	-	47,4		300.000				47	300.000	47%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Sukosari)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		0	-	108, 9		0				109	-	109%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		0	-	74		0				74	-	74%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7				8	9	10	11	12	
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Banjarejo)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		0	-	100		0			100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Puskesmas Demangan)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		0	-	100		0			100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis mencapai target	%	100	220.133.900	13	9.651.000	41,0 7		33.381.750			41	43.032.750	41%	20%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Manguharjo)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		0	-	37,7		0			38	-	38%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Ngegong)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		0	-	25,7		0			26	-	26%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Sukosari)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		0	-	52,4		0			52	-	52%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		0	-	35		400.000			35	400.000	35%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Banjarejo)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		0	-	31,6 9		2.265.200			32	2.265.200	32%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (Puskesmas Demangan)	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		0	-	100	700.000				100	700.000	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mencapai target	%	100	327.297.000	11,5 2	13.566.000	31,9 7	16.865.000				32	30.431.000	32%	9%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Manguharjo)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		0	-	32,9 6	0				33	-	33%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Sukosari)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		0	-	45,7 6	0				46	-	46%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		0	-	43	400.000				43	400.000	43%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Banjarejo)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		0	-	45,9 5	0				46	-	46%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (Puskesmas Demangan)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		0	-	36,6 9	0				37	-	37%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	680.429.000	100	52.698.000	100	84.623.500				100	137.321.500	100%	20%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Manguharjo)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	513.002.000	100	-	100	142.610.500					100	142.610.500	100%	28%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Ngegong)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	509.810.000	100	-	100	168.856.500					100	168.856.500	100%	33%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Sukosari)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	545.040.000	100	-	100	136.374.000					200	136.374.000	200%	25%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Tawangrejo)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	564.295.000	100	-	100	72.493.400					100	72.493.400	100%	13%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Banjarejo)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	580.632.000	100	-	100	2.750.000					100	2.750.000	100%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Puskesmas Demangan)	Prosentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	%	100	535.000.000	100	-	100	0					100	-	100%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunnya Prevalensi stunting	%	9,5	16.852.900	7,4	17.722.200	9,5	12.142.710					10	29.864.910	100%	177%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Manguharjo)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	10	266.050.000	4	45.465.000	4,23	65.115.000					8	110.580.000	82%	42%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Ngegong)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	12	212.330.000	11	68.010.000	11,2 4	33.430.000					22	101.440.000	185%	48%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Sukosari)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	79	281.900.000	6,2	82.500.000	6,2	0					12	82.500.000	16%	29%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Tawangrejo)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	9,5	249.475.000	7,11	36.810.000	7,11	18.660.000					7	55.470.000	75%	22%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Banjarejo)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	11,5	346.215.000	6,8	63.600.000	6,8	132.256.680					7	195.856.680	59%	57%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Puskesmas Demangan)	Menurunnya Prevalensi stunting	%	11	326.000.000	4,38	32.220.000	4,38	131.985.000					4	164.205.000	40%	50%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	%	41	86.024.400	17	9.267.300	23,9 6	42.502.800					24	51.770.100	58%	60%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Sukosari)	Persentase Pekerja yang dilayani	%	41		0		0	0					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Puskesmas Demangan)	Persentase Pekerja yang dilayani	%	41		0		-	0					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7				8				9	10	11	12
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	%	61	553.124.540	93	3.309.150	90	46.445.590					90	49.754.740	148%	9%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Manguharjo)	Persentase TTU Sehat	%	61		0	0	61	17.040.250					61	17.040.250	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Ngegong)	Persentase TTU Sehat	%	61		0	-	30,8	19.687.250					31	19.687.250	50%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Sukosari)	Persentase TTU Sehat	%	61		0		100	0					100	-	164%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase TTU Sehat	%			0	-	54	12.315.500					54	12.315.500	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Banjarejo)	Persentase TTU Sehat	%	61		0	-	61,3	14.470.750					61	14.470.750	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Puskesmas Demangan)	Persentase TTU Sehat	%	61		0	-	46,2	7.928.750					46	7.928.750	76%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	10		0	0	3	23.387.500					3	23.387.500	30%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	16		0	-	11	35.573.300					11	35.573.300	69%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	13		0		10	0					10	-	77%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	16		0	-	6	4.752.500				6	4.752.500	38%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	13		0	-	9	21.400.200				9	21.400.200	69%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan			0	-	7	28.470.750				7	28.470.750	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100	132.280.000	100	90.000.000	100	17.356.000				100	107.356.000	100%	81%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Manguharjo)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100		0	0	100	0				100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Ngegong)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100		0	-	100	3.539.350				100	3.539.350	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Sukosari)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100		0		100	0				100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100		0	-	100	10.742.750				100	10.742.750	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Banjarejo)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100		0	-	100	15.615.250				100	15.615.250	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Puskesmas Demangan)	Persentase respon KLB < 24 jam	%	100		0	-	100	0				100	-	100%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	%	100	162.910.950	19,1 7	4.800.000	88,7 8	9.507.500				89	14.307.500	89%	9%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	%	100	213.562.000	28,5 7	32.342.000	0	61.524.600				0	93.866.600	0%	44%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Manguharjo)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100		0	0	53,0 1	7.408.650				53	7.408.650	53%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Ngegong)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100		0	-	57,1 4	60.839.000				57	60.839.000	57%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Sukosari)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100		0		28,5	0				29	-	29%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100		0	-	50	700.000				50	700.000	50%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Banjarejo)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100		0	-	72,8 3	13.007.300				73	13.007.300	73%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Puskesmas Demangan)	Persentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mencapai Target	%	100		0	-	50,4	30.198.000				50	30.198.000	50%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	Orang	8752 0	38.558.233.280	7577 9	9.776.000	7047 3	15.126.067.550				7047 3	15.135.843. 550	81%	39%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yg melaksanakan tatanan wajib dan pilihan	%	52	155.779.200	33,3 3	8.800.500	33,3 3	17.695.500				33	26.496.000	64%	17%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	%	89	2.864.596.000	67,7 4	-	81,6 9	14.738.500				82	14.738.500	92%	1%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					(Puskesmas Manguharjo)																Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Ngegong)	PKP Puskesmas	%	88	2.360.253.000	65,5	-	76,4	20.409.600				76	20.409.600	87%	1%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sukosari)	PKP Puskesmas	%	89,4	2.809.017.000	90,4	-	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Tawangrejo)	PKP Puskesmas	%	90	2.607.873.000	63	-	67,5	25.935.600				68	25.935.600	75%	1%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Banjarejo)	PKP Puskesmas	%	85	3.354.546.000	47,3 4	-	77,2 7	7.068.000				77	7.068.000	91%	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Demangan)	PKP Puskesmas	%	80	2.710.699.880	62,2 3	-	76,2 7	20.118.600				76	20.118.600	95%	1%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan operasional faskes	%	100	1.778.847.328	0	8.752.500	0	1.004.815.253				0	1.013.567.7 53	0%	57%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	%	100	489.298.000	0	0	20	108.205.119				20	108.205.119	20%	22%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Terlaksananya pelayanan gawat darurat	%	100	817.108.800	100	92.166.000	100	229.031.500				100	321.197.500	100%	39%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					0	0	0	0				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga					0	-	0	0					-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12					
					(Puskesmas Manguharjo)																					
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Ngegong)					0	-	0			0										Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Sukosari)					0	-	0			0			0			#DIV/0!	#DIV/0!			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Tawangrejo)					0	-				0										Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Banjarejo)										0			0							Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga (Puskesmas Demangan)										0			0			-	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	2	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan</b>		%	91	218.691.500	84,5	34.807.800	95,55	49.587.250				96	84.395.050	105%	39%					
1	2	3	2.0 2		<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>Ketersediaan Tambahan Tenaga Medis di Puskesmas Rawat Inap Standart</b>		<b>Dokter</b>	1	48.750.000	1	7.500.000	1	15.000.000				1	22.500.000	100%	46%					



1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standart	Dokter	1	48.750.000	1	7.500.000	1	15.000.000				1	22.500.000	100%	46%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	3	2.0 3		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Teregistrasi</b>	%	91	169.941.500	69	27.307.800	82	34.587.250				82	61.895.050	90%	36%	
1	2	3	2.0 3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	%	91	169.941.500	69	27.307.800	82	34.587.250				82	61.895.050	90%	36%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart</b>	%	86	226.563.000	48,5	2.891.850	78	7.078.500				78	9.970.350	91%	4%	
1	2	4	2.0 1		<b>Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi sesuai Standar</b>	%	86	196.057.000	34	2.891.850	42	1.125.000				42	4.016.850	49%	2%	
1	2	4	2.0 1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	%	86	196.057.000	34	2.891.850	42	1.125.000				42	4.016.850	49%	2%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	4	2.0 4		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran</b>	<b>Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga</b>	%	86	30.506.000	63	0	89,7 7	5.953.500				90	5.953.500	104%	20%	

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
					<b>dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>yang mendapat NoP-IRT</b>															
1	2	4	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRT yang sehat	%	86	30.506.000	63	0	89,7 7	5.953.500				90	5.953.500	104%	20%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata</b>	%	62	1.123.475.000	60,3	14.461.95 0	60,3	128.151.550				60	142.613.50 0	97%	13%	
1	2	5	2.0 1		<b>Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas</b>	%	100	354.582.000	18,1 8	14.461.95 0	45,4 5	49.298.000				45	63.759.950	45%	18%	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	Jenis	6	354.582.000	3	14.461.950	5	49.298.000				5	63.759.950	83%	18%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	Kegiatan	3	3		3		3									
1	2	5	2.0 2		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				-	0	0		49.298.000				0	49.298.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100		0	0		49.298.000				0	49.298.000	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Manguharjo)	Persentase SPM mencapai target	%	100		0	0	0	0				0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12		
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Ngegong)	Persentase SPM Puskesmas mencapai target	%	100	-	0	-	0				0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Sukosari)	Persentase SPM mencapai target	%	100	-	0	0					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Tawangrejo)	Persentase SPM mencapai target	%	100	-	0	-					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Banjarejo)	Persentase SPM mencapai target	%	100	-	0	-	0				0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Puskesmas Demangan)	Persentase SPM mencapai target	%	100	-	0	-					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	%	77,7 8	768.893.000	0	29.555.550	59,2 6					59	29.555.550	76%	4%		
						Persentase Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	%	81,4 8				88,8 9					88,8 9		89			109%
						Persentase Posyandu Balita berstrata puri	%	85,9 3				90,7 4					91		91			106%
						Persentase Posyandu Lansia berstrata puri	%	96,3 8				98,5 8					99		99			103%
						Persentase Poskestren berstrata puri	%	45,4 5				53,3 3					53		53			117%
						Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	%	40				35,2 9					35		35			88%
						Persentase Posbindu PTM berstrata puri	%	69,8 7				51,2 8					51		51			73%

1					2		3		4	5			6		7			8			9	10	11	12
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri	Kelurahan	21	768.893.000	0	29.555.550	16	16	29.555.550	16	29.555.550	76%	4%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
						Jumlah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri	Poskeskel	22				24								24	24	109%		
						Jumlah Posyandu Balita berstrata puri	Posyandu	232				245								245	245	106%		
						Jumlah Posyandu Lansia berstrata puri	Posyandu	133				139								139	139	105%		
						Jumlah Poskestren berstrata puri	Jumlah Poskestren	5				8								8	8	160%		
						Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri	Pos UKK	6				6								6	6	100%		
						Jumlah Posbindu PTM berstrata puri	Posbindu PTM	109				80								80	80	73%		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																								
1	3	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase Rawan Banjir</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>8.220.488.400</b>	<b>0</b>	<b>157.894.000</b>	<b>0</b>	<b>1.147.368.763</b>	<b>0</b>	<b>1.305.262.763</b>	<b>0%</b>	<b>16%</b>							
1	3	2	2.0 1		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase luas daerah genangan</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>8.220.488.400</b>	<b>10</b>	<b>157.894.000</b>	<b>10</b>	<b>1.147.368.763</b>	<b>20</b>	<b>1.305.262.763</b>	<b>133%</b>	<b>16%</b>							
1	3	2	2.0 1	1	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	Pintu Air	2	3.553.200.400	0	0	0	-	0	-	2000%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	2	2.0 1	2	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	Stasiun	1	467.953.000	0	0	50	206.912.000	50	206.912.000	5000%	44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	2	2.0 1	4	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yg dinormalisasikan	Km	15	3.101.995.000	5	14.000.000	60	494.250.388	65	508.250.388	433%	16%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	2	2.0 1	5	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				-		0		-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	3	2	2.0 1	5	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	%	100	1.097.340.000	5	143.894.000	70	446.206.375	75	590.100.375	75%	54%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	3	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Pelanggan yang Terlayani Kebutuhan Air Minum</b>	%	100	100.569.000	0	0	0				0			0%	0%	
1	3	3	2.0 1		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelanggan yang terlayani kebutuhan air minum</b>	%	100	100.569.000	0	0	0				0			0%	0%	
1	3	3	2.0 1	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen	Dok	1	100.569.000	0	0	10				10			1000%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase Rawan Banjir</b>	%	15	20.437.474.970	10	488.835.477	10				20			133%	16%	
1	3	6	2.0 1		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang drainase kondisi baik</b>	Km	194 33	20.437.474.970	10	488.835.477	50				60			0%	16%	
1	3	6	2.0 1	1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Doc	8	983.900.000		0	45				45			563%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.0 1	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yg dibangun	Km	15	16.857.278.960		0	62				62			413%	12%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.0 1	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				-							0			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.0 1	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				-							0			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.0 1	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi drainase yang dipelihara	Kecamatan	3	2.596.296.010	3	488.835.477	63				66			2200%	53%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.0 1	2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				-							0			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2.0 1	3	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				-							0			#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1					2	3	4	5		6		7			8	9	10	11	12
1	3	6	2.0 1	1 4	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan										0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan</b>	%	100	18.700.270.000	10	187.677.440	30	1.272.906.320		40	1.460.583.760	40%	8%	
1	3	8	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan</b>	%	100	18.700.270.000	10	187.677.440		1.272.906.320		10	1.460.583.760	10%	8%	
1	3	8	2.0 1	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Persentase jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	Pemohon	50	220.000.000	5	0	15	8.400.000		20	8.400.000	40%	4%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.0 1	2	Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	Gedung	5	18.480.270.000	5	187.677.440	45	1.264.506.320		50	1.452.183.760	1000%	8%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan</b>	%	100	14.144.804.350	10	1.299.367.700	80	4.858.208.350		90	6.157.576.050	90%	44%	
1	3	9	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan</b>	%	100	14.144.804.350	10	1.299.367.700		4.858.208.350		10	6.157.576.050	10%	44%	
1	3	9	2.0 1	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	Lokasi	30	14.144.804.350	10	1.299.367.700	80	4.858.208.350		90	6.157.576.050	300%	44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab</b>	%	95	49.091.985.111	40	141.550.000	60	12.132.830.208		100	12.274.380.208	105%	25%	
1	3	10	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap</b>	%	95	49.091.985.111	40	141.550.000	60	12.132.830.208		100	12.274.380.208	105%	25%	

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	Doc	10	1.041.582.800	5	0	50	87.723.116				55	87.723.116	550%	8%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	Hektar	5	2.537.942.130	0	0	0	-				0	-	0%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen	Doc	2	403.547.400	0	0	50	-				50	-	2500%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yg dibangun	Meter	1000	18.500.370.600	5	0	60	4.511.713.393				65	4.511.713.393	7%	24%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jumlah ruas yang dilebarkan	Ruas	6	-	0	0	40	-				40	-	667%	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah ruas yang ditambah lajunya	Ruas	1	4.564.571.000	0	0	40	1.452.641.056				40	1.452.641.056	4000%	32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan				-	0	0		-				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km	6	13.831.315.981	0	0	50	4.392.580.165				50	4.392.580.165	833%	32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	Ruas	28	5.353.735.200	10	141.550.000	85	1.580.796.172				95	1.722.346.172	339%	32%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Jembatan	1	2.631.800.000	0	0	20	6.940.302				20	6.940.302	2000%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan				-	0	0		-				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	Jembatan	10	227.120.000	5	0	50	100.436.004				55	100.436.004	550%	44%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>540.000.000</b>	<b>5</b>	<b>12.964.800</b>	<b>20</b>	<b>43.207.300</b>				<b>25</b>	<b>56.172.100</b>	<b>26%</b>	<b>10%</b>	
1	3	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat</b>	<b>Orang</b>	<b>200</b>	<b>270.000.000</b>	<b>5</b>	<b>12.964.800</b>	<b>20</b>	<b>20.807.300</b>				<b>25</b>	<b>33.772.100</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
1	3	1	2.0	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta	Orang	200	270.000.000	5	12.964.800	10	20.807.300				15	33.772.100	8%	13%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0		<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>Jumlah rekomendasi IUJK</b>	<b>Orang</b>	<b>200</b>	<b>270.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>22.400.000</b>				<b>20</b>	<b>22.400.000</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	
1	3	1	2.0	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	BUJK	50	270.000.000	0	0	20	22.400.000				20	22.400.000	40%	8%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Ketaatan Terhadap RT/RW</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.571.376.640</b>	<b>10</b>	<b>56.122.032</b>	<b>50</b>	<b>121.813.638</b>				<b>60</b>	<b>177.935.670</b>	<b>60%</b>	<b>11%</b>	
1	3	1	2.0		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen tata ruang yang ditetapkan</b>	<b>Doc</b>	<b>1</b>	<b>973.210.320</b>	<b>0</b>	<b>23.786.730</b>	<b>40</b>	<b>51.263.498</b>				<b>40</b>	<b>75.050.228</b>	<b>4000%</b>	<b>8%</b>	
1	3	1	2.0	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	1	179.500.000	0	0	50	13.179.649				50	13.179.649	5000%	7%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Doc	1	713.710.320	0	23.786.730	40	38.083.849				40	61.870.579	4000%	9%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah di bidang penataan ruang	Kali	3	80.000.000	0	0	10	-				10	-	333%	0%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2.0		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen Pemanfaatan ruang</b>	<b>Doc</b>	<b>1</b>	<b>261.680.160</b>	<b>0</b>	<b>16.697.970</b>	<b>50</b>	<b>36.862.860</b>				<b>50</b>	<b>53.560.830</b>	<b>5000%</b>	<b>20%</b>	
1	3	1	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	%	100	261.680.160	0	16.697.970	50	36.862.860				50	53.560.830	50%	20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
					Investasi dan Pembangunan Daerah																
1	3	1 2	2.0 4		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>Doc</b>	1	336.486.160	0	15.637.33 2	80	33.687.280				80	49.324.612	8000%	15%	
1	3	1 2	2.0 4	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	%	100	336.486.160	0	15.637.332	80	33.687.280				80	49.324.612	80%	15%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>																
1	4	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase Pengembangan Perumahan</b>	<b>%</b>	100	2.588.721.960	33	914.786.1 62	60	1.099.901.720				60	1.099.901.7 20	60%	42%	
1	4	2	2.0 1		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan</b>	<b>Doc</b>	1	261.850.000	0	4.845.000	1	36.270.000				1	36.270.000	100%	14%	
1	4	2	2.0 1	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	Doc	1	261.850.000	0	4.845.000	1	36.270.000				1	41.115.000	100%	16%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.0 3		<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program</b>	<b>Lokasi</b>	1	1.180.121.960	0	126.933.7 00	1	256.604.258				1	256.604.25 8	100%	22%	
1	4	2	2.0 3	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	Lokasi	1	1.180.121.960	0	126.933.70 0	1	256.604.258				1	256.604.258	100%	22%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.0 5		<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>Persentase pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus</b>	<b>%</b>	100	1.146.750.000	70	783.007.4 62	80	807.027.462				80	807.027.46 2	80%	70%	

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
1	4	2	2.0 5	1	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase fasilitas pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	%	100	1.146.750.000	70	783.007.46 2	80	807.027.462					150	807.027.462	150%	70%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh</b>	%	<b>99</b>	<b>5.455.307.560</b>	<b>0</b>	<b>63.438.50 0</b>	<b>0</b>	<b>2.137.870.400</b>					<b>0</b>	<b>2.137.870.4 00</b>	<b>0%</b>	<b>39%</b>	
1	4	3	2.0 2		<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani</b>	%	<b>5</b>	<b>101.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1975000</b>					<b>1</b>	<b>1.975.000</b>	<b>20%</b>	<b>2%</b>	
1	4	3	2.0 2	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Doc	1	101.150.000	0	0	1	1975000					1	1.975.000	100%	2%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.0 3		<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani</b>	%	<b>0,5</b>	<b>5.354.157.560</b>	<b>0</b>	<b>63.438.50 0</b>	<b>0</b>	<b>2.135.895.400</b>					<b>0</b>	<b>2.135.895.4 00</b>	<b>0%</b>	<b>40%</b>	
1	4	3	2.0 3	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemukaran Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen kajian/perencanaan	Doc	3	206.190.000	1	6.965.000	1	91.148.000					2	91.148.000	67%	44%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase RTLH yang dilakukan perbaikan yang sesuai kriteria	%	100	1.458.500.000	5	15.034.500	70	1.247.465.400					75	1.247.465.4 00	75%	86%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.0 3	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Lokasi	3	3.689.467.560	1	41.439.000	40	797.282.000					41	797.282.000	1367%	22%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	%	<b>100</b>	<b>21.835.861.150</b>	<b>25</b>	<b>2.634.238. 020</b>	<b>35</b>	<b>6.307.733.970</b>					<b>60</b>	<b>6.307.733.9 70</b>	<b>60%</b>	<b>29%</b>	
1	4	5	2.0 1		<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai</b>	%	<b>100</b>	<b>21.835.861.150</b>	<b>25</b>	<b>2.634.238. 020</b>	<b>35</b>	<b>6.307.733.970</b>					<b>60</b>	<b>6.307.733.9 70</b>	<b>60%</b>	<b>29%</b>	

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	4	5	2.0 1	2	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi prasaranasarana dan utilitas umum yang disediakan	Lokasi	3	21.835.861.150	3	2.634.238.020	3	6.307.733.970				6	6.307.733.970	200%	29%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>																					
1	5	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Kasus K3 (Ketertiban Ketentraman Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota</b>	%	97	4.208.385.000	16	843.758.250	42	1.774.721.250				58	2.618.479.500	60%	62%	
1	5	2	2.0 1		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan</b>	%	96	3.852.716.640	16	730.788.700	40	1.533.820.100				56	2.264.608.800	58%	59%	
1	5	2	2.0 1	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	%	100	1.434.120.960	19	301.078.900	41	583.203.300				60	884.282.200	60%	62%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.0 1	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	%	97	725.110.520	7	92.311.800	43	314.620.700				50	406.932.500	52%	56%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.0 1	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan	%	90	152.772.000	11	17.150.000	24	35.934.500				35	53.084.500	39%	35%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1					2	3	4	5			6			7			8			9	10	11	12	
						Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
1	5	2	2.0 1	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	%	92	1.215.613.080	18	230.785.000	39	474.518.600							57	705.303.600	62%	58%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.0 1	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Yang Berkompeten	%	80	325.100.080	25	89.463.000	39	125.543.000							64	215.006.000	80%	66%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.0 2		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	%	100	355.668.360	22	112.969.550	68	240.901.150							90	353.870.700	90%	99%	
1	5	2	2.0 2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	%	100	90.655.400	25	41.372.050	57	52.097.400							82	93.469.450	82%	103%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.0 2	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	%	100	265.012.960	21	71.597.500	71	188.803.750							92	260.401.250	92%	98%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.0 3		<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Berkompeten</b>	%	100	-	0	0	0	0							0	-	0%	0	
1	5	2	2.0 3	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase PPNS Yang Berkompeten	%	100	-	0	0	0	0							0	-	0%	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	3			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Korban Bencana yang Ditangani</b>	%	100	1.530.291.000	45,83	360.220.076	17,5	184.145.000							63	544.365.076	63%	36%	

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
1	5	3	2.0 1		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	%	100	154.467.000	0	0	15	15.945.000				15	15.945.000	15%	10%	
1	5	3	2.0 1	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	%	100	50.000.000	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 1	2	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	%	100	104.467.000	0	0	30	15.945.000				30	15.945.000	30%	15%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 2		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	%	100	1.303.739.000	62,5	329.417.500	37,5	168.200.000				100	497.617.500	100%	38%	
1	5	3	2.0 2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparat dan penduduk yang ikut pelatihan	%	100	131.718.000	50	56.863.000	50	0				100	56.863.000	100%	43%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	%	100	60.021.000	100	59.764.500	0	0				100	59.764.500	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 2	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	%	100	50.000.000	0	0	100	20.000.000				100	20.000.000	100%	40%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	%	100	1.062.000.000	100	212.790.000	0	148.200.000				100	360.990.000	100%	34%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.0 3		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	%	100	72.085.000	75	30.802.576	0	0				75	30.802.576	75%	43%	
1	5	3	2.0 3	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	%	100	72.085.000	75	30.802.576	0	0				75	30.802.576	75%	43%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4			<b>PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>	%	100	1.005.488.000	11	140.638.000	30	298.289.000				41	438.927.000	41%	44%	

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					<b>PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>																	
1	5	4	2.0 1		<b>Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penanganan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100	1.003.267.840	11	140.638.000	30	298.289.000					41	438.927.000	41%	44%	
1	5	4	2.0 1	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	%	80	862.836.040	13	118.726.000	30	257.021.000					43	375.747.000	54%	44%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.0 1	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100	140.431.800	7	21.912.000	29	41.268.000					36	63.180.000	36%	45%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.0 2		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran</b>	%	90	2.220.160	0	0	0	0					0	-	0%	0%	
1	5	4	2.0 2	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Didata	%	100	2.220.160	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>																	
1	6	2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial</b>	%	91	3.846.611.695	0	114.744.300	0	272.100.160					0	386.844.460	0%	10%	
1	6	2	2.0 3		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase PSKS yang dibina</b>	%	91	3.846.611.695	0	114.744.300	0	272.100.160					0	386.844.460	0%	10%	
1	6	2	2.0 3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	Orang	135	288.333.700	35	29.717.500	135	140.043.710					170	169.761.210	126%	59%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.0 3	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	80	77.014.000	77	6.480.500	92	6.744.600					169	13.225.100	211%	17%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5			6			7			8			9	10	11	12	
					Kewenangan Kabupaten/Kota																			
1	6	2	2.0 3	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Lembaga	1	321.677.500	0	2.327.050	0	3.141.350				0	5.468.400	0%	2%				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2.0 3	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	Lembaga	5	3.159.586.495	5	76.219.250	5	122.170.500				10	198.389.750	200%	6%				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial</b>	%	19	1.742.901.123	0	88.851.350		135.636.750				0	224.488.100	0%	13%				
1	6	4	2.0 1		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Prosentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tertangani</b>	%	100	1.295.044.666	0	38.159.000		67.394.000				0	105.553.000	0%	8%				
1	6	4	2.0 1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan pangannya	Orang	160	213.655.500	30	25.509.000	70	43.104.000				100	68.613.000	63%	32%				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	50	50.505.771	0	-	24	2.880.000				24	2.880.000	48%	6%				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.0 1	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang	Orang	10	44.173.250	0	-	0	-				0	-	0%	0%				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
						mendapatkan alat bantu															
1	6	4	2.0	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	42.300.000	0	-	1	680.000				1	680.000	7%	2%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.0	5	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik mental spiritual dan sosial	Orang	60	66.700.000	0	-	1	700.000				1	700.000	2%	1%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.0	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	Orang	286	745.285.475	14	7.970.000	15	12.420.000				29	20.390.000	10%	3%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.0	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	Orang	40	132.424.670	5	4.680.000	6	7.610.000				11	12.290.000	28%	9%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2.0	2	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani</b>	%	100	447.856.457	0	50.692.350		68.242.750				0	118.935.100	0%	27%	



1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
1	6	4	2.0 2	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	Orang	15	199.014.605	7	13.980.000	11					18	35.580.000	120%	18%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
													21.600.000									
1	6	4	2.0 2	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	Orang	150	89.275.500	145	14.879.250	180					325	36.177.000	217%	41%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
													21.297.750									
1	6	4	2.0 2	4	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	Orang	105	20.646.890	20	3.961.600	20					40	7.251.600	38%	35%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
													3.290.000									
1	6	4	2.0 2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu	Orang	7	10.400.830	0	-	0					0	-	0%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4	2.0 2	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan perbekalan kesehatan	Orang	20	7.971.592	10	3.413.500	0					10	7.418.500	50%	93%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
													4.005.000									
1	6	4	2.0 2	7	Pemberian Bimbingan Fisik	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	132	102.347.040	126	12.300.000	149					275	30.350.000	208%	30%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan	
													18.050.000									

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					Mental Spiritual dan Sosial	(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik mental spiritual dan sosial															Perlindungan Anak
1	6	4	2.0 2	1 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	18.200.000	1	2.158.000	0	-				1	2.158.000	10%	12%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	%	90	11.313.296.100	0	834.230.000		4.038.967.200				0	4.873.197.200	0%	43%	
1	6	5	2.0 1		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>Prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial</b>	%	90	7.840.000	0	200.000		100.000				0	300.000	0%	4%	
1	6	5	2.0 1	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	Orang	24	3.600.000	3	150.000	3	100.000				6	250.000	25%	7%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.0 1	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Orang	24	4.040.000	2	50.000	2	-				4	50.000	17%	1%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.0 1	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Orang	24	200	0	-	0	-				0	-	0%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2.0 2		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	%	100	11.305.456.100	0	834.030.000		4.038.867.200				0	4.872.897.200	0%	43%	
1	6	5	2.0 2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang di data	Orang	1404 2	1.231.132.150	2468 5	174.063.00 0	2468 5	69.111.400				4937 0	243.174.400	352%	20%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	6	5	2.0 2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan verval DTKS	Kelurahan	27	851.783.150	0	-	27				27	208.785.000	100%	25%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	2.0 2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	KK	3900	9.120.538.000	641	659.967.000	3707				4348	4.420.937.800	111%	48%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	5	2.0 2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan pengembangan ekonomi	KUBE	10	102.002.800	0	-	0				0	-	0%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	6			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana</b>	%	100	766.036.250	0	63.654.400					0	156.030.400	0%	20%		
1	6	6	2.0 1		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase korban bencana yang mendapat bantuan</b>	%	100	161.799.100	0	15.264.400					0	16.584.400	0%	10%		
1	6	6	2.0 1	1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	Orang	3300	40.269.900	125	14.764.400	5				130	16.084.400	4%	40%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	6	2.0 1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	Orang	1000	15.178.000	0	-	0				0	-	0%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	6	2.0 1	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan psikososial	Orang	300	106.351.200	10	500.000	0				10	500.000	3%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	6	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase kelurahan yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana</b>	%	100	604.237.150	0	48.390.000					0	139.446.000	0%	23%		
1	6	6	2.0 2	1	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	Orang	60	130.627.400	0	-	60				60	18.986.000	100%	15%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	6	6	2.0 2	2	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	Orang	26	473.609.750	26	48.390.000	26	72.070.000				52	120.460.000	200%	25%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik</b>	%	100	186.106.080	0	23.498.420		17.976.200				0	41.474.620	0%	22%	
1	6	7	2.0 1		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan</b>	%	100	186.106.080	0	23.498.420		17.976.200				0	41.474.620	0%	22%	
1	6	7	2.0 1	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	Paket	1	186.106.080	1	23.498.420	1	17.976.200				2	41.474.620	200%	22%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																					
<b>2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>																					
2	7	3			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Prosentase Pencari Kerja yang Dilatih</b>	%	23	862.016.290	0	314.969.950	0	218.979.525				0	533.949.475	0%	62%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.0 1		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>tersedianya peserta pelatihan yang berkompeten</b>	Orang	220	812.016.290	0	307.602.550	0	211.212.125				0	518.814.675	0%	64%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.0 1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang berkompeten bagi pencari kerja dan wirausaha baru	Orang	220	812.016.290	61	307.602.550	18	211.212.125				79	518.814.675	36%	64%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.0 2		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>Prosentase LPTKS yang terakreditasi</b>	%	20	50.000.000	0	7.367.400	0	7.767.400				0	15.134.800	0%	30%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3	2.0 2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	Pembinaan	4	50.000.000	1	7.367.400	1	7.767.400				2	15.134.800	50%	30%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan</b>	%	79	545.866.522	0	26.271.000	50,63	193.771.305				51	220.042.305	64%	40%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1				2		3		4	5		6		7		8		9		10		11	12	
2	7	4	2.0 3		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan didalam Negeri maupun diLuar Negeri</b>	<b>Orang</b>	<b>225</b>	<b>545.866.522</b>	<b>229</b>	<b>26.271.000</b>	<b>12</b>	<b>193.771.305</b>				<b>241</b>	<b>220.042.305</b>	<b>107%</b>	<b>40%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>		
2	7	4	2.0 3	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersediannya aplikasidan data ketenagakerjaan yang aktual	Aplikasi & Doc	1	217.347.107	0	15.804.000	1	54.850.955				1	70.654.955	100%	33%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
2	7	4	2.0 3	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	Orang	175	128.245.575	180	10.467.000	89	138.920.350				269	149.387.350	154%	116%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
2	7	4	2.0 3	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	Orang	50	200.273.840	0	-	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
2	7	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Prosentase Penurunan Kasus - Kasus Perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>1.719.514.240</b>	<b>0</b>	<b>246.144.100</b>	<b>0</b>	<b>482.010.940</b>				<b>0</b>	<b>728.155.040</b>	<b>0%</b>	<b>42%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>		
2	7	5	2.0 1		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase perusahaan yang mengesahkan PP dan PKB</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>268.952.240</b>	<b>0</b>	<b>8.918.500</b>	<b>0</b>	<b>155.489.000</b>				<b>0</b>	<b>164.407.500</b>	<b>0%</b>	<b>61%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>		
2	7	5	2.0 1	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	Doc	15	47.615.000	0	-	2	0				2	-	13%	0%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
2	7	5	2.0 1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	Perusahaan	200	221.337.240	50	8.918.500	200	155.489.000				250	164.407.500	125%	74%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
2	7	5	2.0 2		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di</b>	<b>Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan</b>	<b>%</b>	<b>75</b>	<b>1.450.562.000</b>	<b>0</b>	<b>237.225.600</b>	<b>0</b>	<b>326.521.940</b>				<b>0</b>	<b>563.747.540</b>	<b>0%</b>	<b>39%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>		

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>																					
2	7	5	2.0 2	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	Kasus Terselesaikan	15	107.768.440	6	4.000.000	4	12.316.500					10	16.316.500	6 7 %	15 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
2	7	5	2.0 2	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan SIAGAKITA	Orang	4000	1.342.793.560	4262	233.225.600	745	314.205.440					50 07	547.431.040	1 2 5 %	41 %	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
<b>2</b>	<b>8</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																					
<b>2</b>	<b>8</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>																					
				<b>Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>846.501.000</b>	<b>0</b>	<b>60.345.850</b>	<b>195.676.350</b>	<b>0</b>	<b>256.022.200</b>	<b>0</b>	<b>30</b>											
				<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase program yang di ARG</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	<b>303.301.000</b>	<b>10</b>	<b>49.863.850</b>	<b>35.249.150</b>	<b>10</b>	<b>85.113.000</b>	<b>10</b>	<b>28</b>										
2	8	2	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen program yang di ARG	Doc	34	135.718.050	0	36.675.300	34	8.169.000					34	44.844.300	1 0 0 %	33 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor PUG	Orang	375	57.775.550	45	4.501.000	125	21.170.900					17 0	25.671.900	4 5 %	44 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.0 1	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	Orang	70	100.090.620	0	-	70	5.909.250					70	5.909.250	1 0 0 %	6 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

1				2		3		4	5		6		7		8				9		10		11	12	
2	8	2	2.0 1	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	Orang	75	9.716.780	80	8.687.550	80	-					16 0	8.687.550	2 1 3 %	89 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.0 2		<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase partisipasi perempuan pada lembaga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi</b>	%	12,5	173.850.000	0	10.482.000	13	57.361.500					13	67.843.500	1 0 0 %	39 %				
2	8	2	2.0 2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	Orang	180	67.100.000	90	10.482.000	90	18.552.600					18 0	29.034.600	1 0 0 %	43 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.0 2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik Hukum Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	Orang	116	106.750.000	0	-	116	38.808.900					11 6	38.808.900	1 0 0 %	36 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.0 3		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina</b>	%	50	369.350.000	0	-	50	103.065.700					50	103.065.700	1 0 0 %	28 %				
2	8	2	2.0 3	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	Lembaga	15	65.216.000	0	-	15	48.776.300					15	48.776.300	1 0 0 %	75 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	2	2.0 3	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Orang	80	102.046.150	0	-	40	12.635.250					40	12.635.250	5 0 %	12 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

1				2		3	4	5		6		7			8			9		10		11	12
2	8	2	2.0 3	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	Lembaga	32	202.087.850	0	-	32	41.654.150				32	41.654.150	1 0 0 %	21 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	3			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak</b>	<b>Nilai</b>	<b>0,00 3</b>	<b>250.155.865</b>	<b>0</b>	<b>55.621.77 5</b>	<b>32.097.000</b>				<b>0</b>	<b>87.718.775</b>	<b>0 %</b>	<b>35 %</b>				
2	8	3	2.0 1		<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>	<b>%</b>	<b>67,3 9</b>	<b>53.143.795</b>	<b>0</b>	<b>18.733.66 5</b>	<b>0</b>	<b>-</b>				<b>0</b>	<b>18.733.665</b>	<b>0 %</b>	<b>35 %</b>			
2	8	3	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten/kota	Orang	50	33.619.285	0	-	0	-				0	-	0 %	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	3	2.0 1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Orang	50	19.524.510	50	18.733.66 5	0	-				50	18.733.665	1 0 0 %	96 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	3	2.0 2		<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan</b>	<b>%</b>	<b>56</b>	<b>162.140.250</b>	<b>0</b>	<b>26.667.00 0</b>	<b>30.947.000</b>				<b>0</b>	<b>57.614.000</b>	<b>0 %</b>	<b>36 %</b>				
2	8	3	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Orang	40	162.140.250	0	26.667.00 0	40	30.947.000				40	57.614.000	1 0 0 %	36 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		



1				2		3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
2	8	3	2.0 3		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif</b>	%	100	34.871.820	0	10.221.110		1.150.000		0	11.371.110	0 %	33 %			
2	8	3	2.0 3	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	Klien	20	24.659.820	2	550.000	10	1.150.000			12	1.700.000	6 0 %	7%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	2.0 3	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Orang	30	10.212.000	30	9.671.110	30	-			60	9.671.110	2 0 0 %	95 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4			<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas</b>	%	10	836.784.054	0	180.874.700		113.067.250			0	293.941.950	0 %	35 %		
2	8	4	2.0 1		<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase peserta yang memahami kesetaraan gender dan hak anak</b>	%	80	191.270.900	80	89.444.400	80	30.826.500			16 0	120.270.900	2 0 0 %	63 %		
2	8	4	2.0 1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	Orang	111	56.247.400	192	49.774.200	192	-			38 4	49.774.200	3 4 6 %	88 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4	2.0 1	2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	RT	108	60.880.000	0	-	162	14.826.500			16 2	14.826.500	1 5 0 %	24 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1					2		3		4	5			6			7			8			9		10		11	12	
2	8	4	2.0 1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	Orang	81	74.143.500	192	39.670.200	192	16.000.000									384	55.670.200	474%	75%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	4	2.0 2		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase lembaga yang aktif dalam peningkatan kualitas keluarga dan hak anak</b>	%	100	457.573.954	100	88.924.550	100	75.359.250											200%	36%			
2	8	4	2.0 2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	Orang	100	20.950.000	192	20.949.900	192	-											384%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	4	2.0 2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Lembaga	14	97.510.000	0	-	14	447.000											14	447.000	100%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.0 2	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	Orang	102	339.113.954	0	67.974.650	102	74.912.250											102	142.886.900	100%	42%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2.0 3		<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan hak anak</b>	%	100	187.939.200	0	2.505.750	100	6.881.500												100%	5%		

1				2		3	4	5		6		7		8		9	10		11	12	
2	8	4	2.0 3	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	Orang	81	187.939.200	0	2.505.750	162	6.881.500				16 2	9.387.250	2 0 0 %	5%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Data Terpilah Gender dan Anak</b>	<b>Doc</b>	<b>1</b>	<b>229.549.120</b>	<b>0</b>	<b>25.623.45 0</b>		<b>30.387.400</b>				<b>0</b>	<b>56.010.850</b>	<b>0 %</b>	<b>24 %</b>	
2	8	5	2.0 1		<b>Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase pengumpulan data gender dan anak</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>229.549.120</b>	<b>0</b>	<b>25.623.45 0</b>		<b>30.387.400</b>				<b>0</b>	<b>56.010.850</b>	<b>0 %</b>	<b>24 %</b>	
2	8	5	2.0 1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	Orang	65	85.116.770	65	19.230.65 0	65	938.700				13 0	20.169.350	2 0 0 %	24 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2.0 1	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	Orang	65	144.432.350	0	6.392.800	65	29.448.700				65	35.841.500	1 0 0 %	25 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>%</b>	<b>125</b>	<b>409.276.685</b>	<b>0</b>	<b>24.940.89 5</b>		<b>34.034.895</b>				<b>0</b>	<b>58.975.790</b>	<b>0 %</b>	<b>14 %</b>	
2	8	6	2.0 1		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak</b>	<b>%</b>	<b>12,5 5</b>	<b>59.659.865</b>	<b>0</b>	<b>10.152.20 0</b>		<b>9.556.100</b>				<b>0</b>	<b>19.708.300</b>	<b>0 %</b>	<b>33 %</b>	
2	8	6	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	Orang	100	59.659.865	40	10.152.20 0		9.556.100				40	19.708.300	4 0 %	33 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1				2		3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
2	8	6	2.0 2	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak</b>	%	125 5	349.616.820	0	14.788.69 5	24.478.795		0	39.267.490	0 %	11 %				
2	8	6	2.0 2	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	Orang	105	93.427.695	0	-	0	-	0	0	-	0 %	0 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	6	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	Orang	67	116.036.705	67	11.588.69 5	67	19.678.795	13 4	31.267.490	2 0 0 %	27 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	6	2.0 2	3	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang tersedia	Doc	1	78.233.250	1	3.200.000	1	4.800.000	2	8.000.000	2 0 0 %	10 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	6	2.0 2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	Orang	90	61.919.170	0	-	0	-	0	-	0 %	0 %	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	8	7			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak</b>	Nilai	3	128.240.078	0	700.000	133.538.484		0	134.238.48 4	0 %	10 5%				
2	8	7	2.0 1		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase sekolah yang terlibat dalam perlindungan anak</b>	%	407 4	52.185.560	0	-	0	-	0	-	0 %	0 %				

1				2		3		4	5		6		7			8			9		10		11	12
2	8	7	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	Sekolah	30	52.185.560	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.0 2		<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan khusus</b>	%	48	54.881.439	0	700.000		133.538.484				0	134.238.484	0	24	5%			
2	8	7	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	Orang	10	3.850.000	2	700.000	5	1.150.000				7	1.850.000	7	0	48	%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	7	2.0 2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konvensi hak anak	Orang	40	51.031.439	0	-	0	132.388.484				0	132.388.484	0	25	9%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	8	7	2.0 3		<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak</b>	%	100	21.173.079	0	-	0	-				0	-	0	0	0%	0%		
2	8	7	2.0 3	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	Orang	60	21.173.079	0	-	0	-				0	-	0	0	0%	0%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
				Daerah Kabupaten/Kota																					
<b>2</b>	<b>9</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>																					
2	9	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Prosentase Angka Kecukupan Energi	%	100	1.040.105.000	0	21.996.000	50	277.774.445,00					50	299.770.445	50%	29%					
2	9	3	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	%	100	340.145.000	0	18.396.000	50	42.124.165,00					50	60.520.165	50%	18%					
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen (NBM Prognosa Kebutuhan Neraca Pangan Strategis)	Doc	3	22.704.000	1	12.746.000	0	3.470.900,00					1	16.216.900	33%	71%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
2	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kelompok	27	276.089.000	27	5.650.000	0	31.303.265,00					27	36.953.265	100%	13%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir tingkat eceran tingkat produsen rekapitulasi)	Doc	4	41.352.000	0	0	0	7.350.000,00					0	7.350.000	0%	18%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
2	9	3	2.04		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Angka Kecukupan Energi / AKE</b>	<b>kcal/ka pita</b>	<b>2100</b>	<b>699.960.000</b>	<b>2100</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2100</b>	<b>235.650.280,00</b>					<b>4200</b>	<b>239.250.280</b>	<b>200%</b>	<b>34%</b>				
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan	Doc	2	26.352.000	0	0	0	0,00					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			

1				2		3		4	5			6			7			8			9		10		11	12	
						Pangan dan Gizi (SKPG)																					
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kali	2	660.904.000	0	3.600.000	0	235.650.280,00					0	239.250.280	0%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun	Kali	1	12.704.000	0	0	0	0,00					0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
2	9	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji</b>	%	80	124.124.000	0	61.502.560		8.100.000,00					0	69.602.560	0%	56%						
2	9	5	2.01		<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar</b>	Kali	8	124.124.000	0	61.502.560		8.100.000,00					0	69.602.560	0%	56%						
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	Orang	200	68.572.000	27	10.452.630	0	8.100.000,00					27	18.552.630	14%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	Sampel	45	55.552.000	46	51.049.930		0,00					46	51.049.930	102%	92%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
2	10			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>																							
2	10	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>Persentase Pengelolaan Izin Lokasi</b>	%	100	347.501.600	5	7.642.600	8	12.035.600					13	12.035.600	13%	3%						
2	10	2	2.01		<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase pemberian izin lokasi</b>	%	100	347.501.600	5	7.642.600	8	12.035.600					13	12.035.600	13%	3%						
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan	%	100	347.501.600	5	7.642.600	8	12.035.600					13	12.035.600	13%	3%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					

1				2		3	4	5		6			7				8	9		10		11	12			
					Kemudahan Berusaha	penggunaan tanah sesuai ketentuan																				
2	1	4			<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	%	100	36.200.000	20	5.135.750	30	9.566.500				50	9.566.500	50%	26%						
2	1	4	2.0	1	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah</b>	%	100	36.200.000	20	5.135.750	30	9.566.500				50	9.566.500	50%	26%						
2	1	4	2.0	1	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa konflik perkara pertanahan yang tertangani	%	100	36.200.000	20	5.135.750	30	9.566.500				50	9.566.500	50%	26%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	1	1			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Presentase Penatagunaan Tanah</b>	%	100	15.849.480	15	9.701.500	50	9.701.500				65	9.701.500	65%	61%						
2	1	1	2.0	1	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah</b>	%	100	15.849.480	15	9.701.500	50	9.701.500				65	9.701.500	65%	61%						
2	1	1	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	%	100	15.849.480	15	9.701.500	50	9.701.500				65	9.701.500	65%	61%					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>																					
2	1	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia</b>	%	7179	402.087.000	69,23	41.256.700	0	6.110.000				69	47.366.700	1%	12%						
2	1	2	2.0	1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen yang disusun</b>	Doc	4	225.319.000	0	5.402.500	0	6.110.000				0	11.512.500	0%	5%						
2	1	2	2.0	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	1	225.319.000	0	5.402.500	0	6.110.000				0	11.512.500	0%	5%					Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	2	2.0	2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen yang disusun</b>	Doc	1	176.768.000	0	35.854.200	0	0				0	35.854.200	0%	20%						



1				2		3	4	5		6		7			8			9		10		11	12
2	1	2	2.0	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	Doc	1	176.768.000	0	35.854.200	0				0			35.854.200	0%	20%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu</b>	%	49	1.577.702.254	5	223.207.950	5				0	0	10	329.628.150	20%	21%		
2	1	3	2.0		<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut</b>	Kali	20	1.179.731.780	5	151.958.800	1						6	235.048.000	30%	20%		
2	1	3	2.0	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Kali	15	524.750.000	5	96.967.800	1						6	156.892.000	40%	30%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	3	2.0	2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	Kegiatan	3	654.981.780	1	54.991.000	1						2	78.156.000	67%	12%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	3	2.0		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran</b>	Paket	10	397.970.474	0	71.249.150	0						0	94.580.150	0%	24%		
2	1	3	2.0	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Kali	10	236.775.590	1	71.249.150	2						3	94.580.150	30%	40%	Dinas Lingkungan Hidup	

1					2		3	4	5		6			7			8			9	10		11	12
2	1	3	2.0	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan	Kegiatan	2	161.194.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	%	943	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	
2	1	4	2.0	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI lokal daerah	Jenis	332	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	
2	1	4	2.0	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen yang di susun	Doc	1	56.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	715	23.472.000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	-	1%	0%		
2	1	5	2.0	1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	Kegiatan	5	23.472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
2	1	5	2.0	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	Kegiatan	5	23.472.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	-	40%	0%	Dinas Lingkungan Hidup		
2	1	6			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN</b>	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	88,2	1.166.945.775	6	15.091.500	10	35.001.000	0	0	16	50.092.500	18%	4%					

1				2		3		4		5		6		7		8				9		10		11		12	
				<b>LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>																							
2	1	6	2.0	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan</b>		<b>Wajib Usaha</b>		4	1.166.945.775	0	15.091.500	2	35.001.000	0	0	2	50.092.500	50%	4%						
2	1	6	2.0	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan		Perusahaan		3	438.797.775	1	9.485.000	1	29.971.000			2	39.456.000	67%	9%	Dinas Lingkungan Hidup					
2	1	6	2.0	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan		Wajib Usaha		15	728.148.000	4	5.606.500	3	5.030.000			7	10.636.500	47%	1%	Dinas Lingkungan Hidup					
2	1	8		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		<b>Prosentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>		<b>%</b>		100	603.117.500	10	29.168.000	30	3.580.000	0	0	40	32.748.000	40%	5%						
2	1	8	2.0	<b>Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup</b>		<b>Kegiatan</b>		4	603.117.500	3	29.168.000	3	3.580.000	0	0	6	32.748.000	150%	5%						
2	1	8	2.0	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan lingkungan hidup		Kegiatan		4	603.117.500	2	29.168.000	0	3.580.000			2	32.748.000	50%	5%	Dinas Lingkungan Hidup					

1				2		3		4	5		6		7		8		9		10		11	12	
2	1	1	0		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	%	100	100.000.000	0	1.970.000	40	12.656.400				40	14.626.400	40%	15%			
2	1	1	2.0	1	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</b>	Kasus	10	100.000.000	0	1.970.000	2	12.656.400				2	14.626.400	20%	15%			
2	1	1	2.0	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kasus	10	60.000.000	0	1.970.000	2	12.656.400				2	14.626.400	20%	24%		Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	Kader	50	40.000.000	0	0	0					0	-	0%	0%		Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</b>	%	73	8.497.214.808	72,97	237.283.650	0,009	2.702.735.100				73	2.940.018.750	100%	35%			
2	1	1	2.0	1	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>jumlah sampah yang dikelola</b>	<b>Ton</b>	32350	8.246.382.300	10051	237.283.650	6758,7	2.702.735.100				16810	2.940.018.750	52%	36%			
2	1	1	2.0	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	Lokasi	2	234.400.000	1	2.205.000	0	1.942.500				1	4.147.500	50%	2%		Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2.0	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di	jumlah volume sampah yang masuk TPA	Ton	32280	1.890.169.600	7335	235.078.650	4933,3	183.740.200				12267,9	418.818.850	38%	22%		Dinas Lingkungan Hidup	

1				2		3		4	5			6			7			8			9		10		11	12	
				TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																							
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	Jenis	3	6.121.812.700	1	0	0	2.517.052.400					1	2.517.052.400	33%	41%					Dinas Lingkungan Hidup	
2	1	1	2.0	3	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta</b>	<b>Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>3</b>	<b>250.832.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>						
2	1	1	2.0	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	Kecamatan	3	250.832.508	0	0	0					0	-	0%	0%					Dinas Lingkungan Hidup		
2	1	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>																						
2	1	2			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan</b>	<b>%</b>	<b>84</b>	<b>233.627.050</b>	<b>93,72</b>	<b>13.820.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.820.000</b>					<b>94</b>	<b>27.640.000</b>	<b>112%</b>	<b>12%</b>					
2	1	2	2.0	1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	Orang	17000	233.627.050	2172	13.820.000	0	0	13.820.000					2172	27.640.000	13%	12%					
2	1	2	2.0	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekamana KTP EL	Data	2500	133.074.125	1028	7.020.000	1575	7.020.000					2603	14.040.000	104%	11%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	1	2	2.0	5	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	Doc	1000	100.552.925	1144	6.800.000	2453	6.800.000					3597	13.600.000	360%	14%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	1	2	3		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil</b>	<b>%</b>	<b>9425</b>	<b>402.719.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.890.000</b>					<b>0</b>	<b>47.890.000</b>	<b>0%</b>	<b>12%</b>						
2	1	2	2.0	3	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	Doc	1600	402.719.632	970	0	0	47.890.000					970	47.890.000	61%	12%						
2	1	2	2.0	1	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	Doc	1500	110.536.272	902	0	1658	23.100.000					2560	23.100.000	171%	21%				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
					Pelaporan Peristiwa Penting																				
2	1 2	3	2.0 1	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	Doc	100	292.183.360	68	0	92	24.790.000			16 0	24.790.000	1 6 0 0 %	8%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2	1 2	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Akurasi Database Kependudukan</b>	%	80	362.506.923	100	26.700.00 0	0	54.826.750			10 0	81.526.750	1 2 5 %	22%						
2	1 2	4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	%	77	362.506.923	19,9 8	26.700.00 0	0	54.826.750			20	81.526.750	2 6 %	22%						
2	1 2	4	2.0 1	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	Laporan	13	308.105.990	3	24.500.00 0	6	46.500.000			9	71.000.000	6 9 %	23%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2	1 2	4	2.0 1	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	Doc	10	54.400.933	13	2.200.000	16	8.326.750			29	10.526.750	2 9 0 0 %	19%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2	1 4			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>																					
2	1 4	2			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) &lt; 20 tahun</b>	%	≤ 47	520.081.430	0	100.746.2 50	0	275.994.587			0	376.740.83 7	# V A L U E!	72%						
2	1 4	2	2.0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase Sekolah SSK yang membuat PRP Kependudukan	%	100	21.621.200	0	3.501.000	0	31.954.600			0	35.455.600	0 %	16 4%						
2	1 4	2	2.0 1	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang telah membentuk RPP SSK	Sekolah	5	21.621.200	7	3.501.000	7	13.451.600			#R EF!	#REF!	# R E F!	#R EF!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					

1					2		3		4	5			6			7			8			9		10		11	12	
2	1	2	2.0	1	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	9		0	0	9	18.503.000				9	18.503.000	100%	#DI V/O!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	1	2	2.0	2	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pendataan Keluarga</b>	%	100	498.460.230	100	97.245.250	100	244.039.987				100	341.285.237	100%	68%								
2	1	2	2.0	2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kelurahan yang telah mendata semua keluarga dalam Pendataan Keluarga	Kelurahan	27	498.460.230	27	97.245.250	27	244.039.987				27	341.285.237	100%	68%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	1	2	2.0	3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	3			0	3	0				3	-			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	1	3			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Menurunnya Unmeet Need</b>	% <	8	2.806.958.000	0	97.479.600	8,8	172.816.800				0	270.296.400	0%	10%								
2	1	3	2.0	1	<b>Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</b>	%	100	340.290.000	100	29.681.600	100	44.892.800				100	74.574.400	100%	22%								
2	1	3	2.0	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	Organisasi	45	-	0	-	0	0				0	-	0%	#DI V/O!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	1	3	2.0	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Dokumen	1	-	0	-	0	0				0	-	0%	#DI V/O!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2	1	3	2.0	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	Jenis	4	120.042.000	4	0	4	20.640.000				4	20.640.000	100%	17%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

1				2		3		4	5			6			7			8			9	10		11	12	
					KIE Program KKBPK																	0%				
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	6	-	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangsa Kencana (BKB BKR PIK R UPPKS BKL IMP PKB PUS)	Kelompok	8	220.248.000	6	29.681.600	6	24.252.800	6	53.934.400	75%	24%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2	14	3	2.02		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Prosentase Kader yang Melakukan Updating Data</b>	%	100	129.600.000	100	-	100	30.000.000	200	30.000.000	200%	23%									
2	14	3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	3	-	0	-	0	0	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	Kader	148	129.600.000	148	0	150	30.000.000	150	30.000.000	101%	23%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
2	14	3	2.03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan</b>	<b>Menurunnya Angka Drop Out (Kurang Dari)</b>	%	19,5	2.184.956.000	1,82	34.192.000	10,13	73.937.300	10	108.129.300	52%	5%									



1				2		3	4	5		6		7		8		9	10		11	12	
					<b>Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>																
2	1 4	3	2.0 3	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	Faskes	22	51.766.000	7	200.000	17	750.000				17	950.000	7 7 %	2%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	3	2.0 3	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	Aseptor	651	1.224.894.000	321	33.992.00 0	727	69.569.600				72 7	103.561.600	1 1 2 %	8%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	3	2.0 3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	Paket	2	908.296.000	0	0	0	0				0	-	0 %	0%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	3	2.0 3	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	-	0	0	2	3.617.700				2	3.617.700	5 0 %	#DI V/ 0!	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	3	2.0 4		<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Persentase Poktan IMP dan Pokja Kampung KB yang Menerima Pembinaan Kesertaan ber KB</b>	%	100	152.112.000	66	33.606.00 0	100	23.986.700				10 0	57.592.700	1 0 0 %	38 %	
2	1 4	3	2.0 4	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Kegiatan	3	152.112.000	2	33.606.00 0	3	23.986.700				3	57.592.700	1 0 0 %	38 %	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 4	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN</b>	<b>Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB</b>	%	71	678.185.400	84,2	63.695.75 0	86,0 1	41.099.800				17 0	104.795.55 0	2 4 0 %	15 %	

1				2		3	4	5		6		7				8		9	10		11	12
				<b>KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>																		
2	14	4	2.01	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>Meningkatnya Angka Kepesertaan Sasaran dalam Kegiatan BKB</b>	%	61	678.185.400	0	63.695.750	24	41.099.800					24	104.795.550	39%	15%	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					0	0	0						0				
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	2	75.399.550	1	29.027.050	0						1	29.027.050	50%	38%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	54		0	0	54	25.200.000						25.200.000			
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKR BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kegiatan	3	602.785.850	0	34.668.700		15.899.800					0	50.568.500	0%	8%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
2	1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																					
2	1	5	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Perlengkapan Lalu Lintas</b>	%	88	9.181.049.000	0	558.434.424	40	1.398.948.312				40	1.957.382.736	45%	21%				
2	1	5	2	2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase terlaksanannya kebijakan</b>	%	100	50.000.000	0	0	0	0				0	-	0%	0%				
2	1	5	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi	%	100	50.000.000	0	0	0	0				0	-	0%	0%		Dinas Perhubungan	
2	1	5	2	2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik</b>	%	75	3.639.975.000	10	150.363.301	40	282.799.259				50	433.162.560	67%	12%				
2	1	5	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	%	100	1.490.575.000	0	39.400.000	70	39.400.000				70	78.800.000	70%	5%		Dinas Perhubungan	
2	1	5	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	persentase perlengkapan jalan yang dipelihara	%	100	2.149.400.000	1	110.963.301	70	243.399.259									Dinas Perhubungan	
2	1	5	2	2.03	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Presentasi fasilitas parkir yang memiliki ijin</b>	%	100	38.250.000	0	0	100	37.310.000				100	37.310.000	100%	98%				
2	1	5	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	persentase fasilitas terminal yang layak	%	100	38.250.000	0	0	100	37.310.000				100	37.310.000	100%	98%		Dinas Perhubungan	
2	1	5	2	2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Presentase fasilitas parkir yang memiliki ijin</b>	%	100	868.469.000	0	94.377.468	50	195.049.398				50	289.426.866	50%	33%				
2	1	5	2	2.04	1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha	Presentase pengurusan ijin	%	100	168.469.000	0	0	30	2.316.000				30	2.316.000	30%	1%		Dinas Perhubungan	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
					Terintegrasi secara Elektronik																				
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																				
2	15	2	2.05	2	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kendaraan Lulus Uji</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>745.480.000</b>	<b>0</b>	<b>49.974.860</b>	<b>50</b>	<b>102.659.395</b>			<b>50</b>	<b>152.634.255</b>	<b>50</b>	<b>20</b>						
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	%	100	155.550.000	0	0	0	0			0	-	0	0%						
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemohon yang paham	%	100	48.395.000	0	0	0	0			0	-	0	0%						
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	%	100	105.950.000	25	23.320.000	50	46.570.000			75	69.890.000	75	66						
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase laporan	%	100	435.585.000	10	26.654.860	50	56.089.395			60	82.744.255	60	19						
2	15	2	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>140.200.000</b>	<b>55</b>	<b>6.197.000</b>	<b>50</b>	<b>55.520.825</b>			<b>105</b>	<b>61.717.825</b>	<b>105</b>	<b>44</b>						
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen MRLL	Kegiatan	6	80.000.000	0	6.197.000	6	35.243.525			6	41.440.525	6	52						

1				2		3	4	5		6		7		8		9		10		11	12
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	%	100	60.200.000	0	0	35	20.277.300				35	20.277.300	35%	34%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07		<b>Peretujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pengurusan rekomendasi Andalalin</b>	%	<b>100</b>	<b>368.035.000</b>	<b>10</b>	<b>23.293.150</b>	<b>50</b>	<b>58.491.600</b>				<b>60</b>	<b>81.784.750</b>	<b>60%</b>	<b>22%</b>	
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase pemenuhan rekomendasi	%	100	368.035.000	10	23.293.150	50	58.491.600				60	81.784.750	60%	22%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08		<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah kegiatan keselamatan</b>	%	<b>100</b>	<b>1.495.880.000</b>	<b>3</b>	<b>121.361.266</b>	<b>60</b>	<b>389.511.831</b>				<b>63</b>	<b>510.873.097</b>	<b>63%</b>	<b>34%</b>	
2	15	2	2.08	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Peserta	%	100	60.000.000	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	persentase Jumlah kegiatan	%	100	1.386.880.000	10	121.361.266	60	366.192.731				70	487.553.997	70%	35%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	persentase Jumlah kegiatan	%	100	49.000.000	0	0	50	23.319.100				50	23.319.100	50%	48%	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan angkutan umum</b>	%	<b>100</b>	<b>1.834.760.000</b>	<b>30</b>	<b>112.867.379</b>	<b>60</b>	<b>277.606.004</b>				<b>90</b>	<b>390.473.383</b>	<b>90%</b>	<b>21%</b>	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	jumlah kendaraan yang melayani	Kendaraan	41	1.011.860.000	5	8.165.000	28	18.608.000				33	26.773.000	80%	3%	Dinas Perhubungan

1					2		3		4	5		6		7			8			9		10		11	12		
					dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan barang	Kendaraan	2E+05	822.900.000	567	104.702.379	11668	258.998.004							12235	363.700.383	5%	44%			Dinas Perhubungan	
2	16				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>																						
2	16	2			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik</b>	%	77	4.789.955.000	0	552.598.080	0	1.186.330.792							0	1.738.928.872	0%	36%				
2	16	2	2.01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah</b>	%	100	4.789.955.000	100	552.598.080	100	1.186.330.792							200	1.738.928.872	200%	36%				
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	Berita	1200	2.289.955.000	344	252.250.000	297	593.175.448							641	845.425.448	53%	37%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	Media	5	1.500.000.000	5	184.522.080	5	351.371.124							10	535.893.204	200%	36%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	%	100	250.000.000	100	34.495.000	100	41.133.795							200	75.628.795	200%	30%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	Kelompok	27	300.000.000	27	31.420.000	27	44.416.125							54	75.836.125	200%	25%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan	Paket	1	100.000.000	1	0	1	74.739.500							2	74.739.500	200%	75%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Tema Informasi	6	350.000.000	2	49.911.000	2	81.494.800							4	131.405.800	67%	38%			Dinas Komunikasi dan Informatika	

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
2	1	3			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo</b>	%	100	10.587.483.000	25	1.523.757.278	25	2.476.133.729				50	3.999.891.007	50%	38%						
2	1	3	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD pengguna domain.id</b>	%	100	5.100.000.000	25	796.112.672	25	1.185.154.242				50	1.981.266.914	50%	39%						
2	1	3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	Domain	238	100.000.000	238	19.714.000	238	0				476	19.714.000	200%	20%					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	Titik	1750	5.000.000.000	1550	776.398.672	1550	1.185.154.242				3100	1.961.552.914	177%	39%					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2.02		<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah</b>	%	100	5.487.483.000	25	727.644.606	25	1.290.979.487				50	2.018.624.093	50%	37%						
2	1	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	Paket	1	3.978.005.000	1	521.925.841	1	994.045.242				2	1.515.971.083	200%	38%					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	Titik	180	400.000.000	180	121.477.490	180	79.082.590				360	200.560.080	200%	50%					Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	1	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	7	460.000.000	1	25.841.275	2	120.651.655				3	146.492.930	43%	32%					Dinas Komunikasi dan Informatika	

1					2		3		4	5		6		7		8			9		10		11	12	
2	1	3	2.0	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	Paket	1	302.553.000	1	17.500.000	1	33.000.000					2	50.500.000	200%	17%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2	1	3	2.0	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase perangkat daerah yang mendukung smart city	%	100	100.000.000	100	11.400.000	100	18.200.000					20	29.600.000	200%	30%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2	1	3	2.0	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK	Komunitas	4	186.000.000	4	29.500.000	4	46.000.000					8	75.500.000	200%	41%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2	1	3	2.0	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	Unit	1	60.925.000	0	0	1	0					1	-	100%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>																							
2	1	5	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		<b>Presntase Koperasi Bersertifikat NIK</b>	<b>%</b>	<b>86,5</b>	<b>624.176.900</b>	<b>0</b>	<b>20.769.500</b>	<b>0</b>	<b>112.615.500</b>					<b>0</b>	<b>133.385.000</b>	<b>0%</b>	<b>21%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>				
2	1	5	2.0	1	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah koperasi bersertifikat NIK</b>	<b>Koperasi</b>	<b>135</b>	<b>624.176.900</b>	<b>11</b>	<b>20.769.500</b>	<b>0</b>	<b>112.615.500</b>					<b>11</b>	<b>133.385.000</b>	<b>8%</b>	<b>21%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>			
2	1	5	2.0	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang dibina	Koperasi	156	624.176.900	82	20.769.500	25	112.615.500					10	133.385.000	69%	21%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah			
2	1	6	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>		<b>Presentase Koperasi Aktif Dengan Omzet Meningkat</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>224.161.900</b>	<b>0</b>	<b>16.889.250</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>					<b>0</b>	<b>17.939.250</b>	<b>0%</b>	<b>8%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>				
2	1	6	2.0	1	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah koperasi yang meningkat omsetnya</b>	<b>Koperasi</b>	<b>50</b>	<b>224.161.900</b>	<b>47</b>	<b>16.889.250</b>	<b>47</b>	<b>1.050.000</b>					<b>94</b>	<b>17.939.250</b>	<b>188%</b>	<b>8%</b>	<b>Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah</b>			



1				2		3	4	5		6		7			8			9	10		11	12	
2	1	6	2.0	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina	Koperasi	156	224.161.900	82	16.889.250	25	1.050.000				10	17.939.250	6	9	8%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	1	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Presentase Usaha Mikro Terfasilitasi yang Beromset Naik</b>	%	7	310.000.000	0	108.514.000	0	22.172.300				0	130.686.300	0	42	42%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	1	8	2.0	1	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Mikro terfasilitasi beromset naik</b>	Orang	4	310.000.000	0	108.514.000	0	22.172.300				0	130.686.300	0	42	42%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	1	8	2.0	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Orang	50	310.000.000	46	108.514.000	31	22.172.300				77	130.686.300	1	5	42	42%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>																		
2	1	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal</b>	%	100	160.250.000	0	-	0	612.000				-	612.000	0	0	0%		
2	1	2	2.0	2	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah peta potensi investasi yang tersedia</b>	Paket	1	160.250.000	0	-	0	612.000				-	612.000	0	0	0%		
2	1	2	2.0	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	Doc	1	99.500.000	0	0	0	0				0	-	0	0	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	1	2	2.0	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	Paket	1	60.750.000	0	0	0	612.000				0	612.000	0	1	1%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

1				2		3		4	5		6		7			8			9		10		11	12	
2	1	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya</b>	<b>%</b>	<b>26</b>	<b>182.591.250</b>	<b>11</b>	<b>57.861.000</b>	<b>33</b>	<b>70.219.000</b>				<b>44</b>	<b>128.080.000</b>	<b>169%</b>	<b>70%</b>					
2	1	3	2.0		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah investor baru</b>	<b>Investor</b>	<b>20</b>	<b>182.591.250</b>	<b>8</b>	<b>57.861.000</b>	<b>10</b>	<b>70.219.000</b>				<b>18</b>	<b>128.080.000</b>	<b>90%</b>	<b>70%</b>					
2	1	3	2.0	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	Kegiatan	5	182.591.250	1	57.861.000	1	70219000				2	128.080.000	40%	70%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	1	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>344.410.640</b>	<b>96,5</b>	<b>44.021.248</b>	<b>99,2</b>	<b>139.485.693</b>				<b>196</b>	<b>183.506.941</b>	<b>230%</b>	<b>53%</b>					
2	1	4	2.0		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>jumlah pemohon izin</b>	<b>Izin</b>	<b>1600</b>	<b>344.410.640</b>	<b>1589</b>	<b>44.021.248</b>	<b>3012</b>	<b>139.485.693</b>				<b>4601</b>	<b>183.506.941</b>	<b>288%</b>	<b>53%</b>					
2	1	4	2.0	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	Orang	80	110.988.000	0	10.979.280	60	37.272.090				60	48.251.370	75%	43%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	1	4	2.0	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	persentase pemenuhan komitmen berusaha yang dievaluasi	%	15	175.484.000	2,1	23.370.158	6,96	85.607.793				9	108.977.951	60%	62%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
2	1	4	2.0	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Kali	45	57.938.640	8	9.671.810	17	16.605.810				25	26.277.620	56%	45%		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			



1				2		3		4	5			6		7			8			9		10		11	12			
				Terintegrasi secara Elektronik																								
2	1	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
2	1	9	2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>		Jumlah Prestasi Pemuda	orang	12	475.000.000	0	23.915.000	2	69.033.000					2	92.948.000	17%	20%							
2	1	9	2	2.01		Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	event	1	475.000.000	0	23.915.000	6	69.033.000					6	92.948.000	600%	20%						
2	1	9	2	2.01		8	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang	40	475.000.000	0	23.915.000	78	69.033.000					78	92.948.000	195%	20%			Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga		
2	1	9	3				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Jumlah Medali yang diraih di Bidang Olahraga	medali	35	2.734.615.445	0	2.996.362.085	5	538.096.550					5	3.534.458.635	14%	129%					
2	1	9	3	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras olahraga yang terfasilitasi	sarpras olahraga	3	1.203.197.370	1	261.460.585	45	476.123.550					46	737.584.135	1533%	61%					
2	1	9	3	2.01		3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	Sarpras Olahraga	3	1.203.197.370	1	261.460.585	1	476.123.550					2	737.584.135	67%	61%			Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga		

1				2		3		4	5		6		7		8			9		10		11	12	
2	19	3	2.02		<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan</b>	<b>event</b>	2	404.609.015	0	0	6	41.973.000				6	41.973.000	300%	10%				
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Event	1	404.609.015	0	0	1	41.973.000				1	41.973.000	100%	10%			Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	
2	19	3	2.04		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Jumlah cabang olahraga yang dibina</b>	<b>cabor</b>	10	1.000.000.000	10	2.700.000.000	6	0				16	2.700.000.000	160%	270%				
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang Olahraga	10	1.000.000.000	10	2.700.000.000		0				10	2.700.000.000	100%	270%			Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	
2	19	3	2.05		<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan</b>	<b>festival</b>	1	126.809.060	0	34.901.500	6	20.000.000				6	54.901.500	60%	43%				
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	Festival Olahraga	1	126.809.060	0	34.901.500	2	20.000.000				2	54.901.500	200%	43%			Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>																			
2	20	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>%</b>	100	500.000.000	25	36.862.000	25	24.601.000				50	61.463.000	50%	12%				
2	20	2	2.01		<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan</b>	<b>Doc</b>	1	500.000.000	1	36.862.000	1	24.601.000				2	61.463.000	200%	12%				
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	Doc	1	295.000.000	1	10.572.000	1	13.145.000				2	23.717.000	200%	8%			Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan	Jumlah Kegiatan	Paket	1	55.000.000	1	26.290.000		0				1	26.290.000	100%	48%			Dinas Komunikasi dan Informatika	

1				2		3	4	5		6		7		8			9	10		11	12
					Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata	Doc	1	150.000.000	0	0	1	11.456.000				1	11.456.000	100%	8%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>																					
2	21	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>350.000.000</b>	<b>100</b>	<b>9.152.500</b>		<b>104.972.750</b>				<b>100</b>	<b>114.125.250</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	JKS	2	350.000.000	2	9.152.500	2	104.972.750				4	114.125.250	200%	33%	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	OPD	34	50.000.000	0	0		17.998.000				0	17.998.000	0%	36%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita sandi yang diamankan	Berita	800	300.000.000	181	9.152.500	140	86.974.750				321	96.127.250	40%	32%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																					
2	22	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>6</b>	<b>1.259.314.150</b>	<b>0</b>	<b>75.127.500</b>	<b>88</b>	<b>234.980.725</b>				<b>88</b>	<b>310.108.225</b>	<b>1467%</b>	<b>25%</b>	
2	22	2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	budaya	8	1.259.314.150	0	75.127.500	44	234.980.725				44	310.108.225	50%	25%	

1				2		3		4	5			6			7			8			9		10		11	12	
2	2	2	2.0	1	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Obyek Pemajuan Budaya yang dimanfaatkan	Budaya	8	1.067.529.815	0	75.127.500	8	234.980.725				8	310.108.225	100%	29%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga						
2	2	2	2.0	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	Festival	1	191.784.335	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga						
2	2	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Jumlah SDM Lembaga dan Pranata yang Dibina</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>	<b>123.886.145</b>	<b>0</b>	<b>20.416.000</b>	<b>146</b>	<b>31.940.000</b>				<b>146</b>	<b>52.356.000</b>	<b>146%</b>	<b>42%</b>							
2	2	3	2.0	1	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelatihan yang diselenggarakan</b>	<b>pelatihan</b>	<b>2</b>	<b>123.886.145</b>	<b>0</b>	<b>20.416.000</b>	<b>2</b>	<b>31.940.000</b>				<b>2</b>	<b>52.356.000</b>	<b>200%</b>	<b>42%</b>							
2	2	3	2.0	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	Orang	20	123.886.145	0	20.416.000	146	31.940.000				146	52.356.000	730%	42%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga						
2	2	5			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>21</b>	<b>91.547.225</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2</b>	<b>46.225.000</b>				<b>2</b>	<b>48.225.000</b>	<b>100%</b>	<b>53%</b>							
2	2	5	2.0		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah cagar budaya yang dikembangkan</b>	<b>unit</b>	<b>20</b>	<b>91.547.225</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10</b>	<b>46.225.000</b>				<b>10</b>	<b>48.225.000</b>	<b>500%</b>	<b>53%</b>							
2	2	5	2.0	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	Unit	20	91.547.225	0	2.000.000	10	46.225.000				10	48.225.000	50%	53%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga						
2	2	3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>																						
2	2	2			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan</b>	<b>%</b>	<b>559</b>	<b>1.461.345.000</b>	<b>0</b>	<b>126.079.170</b>	<b>0</b>	<b>315.326.216</b>				<b>0</b>	<b>441.405.386</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>							
2	2	2	2.0	1	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>43</b>	<b>729.060.000</b>	<b>0</b>	<b>50.019.000</b>	<b>0</b>	<b>221.483.716</b>				<b>0</b>	<b>271.502.716</b>	<b>0%</b>	<b>37%</b>							

1				2		3		4	5		6		7		8		9		10		11	12	
2	2	2	2.0	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	Perpustakaan	72	506.386.000	0	50.019.000	0	76.023.016				0	126.042.016	0%	25%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	2	2	2.0	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	Eksemplar	3500	155.324.000	0	0	0	145.460.700				0	145.460.700	0%	94%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	2	2	2.0	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	Eksemplar	4100	67.350.000	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	2	2	2.0	2	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Masyarakat Gemar Membaca</b>	<b>Kali</b>	<b>20</b>	<b>732.285.000</b>	<b>2</b>	<b>76.060.170</b>	<b>0</b>	<b>93.842.500</b>				<b>2</b>	<b>169.902.670</b>	<b>10%</b>	<b>23%</b>			
2	2	2	2.0	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	2500	732.285.000	617	76.060.170	0	93.842.500				617	169.902.670	25%	23%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	2	3			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan</b>	<b>%</b>	<b>36</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.267.500</b>	<b>0</b>	<b>21.985.500</b>				<b>0</b>	<b>32.253.000</b>	<b>0%</b>	<b>32%</b>			
2	2	3	2.0	1	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan</b>	<b>Eksemplar</b>	<b>168</b>	<b>100.000.000</b>	<b>168</b>	<b>10.267.500</b>	<b>0</b>	<b>21.985.500</b>				<b>168</b>	<b>32.253.000</b>	<b>100%</b>	<b>32%</b>			
2	2	3	2.0	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	Kegiatan	4	100.000.000	1	10.267.500	0	21.985.500				1	32.253.000	25%	32%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	2	4			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>																		
2	2	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang</b>	<b>%</b>	<b>42</b>	<b>651.625.000</b>	<b>0</b>	<b>268.175.000</b>	<b>0</b>	<b>81.362.800</b>				<b>0</b>	<b>349.537.800</b>	<b>0%</b>	<b>54%</b>			



1				2		3		4	5		6		7		8				9		10		11	12			
						No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)																					
2	2	2	2.0	4	1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	%	28	342.140.000	107	146.825.000	0	49.797.800				10	196.622.800	3	8	2	57				
2	2	2	2.0	4	1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	Meter Linier	912	342.140.000	976	146.825.000	0	49.797.800				97	196.622.800	1	0	7	57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	2	2	2.0	4	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	Nomor Arsip	250	309.485.000	195	121.350.000	0	31.565.000				19	152.915.000	7	8	0	49				
2	2	2	2.0	4	2	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi diolah dipreservasi dan layanan akses arsip	Berkas	250	309.485.000	4888	121.350.000	0	31.565.000				48	152.915.000	1	9	5	49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2	2	3		4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara Pemerintah Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai	8,8	149.291.000	8,4	0	0	2.555.000				8	2.555.000	9	5		2				
2	2	3	2.0	4	1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	%	400	149.291.000	100	0	0	2.555.000				10	2.555.000	2	5		2				
2	2	3	2.0	4	1	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah	Jumlah arsip in aktif yang dinilai	Nomor Berkas	917	70.390.000	917	0	0	2.555.000				91	2.555.000	1	0	0	4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			

1				2		3		4	5			6			7			8			9		10		11	12	
				10 (sepuluh) Tahun																							
2	24	3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	Kali	1	78.901.000	1	0	0	0					1					-	100%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																											
<b>3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																											
3	25	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>Ton</b>	<b>280</b>	<b>344.650.000</b>	<b>0</b>	<b>24.123.450</b>	<b>176</b>	<b>58.353.405,00</b>					<b>176</b>					<b>82.476.855</b>	<b>63%</b>	<b>24%</b>		
3	25	4	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)</b>	<b>Orang</b>	<b>245</b>	<b>344.650.000</b>	<b>30</b>	<b>24.123.450</b>	<b>115</b>	<b>58.353.405,00</b>					<b>145</b>					<b>82.476.855</b>	<b>59%</b>	<b>24%</b>		
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	Unit/Tahun	2	148.550.000	0	0	0	20.946.000,00					0					20.946.000	0%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana yang tersedia	Paket	4	20.000.000	1	8.393.500	1	0,00					2					8.393.500	50%	42%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pembudidaya Ikan	Dokumen	3	176.100.000	0	15.729.950	0	37.407.405,00					0					53.137.355	0%	30%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	25	5			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA</b>	<b>Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>Ton</b>	<b>89</b>	<b>40.360.000</b>	<b>0</b>	<b>19.016.870</b>	<b>15,5</b>	<b>4.800.000,00</b>					<b>16</b>					<b>23.816.870</b>	<b>17%</b>	<b>59%</b>		

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
				<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																					
3	2	5	5	2.0	1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Orang	435	40.360.000	0	19.016.870	200	4.800.000,00				200	23.816.870	46%	59%				
3	2	5	5	2.0	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyuluhan Monitoring Perikanan Tangkap	Dokumen	2	40.360.000	0	19.016.870		4.800.000,00				0	23.816.870	0%	59%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	5	6			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Tingkat Konsumsi Ikan</b>	<b>Kg/Kapita/Tahun</b>	157	336.122.600	0	1.906.000		#####				0	164.268.570	0%	49%				
3	2	5	6	2.0	2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolahan dan pemasar ikan yang dibina	Orang	50	71.441.600	0	1.906.000	36	66.715.570,00				36	68.621.570	72%	96%				
3	2	5	6	2.0	2	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penyuluhan Pembinaan dan Monitoring Pengolahan dan Pemasar Ikan	Dokumen	3	71.441.600	0	1.906.000	0	66.715.570,00				0	68.621.570	0%	96%			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	5	6	2.0	3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri	Ton	24	264.681.000	0	0	18	95.647.000,00				18	95.647.000	75%	36%				

1				2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12	
				<b>Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>pengolahan ikan skala rumah tangga</b>																	
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	Ukm	10	264.681.000	0	0	18	95.647.000,00				18	95.647.000	180%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
<b>3</b>	<b>26</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>																		
3	26	2		<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi</b>	<b>Destinasi</b>	2	489.048.300	0	7.925.000	18	214.672.250					18	222.597.250	900%	46%		
3	26	2	2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola</b>	<b>destinasi</b>	2	489.048.300	0	7.925.000	15	214.672.250					15	222.597.250	750%	46%		
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	Lokasi	2	224.048.300	0	0	1	23.913.250					1	23.913.250	50%	11%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yg memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	2	265.000.000	0	7.925.000	2	190.759.000					2	198.684.000	100%	75%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	3		<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri</b>	<b>Event</b>	4	547.528.750	0	3.000.000	8	25.794.825					8	28.794.825	200%	5%		
3	26	3	2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah promosi pariwisata</b>	<b>Promosi</b>	2	547.528.750	0	3.000.000	15	25.794.825					15	28.794.825	750%	5%		
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	Promosi	2	547.528.750	0	3.000.000	3	25.794.825					3	28.794.825	150%	5%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

1				2		3	4	5		6		7				8		9	10	11	12	
3	2	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataaan	%	19	386.573.000	0	500.000	19	19.089.200				19	19.589.200	100%	5%		
3	2	5	2.0	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor pariwisata	%	18	386.573.000	0	500.000	8	19.089.200				8	19.589.200	44%	5%		
3	2	5	2.0	1	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	Event	1	386.573.000	0	500.000	10	19.089.200				10	19.589.200	1000%	5%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																	
3	2	2			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Efektifitas Sarana Pertanian	%	55	2.002.746.000	0	117.975.405		#####				0	299.895.024	0%	15%		
3	2	2	2.0	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	%	75	1.837.425.000	25	83.311.705		#####				25	218.323.205	33%	12%		
3	2	2	2.0	1	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah monitoring dan evaluasi pengawasan penggunaan sarana pertanian	Lokasi	39	342.895.000	15	0	5.850.000,00				15	5.850.000	38%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	2	2.0	1	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	Paket	2	1.494.530.000	1	83.311.705	#####				1	212.473.205	50%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	2	2.0	3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	%	75	165.321.000	5	34.663.700		46.908.119,00				5	81.571.819	7%	49%		
3	2	2	2.0	3	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi	Lokasi	12	165.321.000	8	34.663.700	0	46.908.119,00				8	81.571.819	67%	49%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1				2		3		4	5		6			7			8			9	10	11	12
3	2	3			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	%	50	541.200.000	0	0	0	12.070.000,00				0	12.070.000	0%	2%			
3	2	3	2.0		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun /rehabilitasi /dipelihara	%	25	541.200.000	0	0	0	12.070.000,00				0	12.070.000	0%	2%			
3	2	3	2.0	3	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT dibangun/direhab/d ipelihara	Unit	1	541.200.000	0	0	0	12.070.000,00				0	12.070.000	0%	2%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	2	4			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	10	252.100.700	0	65.824.755	6	6.228.400,00				6	72.053.155	60%	29%			
3	2	4	2.0		Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	%	80	193.374.900	34	51.570.755	134	0,00				168	51.570.755	210%	27%			
3	2	4	2.0	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	Ekor	2850	193.374.900	##	51.570.755	3827	0,00				4700	51.570.755	165%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	2	4	2.0		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	%	80	58.725.800	##	14.254.000	85	6.228.400,00				185	20.482.400	231%	35%			
3	2	4	2.0	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	Sampel	200	58.725.800	66	14.254.000	73	6.228.400,00				139	20.482.400	70%	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3	2	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Prosentase Lahan Aman Bencana Pertanian	%	72	198.236.000	0	800.000	0	33.150.400,00				0	33.950.400	0%	17%			
3	2	5	2.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	Ha/Tahun	1750	198.236.000	##	800.000	0	33.150.400,00				108	33.950.400	6%	17%			

1					2		3	4	5			6			7			8			9	10	11	12
3	2	5	2.0	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	Ha	10	198.236.000	0	800.000	7	33.150.400,00				7	33.950.400	70%	17%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
3	2	6			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Prosentase Kelompok Tani yang Memiliki Izin Usaha Pertanian</b>	%	10	50.000.000	0	7.249.300	0	9.380.450,00				0	16.629.750	0%	33%				
3	2	6	2.0	1	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten</b>	Jenis	2	50.000.000	0	7.249.300	0	9.380.450,00				0	16.629.750	0%	33%				
3	2	6	2.0	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Petani yang produksinya lolos uji layak mutu	Orang	4	50.000.000	0	7.249.300	0	9.380.450,00				0	16.629.750	0%	33%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
3	2	7			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih</b>	%	20	68.873.500	0	1.350.000		52.759.000,00				0	54.109.000	0%	79%				
3	2	7	2.0	1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah SDM Pertanian terlatih</b>	Orang	78	68.873.500	0	1.350.000	0	52.759.000,00				0	54.109.000	0%	79%				
3	2	7	2.0	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	Paket	1	16.500.000	0	0	1	14.602.500,00				1	14.602.500	100%	89%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
3	2	7	2.0	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	Jenis	1	52.373.500	0	1.350.000	0	38.156.500,00				0	39.506.500	0%	75%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
3	3	0			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																			
3	3	2			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>Prosentase Perusahaan yang Memperbarui Perijinan</b>	%	100	107.083.000	19	17.596.750	12	11.473.500				31	29.070.250	31%	27%				
3	3	2	2.0	1	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Prosentase ijin yang diterbitkan</b>	%	100	107.083.000	19	17.596.750	12	11.473.500				31	29.070.250	31%	27%				

1					2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12			
3	3	2	2.0	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Surat	75	107.083.000	14	17.596.750	9	11.473.500				23	29.070.250	31%	27%	Dinas Perdagangan
3	3	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Prosentase Pasar yang Dikelola Sarana Distribusinya</b>	%	100	5.202.899.418	25	1.008.066.450	25	899.998.685				50	1.908.065.135	50%	37%	
3	3	3	2.0		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Jumlah Pasar yang dikelola sarana distribusinya</b>	Pasar	17	1.275.495.040	17	210.144.700	17	255.952.450				17	466.097.150	100%	37%	
3	3	3	2.0	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar	3	213.350.000	1	81.147.000	1	60.322.600				2	141.469.600	67%	66%	Dinas Perdagangan
3	3	3	2.0	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	17	1.062.145.040	17	128.997.700	17	195.629.850				17	324.627.550	100%	31%	Dinas Perdagangan
3	3	3	2.0		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah Peningkatan omset Pasar Rakyat</b>	Rupiah	#### #	3.927.404.378	0	797.921.750	0	644.046.235				0	1.441.967.985	0%	37%	
3	3	3	2.0	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Promosi Pasar	Kali	2	670.330.383	2	70.172.550	0	97.195.235				2	167.367.785	100%	25%	Dinas Perdagangan
3	3	3	2.0	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	Orang	118	3.257.073.995	##	727.749.200	118	546.851.000				118	1.274.600.200	100%	39%	Dinas Perdagangan
3	3	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting</b>	%	100	77.500.800	0	4.477.500	33	8.414.000				33	12.891.500	33%	17%	



1					2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12			
3	30	4	2.02		<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan bahan pokok dan barang penting</b>	%	100	75.089.600	0	4.477.500	33	7.320.000					33	11.797.500	33%	16%	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	Kali	3	75.089.600	0	4.477.500	1	7.320.000					1	11.797.500	33%	16%	Dinas Perdagangan
3	30	4	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak</b>	%	100	2.411.200	0	0	50	1.094.000					50	1.094.000	50%	45%	
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan	Kali	2	2.411.200	0	0	1	1.094.000					1	1.094.000	50%	45%	Dinas Perdagangan
3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Prosentase UTTP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT</b>	%	100	216.946.035	40	23.118.505	26	27.600.000					66	50.718.505	66%	23%	
3	30	6	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi Legal berupa tera tera ulang dan pengawasannya</b>	Bulan	12	216.946.035	3	23.118.505	3	27.600.000					6	50.718.505	50%	23%	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang	Uttp	7000	204.753.055	##	23.118.505	1784	27.600.000					4585	50.718.505	66%	25%	Dinas Perdagangan
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	Lokasi	9	12.192.980	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan
3	30	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Jumlah Produk Perdagangan yang Dipromosikan</b>	Produk	15	243.973.850	0	0	0	0					0	-	0%	0%	

1					2		3	4	5		6			7				8	9	10	11	12
3	30	7	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah terlaksananya promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</b>	Kali	4	243.973.850	0	0	0	0				0	-	0%	0%		
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	Kali	4	135.387.400	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem Informasi baik baru dan pemeliharannya	Jenis	2	108.586.450	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
<b>3</b>	<b>31</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																	
3	31	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Prosentase tersedianya Dokumen Induk Perindustrian</b>	%	100	365.380.370	##	4.000.000	100	119.973.500				200	123.973.500	200%	34%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	31	2	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perindustrian</b>	Doc	2	365.380.370	2	4.000.000	2	119.973.500				4	123.973.500	200%	34%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi	IKM	20	84.269.040	0	-	29	17.050.350				29	17.050.350	145%	20%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	31	2	2.01	4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	IKM	40	55.713.160	0	-	20	16.471.000				20	16.471.000	50%	30%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	65	225.398.170	0	4.000.000	64	86.452.150				64	90.452.150	98%	40%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
3	31	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Prosentase IKM yang mengikuti Publikasi Produk</b>	%	128	497.103.295	4	126.530.430	4	54.100.000				8	180.630.430	7%	36%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	

1					2		3	4	5		6		7				8		9	10	11	12
3	3	4	2.0		Penyediaan Informasi Industri untuk Industri IUI IUPI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyebarluasan Informasi produk IKM	Kegiatan	4	497.103.295	1	126.530.430	1	54.100.000					2	180.630.430	50%	36%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	3	4	2.0	2	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	Kali Publikasi	4	497.103.295	1	126.530.430	1	54.100.000					2	180.630.430	50%	36%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
<b>3 3 2</b>																						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>																						
3	3	3			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	Prosentase Penduduk yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	%	20	14.850.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0%	0%			
3	3	3	2.0		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi penataan persebaran	Orang	100	14.850.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0%	0%			
3	3	3	2.0	5	Penyuluhan Transmigrasi	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	Kegiatan	1	14.850.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
<b>4</b>																						
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>4 1</b>																						
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																						
4	1	2			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	87	2.202.809.000	0	140.267.000	0	531.801.150					0	672.068.150	0%	31%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.0		Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	%	100	1.608.859.000	0	115.267.000	#	459.710.400					100	574.977.400	100%	36%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.0	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	Kali	10	1.283.369.000	0	87.117.000	5	345.082.400					5	432.199.400	50%	34%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.0	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen rupa bumi	Doc	2	89.650.000	0	0	2	87.150.000					2	87.150.000	100%	97%	Bagian Pemerintahan

1					2		3	4	5		6		7				8	9	10	11	12
4	1	2	2.0 1	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	Doc	5	235.840.000	0	28.150.000	5	106.278.000				5	134.428.000	100%	57%	Bagian Pemerintahan
4	1	2	2.0 2		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			15	<b>5.737.465.595</b>	2	<b>35.282.400</b>	6	<b>541.649.900</b>				8	<b>576.932.300</b>	<b>53%</b>	<b>10%</b>	<b>Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</b>
4	1	2	2.0 2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	Kegiatan	15	5.737.465.595	2	35.282.400	6	541.649.900				8	576.932.300	53%	10%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.0 3		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Produk hukum yang tersusun</b>	%	100	<b>745.173.260</b>	15	<b>994.000</b>		<b>278.354.000</b>				15	<b>279.348.000</b>	<b>15%</b>	<b>37%</b>	<b>Bagian Hukum</b>
4	1	2	2.0 3	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	Perda / Raperda	20	287.000.000	3	0	4	16.500.000				7	16.500.000	35%	6%	Bagian Hukum
4	1	2	2.0 3	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	Kegiatan	3	226.775.880	1	994.000	1	63.184.000				2	64.178.000	67%	28%	Bagian Hukum
4	1	2	2.0 3	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	Jenis	3	231.397.380	0	0	1	198.670.000				1	198.670.000	33%	86%	Bagian Hukum
4	1	2	2.0 4		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Prosentase Kerjasama yang difasilitasi</b>	%	100	<b>334.761.920</b>	0	<b>25.000.000</b>	#	<b>72.090.750</b>				10 0	<b>97.090.750</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>Bagian Pemerintahan</b>
4	1	2	2.0 4	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	Kali	5	334.761.920	0	25.000.000	4	72.090.750				4	97.090.750	80%	29%	Bagian Pemerintahan
4	1	3			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Skor</b>	<b>A</b>	<b>600.700.000</b>	20	<b>64.600.500</b>	0	<b>67.700.000</b>				20	<b>132.300.500</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>22%</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang</b>
4	1	3	2.0 1		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>			5	<b>571.000.000</b>	0	<b>26.380.000</b>	2	<b>79.328.000</b>				2	<b>105.708.000</b>	<b>40%</b>	<b>19%</b>	<b>Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</b>
4	1	3	2.0 1	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan	3	370.000.000	0	26.380.000	1	67.220.500				1	93.600.500	33%	25%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Kegiatan	2	201.000.000	0	0	1	12.107.500				1	12.107.500	50%	6%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	3	2.0 2		<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik</b>	%	100	<b>130.300.000</b>	##	<b>15.499.750</b>	#	<b>26.250.000</b>				20 0	<b>41.749.750</b>	<b>200%</b>	<b>32%</b>	<b>Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang</b>

1					2		3		4	5		6			7			8			9	10	11	12
							<b>keuangannya &gt;79% dari target</b>																	
4	1	3	2.0 2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Doc	1	28.500.000	0	0	0	-							0	-	0%	0%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.0 2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	Doc	12	101.800.000	3	15.499.750	3	26.250.000							6	41.749.750	50%	41%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.0 3		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa &gt;79% dari target</b>	%	100	470.400.000	25	49.100.750	#	41.450.000							50	90.550.750	50%	19%	<b>Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang</b>
4	1	3	2.0 3	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tender/seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	%	100	185.850.000	34	28.600.000	#	28.700.000							66	57.300.000	66%	31%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.0 3	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase tender/seleksi yang terumumkan di sistem LPSE	%	100	284.550.000	19	20.500.750	#	12.750.000							54	33.250.750	54%	12%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	3	2.0 4		<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>			100	295.000.000	5	14.094.000	#	93.139.675							35	107.233.675	35%	36%	<b>Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</b>
4	1	3	2.0 4	1	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	%	100	295.000.000	5	14.094.000	#	93.139.675							35	107.233.675	35%	36%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	2				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>																			
4	2	2			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD</b>	Skor	80	14.253.278.705	0	1.382.375.350	0	2.974.735.725							0	4.357.111.075	0%	28%	
4	2	2	2.0 1		<b>Pembentukan Peraturan Daerah</b>	<b>Persentase tercapainya fungsi</b>	%	100	5.359.600.820	7	490.569.000	#	1.665.604.905							34	2.156.173.905	34%	40%	



1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
5	1			PERENCANAAN																					
5	1	2		<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.131.764.925</b>	<b>25</b>	<b>367.872.376</b>	<b>25</b>	<b>247.044.551</b>					<b>50</b>	<b>614.916.927</b>	<b>50%</b>	<b>54%</b>					
5	1	2	2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Kota</b>	<b>Doc</b>	<b>3</b>	<b>926.218.925</b>	<b>1</b>	<b>352.614.776</b>	<b>1</b>	<b>209.291.801</b>					<b>2</b>	<b>561.906.577</b>	<b>67%</b>	<b>61%</b>					
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	Kali	1	134.009.600	1	122.319.992	0					1	122.319.992	100%	91%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	Kali	1	174.725.500	1	132.642.242	0					1	132.642.242	100%	76%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	Kali	1	254.344.350		79.130.272	1	162.517.951				1	241.648.223	100%	95%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	Doc	1	363.139.475	0	18.522.270	0	46.773.850				0	65.296.120	0%	18%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	1	2	2.03		<b>Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah</b>	<b>Doc</b>	<b>2</b>	<b>205.546.000</b>	<b>0</b>	<b>15.257.600</b>	<b>1</b>	<b>37.752.750</b>				<b>1</b>	<b>53.010.350</b>	<b>50%</b>	<b>26%</b>					
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	Doc	2	87.670.000	0	14.501.000	1	23.042.500				1	37.543.500	50%	43%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			
5	1	2	2.03	3	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	Doc	4	117.876.000	1	756.600	1	14.710.250				2	15.466.850	50%	13%		Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah			

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
5	1	3			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.452.524.960</b>	<b>25</b>	<b>79.274.750</b>	<b>25</b>	<b>126.126.550</b>				<b>50</b>	<b>128.485.300</b>	<b>50%</b>	<b>9%</b>	
5	1	3	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>	<b>Doc</b>	<b>1</b>	<b>337.508.320</b>	<b>0</b>	<b>23.198.000</b>	<b>0</b>	<b>34.993.050</b>				<b>0</b>	<b>58.191.050</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan	%	100	99.379.200	25	6.409.000	25	13.004.950				50	19.413.950	50%	20%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen	Doc	14	20.000.000		1.219.650		452.500				0	1.672.150	0%	8%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia	%	100	211.710.620	25	12.456.250	25	21.535.600				50	33.991.850	50%	16%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen	Doc	1	6.418.500	0	3.113.100	0	0				0	3.113.100	0%	49%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>	<b>Doc</b>	<b>1</b>	<b>473.363.520</b>	<b>0</b>	<b>29.643.000</b>	<b>0</b>	<b>54.363.000</b>				<b>0</b>	<b>7.090.000</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	



1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					<b>dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>																
5	1	3	2.0 2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	Doc	1	124.996.800	0	0	0	3227500				0	3.227.500	0%	3%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	Doc	1	348.366.720	0	0	0	3862500				0	3.862.500	0%	1%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2.0 3</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi</b>	<b>Doc</b>	<b>1</b>	<b>641.653.120</b>	<b>0</b>	<b>26.433.750</b>	<b>0</b>	<b>36.770.500</b>				<b>0</b>	<b>63.204.250</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	
5	1	3	2.0 3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	Doc	1	181.150.000	0	3.209.250	0	10.502.500				0	13.711.750	0%	8%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	Doc	1	324.963.360	0	2.892.750	0	0				0	2.892.750	0%	1%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0 3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang wilayah	Doc	1	98.521.000	0	15.173.250	0	20.258.750				0	35.432.000	0%	36%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1					2		3	4	5		6		7		8			9	10	11	12
5	1	3	2.0 3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	Doc	1	37.018.760	0	5.158.50 0	0	6.009.250				0	11.167.750	0%	30%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>5</b>					<b>2</b>		<b>KEUANGAN</b>														
5	2	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target</b>	%	100	118.293.428.40 9	##	308.330 .800	100	1.030.942.650				2 0 0	1.339.273.4 50	200%	1%	
5	2	2	2.0 1		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Pengesahan Perda APBD tepat waktu</b>	%	100	873.034.090	##	112.678 .800	100	116.050.000,00				2 0 0	228.728.80 0	200%	26%	
5	2	2	2.0 1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Doc	2	51.739.910	0	24.921.0 00	0	0,00				0	24.921.000	0%	48%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Doc	2	56.794.910	0	0	0	0,00				0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Doc	28	16.877.340	1	12.016.8 00	28	0,00				2 9	12.016.800	104%	71%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Doc	28	14.040.000	0	0	0	0,00				0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Doc	2	193.633.320	2	66.741.0 00	0	0,00				2	66.741.000	100%	34%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Doc	2	114.401.610	0	0	0	0,00				0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1					2		3		4	5		6		7			8			9	10	11	12
5	2	2	2.0 1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	Doc	3	425.547.000	0	9.000.00 0	1	116.050.000,00					1	125.050.000	33%	29%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Dengan Peraturan Perundangan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>47.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>13.290.000,00</b>					<b>0</b>	<b>13.290.000</b>	<b>0%</b>	<b>28%</b>		
5	2	2	2.0 2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Doc	55	41.950.000	0	0	25	12.270.000,00					2 5	12.270.000	45%	29%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0 2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Doc	3	5.100.000	0	0	3	1.020.000,00					3	1.020.000	100%	20%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2.0 3</b>		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.069.970.740</b>	<b>0</b>	<b>195.652 .000</b>		<b>220.915.250,00</b>					<b>0</b>	<b>416.567.25 0</b>	<b>0%</b>	<b>39%</b>		
5	2	2	2.0 3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Laporan	2	117.229.440	0	29.152.0 00	1	43.946.000,00					1	73.098.000	50%	62%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0 3	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Doc	2	57.500.000	0	0	1	22.380.000,00					1	22.380.000	50%	39%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0 3	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Doc	4	64.376.480	0	0	0	0,00					0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	600	830.864.820	##	166.500. 000	100	154.589.250,00					3 0 0	321.089.250	50%	39%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	

1				2		3	4	5		6		7		8		9	10	11	12	
5	2	2	2.0 4		<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya Laporan BTT</b>	%	100	116.303.373.579	##	0	100	680.687.400,00			200	680.687.400	200%	1%	
5	2	2	2.0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	12	116.303.373.579	3	0	3	680.687.400,00			6	680.687.400	50%	1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Pengelolaan Aset yang Dilindungi</b>	%	100	1.938.747.980	##	31.470.000		31.812.779,00			100	63.282.779	100%	3%	
5	2	3	2.0 1		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	Laporan	22	1.938.747.980	5	31.470.000	0	31.812.779,00			5	63.282.779	23%	3%	
5	2	3	2.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	96.592.000	0	28.750.000	0	14.067.779,00			0	42.817.779	0%	44%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	2	1.800.555.980	1	2.720.000	0	7.325.000,00			1	10.045.000	50%	1%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.0 1	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	18	41.600.000	4	-	0	10.420.000,00			4	10.420.000	22%	25%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah</b>	%	10	1.200.439.000	0	14.137.500	4	35.273.000			4	49.410.500	40%	4%	
5	2	4	2.0 1		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah</b>	%	100	1.200.439.000	0	14.137.500	0	35.273.000			0	49.410.500	0%	4%	
5	2	4	2.0 1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	dokumen	2	4.600.000	0	0	0	253.500			0	253.500	0%	6%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	dokumen	1	560.987.000	0	7.254.000	0	4.304.000			0	11.558.000	0%	2%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah subyek pajak dan wajib pajak daerah	dokumen	1	16.250.000	0	0	0	0			0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0 1	6	Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan pemeliharaan dan	dokumen	1	110.000.000	0	0	0	0			0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
							pelaporan basis data pajak daerah															
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	WP	4303	264.442.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	dokumen	1	50.000.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	Pajak	8923	48.847.000	0	4.608.000	####	29.415.500					### ### ###	34.023.500	72%	70%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	%	100	85.540.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	%	100	49.503.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	1	10.270.000	0	2.275.500	0	1.300.000					0	3.575.500	0%	35%	Badan Pendapatan Daerah
<b>5</b>	<b>3</b>				<b>KEPEGAWAIAN</b>																	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Skor</b>	<b>87,7</b>	<b>2.057.510.180</b>	<b>0</b>	<b>82.172.000</b>	<b>0</b>	<b>464.650.600</b>					<b>0</b>	<b>546.822.600</b>	<b>0%</b>	<b>27%</b>	
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Persentase Realisasi Pengadaan Pemberhentian dan Informasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.118.789.580</b>	<b>25</b>	<b>44.941.000</b>	<b>58</b>	<b>124.031.100</b>					<b>58</b>	<b>168.972.100</b>	<b>58%</b>	<b>15%</b>	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Dokumen	2	955.738.700	0	30.561.000	0	73.019.100					0	103.580.100	0%	11%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	212	53.940.000	50	950.000	115	23.900.000					165	24.850.000	78%	46%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1					2		3		4	5		6		7		8			9	10	11	12
5	3	2	2.0 1	1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	3000	109.110.880	##	13.430.000	####	27.112.000					# # #	40.542.000	78%	37%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>174.316.600</b>	<b>18</b>	<b>16.040.000</b>	<b>90</b>	<b>58.805.000</b>					<b>90</b>	<b>74.845.000</b>	<b>90%</b>	<b>43%</b>	
5	3	2	2.0 2	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	209	80.636.600	##	4.540.000	188	16.462.000					3 2 8	21.002.000	157%	26%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 2	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	455	93.680.000	4	11.500.000	276	42.343.000					2 8 0	53.843.000	62%	57%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.0 3</b>		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>694.904.000</b>	<b>49</b>	<b>14.790.000</b>	<b>63</b>	<b>265.830.000</b>					<b>63</b>	<b>280.620.000</b>	<b>63%</b>	<b>40%</b>	
5	3	2	2.0 3	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta	Peserta	280	409.266.000	##	14.790.000	177	247.010.000					3 1 4	261.800.000	112%	64%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 3	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	150	285.638.000	0	0	96	18.820.000					9 6	18.820.000	64%	7%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2.0 4</b>		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>69.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.401.000</b>	<b>65</b>	<b>15.984.500</b>					<b>65</b>	<b>22.385.500</b>	<b>65%</b>	<b>32%</b>	
5	3	2	2.0 4	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	14.391.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 4	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	1429	60.130.000	0	0	0	0					0	0	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0 4	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan	Peserta	60	69.500.000	27	6.401.000	39	15.984.500					6 6	22.385.500	110%	32%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
5	4			<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>															
5	4	2		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	14	4.169.393.630		403.301.495	22	1.440.725.983		22	1.844.027.478	158%	44%		
5	4	2	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	%	85	1.051.093.785	47	156.563.307	84	228.645.807		84	385.209.114	99%	37%		
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Peserta	277	1.051.093.785	##	156.563.307	233	228.645.807		408	385.209.114	147%	37%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	2.02		<b>Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	%	80	3.118.299.845	20	246.738.188	77	1.212.080.176		77	1.458.818.364	96%	47%	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan	Peserta	177	3.118.299.845	50	246.738.188	136	1.212.080.176		186	1.458.818.364	105%	47%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	5			<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
5	5	2		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100	708.337.517	25	11.888.450	25	40.664.000		50	66.850.950	50%	9%		
5	5	2	2.01		Penelitian dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	Doc	2	485.987.210		1.774.500		11.776.250		0	27.849.250	0%	6%	

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					<b>Pengkajian Peraturan</b>																	
5	5	2	2.0 1	2	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah dokumen penelitian/kajian	Doc	2	352.745.060	0	1.774.50 0	1	11.776.250					1	13.550.750	50%	4%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.0 1	1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen data kelitbangan	Doc	1	133.242.150	0	6.668.50 0	0	7.630.000					0	14.298.500	0%	11%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2.0 4</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah</b>	<b>Doc</b>	<b>1</b>	<b>222.350.307</b>		<b>10.113.950</b>		<b>28.887.750</b>					<b>0</b>	<b>39.001.700</b>	<b>0%</b>	<b>18%</b>	
5	5	2	2.0 4	1	Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Doc	4	222.350.307	0	10.113.9 50	1	28.887.750					1	39.001.700	25%	18%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
<b>6</b>																						
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																						
<b>6 1</b>																						
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>																						
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3</b>	<b>%</b>	<b>35</b>	<b>1.237.019.000</b>	<b>1</b>	<b>68.748.650</b>	<b>14</b>	<b>57.967.650</b>					<b>15</b>	<b>126.716.300</b>	<b>43%</b>	<b>10%</b>	
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Jumlah Laporan Kegiatan	Doc	29	<b>957.688.000</b>	<b>1</b>	<b>67.780.650</b>	<b>14</b>	<b>51.733.100</b>					<b>15</b>	<b>119.513.750</b>	<b>52%</b>	<b>12%</b>	
6	1	2	2.0 1	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	Doc	3	51.772.000	0	0	2	29.886.800					2	29.886.800	67%	58%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen hasil pengawasan	Doc	15	459.516.000	0	19.216.05 0	10	13.465.500					10	32.681.550	67%	7%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil reviu	Doc	4	24.507.000	0	11.976.40 0	2	2.961.000					2	14.937.400	50%	61%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	4	Reviu Laporan Keuangan	jumlah dokumen hasil reviu	Doc	3	402.728.000	1	36.588.20 0	0	0					1	36.588.200	33%	9%	Inspektorat Daerah
6	1	2	2.0 1	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monev	Doc	4	19.165.000	0	0	0	5.419.800					0	5.419.800	0%	28%	Inspektorat Daerah



1				2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
6	1	2	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	<b>279.331.000</b>	0	<b>968.000</b>	100	<b>6.234.550</b>				1 0 0	<b>7.202.550</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>	
6	1	2	2.0 2	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah dokumen hasil pengawasan	Doc	1	279.331.000	0	968.000	1	6.234.550				1	7.202.550	100%	3%	Inspektorat Daerah
6	1	3			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisduur Pengawasan yang Terpenuhi</b>	%	<b>100</b>	<b>1.138.997.000</b>	<b>37</b>	<b>170.431.550</b>	<b>25</b>	<b>165.493.900</b>				<b>6 2</b>	<b>335.925.450</b>	<b>62%</b>	<b>29%</b>	
6	1	3	2.0 1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	Jumlah dokumen kebijakan dan sisduur pengawasan yang disusun	Doc	2	<b>6.623.000</b>	<b>2</b>	<b>6.508.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>2</b>	<b>6.508.000</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	
6	1	3	2.0 1	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen dan sisduur pengawasan yang disusun	Doc	2	6.623.000	2	6.508.000	0	0				2	6.508.000	100%	98%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.0 2		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	Doc	6	<b>1.132.374.000</b>	<b>1</b>	<b>163.923.550</b>	<b>2</b>	<b>165.493.900</b>				<b>3</b>	<b>329.417.450</b>	<b>50%</b>	<b>29%</b>	
6	1	3	2.0 2	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	Doc	4	466.539.000	0	5.875.500	2	8.931.900				2	14.807.400	50%	3%	Inspektorat Daerah
6	1	3	2.0 2	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen monev dan verifikasi	Doc	2	665.835.000	1	158.048.050	0	156.562.000				1	314.610.050	50%	47%	Inspektorat Daerah
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																
7	1				<b>KECAMATAN MANGUHARJO</b>																
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Skor</b>	<b>92,1</b>	<b>7.189.758.228</b>	<b>0</b>	<b>1.489.697.289</b>	<b>0</b>	<b>1.166.763.137</b>				<b>0</b>	<b>2.656.460.426</b>	<b>0%</b>	<b>37%</b>	
7	1	2	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja</b>	<b>Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan</b>	%	<b>100</b>	<b>7.127.552.788</b>	<b>25</b>	<b>1.488.447.289</b>	<b>25</b>	<b>1.165.533.137</b>				<b>5 0</b>	<b>2.653.980.426</b>	<b>50%</b>	<b>37%</b>	

1					2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12			
					<b>Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>																	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Manguharjo)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	%	100	944.241.927	25	290.446.8 78	25	155.882.944					5 0	446.329.822	50%	47%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Sogaten)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	737.064.585	25	130.426.6 77	25	111.563.201					5 0	241.989.878	50%	33%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Patihan)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	680.050.833	25	155.455.2 50	25	93.875.186					5 0	249.330.436	50%	37%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Ngegong)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	721.326.580	25	127.246.9 40	25	124.225.277					5 0	251.472.217	50%	35%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Winongo)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	755.447.545	25	139.151.9 63	25	116.350.153					5 0	255.502.116	50%	34%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mandiun Lor)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	837.376.000	25	162.291.1 21	25	138.335.645					5 0	300.626.766	50%	36%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pangongangan)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	720.672.579	25	135.930.141	25	126.026.610					50	261.956.751	50%	36%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Nambangan Lor)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	905.300.000	25	192.186.406	25	172.841.521					50	365.027.927	50%	40%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Nambangan Kidul)	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	826.072.739	25	155.311.913	25	126.432.600					50	281.744.513	50%	34%	Kecamatan Manguharjo
7	1	2	2.0 3		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti</b>	%	<b>100</b>	<b>62.205.440</b>	<b>25</b>	<b>1.250.000</b>	<b>25</b>	<b>1.230.000</b>					<b>50</b>	<b>2.480.000</b>	<b>50%</b>	<b>4%</b>	
7	1	2	2.0 3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi/pertemuan	Kali	8	62.205.440	2	1.250.000	50	1.230.000					52	2.480.000	650%	4%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD</b>	<b>Usulan</b>	<b>18</b>	<b>2.644.100.425</b>	<b>0</b>	<b>435.500.400</b>	<b>0</b>	<b>766.687.747</b>					<b>0</b>	<b>1.202.188.147</b>	<b>0%</b>	<b>45%</b>	
7	1	3	2.0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan</b>	%	<b>100</b>	<b>2.644.100.425</b>	<b>25</b>	<b>435.500.400</b>	<b>25</b>	<b>766.687.747</b>					<b>50</b>	<b>1.202.188.147</b>	<b>50%</b>	<b>45%</b>	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	12	282.113.460	12	220.107.800	88	624.200					88	220.732.000	733%	78%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					Pembangunan di Kelurahan																	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Manguharjo)	Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	67.539.500	0	10.280.70 0	1,8	28.301.250					2	38.581.950	67%	57%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sogaten)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	322.785.800	0	-	2	180.490.000					2	180.490.000	67%	56%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Patihan)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	129.000.000	1	19.320.00 0	1,5	83.974.400					3	103.294.400	83%	80%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Ngegong)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	48.850.000	0	-	2	30.372.455					2	30.372.455	67%	62%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Winongo)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	48.106.905	0	-	2	27.712.500					2	27.712.500	67%	58%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Mandiun Lor)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	106.120.000	1	103.786.1 00	0	0					1	103.786.100	33%	98%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Pangongangan)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	51.939.800	0	-	2,5	47.601.000					3	47.601.000	83%	92%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Nambangan Lor)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	253.920.000	1	77.670.00 0	1,5	155.000.000					3	232.670.000	83%	92%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Nambangan Kidul)	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	Paket	3	97.337.405	0	-	2	83.900.592					2	83.900.592	67%	86%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Manguharjo)	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	40	100.000.000	8	1.301.000	10	1.600.000					1 8	2.901.000	45%	3%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Sogaten)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	35	210.551.020	0	-	5	17.833.550				5	17.833.550	14%	8%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Patihan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	30	141.000.000	6	834.800	10	1.904.400				1 6	2.739.200	53%	2%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Ngegong)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	30	168.347.550	0	-	20	76.996.600				2 0	76.996.600	67%	46%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Winongo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	40	115.267.785	8	800.000	10	1.600.000				1 8	2.400.000	45%	2%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Mandiun Lor)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	40	141.100.000	0	-	5	18.162.950				5	18.162.950	13%	13%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Pangongangan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	35	128.112.200	0	-	5	9.013.850				5	9.013.850	14%	7%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Nambangan Lor)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	%	30	57.009.000	6	1.400.000	10	1.600.000				1 6	3.000.000	53%	5%	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Nambangan Kidul)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	45	175.000.000	0	-	0	0				0	-	0%	0%	Kecamatan Manguharjo
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</b>	%	<b>100</b>	<b>815.576.400</b>	<b>25</b>	<b>133.120.250</b>	<b>25</b>	<b>133.551.700</b>				<b>50</b>	<b>266.671.950</b>	<b>50%</b>	<b>33%</b>	
7	1	4	2.0 1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	<b>100</b>	<b>324.385.300</b>	<b>25</b>	<b>41.120.750</b>	<b>25</b>	<b>80.911.000</b>				<b>50</b>	<b>122.031.750</b>	<b>50%</b>	<b>38%</b>	
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Kali	12	324.385.300	3	41.120.750	70	80.911.000				7 3	122.031.750	608%	38%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
7	1	4	2.0 2		<b>Koordinasi Penerimaan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi Yang ditindak lanjuti</b>	%	100	491.191.100	25	91.999.500	25	52.640.700				50	144.640.200	50%	29%	
7	1	4	2.0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/pertemuan	Kali	14	491.191.100	3	91.999.500	50	52.640.700				53	144.640.200	379%	29%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain</b>	%	100	181.926.494	25	23.387.950	25	23.037.000				50	46.424.950	50%	26%	
7	1	5	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Himbauan Kepala daerah yang ditindak lanjuti</b>	%	100	181.926.494	25	23.387.950	25	23.037.000				50	46.424.950	50%	26%	
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	Kali	2	111.926.494	1	16.662.000	25	0				26	16.662.000	1300%	15%	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.0 1	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Persentase konflik yang terselesaikan	%	100	55.000.000	25	3.400.000	30	20.119.500				55	23.519.500	55%	43%	Kecamatan Manguharjo

1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					Perundang-Undangan																		
7	1	5	2.0 1	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Doc	2	15.000.000	0	3.325.950	1	2.917.500					1	6.243.450	50%	42%	Kecamatan Manguharjo	
<b>7</b>	<b>1</b>				<b>KECAMATAN KARTOHARJO</b>																		
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Skor</b>	<b>87,8</b>	<b>5.829.100.193</b>	<b>0</b>	<b>1.119.904.383</b>	<b>51</b>	<b>1.391.414.938</b>					<b>51</b>	<b>2.511.319.321</b>	<b>58%</b>	<b>43%</b>		
7	1	2	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>5.821.673.633</b>	<b>0</b>	<b>1.118.331.883</b>	<b>50</b>	<b>1.388.914.938</b>					<b>50</b>	<b>2.507.246.821</b>	<b>50%</b>	<b>43%</b>		
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Oro - Oro Ombo)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	672.956.040	25	136.309.720	25	158.607.950					50	294.917.670	50%	44%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Sukosari)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	560.181.546	25	124.613.358	25	155.560.107					50	280.173.465	50%	50%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Klegen)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	741.948.355	25	140.589.411	25	178.930.381					50	319.519.792	50%	43%	Kecamatan Kartoharjo	

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Rejomulyo)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	728.815.767	25	131.499.3 10	25	121.795.430					5 0	253.294.740	50%	35%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pilangbango)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	628.459.777	25	126.692.7 56	25	134.922.234					5 0	261.614.990	50%	42%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Tawangrejo)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	584.340.251	25	107.486.3 61	25	127.928.952					5 0	235.415.313	50%	40%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kanigoro)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	662.294.395	25	131.801.9 85	25	177.476.013					5 0	309.277.998	50%	47%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kartoharjo)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	623.772.900	25	109.355.5 29	25	175.367.314					5 0	284.722.843	50%	46%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kelun)	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	%	100	618.904.602	25	109.983.4 53	25	158.326.557					5 0	268.310.010	50%	43%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	2	2.0 3		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti</b>	%	100	7.426.560	0	1.572.500	60	2.500.000					6 0	4.072.500	60%	55%	



1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
7	1	2	2.0 3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi / pertemuan	Pertemuan	3	7.426.560	1	1.572.500	1	2.500.000				2	4.072.500	67%	55%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD</b>	<b>Usulan</b>	<b>18</b>	<b>3.248.555.675</b>	<b>0</b>	<b>555.407.803</b>	<b>18</b>	<b>1.839.730.277</b>				<b>18</b>	<b>2.395.138.080</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>	
7	1	3	2.0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>3.248.555.675</b>	<b>0</b>	<b>555.407.803</b>	<b>80</b>	<b>1.839.730.277</b>				<b>80</b>	<b>2.395.138.080</b>	<b>80%</b>	<b>74%</b>	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	100	201.795.330	80	192.186.800	0	-				80	192.186.800	80%	95%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Oro - Oro Ombo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	298.405.360	0	0	1	297.500.000				1	297.500.000	50%	100%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Sukosari)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	316.340.000	0	0	2	292.660.683				2	292.660.683	100%	93%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Klegen)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	322.000.000	0	100.002.703	2	177.414.950				2	277.417.653	100%	86%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Rejomulyo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	200.000.000	0	62.218.300	2	92.840.850				2	155.059.150	100%	78%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Pilangbango)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	316.116.410	0	1.000.000	2	48.112.250				2	49.112.250	100%	16%	Kecamatan Kartoharjo

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Tawangrejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	219.299.800	0	0	2	204.869.164				2	204.869.164	100%	93%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kanigoro)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	250.000.000	1	200.000.000	2	36.494.375				3	236.494.375	150%	95%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kartoharjo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	298.419.280	0	0	2	200.000.000				2	200.000.000	100%	67%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kelun)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	2	312.709.500	0	0	2	286.708.555				2	286.708.555	100%	92%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Oro - Oro Ombo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	30.163.150	0	0	80	31.791.650				80	31.791.650	80%	105%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Sukosari)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	33.660.000	0	0	80	32.669.800				80	32.669.800	80%	97%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Klegen)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	28.000.000	0	0	0	-				0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Rejomulyo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	150.000.000	0	0	80	96.509.150				80	96.509.150	80%	64%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Pilangbango)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	33.883.590	0	0	0	-				0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Tawangrejo)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	55.000.000	0	0	0	-				0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kanigoro)	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	93.900.000	0	0	0	-				0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo	

1					2		3	4	5		6			7			8			9	10	11	12
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kartoharjo)	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	51.572.755	0	0	0	-				0	-	0%	0%	Kecamatan Kartoharjo		
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kelun)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	37.290.500	0	0	75	42.158.850				7 5	42.158.850	75%	113%	Kecamatan Kartoharjo		
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</b>	%	100	608.688.850	19	118.875.300	33	33.943.300				5 2	152.818.600	52%	25%			
7	1	4	2.0 1		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	100	382.507.140	25	68.942.600	15	83.876.000				4 0	152.818.600	40%	40%			
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	Pertemuan	20	382.507.140	6	68.942.600	3	83.876.000				9	152.818.600	45%	40%	Kecamatan Kartoharjo		
7	1	4	2.0 2		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	100	226.181.710	25	49.932.700	35	73.896.500				6 0	123.829.200	60%	55%			
7	1	4	2.0 2	1	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi / pertemuan	Pertemuan	8	226.181.710	3	49.932.700	3	73.896.500				6	123.829.200	75%	55%	Kecamatan Kartoharjo		
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain</b>	%	100	172.589.050	0	14.278.250		11.771.500				0	26.049.750	0%	15%			
7	1	5	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti</b>	%	100	172.589.050	10	14.278.250	30	11.771.500				4 0	26.049.750	40%	15%			
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan	Jumlah Sosialisasi	Kegiatan	1	31.446.650	0	0	0	11.771.500				0	11.771.500	0%	37%	Kecamatan Kartoharjo		

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7	1	5	2.0 1	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	%	100	56.872.800	25	12.356.250	25	-				50	12.356.250	50%	22%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5	2.0 1	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	Doc	2	84.269.600	1	1.922.000	0	-				1	1.922.000	50%	2%	Kecamatan Kartoharjo
7	1				<b>KECAMATAN TAMAN</b>																
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Skor</b>	<b>88,4</b>	<b>26.203.387</b>	<b>0</b>	<b>6.295.000</b>	<b>0</b>	<b>6.421.250</b>				<b>0</b>	<b>12.716.250</b>	<b>0%</b>	<b>49%</b>	
7	1	2	2.0 2		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>600.472.270</b>	<b>25</b>	<b>108.950.804</b>	<b>25</b>	<b>170.398.704</b>				<b>50</b>	<b>279.349.508</b>	<b>50%</b>	<b>47%</b>	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Persentase Terselesaikannya permohonan	%	100	600.472.270	0	108.950.804	50	170.398.704				50	279.349.508	50%	47%	Kecamatan Taman

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Mojorejo)	rekomendasi di Kelurahan															
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Pandean)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	573.232.065	0	112.755.0 97	40	114.286.596				4 0	227.041.693	40%	40%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Banjarejo)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	546.615.120	0	122.139.8 40	45	120.999.339				4 5	243.139.179	45%	44%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kuncen)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	322.931.220	0	54.661.27 7	35	59.286.350				3 5	113.947.627	35%	35%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Manisrejo)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	687.427.608	0	152.242.5 62	46	161.810.608				4 6	314.053.170	46%	46%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Kejuron)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	575.325.668	0	162.094.8 24	50	124.711.318				5 0	286.806.142	50%	50%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Josenan)	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	508.779.426	0	99.139.86 8	50	147.891.854				5 0	247.031.722	50%	49%	Kecamatan Taman
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Persentase Terselesaikannya permohonan	%	100	541.953.770	0	136.003.0 26	49	130.577.573				4 9	266.580.599	49%	49%	Kecamatan Taman

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Demangan)	rekomendasi di Kelurahan																
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kel. Taman)	Persentase Terselesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	%	100	624.966.940	0	109.398.3 99	40	143.827.840				4 0	253.226.239	40%	41%	Kecamatan Taman	
7	1	2	2.0 3		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti</b>	%	100	26.203.387	25	6.295.000	25	6.421.250				5 0	12.716.250	50%	49%		
7	1	2	2.0 3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	Kali	3	26.203.387	1	6.295.000	1	6.421.250				2	12.716.250	67%	49%	Kecamatan Taman	
7	1	3			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD</b>	Usulan	18	234.146.465	18	225.380.3 50	0	0				1 8	225.380.35 0	100%	96%		
7	1	3	2.0 1		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	%	100	234.146.465	##	225.380.3 50	0	0				1 0 0	225.380.35 0	100%	96%		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	%	100	234.146.465	##	225.380.3 50	0	0				1 0 0	225.380.350	100%	96%	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.0 2		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	%	100	277.662.535	25	511.308.3 40	25	1.742.104.298				5 0	2.253.412.6 38	50%	812%		

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Mojorejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	1	205.000.000	0	62.125.00 0	1	137.350.348					1	199.475.348	100%	97%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Pandean)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	513.729.750	2	314.336.2 40	1	199.285.000					3	513.621.240	100%	100%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Banjarejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	173.800.000	0	0	1	172.035.600					1	172.035.600	33%	99%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kuncen)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	198.925.000	0	4.345.350	1	193.270.900					1	197.616.250	33%	99%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Manisrejo)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	198.800.000	1	80.586.00 0	1	118.214.000					2	198.800.000	67%	100%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kejuron)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	199.500.000	0	0	1	198.992.200					1	198.992.200	33%	100%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Josenan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	198.800.000	0	49.915.75 0	1	148.877.250					1	198.793.000	33%	100%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Demangan)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	235.660.000	0	0	1	220.300.000					1	220.300.000	33%	93%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Taman)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	Paket	3	354.100.000	0	0	1	353779000					1	353.779.000	33%	100%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Mojorejo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	72.662.535	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Pandean)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	72.103.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Taman

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Banjarejo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	74.250.000	0	0	0	0				0		-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kuncen)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	38.887.500	0	0	47	18.451.100				47		18.451.100	47%	47%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Manisrejo)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	74.200.000	0	0	100	73.700.000				100		73.700.000	100%	99%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Kejuron)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	67.081.400	0	0	0	0				0		-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Josenan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	74.250.000	0	0	0	0				0		-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Demangan)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	74.250.000	0	0	0	0				0		-	0%	0%	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Taman)	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	%	100	75.000.000	10	6.849.900	0	0				10		6.849.900	10%	9%	Kecamatan Taman
7	1	4			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan</b>	%	100	566.062.850	25	12.102.000	25	217.833.265				50		229.935.265	50%	41%	
7	1	4	2.0	1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	100	264.872.350	25	0	25	131.983.450				50		131.983.450	50%	50%	
7	1	4	2.0	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	Kali	24	264.872.350	0	0	5	131.983.450				5		131.983.450	21%	50%	Kecamatan Taman
7	1	4	2.0	2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	%	100	301.190.500	25	12.102.000	25	85.849.815				50		97.951.815	50%	33%	



1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
7	1	4	2.0 2	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	Kali	8	301.190.500	1	12.102.000	3	85.849.815					4	97.951.815	50%	33%	Kecamatan Taman
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain</b>	%	100	82.223.710	25	15.995.200	25	6.640.000					50	22.635.200	50%	28%	
7	1	5	2.0 1		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase himbauan kepala daerah yang ditindaklanjuti</b>	%	100	82.223.710	25	15.995.200	25	6.640.000					50	22.635.200	50%	28%	
7	1	5	2.0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	Kali	1	51.989.500	0	7.990.000	0	0					0	7.990.000	0%	15%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.0 1	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik yang terselesaikan	%	100	28.272.000	25	6.718.000	25	6.640.000					50	13.358.000	50%	47%	Kecamatan Taman
7	1	5	2.0 1	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan	Jumlah buku profil kelurahan dan monografi	Doc	2	1.962.210	2	1.287.200	0	0					2	1.287.200	100%	66%	Kecamatan Taman

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
					Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	kecamatan dan kelurahan																
8					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>																	
8	1				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																	
8	1	2			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	255.910.947	25	88.960.000	25	34.397.000					50	123.357.000	50%	48%	
8	1	2	2.0	1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah jenis kegiatan	jenis	5	255.910.947	1	88.960.000	1	34.397.000					2	123.357.000	40%	48%	
8	1	2	2.0	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	Orang	150	255.910.947	30	88.960.000	90	34.397.000					120	123.357.000	80%	48%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik	%	100	1.009.259.170	25	0	25	952.052.350					50	952.052.350	50%	94%	
8	1	3	2.0	1	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan</b>	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	%	80	1.009.259.170	0	0	30	952.052.350					30	952.052.350	38%	94%	

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
					<b>Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>																
8	1	3	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	org	99	978.656.030	0	0	33	952.052.350				3 3	952.052.350	33%	97%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	Orang	125	30.603.140	0	0	0	0				0	0	0%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2		3	4	5		6		7		8			9	10	11	12
8	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN</b>	Persentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	%	68	179.712.640	0	0	23	26.120.000				23	26.120.000	34%	15%	
8	1	4	2.0 1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Persentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	%	75	179.712.640	0	0	25	26.120.000				25	26.120.000	33%	15%	
8	1	4	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Orang	225	179.712.640	0	0	75	26.120.000				75	26.120.000	33%	15%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100	398.480.490	25	51.197.780	25	88.003.830				50	139.201.610	50%	35%	
8	1	5	2.0 1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	Jumlah koordinasi	Kali	4	398.480.490	1	51.197.780	1	88.003.830				2	139.201.610	50%	35%	
8	1	5	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	100	21.138.360	27	10.276.780	27	10.676.830				54	20.953.610	54%	99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
					Kepercayaan di Daerah																
8	1	5	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	Orang	400	377.342.130	100	40.921.00 0	100	77.327.000				2 0 0	118.248.000	50%	31%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase konflik yang terfasilitasi</b>	%	100	1.679.510.09 0	25	1.231.667 .100	25	58.800.000				5 0	1.290.467.1 00	50%	77%	
8	1	6	2.0 1		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah konflik</b>	<b>Konflik</b>	0	1.679.510.09 0	0	1.231.667 .100	0	58.800.000				0	1.290.467.1 00	0%	77%	
8	1	6	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta rakor	Orang	500	1.679.510.090	100	1.231.667. 100	100	58.800.000				2 0 0	1.290.467.10 0	40%	77%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>Skor</b>	<b>100</b>	<b>660.615.637.936</b>	<b>0</b>	<b>85.343.171.961</b>	<b>0</b>	<b>178.694.009.405</b>				<b>0</b>	<b>264.037.181.366</b>	<b>0%</b>	<b>40%</b>	
1	1	1	2.01		<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Skor</b>	<b>65</b>	<b>9.764.713.407</b>	<b>0</b>	<b>340.418.680</b>	<b>0</b>	<b>521.070.355</b>				<b>0</b>	<b>861.489.035</b>	<b>0%</b>	<b>9%</b>	
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	%	100	40.000.000	20	0	60	3.371.500				80	3.371.500	80%	8%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	Doc	6	72.133.016	2	3.444.700	1	14.036.800				3	17.481.500	50%	24%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Doc	7	12.619.200	2	3.087.500	2	4.973.750				4	8.061.250	57%	64%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doc	6	57.776.800	1	0	2	199.500				3	199.500	50%	0%	Kecamatan Kartoharjo
2	12	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	%	100	84.819.000	25	0	50	119.890.960				50	119.890.960	50%	141%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Dokumen	6	7.739.590.464	1	23.630.000	1	25.400.000				2	49.030.000	33%	1%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	Doc	11	307.609.000	6	25.442.600	4	65.744.540				10	91.187.140	91%	30%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doc	20	16.673.400	5	4.820.000	11	7.040.000				16	11.860.000	80%	71%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
1	5	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doc	12	51.750.280	4	0	3	51.245.000				7	51.245.000	58%	99%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Doc	12	89.831.480	4	47.330.45 0	7	9.588.000				1 1	56.918.450	92%	63%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	5	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	12	480.000	3	150.000	3	0				6	150.000	50%	31%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	7	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doc	6	71.280.000	3	23.412.15 0	1	14.184.525				4	37.596.675	67%	53%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Doc	20	169.545.50 0	6	41.069.25 0	0	12.107.150, 00				6	53.176.400	30%	31%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	1 1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	Doc	6	75.350.000	2	49.175.20 0	2	4.098.500				4	53.273.700	67%	71%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	%	100	61.767.360	25	0	0	-				2 5	-	25%	0%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 5	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Doc	6	140.200.00 0	3	28.448.56 0	3	41.286.720				6	69.735.280	100%	50%	Dinas Perhubungan
2	1 6	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Doc	10	115.000.00 0	2	0	2	136.500				4	136.500	40%	0%	Dinas Komunikasi dan Informatika

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	6	16.486.320	2	10.496.320	2	2.040.650					4	12.536.970	67%	76%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	2	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Doc	10	55.000.000	0	0	2	0					2	-	20%	0%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	3	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	Doc	6	54.007.200	3	0	1	0					4	-	67%	0%	Dinas Perdagangan
2	2	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Dokumen	6	30.000.000	2	9.840.750	2	9.600.000					4	19.440.750	67%	65%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja	Doc	6	998.400	0	0	6	998.400					6	998.400	100%	100%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	6	15.000.000	1	3.021.300	3	1.885.000					4	4.906.300	67%	33%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	%	100	1.000.000	33	0	0	-					3	-	33%	0%	Bagian Hukum
4	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	21	41.636.000	5	0	6	-					1	-	52%	0%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang



1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
4	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	21	20.000.000	2	4.230.000	4	4.230.000				6	8.460.000	29%	42%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	-				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bagian Umum
5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	2.000.000	4	0	1	599.400,00				5	599.400	63%	30%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	12	10.665.600	3	1.946.250	3	2.625.750				6	4.572.000	50%	43%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	5.000.000	0	668.200	2	466.700				2	1.134.900	50%	23%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	13.978.800	2	0	3	0				5	0	100%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	10	85.105.000	1	1.000.000	0	0				1	1.000.000	10%	1%	Inspektorat Daerah

1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
8	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	Dok	12	30.600.000	3	0	3	0					6	0	50%	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Doc	20	68.784.000	1	782.250	10	1.404.000					1 1	2.186.250	55%	3%	Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	Doc	12	3.992.800	3	0	3	1.560.000					6	1.560.000	50%	39%	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	Doc	12	5.183.387	0	0	4	2.466.050					4	2.466.050	33%	48%	Kecamatan Taman	
2	1 2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	%	100	193.432.00 0	25	58.165.00 0	50	119.890.96 0					5 0	178.055.960	50%	92%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
5	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Doc	2	1.425.600		0	1	0					1	-	50%	0%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Doc	2	3.992.800	2	258.200	0	-					2	258.200	100%	6%	Kecamatan Kartoharjo	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.0 2</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Skor</b>	<b>65</b>	<b>437.378.38 7.789</b>	<b>0</b>	<b>49.334.73 7.286</b>	<b>0</b>	<b>121.237.74 5.678</b>					<b>0</b>	<b>170.572.48 2.964</b>	<b>0%</b>	<b>39%</b>		
1	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	184.218.67 6.428	25	19.956.05 3.364	25	44.292.322. 156					5 0	64.248.375.5 20	50%	35%	Dinas Pendidikan	
1	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	29.866.091. 556	25	4.639.656. 615	45	11.882.829. 910					4 5	16.522.486.5 25	45%	55%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1					2	3	4	5		6		7				8		9	10	11	12	
1	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	23.209.552. 852	25	2.757.325. 425	25	4.655.855.3 81					5 0	7.413.180.80 6	50%	32%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	8.171.117.9 00	100	776.547.4 68	100	3.001.023.8 36					1 0 0	3.777.571.30 4	100%	46%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	7.579.340.3 20	25	562.692.6 22	50	2.106.596.4 31					7 5	2.669.289.05 3	75%	35%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	7.054.399.8 00	15	833.529.6 81	44	3.126.256.8 28					5 9	3.959.786.50 9	59%	56%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	4.357.416.2 61	100	618.676.3 95	100	1.681.622.1 73					1 0 0	2.300.298.56 8	100%	53%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	1.663.185.0 00	25	173.842.1 22	25	494.223.32 3					5 0	668.065.445	50%	40%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	7	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah	%	100	3.597.300.0 00	25	500.532.8 21	29	1.498.844.2 51					5 4	1.999.377.07 2	54%	56%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	4.435.212.0 00	29	480.892.0 76	22	1.341.368.7 28,00					5 1	1.822.260.80 4	51%	41%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	1 1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	10.312.341. 430	100	1.351.854. 985	0	2.706.540.7 61					1 0 0	4.058.395.74 6	100%	39%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	3.030.000.0 00	25	420.120.9 41	50	1.604.718.9 30					5 0	2.024.839.87 1	50%	67%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	6.514.480.0 00	9	795.543.8 90	50	2.873.928.7 61					5 9	3.669.472.65 1	59%	56%	Dinas Perhubungan
2	1 6	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	3.783.741.0 00	25	560.586.3 43	25	1.556.300.1 05					5 0	2.116.886.44 8	50%	56%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1 8	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	4.705.920.8 20	10	439.581.2 24	34	1.195.079.3 83					4 4	1.634.660.60 7	44%	35%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1					2		3		4	5		6		7		8				9	10	11	12
																							Terpadu Satu Pintu
2	2	3	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	2.867.787.4	13	386.280.8	40	1.107.228.3				5	1.493.509.15	53%	52%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	3	0	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	7.616.000.0	25	1.077.769.834	25	2.701.200.0				5	3.778.969.88	50%	50%	Dinas Perdagangan
2	2	2	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	3.202.119.3	25	454.703.8	30	1.352.067.6				5	1.806.771.53	55%	56%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
4	1	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	%	100	824.778.08	25	28.982.59	50	273.666.29				7	302.648.893	75%	37%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	9	792.010.50	7	27.838.04	0	251.981.43				7	279.819.482	78%	35%	Bagian Organisasi
4	1	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	1.413.437.1	3	28.758.10	20	275.830.36				2	304.588.467	23%	22%	Bagian Hukum
4	1	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	1.233.270.0	30	34.110.43	30	581.925.56				6	616.035.994	60%	50%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	559.825.50	25	37.578.13	20	24.700.000				4	62.278.131	45%	11%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	12	12.518.435.102	3	1.508.920.461	3	3.055.848.3				6	4.564.768.83	50%	36%	Bagian Umum
4	2	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	%	100	3.328.843.5	25	334.321.8	25	993.620.42				5	1.327.942.26	50%	40%	Sekretariat DPRD
5	2	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	3000	36.703.330.046	3000	2.719.615.886	3000	6.249.319.6				3	8.968.935.50	100%	24%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	1	1	2.0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji ASN perangkat daerah	%	100	6.679.470.5	25	514.079.2	25	1.493.565.5				5	2.007.644.78	50%	30%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

1				2		3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31	9.406.622.000	31	1.426.084.271	31	1.876.947.540				31	3.303.031.811	100%	35%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	43	5.713.101.595	42	671.353.034	42	2.442.041.494				42	3.113.394.528	98%	54%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	7.773.908.000	10	780.285.739	28,52	2.217.147.710				39	2.997.433.449	39%	39%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	3.836.675.994	25	423.917.892	25	1.267.140.266				50	1.691.058.158	50%	44%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	9.506.666.943	25	1.352.674.497	25	3.721.922.919				50	5.074.597.416	50%	53%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	%	100	8.379.822.530	25	1.270.959.549	25	3.565.775.554				50	4.836.735.103	50%	58%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	%	100	12.406.038.104	25	1.348.079.129	20	3.710.997.770				45	5.059.076.899	45%	41%	Kecamatan Taman
1	4	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	13	61.000.000	3	23.921.900	6	39.065.900				6	62.987.800	46%	103%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	6	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	13	39.715.050	3	13.397.000	6	17.254.350				9	30.651.350	69%	77%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	13	12.755.000	3	2.677.600	3	0				6	2.677.600	46%	21%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	13	2.000.000	3	491.700	4	491.700				7	983.400	54%	49%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	Doc	13	2.000.000	3	499.800	3	495.800				6	995.600	46%	50%	Kecamatan Kartoharjo

1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD																		
1	4	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian</b>	%	100	7.584.802.030	15	359.394.150	70	1.417.052.397					70	1.776.446.547	70%	23%		
1	4	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	118.260.000	0	0	100	115520475					100	115.520.475	100%	98%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	%	100	492.592.000	0	0	95	468.971.800					95	468.971.800	95%	95%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
2	11	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	presentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya (perhitungan = realisasi/target kebutuhan)	%	100	134.820.000	50	67.807.000	50	55.083.400					100	122.890.400	100%	91%	Dinas Lingkungan Hidup	
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	%	100	125.000.000	25	33.538.500	100	122.267.250					100	155.805.750	100%	125%	Dinas Perhubungan	
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	%	100	174.299.000	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Perdagangan	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4.627.700.000	0	7.447.250	0	50.994.500					0	58.441.750	0%	1%	Bagian Umum	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	%	100	29.700.000		-	96	28.530.000					96	28.530.000	96%	96%	Sekretariat DPRD	
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	presentase peningkatan kapasitas pegawai	%	100	76.350.000	60	40.518.100	0	3.380.000					60	43.898.100	60%	57%	Dinas Lingkungan Hidup	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatan kapasitas pegawai	%	100	176.199.957	50	84.810.000	50	74.636.500					100	159.446.500	100%	90%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	10.000.000	25	2.960.000	30	2.960.000					55	5.920.000	55%	59%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
1	6	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	35.774.400	100	3.500.000	100	4.000.000				1 0 0	7.500.000	100%	21%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan cukai	Orang	100	100.000.00 0	0	-	25	49.765.000				2 5	49.765.000	25%	50%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	1 2	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	%	100	194.811.00 0	25	11.800.00 0	50	58.678.622				5 0	70.478.622	50%	36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1 5	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	%	100	96.261.000	80	81.519.00 0	100	93.559.000				1 0 0	175.078.000	100%	182 %	Dinas Perhubungan
2	1 6	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Paket	1	1.000.000.0 00	0	0	1	282.448.50 0				1	282.448.500	100%	28%	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	2	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	%	100	1.986.336	25	58.000	3					2 8	58.000	28%	3%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang memahami	%	100	158.503.81 0	10	12.600.00 0		0				1 0	12.600.000	10%	8%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7	1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	presentase peserta yang paham	%	100	7.200.000	23	1.633.800	30	2.161.350				5 3	3.795.150	53%	53%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	%	100	7.192.555	63	3.000.000	37	4.096.000				1 0 0	7.096.000	100%	99%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 5	1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	%	100	18.151.972	40	8.202.500	0	0				4 0	8.202.500	40%	45%	Kecamatan Taman
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.0 6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Skor</b>	<b>65</b>	<b>22.731.456 .748</b>	<b>0</b>	<b>3.520.893 .891</b>	<b>0</b>	<b>4.813.782. 933</b>				<b>0</b>	<b>8.334.676.8 24</b>	<b>0%</b>	<b>37%</b>	
4	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	250.000.00 0	0	6.729.000	0	12.962.500				0	19.691.500	0%	8%	Bagian Umum

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	7.212.439.290	0	632.693.270						0	1.433.743.391	0%	20%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	2.103.680.000	100	211.671.407	100					100	534.247.318	100%	25%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	885.850.000	25	70.437.137	25					50	170.563.199	50%	19%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	1.117.648.278	25	222.862.395	50					50	591.534.638	50%	53%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/perengkapan kantor	%	100	650.956.080	15	93.166.984	48					63	409.767.463	63%	63%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	Paket	1	625.551.250	0	57.863.400	0					0	98.739.150	0%	16%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan peralatan kantor yang representatif	%	100	402.782.383	25	81.023.000	25					50	173.853.500	50%	43%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	883.174.042	15	155.476.938	22					37	382.887.163	37%	43%	Kecamatan Taman
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	280.950.000	25	65.483.300						25	133.776.000	25%	48%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	539.360.000	100	34.973.500	100					100	106.521.725	100%	20%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	60	240.000.000	15	48.053.700	65					80	158.271.962	133%	66%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	183.880.000	20	34.598.930	48	89.698.047					48	124.296.977	48%	68%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	%	100	100.585.000	71	72.224.800	22	94.221.200					93	166.446.000	93%	165%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	194.901.000	100	29.307.000	24	46.266.800					124	75.573.800	124%	39%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	60.000.000	25	38.809.105	25	3.755.000					50	42.564.105	50%	71%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	234.000.000	25	35.606.188	25	78.369.500					50	113.975.688	50%	49%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	200.029.000	26	27.321.000	10	43.944.500,00					27	71.265.500	27%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (perhitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	289.703.000	16	34.304.400	24	16.347.600					40	50.652.000	40%	17%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	152.961.000	25	24.707.900	50	52.993.600					50	77.701.500	50%	51%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	200.000.000	8	93.475.000	50	110.696.000					58	204.171.000	58%	102%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	200.000.000	25	63.172.910	25	47.657.330					50	110.830.240	50%	55%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	200.000.000	31	62.346.000	50	100.962.609					81	163.308.609	81%	82%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	80.000.000	18,9	15.088.000	47	34.180.500					66	49.268.500	66%	62%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1					2		3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
3	3	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	201.010.800	43	150.140.050	17	14.394.270				60	164.534.320	60%	82%	Dinas Perdagangan	
2	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	299.700.000	0	29.806.000	30	88.066.000				30	117.872.000	30%	39%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	%	100	100.000.000	25	12.491.500	50	60.845.600				75	73.337.100	75%	73%	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	167.326.280	3	25.874.500	3	20.622.500				6	46.497.000	50%	28%	Bagian Organisasi	
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	130.000.000	16	20.387.683	21	27.649.938				37	48.037.621	37%	37%	Bagian Hukum	
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	98.194.000	30	14.384.500	30	41.354.000				60	55.738.500	60%	57%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang	
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	180.000.000	20	44.060.000	40	70.482.500				60	114.542.500	60%	64%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	324	1.988.407.600	45	267.912.016	90	544.690.067				135	812.602.083	42%	41%	Bagian Umum	
4	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional ASN	%	100	736.655.000	24	257.322.677	66	286.148.540				90	543.471.217	90%	74%	Sekretariat DPRD	
5	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	200.000.000	22	187.126.276	4	11.690.471,00				26	198.816.747	37%	99%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	401.434.000	25	121.812.300	25	93.521.000				50	215.333.300	50%	54%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	15	30.000.000	4	6.094.000	4	16.538.792				8	22.632.792	53%	75%	Badan Pendapatan Daerah	

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
5	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	307.840.00 0	10	25.911.00 0	37	140.696.60 0				4 7	166.607.600	59%	54%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	Paket	1	212.155.74 5	0	61.178.29 0	0	93.121.000				0	154.299.290	0%	73%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	50.000.000	25	9.967.000	25	18.477.350				5 0	28.444.350	50%	57%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	128.715.00 0	25	33.941.95 0	20	14.522.000				4 5	48.463.950	45%	38%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	%	100	112.996.00 0	20	30.342.75 0	30	11.465.100				5 0	41.807.850	50%	37%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	%	100	98.572.000	25	10.746.13 5	25	7.241.541				5 0	17.987.676	50%	18%	Kecamatan Taman
1	1	1	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Skor</b>	<b>65</b>	<b>12.589.228 .878</b>	<b>0</b>	<b>1.356.852 .500</b>	<b>0</b>	<b>10.342.722 .070</b>				<b>0</b>	<b>11.699.574. 570</b>	<b>0%</b>	<b>93%</b>	
1	4	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	%	100	1.434.787.5 00	13	184.898.4 00	100	1.351.255.4 00				1 0 0	1.536.153.80 0	100%	107 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	7	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	%	100	2.673.000	0	-	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	%	100	-	0	0	0	-				0	-	0%	#DIV /0!	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
4	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	16	7.495.800.000	0	0	16	7.131.300.000					16	7.131.300.000	100%	95%	Bagian Umum
6	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan	%	100	92.301.000	100	91.470.000	0	0					100	91.470.000	100%	99%	Inspektorat Daerah
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	Unit	11	357.600	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Kecamatan Taman
1	3	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-									0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	6	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	%	100	-	0	-	0	-					0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	1	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan	%	100	16.632.000	78	13.070.000	22	0					100	13.070.000	100%	79%	Kecamatan Manguharjo
2	7	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	3.043.755	0	-	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	%	100	1.163.250	0	975.000	100	975.000					100	1.950.000	100%	168%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	%	100	6.500.000	0	0	99	6.451.875					99	6.451.875	99%	99%	Bagian Hukum
4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan dan mesin lainnya	%	100	-	0	0	0	-					0	-	0%	#DIV/0!	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	84.350.000	2	83.534.000	0	-					2	83.534.000	100%	99%	Bagian Umum

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi	Jenis	2	448.521.205	2	445.818.000	0	0				2	445.818.000	100%	99%	Inspektorat Daerah
2	23	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan gedung kantor	%	100	-	0	0	0	0				0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang representatif	%	100	125.000.000	0	-	5	6.000.000				5	6.000.000	5%	5%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang representatif	%	100	200.000.000	0	0	60	-				60	-	60%	0%	Kecamatan Kartoharjo
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%	100	-	0	-						0	-	0%	0%	Dinas Pendidikan
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras yang terpenuhi	Jenis	5	88.650.000	0	0	100	88.300.000				100	88.300.000	2000%	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	181.434.050	86	157.738.500	100	179.422.500				100	337.161.000	100%	186%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	1	4.965.000	0	0	1	4.965.000				1	4.965.000	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	296.550.000	0	-	8	23.365.000				8	23.365.000	8%	8%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	-	0	-	0	0	0	0,00				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	9	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	118.905.000	0	0		5.241.000,00				0	5.241.000	0%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	92.784.238	50	9.295.000	83,33	418.912.750				83	428.207.750	83%	462%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
2	15	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	300.000.000	100	296.525.500	100	297.025.500					100	593.551.000	100%	198%	Dinas Perhubungan
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	108.600.000	0	0	100	108080700					100	108.080.700	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	23	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	527.860.000	11,3	59.532.000	85	444.997.920					96	504.529.920	96%	96%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	22	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	20.790.000	0	0	100	19.716.375					100	19.716.375	100%	95%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tercukupinya pemenuhan barang kebutuhan milik daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	4.300.000	0	0	100	3.500.000					100	3.500.000	100%	81%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	%	100	2.000.000	0	0	0	-					0	-	0%	0%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	43	147.311.790	0	0	0	-					0	-	0%	0%	Bagian Umum
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi	%	100	123.550.000	0	-	58	71.524.050					58	71.524.050	58%	58%	Sekretariat DPRD
5	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	4.915.845	0	0	0	0					0	-	0%	0%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	0	0	0	0	0	0					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan Pendapatan Daerah

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
5	3	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	59.000.000	0	0	0	0				0	0	0%	0%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	%	100	7.397.500	87	6.500.000	13	0				1 0 0	6.500.000	100%	88%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	%	100	175.341.00 0	0	0	15	2.139.000				1 5	2.139.000	15%	1%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan	Paket	2	1.837.500	2	1.800.000	0	0				2	1.800.000	100%	98%	Kecamatan Taman
1	3	1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-				-				0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1 1	1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	%	100	226.280.64 5	100	5.696.100		0				1 0 0	5.696.100	100%	3%	Dinas Lingkungan Hidup
5	2	1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	185.627.00 0	0	0	8	179.550.00 0,00				8	179.550.000	133%	97%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
1	2	1	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>51.634.431 .528</b>	<b>25</b>	<b>9.495.462 .871</b>	<b>25</b>	<b>12.483.900 .302</b>				<b>5 0</b>	<b>21.979.363. 173</b>	<b>50%</b>	<b>43%</b>	
1	3	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perengkapan kantor	Jenis	10	3.228.349.2 06	5	452.401.5 77	60	1.122.423.0 48				6 5	1.574.824.62 5	650%	49%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	1.540.934.4 25	16	318.652.7 86	45	644.739.79 3				4 5	963.392.579	45%	63%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Representatif	%	100	2.531.507.920	17	480.253.865	46	1.172.852.655					63	1.653.106.520	63%	65%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.149.315.914	84	139.142.612	6	66.352.117					90	205.494.729	90%	18%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	%	100	329.244.000	30	143.243.150	20	28.101.100					50	171.344.250	50%	52%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	%	100	612.243.000	85	109.400.730	0	150.319.895,00					85	259.720.625	85%	42%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	11	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	790.386.803	100	152.284.600	0	140.026.800					100	292.311.400	100%	37%	Dinas Lingkungan Hidup
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	2.570.385.600	9	469.273.608	50	985.552.083					59	1.454.825.691	59%	57%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	1.228.338.000	25	212.770.878	25	243.315.569					50	456.086.447	50%	37%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	23	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	790.000.000	15	118.206.050	35	99.454.900					50	217.660.950	50%	28%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	1.067.561.807	25	166.284.615	25	144.688.050					50	310.972.665	50%	29%	Dinas Perdagangan
2	22	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	%	100	2.337.115.000	0	366.296.196	21	498.327.235					21	864.623.431	21%	37%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	%	100	285.891.000	25	56.641.900	50	107.409.100					75	164.051.000	75%	57%	Bagian Pemerintahan



1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	106.722.468	3	19.275.075	3	22.715.765					6	41.990.840	50%	39%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	246.546.760	14	43.962.000	26	64.552.540					40	108.514.540	40%	44%	Bagian Hukum
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	363.091.000	30	39.014.390	30	77.649.638					60	116.664.028	60%	32%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	385.500.000	15	45.387.400	30	81.054.200					45	126.441.600	45%	33%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	4.372.103.275	3	734.692.818	3	1.108.529.252					6	1.843.222.070	50%	42%	Bagian Umum
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	%	100	2.137.061.372	24	421.622.453	43	499.283.968					67	920.906.421	67%	43%	Sekretariat DPRD
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	15.151.080.890	3	3.079.871.975	3	3.261.546.718,00					6	6.341.418.693	50%	42%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	384.278.405	25	81.065.850	25	82.882.280					50	163.948.130	50%	43%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	344.710.000		31.500.000	100	18.000.000					100	49.500.000	100%	14%	
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	18	567.448.000	16	146.107.600	17	277.584.600					17	423.692.200	94%	75%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengka	%	100	1.470.773.880	10	173.185.740	35	210.812.174					45	383.997.914	45%	26%	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
						pan kantor yang representatif																
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	1.400.630.163	20	189.605.903	50	396.298.812					70	585.904.715	70%	42%	Kecamatan Kartoharjo
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (RSUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	%	100	1.239.700.000	25	256.850.000	25	322.200.000					50	579.050.000	50%	47%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	%	100	330.180.000	69	57.845.000	24	80.710.000					93	138.555.000	93%	42%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase pemenuhan gaji non ASN perangkat daerah	%	100	4.178.660.000	100	915.248.500	0	490.067.000					100	1.405.315.500	100%	34%	Dinas Lingkungan Hidup
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	%	100	202.620.000	25	18.309.500	50	54.873.460					75	73.182.960	75%	36%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	%	100	292.052.640	25	57.066.100	25	31.577.550					50	88.643.650	50%	30%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	%	100	0		0	0	0					0	-	0%	#DIV/0!	Badan Pendapatan Daerah
1	1	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks RB</b>	<b>Skor</b>	<b>65</b>	<b>16.400.819.294</b>	<b>0</b>	<b>2.162.643.638</b>	<b>0</b>	<b>3.812.759.071</b>					<b>0</b>	<b>5.975.402.709</b>	<b>0%</b>	<b>36%</b>	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	147.242.800	0	15.551.500	50	14.584.800					50	30.136.300	50%	20%	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	339.210.000	100	32.249.900	100	44.329.127					100	76.579.027	100%	23%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	Buah	59	314.850.400	20	32.156.432	65	79.542.486					65	111.698.918	110%	35%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	1.470.961.432	25	177.590.850	60	439.780.577					60	617.371.427	60%	42%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	%	100	467.100.000	7	34.618.155	31	145.536.616					38	180.154.771	38%	39%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	%	100	170.634.200	46	17.959.450	18	31.070.950					64	49.030.400	64%	29%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	48.550.000	25	6.208.270	25	6.759.500					50	12.967.770	50%	27%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	%	100	62.462.000	15	10.046.000	0	14.581.520,00					15	24.627.520	15%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12			
2	1	1	2.0	1	atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	presentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	1.460.069.000	100	238.903.650	0	153.700.500					1000	392.604.150	100%	27%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1	2	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	%	100	27.500.000	25	7.484.700	50	9.780.700					75	17.265.400	75%	63%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	5	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	650.000.000	30	113.228.206	50	276.047.220					80	389.275.426	80%	60%	Dinas Perhubungan
2	1	6	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	150.500.000	25	25.765.200	25	31.844.890					50	57.610.090	50%	38%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	1	8	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	45.000.000	27	11.960.100	44	19.981.100					71	31.941.200	71%	71%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	2	3	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	64.900.000	24,5	15.876.500	33	15.305.450					57	31.181.950	57%	48%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	3	0	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	260.515.740	25	47.344.700	25	39.937.350					50	87.282.050	50%	34%	Dinas Perdagangan

1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12	
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
2	2	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	%	100	55.000.000	10	10.009.000	36	19.808.800					46	29.817.800	46%	54%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	%	100	20.000.000	25	4.110.000	50	9.110.000					75	13.220.000	75%	66%	Bagian Pemerintahan	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	6	18.963.000	2	4.551.700	0	7.350.380					2	11.902.080	33%	63%	Bagian Organisasi	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	20.547.600	7	1.747.538	12	2.540.498					19	4.288.036	19%	21%	Bagian Hukum	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	15.321.000	17	5.010.364	65	5.072.500					82	10.082.864	82%	66%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	22.000.000	15	3.525.000	45	9.273.000					60	12.798.000	60%	58%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	

1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
4	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	kali	188	1.204.405.0 50	35	226.465.3 48	29	183.633.72 5					6 4	410.099.073	34%	34%	Bagian Umum
4	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	%	100	296.474.81 0	28	73.769.24 5	44	56.410.990					7 2	130.180.235	72%	44%	Sekretariat DPRD
5	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	36	80.000.000	0	18.966.30 0	14	16.372.900, 00					1 4	35.339.200	39%	44%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas jabatan yang layak digunakan	%	100	50.000.000	25	1.980.000	25	2.295.000					5 0	4.275.000	50%	9%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	35	40.000.000	5	14.245.13 0	9	7.415.000					1 4	21.660.130	40%	54%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	15.000.000	4	1.735.800	2	3.932.500					6	5.668.300	33%	38%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	Unit	1	22.700.000	0	4.086.100	1	11.686.040					1	15.772.140	100%	69%	Inspektorat Daerah

1					2	3	4	5			6		7			8			9	10	11	12
					atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	%	100	27.000.000	25	4.750.000	25	3.000.000					50	7.750.000	50%	29%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	%	100	59.559.200	30	4.379.770	30	11.171.000					60	15.550.770	60%	26%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang layak digunakan	%	100	25.251.000	25	5.978.000	25	2.770.000					50	8.748.000	50%	35%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	%	100	48.448.000	25	4.408.917	25	9.568.807					50	13.977.724	50%	29%	Kecamatan Taman
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	%	100	175.000.000	15	20.384.193	30	41.940.871					45	62.325.064	45%	36%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	%	100	10.000.000	25	600.000	25	3.435.000					50	4.035.000	50%	40%	Kecamatan Kartoharjo
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan	%	100	152.055.000	100	27.385.500	0	17.924.500					100	45.310.000	100%	30%	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5		6		7			8			9	10	11	12
4	2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	%	100	252.354.60 0	18	16.421.95 0	41	58.311.118				5 9	74.733.068	59%	30%	Sekretariat DPRD
1	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	382.278.00 0	0	12.118.00 0		94.718.400				0	106.836.400	0%	28%	Dinas Pendidikan
1	2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	16.019.000	100	45.000	100	4.989.000				1 0 0	5.034.000	100%	31%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	4	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	40.000.000	0	0	30	9.880.000				3 0	9.880.000	30%	25%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	%	100	50.000.000	0	0	5	2.500.000				5	2.500.000	5%	5%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	140.131.45 0	80	31.698.90 0	0	-				8 0	31.698.900	80%	23%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	5	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	25.000.000	100	24.742.40 0	0	0				1 0 0	24.742.400	100%	99%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	7	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	39.250.000	0	-	0	0				0	-	0%	0%	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	9	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	54.150.000	0	0	0	0,00				0	-	0%	0%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	1 1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	99.918.900	0	0	0					0	-	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
2	1 2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	592.124.50 0	25	4.000.000	50	11.000.000				7 5	15.000.000	75%	3%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	284.650.000	15	27.593.000	100	282.381.000				100	309.974.000	100%	109%	Dinas Perhubungan
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	132.500.000	25	70.109.828	25	9.754.287				50	79.864.115	50%	60%	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	18	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	197.167.000	16	320.000	7	13.662.050				23	13.982.050	23%	7%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	95.000.000	3,87	5.863.000	23	21.420.000				27	27.283.000	27%	29%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	49.978.750	0	0	25	18.415.500				25	18.415.500	25%	37%	Dinas Perdagangan
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	70.000.000	25	19.998.000	70	48.802.000				95	68.800.000	95%	98%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	7.500.000	0	7.376.950	100	7.376.950				100	14.753.900	100%	197%	Bagian Pemerintahan
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	1	1.680.000	1	1.638.000	0	-				1	1.638.000	100%	98%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	2.500.000	0	0	10	250.000				10	250.000	10%	10%	Bagian Hukum
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	826.000.000	9	71.622.320	26	150.000.000				35	221.622.320	35%	27%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Persentase gedung yang layak digunakan	%	100	28.750.000	0	0	0	8.185.000				0	8.185.000	0%	28%	Bagian Perekonomian dan

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
					Bangunan Lainnya															Kesejahteraan Rakyat	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	500.000.000	0	72.049.400	0	236.034.886				0	308.084.286	0%	62%	Bagian Umum
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	%	100	289.636.770	9	16.278.375	17	33.185.215				26	49.463.590	26%	17%	Sekretariat DPRD
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	0	0	0	0,00				0	-	0%	0%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	149.842.000	25	62.489.000	25	1.167.250				50	63.656.250	50%	42%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	81.275.000	0	0	0	0				0	-	0%	0%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	300.000.000	1	20.189.500	1	60.605.900				2	80.795.400	100%	27%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Unit	1	233.250.000	0	0	1	195.762.100				1	195.762.100	100%	84%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	10.000.000	25	1.350.000	25	1.200.000				50	2.550.000	50%	26%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	98.765.703	10	6.740.175	25	15.759.750				35	22.499.925	35%	23%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	persentase gedung yang layak digunakan	%	100	67.152.745	0	0	15	13.866.545				15	13.866.545	15%	21%	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5		6		7		8					9	10	11	12							
					Bangunan Lainnya																								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	%	100	100.000.000	0	0	100	100.000.000					100	0	0				100	100	100	0	100	Kecamatan Taman
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	149.704.300	0	23.021.500		18.090.000						0						41.111.500	0%	27%		Dinas Pendidikan
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	184.915.000	100	17.649.200	100	42.396.225						100	0	0				60.045.425	100%	32%		Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	Buah	1	388.150.000	1	32.847.272	30	67.717.042											31	100.564.314	3100%	26%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	425.808.000	25	44.554.100	50	126.428.800											50	170.982.900	50%	40%		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	%	100	50.000.000	9	4.497.500	26	12.893.000											35	17.390.500	35%	35%		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	%	100	85.000.000	35	7.100.000	16	13.888.500											51	20.988.500	51%	25%		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	16.500.000	10	1.913.500	40	3.648.000											50	5.561.500	50%	34%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	%	100	27.500.000	25	4.805.000	25	7.104.600											50	11.909.600	50%	43%		Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1					2	3	4	5		6		7					8			9	10	11	12										
					atau Bangunan Lainnya																												
2	9	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	87.896.500	36	4.680.000	0	17.162.690, 00							3 6	21.842.690	36%	25%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian									
2	1 2	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	135.907.55 9	25	23.606.25 0	50	23.606.250							7 5	47.212.500	75%	35%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2	1 6	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan	%	100	336.860.00 0	25	54.712.00 0	25	11.765.825							5 0	66.477.825	50%	20%	Dinas Komunikasi dan Informatika									
2	1 8	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	55.000.000	5	2.715.000	21	9.368.600							2 6	12.083.600	26%	22%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2	2 3	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	%	100	63.000.000	16,6	10.445.00 0	36	20.951.500							5 3	31.396.500	53%	50%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan									
3	3 0	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung yang layak digunakan	%	100	126.503.60 0	25	25.081.00 0	25	18.052.000							5 0	43.133.000	50%	34%	Dinas Perdagangan									
2	2 2	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	40.115.000	20	5.692.000	2	430.000							2 2	6.122.000	22%	15%	Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga									
4	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase sarana/prasarana gedung yang representatif	%	100	12.000.000	25	1.918.000	50	4.584.000							7 5	6.502.000	75%	54%	Bagian Pemerintahan									

1					2		3	4	5		6		7		8				9	10	11	12
4	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	21	13.230.000	5	2.235.000	4	2.391.000					9	4.626.000	43%	35%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	18.893.120	0	0	13	2.490.000					1 3	2.490.000	13%	13%	Bagian Hukum
4	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	12.659.000	9	1.325.000	25	1.850.000					3 4	3.175.000	34%	25%	Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Adbang
4	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	9.200.000	10	935.000	30	2.460.000					4 0	3.395.000	40%	37%	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
4	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	233	250.000.00 0	32	34.225.40 0	72	77.312.741					1 0 4	111.538.141	45%	45%	Bagian Umum
5	2	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	108.000.00 0	5	39.344.20 0	1	20.318.400, 00					6	59.662.600	75%	55%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	75.321.565	25	20.465.50 0	25	15.230.650					5 0	35.696.150	50%	47%	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	2	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	%	100	50.000.000	35	17.665.00 0	25	9.384.000					6 0	27.049.000	60%	54%	Badan Pendapatan Daerah
5	3	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	8	50.000.000	2	19.146.90 0	4	23.546.900					6	42.693.800	75%	85%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12	
					atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi														Sumber Daya Manusia	
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana	Jenis	5	22.801.000	0	5.500.000	0	1.500.000				0	7.000.000	0%	31%	Inspektorat Daerah
8	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana kantor yang layak digunakan	%	100	35.000.000	25	10.450.000	25	7.870.000				50	18.320.000	50%	52%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	%	100	45.300.000	20	9.419.000	30	9.286.600				50	18.705.600	50%	41%	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	34.960.000	25	8.120.000	15	6.104.000				40	14.224.000	40%	41%	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	%	100	36.500.000	0	0	35	17.517.900				35	17.517.900	35%	48%	Kecamatan Taman
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	%	100	150.000.000	30	30.900.000	100	70.688.600				100	101.588.600	100%	68%	Dinas Perhubungan
1	2	1	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>76.550.000.000</b>	<b>0</b>	<b>13.697.784.421</b>	<b>0</b>	<b>17.788.001.603</b>				<b>0</b>	<b>31.485.786.024</b>	<b>0%</b>	<b>41%</b>	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	%	100	76.550.000.000	70	13.697.784.421	7,14	17.788.001.603				77	31.485.786.024	77%	41%	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	1	1	2.11		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan</b>	%	<b>100</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>6</b>	<b>176.316.936</b>	<b>6</b>	<b>187.745.853</b>				<b>12</b>	<b>364.062.789</b>	<b>12%</b>	<b>36%</b>	<b>Bagian Umum</b>

1					2	3	4	5		6		7		8			9	10	11	12		
					dan Wakil Kepala Daerah	Wakil Kepala Daerah																
4	1	1	2.1 1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	laporan	12	400.000.00 0	3	43.881.93 6	3	55.310.853					6	99.192.789	50%	25%	Bagian Umum
4	1	1	2.1 1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	laporan	12	600.000.00 0	3	132.435.0 00	3	132.435.00 0					6	264.870.000	50%	44%	Bagian Umum
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1 2</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.871.503.250</b>	<b>9</b>	<b>315.003.958</b>	<b>9</b>	<b>503.980.324</b>					<b>18</b>	<b>818.984.282</b>	<b>18%</b>	<b>44%</b>	<b>Bagian Umum</b>
4	1	1	2.1 2	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	laporan	12	1.010.792.1 50	3	165.485.6 63	3	300.542.88 0					6	466.028.543	50%	46%	Bagian Umum
4	1	1	2.1 2	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	laporan	12	550.000.00 0	3	126.916.5 05	3	177.504.55 8					6	304.421.063	50%	55%	Bagian Umum
4	1	1	2.1 2	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	laporan	12	310.711.10 0	3	22.601.79 0	3	25.932.886					6	48.534.676	50%	16%	Bagian Umum
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1 3</b>		<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Tingkat Kematangan Organisasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>28,2</b>	<b>1.495.714.750</b>	<b>0</b>	<b>212.496.625</b>	<b>0</b>	<b>121.629.540</b>					<b>0</b>	<b>334.126.165</b>	<b>0%</b>	<b>22%</b>	<b>Bagian Organisasi</b>
4	1	1	2.1 3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen	2	367.073.28 0	2	69.907.38 9	0	19.464.600					2	89.371.989	100%	24%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.1 3	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	dokumen	2	663.164.35 0	0	37.092.33 6	0	29.414.890					0	66.507.226	0%	10%	Bagian Organisasi
4	1	1	2.1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	2	465.477.12 0	0	105.496.9 00	1	72.750.050					1	178.246.950	50%	38%	Bagian Organisasi
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2.1 4</b>		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>1.922.341.180</b>	<b>1</b>	<b>207.779.200</b>	<b>4</b>	<b>96.511.000</b>					<b>5</b>	<b>304.290.200</b>	<b>5%</b>	<b>16%</b>	<b>Bagian Umum</b>
4	1	1	2.1 4	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kegiatan	10	1.922.341.1 80	1	207.779.2 00	4	96.511.000					5	304.290.200	50%	16%	Bagian Umum

1					2		3		4	5		6		7		8				9	10	11	12
4	2	1	2.1 5		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD</b>	%	100	15.939.735 .562	8,33	3.576.576 .405	35	4.179.535. 755						4 3, 3 3	7.756.112.1 60	43%	49%	
4	2	1	2.1 5	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	Bulan	12	15.553.173. 870	3	3.576.546. 405	3	4.002.912.5 55						6	7.579.458.96 0	50%	49%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1 5	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	Jenis	5	281.561.69 2	0	30.000	4	176.623.20 0						4	176.653.200	80%	63%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1 5	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	kali/ora ng	1	105.000.00 0	0	-	0							0	-	0%	0%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1 6		<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD</b>	%	100	3.752.503. 520	13,5	586.811.4 00	36	1.187.572. 524						4 9, 5	1.774.383.9 24	50%	47%	
4	2	1	2.1 6	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	Dokume n	4	37.326.520	0	684.000	1	100.000						1	784.000	25%	2%	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1 6	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional DPRD	%	100	3.715.177.0 00	27	586.127.4 00	47	1.187.472.5 24						7 4	1.773.599.92 4	74%	48%	Sekretariat DPRD



### **BAB III**

#### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun pada Perubahan RKPD 2022 menyesuaikan dengan asumsi makro dasar APBN 2022 dan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan tingkat pusat dan Provinsi Jawa Timur. Asumsi makro dalam perubahan APBN 2022, pertumbuhan ekonomi dijaga pada kisaran minus 0,4-2,3 persen sesuai skenario COVID-19 dan inflasi akan dijaga di kisaran 2-4 persen. Nilai tukar rupiah berada pada angka Rp14.900-15.500 per dolar AS. Lalu asumsi harga minyak atau *Indonesia Crude Price* (ICP) sebesar 30-35 dolar AS per barel. Produksi minyak siap jual atau lifting minyak sebesar 695-725 ribu barel minyak per hari. Lalu lifting gas di asumsikan sebesar 990-1050 ribu barel setara minyak per hari.

**Tabel 3.1**

**Asumsi Dasar Makro Ekonomi Indonesia 2022**

<b>Uraian</b>	<b>RAPBN</b>	<b>APBN</b>
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2	5,2
Inflasi (%)	3,0	3,0
Nilai tukar (rupiah/dollar AS)	14.350	14.350
Suku bunga SUN 10 tahun (%)	6,80	6,82
Harga Minyak (dollar AS/barel)	63	63
Produksi Minyak (rbph)	703	703
Produksi Gas (rbsmph)	1,036	1,036

*Sumber: Nota Keuangan APBN 2022*

Selain itu arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun memperhatikan berbagai regulasi pemerintah pusat dan Provinsi sebagai berikut

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

Selain berbagai hal diatas, kebijakan pembangunan ekonomi Kota Madiun selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Kebijakan pembangunan nasional dapat dilihat dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Setidaknya terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber: Bappenas, 2020 (RPJMN 2020 – 2024)

**Gambar 3.1**

**Tujuh Agenda Pembangunan Nasional**

Tujuh agenda pembangunan nasional, mengacu pada 5 (lima) arahan presiden yang meliputi pembungan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Tujuh agenda pembangunan nasional di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.**

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

## **2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.**

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: 1) Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah; 2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang; 3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah; 4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan 5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

## **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.**

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

## **4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.**

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan; 3) Moderasi beragama; dan 4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

## **5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; 4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan 5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

## **6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.**

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon.

## **7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara, melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; 2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; 3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sejalan dengan agenda pembangunan nasional, Pemerintah provinsi juga telah merumuskan agenda/strategi pembangunan daerah melalui 7 agenda utama sebagai berikut:

<b>7 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2022</b>	<b>7 Agenda Pembangunan Jatim Tahun 2022</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</li><li>2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</li><li>3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</li><li>4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</li><li>5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</li><li>6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</li><li>7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata</li><li>2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</li><li>3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan,</li><li>4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal</li><li>5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi</li><li>6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup,</li><li>7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur</li></ol>

**Gambar 3.2**

**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Jawa Timur Tahun 2022**

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan tujuh agenda prioritas pembangunan untuk Tahun 2022. Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah 1) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata; 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur; 3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI); 4). Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal; 5). Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan; 6). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; 7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

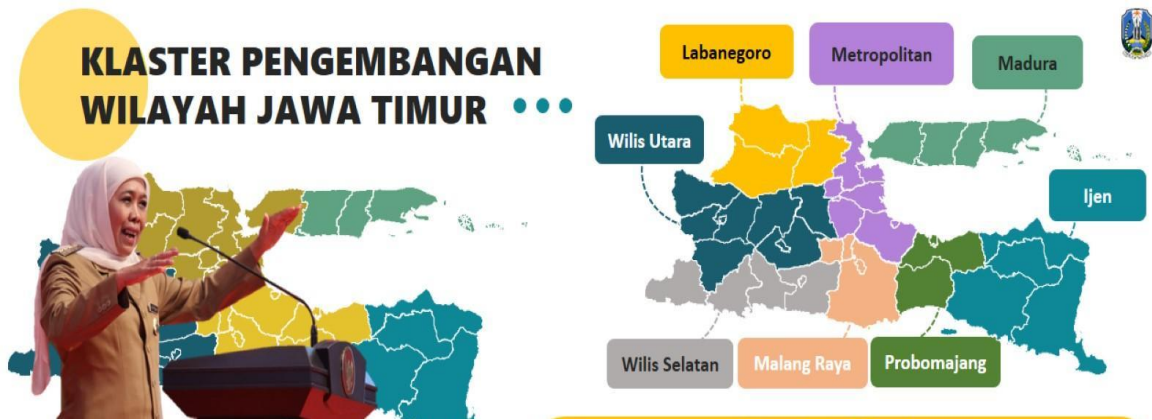
Dalam upaya mencapai agenda dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur, Pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Timur menerapkan klastering wilayah. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah sehingga meningkatkan nilai tambah pada wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan untuk peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran.



**Gambar 3. 3**  
**Pembagian Kawasan percepatan Pembangunan di Jawa Timur**

Percepatan pembangunan Kawasan di Jawa Timur diatur melalui Peraturan Presiden no 80 Tahun 2019. Perpres ini mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi Kawasan gerbang Kertosusila dan sekitarnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Selain itu, pembangunan Kawasan di tujukan di daerah hinterland utama Gerbangkertosusila. Kawasan Prioritas Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, meliputi Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Pacitan dengan fokus utama agroproduksi dan agroindustri, serta sektor pariwisata.

Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mempunyai tema peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan. Tema yang digunakan untuk pembangunan kawasan prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan tersebut melihat dari kondisi ekonomi saat ini yang memberikan kontribusi ekonomi yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian hortikultura, peternakan dan nilai tambah Agroindustri utamanya pada komoditas perkebunan dan hortikultura, serta biofarmaka dan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Selain itu Pengembangan Pariwisata berbasis agro dan sumberdaya alam lainnya (geopark dan lainnya) diharapkan dapat mengungkit perkembangan sektor ekonomi lainnya, didukung peningkatan Sumber Daya Manusia, peningkatan aksesibilitas infrastruktur pendukung lainnya dengan tetap menjamin kelestarian lingkungan.



**Gambar 3. 4**  
**Pembagian Klaster Wilayah Pembangunan Jawa Timur**

Di Jawa Timur, penetapan klaster dirumuskan atas dasar RPJMD tahun 2019–2024 dan juga arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka. Klaster kewilayahan difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Klaster kewilayahan yang ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Salah satu pengembangan klaster adalah klaster 2 yaitu Wilis Utara.

Klaster Wilis Utara terdiri dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan.

Arahan pengembangan pada Klaster Wilis Utara adalah:

- a. Aspek Sosial: Klaster Wilis Utara terbentuk dari latar belakang yang sama sebagai turunan dari budaya Matraman. Seperti halnya budaya Matraman dari Keraton Solo dan Surakarta, dalam kehidupan sosial masyarakatnya masih ada sistem pelapisan sosial atau stratafikasi sosial. Mayoritas wilayah Matraman masih menganut garis keturunan Patrilineal, dimana laki – laki mendapatkan keistimewaan lebih banyak dari wanita dalam hak tahta maupun harta. Berbeda dengan wilayah Klaster Wilis Selatan, di wilayah Wilis Utara tidak ada daerah pesisir pantai seperti Wilis Selatan, melainkan daerah dataran rendah dan pegunungan. Hal tersebut yang membentuk mata pencaharian masyarakatnya yang agraris atau sebagai petani. Selain itu yang membedakan Wilis Utara dengan Wilis Selatan adalah masyarakat di daerah Wilis Utara lebih bersifat Pluralistik atau majemuk.

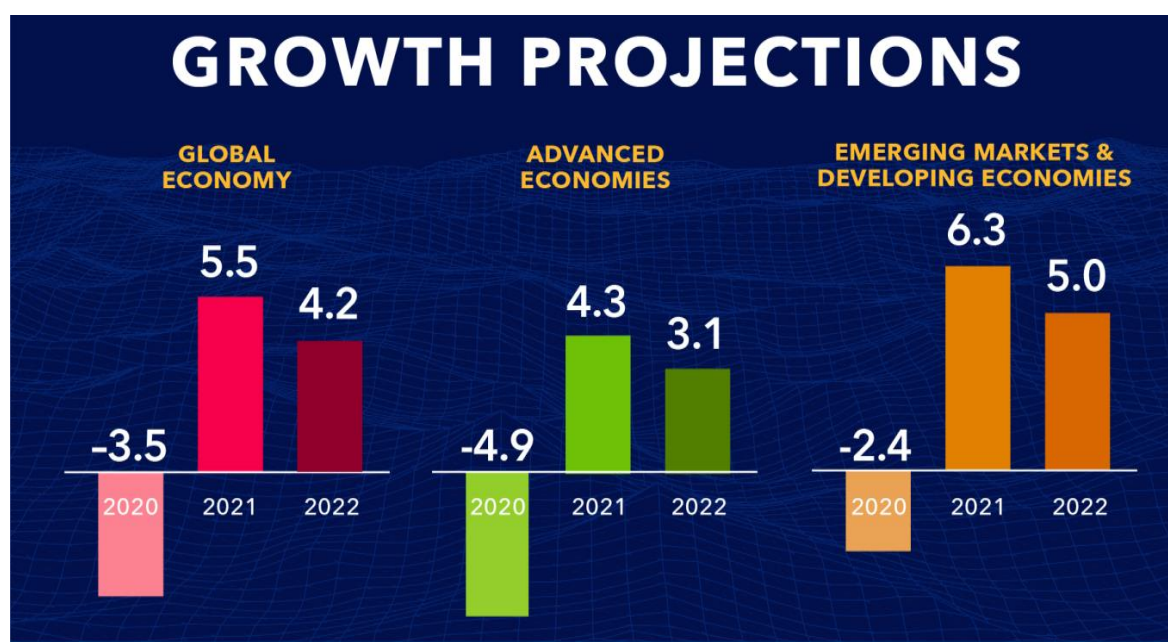
Hal itu disebabkan karena di beberapa wilayah Wilis Utara sudah menjadi daerah industri, sehingga terjadi interaksi sosial antara pendatang yang bekerja disektor industri dengan masyarakat lokal. Masyarakat di wilayah Wilis Utara merupakan masyarakat transisi, yaitu masyarakat yang awal mulanya masyarakat desa kemudian bertransisi menuju masyarakat perkotaan. Masyarakat transisi ini sangat mudah untuk menerima hal – hal baru tanpa ada seleksi, sehingga akan merubah kebudayaan yang lebih dulu ada termasuk adat istiadat dan mata pencaharian. Adanya perubahan yang terjadi di wilayah ini sangatlah cepat, munculnya istilah Orang Kaya Baru akibat industrialisasi karena berkurangnya interaksi sosial antar masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka di wilayah Wilis Utara memerlukan pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Di daerah klaster Wilis utara ini, masih terdapat kondisi wilayah tertinggal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan pergerakan perekonomian khususnya di daerah-daerah pegunungan, terpencil dan terdalam, oleh karena itu diperlukan beberapa alternatif kebijakan seperti Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;

- b. Aspek Ekonomi: Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan inkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan

Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.



**Kondisi ekonomi global pada tahun 2022 diproyeksikan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021.** Pada tahun 2020, kondisi perekonomian pada berbagai level masih menghadapi ketidakpastian akibat COVID-19 yang menyebabkan krisis kesehatan. Dampak dari adanya krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 menghambat laju mobilisasi barang jasa. Salah satunya adalah hilangnya mata pencaharian dan berkurangnya pendapatan penduduk. Sehingga, berimplikasi terhadap tingkat konsumsi dan daya beli penduduk. Pada tingkat dunia, pertumbuhan diprediksi menurun tajam sebesar -3,5 persen pada tahun 2020. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan dengan krisis keuangan tahun 2008. Sehingga, nilai pertumbuhan ekonomi, baik di level global maupun di Indonesia juga akan turun.



Sumber: IMF (2021)

**Gambar 3. 5**  
**Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2021 – 2022**

Pada tahun 2021, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global diprediksi meningkat sebesar 5,5 persen ketika terdapat dukungan kebijakan untuk rumah tangga ataupun pelaku bisnis yang terdampak pandemic COVID-19 dari sisi fiskal ataupun moneter. Seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi global di prediksi tumbuh sebesar 4,2 persen. Pada tahun 2022, negara berkembang di proyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dan jauh lebih tinggi dari Negara maju yang di proyeksikan hanya sebesar 3,1 persen.



**Gambar 3. 6**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai Triwulan I tahun 2022**

Sampai dengan triwulan I tahun 2022, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di tengah peningkatan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan I 2022 yang tetap kuat, yakni 5,01% (yoy), tidak jauh berbeda dengan capaian triwulan sebelumnya 5,02% (yoy). Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi nasional terjadi pada mayoritas lapangan usaha serta seluruh wilayah. Ke depan, perbaikan ekonomi domestik diperkirakan akan terus berlanjut hingga mencapai 4,5-5,3% untuk keseluruhan tahun 2022, didukung oleh akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi yang semakin luas, serta stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya.

Dari sisi pengeluaran, pemulihan ekonomi pada triwulan I 2022 terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,34% (yoy), jauh lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,55% (yoy). Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat yang lebih longgar pada triwulan I 2022 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi. Investasi tumbuh sebesar 4,09% (yoy), terutama ditopang oleh investasi nonbangunan, di tengah pertumbuhan investasi bangunan yang tetap terjaga. Sementara itu, konsumsi Pemerintah berkontraksi 7,74% (yoy) sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya belanja barang dan bantuan sosial khususnya untuk penanganan Covid-19 dan mitigasi dampaknya terhadap masyarakat. Kinerja ekspor tercatat tetap baik, tumbuh 16,22% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat di tengah masih terbatasnya dampak ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina. Adapun impor pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 15,03% (yoy) sejalan kinerja ekspor yang tetap baik dan permintaan domestik yang meningkat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2022 menunjukkan pertumbuhan positif. Perbaikan kinerja LU terutama didorong oleh beberapa LU, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Transportasi dan Pergudangan, seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat yang terjadi di seluruh wilayah. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Kalimantan.

Berbagai tantangan pada tahun 2020, menyebabkan kondisi perekonomian penuh dengan ketidakpastian. Namun demikian, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian. Berdasarkan fenomena tersebut, maka proyeksi asumsi makro tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

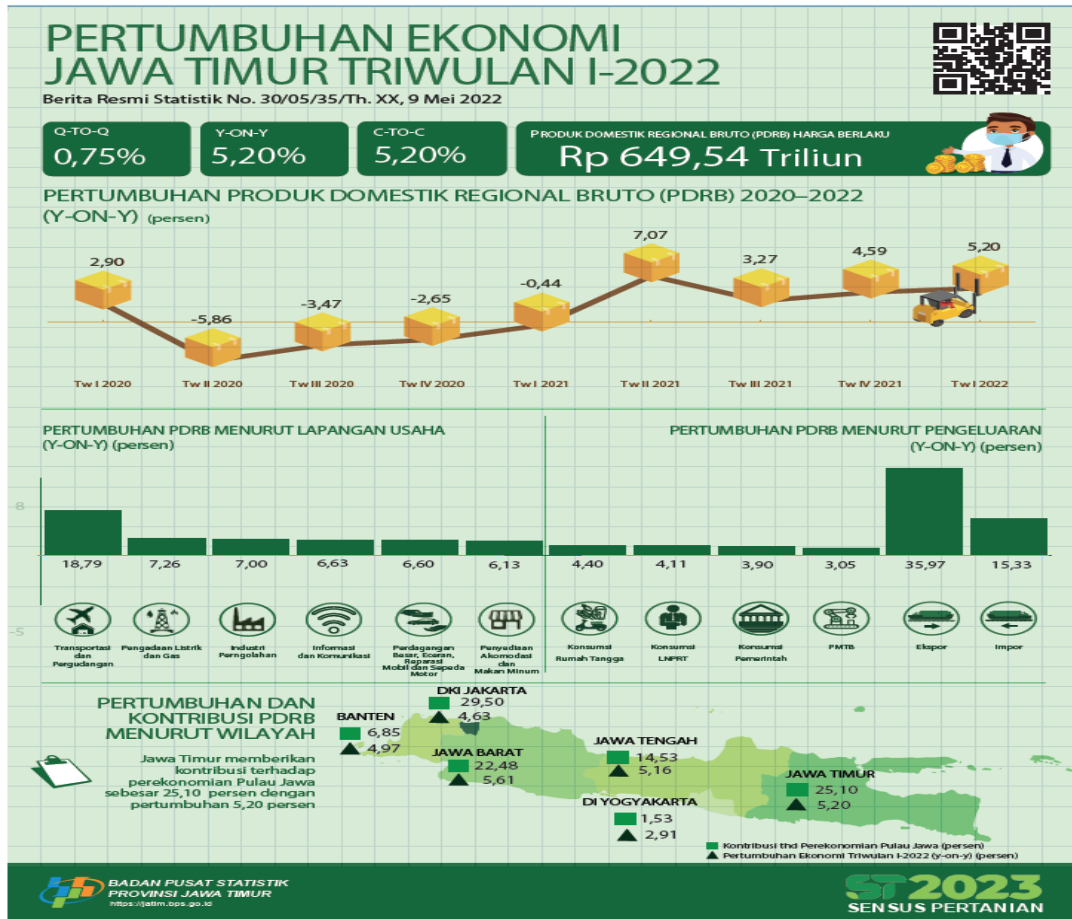
**Tabel 3. 2**  
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2022-2023**

Indikator	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>yoy</i> )	5,4 – 6,0	5,3 – 5,9
Inflasi (% <i>yoy</i> )	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
Tingkat Bunga SBN 10 Y (%)	5,98 – 8,07	7,34 – 9,16
Nilai Tukar (Rp/ US\$)	13.900 – 14.700	14.300 – 14.800
Harga Minyak/ ICP (USD/barel)	60 – 70	80 – 100
Lifting Minyak Mentah (ribu barel/hari)	636 – 735	619 – 680
Lifting Gas (BOE/hari)	1.232 – 1.341	1.020 – 1.116

Sumber: Kemenkeu, 2022

Secara umum, indikator makro ekonomi pada *outlook* tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan pada saat covid19 tahun 2020. Laju inflasi cukup kuat di tahun 2022 dan 2023 namun masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 2,0-4,0 persen. Kemudian, nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.300 hingga Rp14.800 per USD pada tahun 2023. Harga minyak juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 dari sekitar 60 – 70 USD per barel menjadi 80 – 100 USD per barel. Peningkatan ini di proyeksikan sebagai dampak ketidak pastian global yang salah satunya sebagai dampak perang antara Rusai dan Ukraina. Outlook pada tahun 2022 dan 2023, menunjukkan bahwa secara umum indikator makro ekonomi mulai menunjukkan perbaikan setelah covid19. Tentunya, hal ini tidak lepas dari upaya menggiatkan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama multilateral yang kuat untuk mengatasi dampak pandemi, termasuk membantu negara-negara yang mengalami kendala finansial/pendanaan, dan penyaluran bantuan ke negara-negara dengan kondisi kesehatan yang lemah. Selain kerjasama multilateral, stimulus dalam mitigasi ekonomi Indonesia juga dilakukan dari sisi fiskal maupun moneter.

Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam masa resesi ekonomi pada sisi moneter antara lain: (i) penurunan suku bunga; (ii) *Quantitative Easing (QE) Liquidity Swap*; (iii) pemberian fasilitas pinjaman; (iv) menurunkan *reserve requirement ratio*. Selanjutnya dari sisi fiskal, dukungan kebijakan yang diberlakukan antara lain: (i) peningkatan anggaran kesehatan penanganan COVID-19; (ii) *social safety net*; (iii) insentif perpajakan; (iv) bantuan subsidi upah bagi perusahaan; dan (v) *cash transfer* bagi UMKM.



**Gambar 3. 7**  
**Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur sampai Triwulan I tahun 2022**

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus menunjukkan progres baik. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang mencatat, perekonomian Jatim di kuartal I-2022 tumbuh positif 5,20 persen dibanding kuartal I-2021 Year over year (YoY). Sementara jika dibandingkan kuartal IV-2021 quater to quarter(q-to-q), pertumbuhan ekonomi Jatim pada kuartal I-2022 naik sebesar 0,75 persen. Meski pandemi Covid-19 belum usai, alhamdulillah perekonomian Jatim mulai bergerak membaik. Keseimbangan baru dalam perekonomian telah mulai terbentuk, dimana produksi meningkat seiring dengan adanya kenaikan permintaan.

Perekonomian Jawa Timur Triwulan I-2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestk Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 649,54 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 427,65 triliun. Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan IV-2021 meningkat sebesar 0,75 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 12,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 24,61 persen.

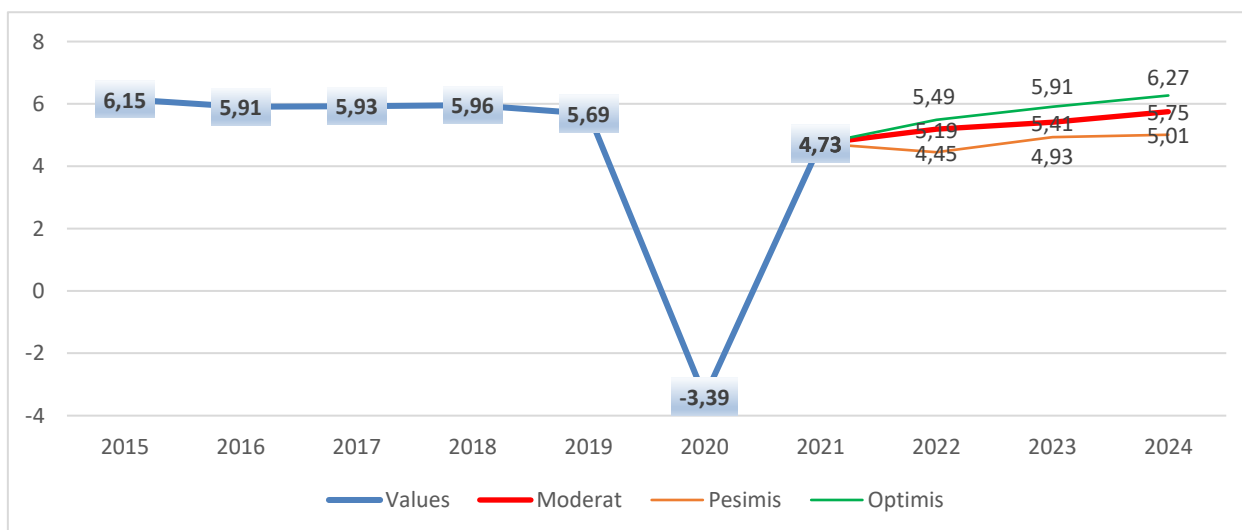
Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2022 dibandingkan Triwulan I-2021 meningkat sebesar 5,20 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 18,79 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 35,97 persen.

Ekonomi Jawa Timur triwulan I-2022 dibanding triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 0,75 persen (q-to-q). Pertumbuhan terkontraksi terjadi hampir di semua Komponen Pengeluaran, kecuali Ekspor Luar Negeri sebesar 24,61 persen. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) terkontraksi sebesar 1,69 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRRT) terkontraksi sebesar 0,25 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) terkontraksi sebesar 29,50 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) terkontraksi sebesar 3,88 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) terkontraksi sebesar 6,43 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 58,39 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 27,62 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 15,35 persen; Komponen PKP sebesar 4,16 persen; Komponen PKLNPRRT sebesar 1,17 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 18,02 persen. Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,20 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 35,97 persen; diikuti oleh Komponen PKRT dan Komponen PKLNPRRT yang masing-masing tumbuh sebesar 4,40 persen dan 4,11 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri tumbuh sebesar 15,33 persen.

Pada tahun 2022, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah pemulihan kondisi ekonomi ditengah pandemi yang masih berlangsung meskipun kondisi pandemic sudah membaik. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah tetap fokus pemulihan kondisi ekonomi dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat melalui reformasi struktural sebagai dampak dari pandemi tersebut. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun Pasca COVID-19 menunjukkan proyeksi kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2022 hingga tahun 2024.

Pada tahun 2020, tantangan utama perekonomian Kota Madiun adalah penanganan pandemi COVID-19. Sedangkan pada tahun selanjutnya, tantangan terbesar adalah pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak dari pandemi tersebut. Hasil proyeksi dengan berbagai skenario yang digunakan, prospek perekonomian Kota Madiun Pasca COVID-19 menunjukkan proyeksi kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

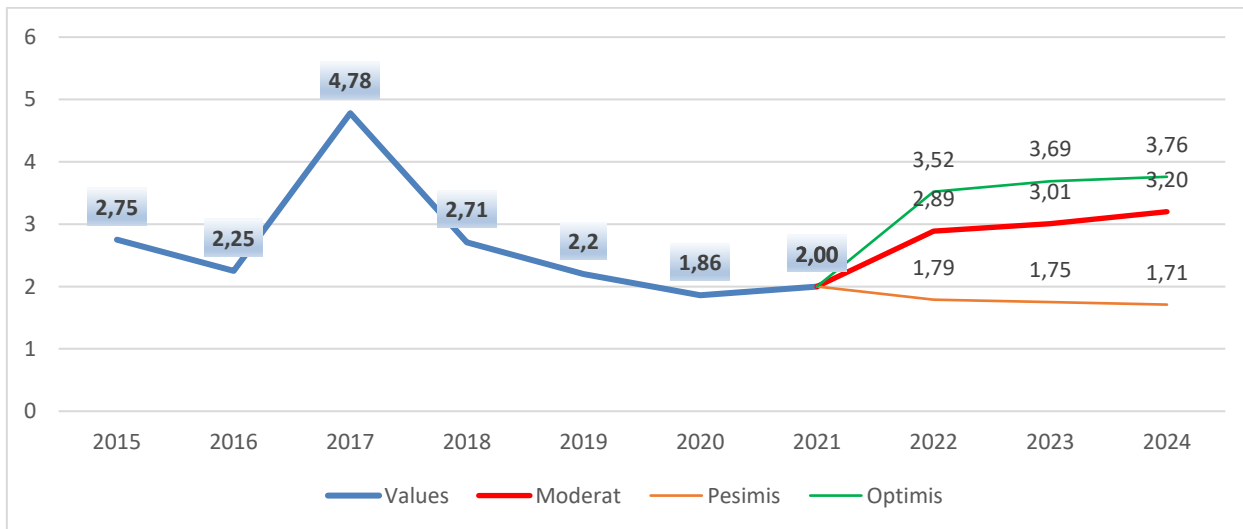


**Grafik 3. 1**

**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun tahun 2022 sampai dengan tahun 2024**

Sumber : BKAD Kota Madiun, Tahun 2022

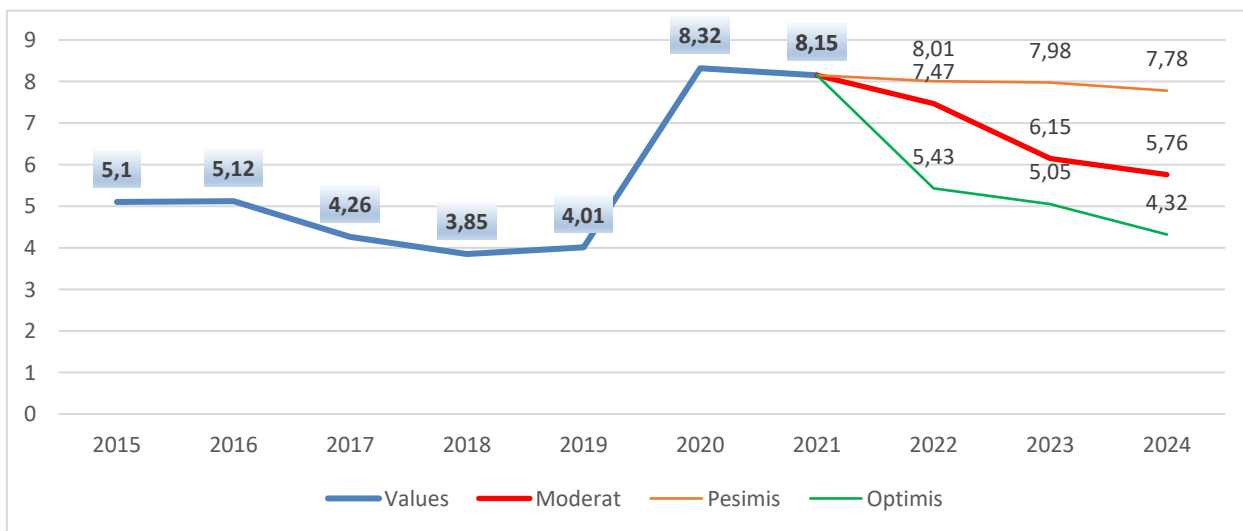
Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018 pertumbuhan ekonomi masih cukup progresif dengan adanya peningkatan yakni dari 5,93 ke 5,96. Namun demikian, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan 5,69 persen dan mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 yaitu menjadi minus 3,39 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,73 persen. Pada tahun 2022, dengan asumsi program vaksinasi Covid19 telah berhasil menurunkan kasus Covid19, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,19 persen dengan skema moderat. Sedangkan pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 5,41 persen.



**Grafik 3. 2**  
**Proyeksi Inflasi Kota Madiun tahun 2022 sampai dengan tahun 2024**

Sumber : BKAD Kota Madiun, Tahun 2022

Inflasi Kota Madiun dalam tiga tahun terakhir mengalami nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2015, inflasi sebesar 2,75 persen dan mengalami peningkatan sebesar 4,78 persen tahun 2017. Setelah tahun 2017, nilai inflasi mengalami trend yang semakin menurun. Pada tahun 2019, tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 2,20 persen. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap inflasi tahun 2020 mengalami penurunan hingga 1,86 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan kondisi daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak luas COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat inflasi mengalami perbaikan dan berada pada angka 2,00 persen. Selanjutnya, pada tahun 2022 dan 2023, nilai inflasi di proyeksikan sebesar 2,89 persen dan 3,01 persen dengan skema moderat. Nilai inflasi yang stabil dalam perekonomian, jika nilainya berada pada rentang 3 – 5 persen.

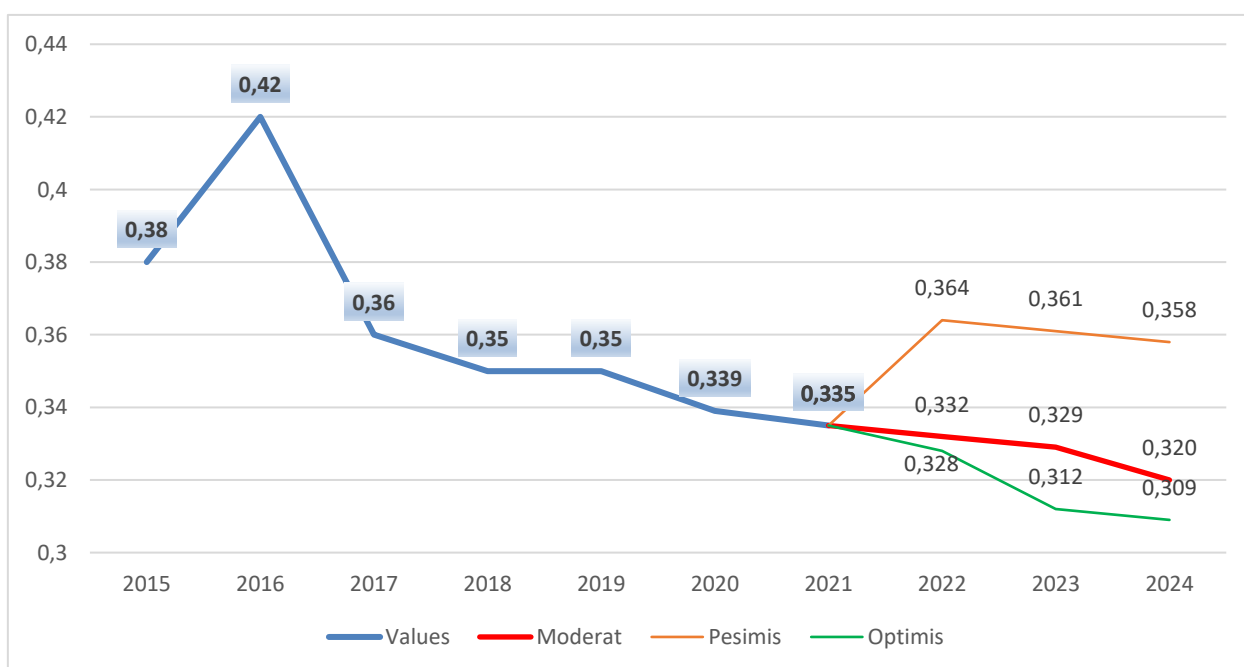


**Grafik 3. 3**  
**Proyeksi TPT Kota Madiun tahun 2022 sampai dengan tahun 2024**

Sumber : BKAD Kota Madiun, Tahun 2022



Seiring dengan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun tahun 2020, TPT mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, TPT Kota Madiun sebesar 4,01 persen. Kemudian, pada tahun 2020, TPT mengalami peningkatan sebesar 8,32 persen. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, TPT masih sangat tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi 8,15 persen. Dengan tren pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, TPT di proyeksikan akan mengalami penurunan masing – masing sebesar 7,47 persen tahun 2022 dan 6,15 persen tahun 2023 dengan skema moderat.

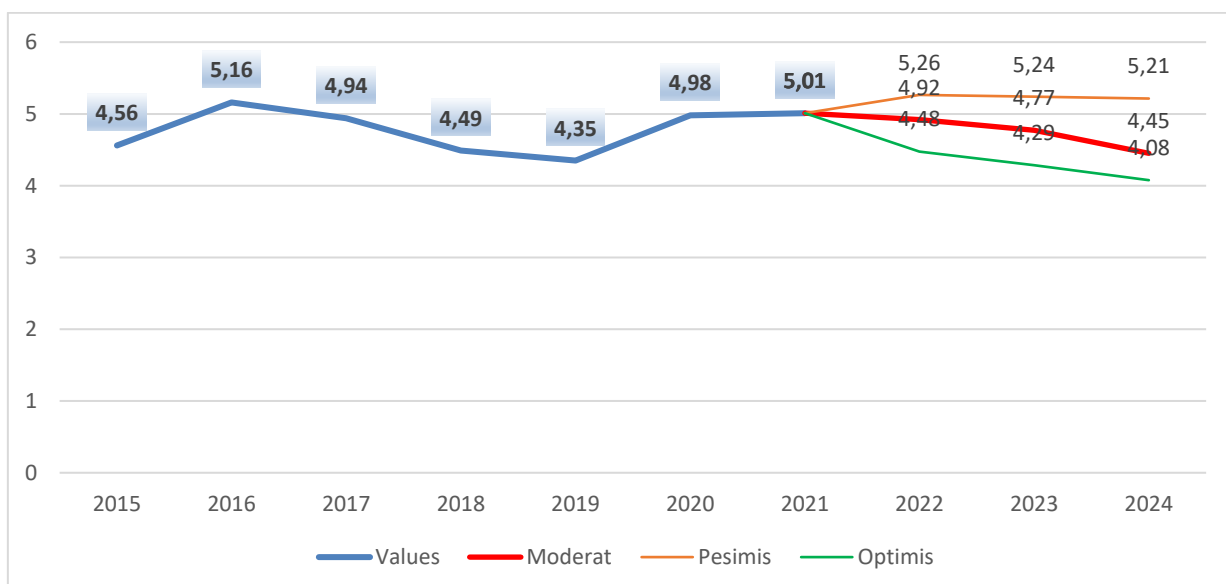


**Grafik 3. 4**

**Proyeksi Ketimpangan pendapatan Kota Madiun 2022 sampai dengan tahun 2024**

Sumber : BKAD Kota Madiun, Tahun 2022

Meski terdapat pelemahan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya TPT sebagai dampak COVID19, ketimpangan pendapatan tahun 2020 justru mengalami penurunan hingga 0,339. Kemudian di tahun 2021 sampai 2024, rasio gini mengalami sedikit penurunan menjadi 0,335. Pada tahun 2022 dan 2023, indek gini di proyeksikan mengalami penurunan masing – masing sebesar 0,332 dan 0,329 dengan skema moderat. Nilai indek diatas 0,30 mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat berkategori sedang.

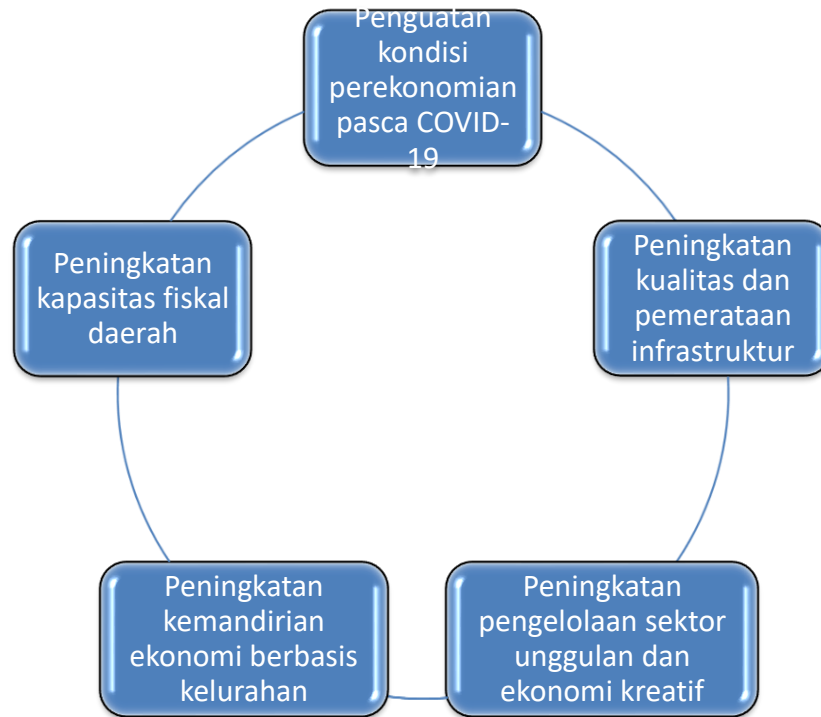


**Grafik 3. 5**  
**Proyeksi Tingkat kemiskinan Kota Madiun 2022 sampai dengan tahun 2024**

Sumber : BKAD Kota Madiun, Tahun 2022

Tingkat kemiskinan di Kota Madiun sejak tahun 2016 – 2019 terus mengalami penurunan. Pada periode tersebut, tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang relatif cepat. Namun pada tahun 2019, penurunan kemiskinan mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemic COVID-19 yaitu sebesar 4,98 persen. Pada tahun 2021, dengan masih terjadinya eskalasi pandemic, tingkat kemiskinan sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,01 persen. Dengan asumsi, perekonomian kota Madiun terus mengalami peningkatan yang didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali maka tingkat kemiskinan pada tahun 2022 dan 2023 di proyeksikan mengalami penurunan dengan nilai masing – masing sebesar 4,92 persen dan 4,77 persen.

**Arah kebijakan ekonomi Kota Madiun tahun 2022 diprioritaskan pada upaya stabilisasi dan pemulihan ekonomi Kota Madiun sebagai dampak COVID-19.** Beberapa kebijakan tersebut fokus pada pemulihan (*recovery*) kondisi perekonomian pasca wabah COVID-19, peningkatan infrastruktur daerah, dan penguatan kondisi ekonomi daerah. Secara rinci, arah kebijakan Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan kondisi ekisting dan permasalahan pembangunan antara lain:



**Grafik 3. 6**  
**Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2022**

1. Peningkatan kondisi perekonomian pasca COVID-19

Orientasi pergerakan ekonomi difokuskan pada pemulihan/*recovery* dampak COVID-19 pada semua sektor ekonomi. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian, maka difokuskan pada sektor unggulan dan potensial, khususnya sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri berbasis sumber daya lokal, dan pariwisata untuk mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,19 persen dengan skenario moderat Tahun 2022. Pertumbuhan ini diharapkan dapat disertai dengan pemerataan pendapatan pada semua lapisan masyarakat (pertumbuhan inklusif). Inflasi daerah dijaga pada posisi 3–5 %, inflasi yang terkendali diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

2. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional, melalui : 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; 2) Pembangunan infrastruktur kawasan baik kelurahan maupun kecamatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah

3. Peningkatan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif  
Kebijakan menarik investasi dalam rangka mengakselerasi *recovery* dari dampak COVID-19 difokuskan pada peningkatan promosi investasi pada sektor pariwisata, pertanian dan agroindustry.
4. Peningkatan kemandirian ekonomi berbasis kelurahan  
Mendorong pergerakan ekonomi di kawasan kelurahan dengan fokus pada pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal serta mengoptimalkan penggunaan program pengembangn keluarahn untuk menstimulus perekonomian
5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah  
Kebijakan relaksasi dalam rangka *recovery* COVID-19 dapat difokuskan pada stimulus fiskal bagi perekonomian dan dunia usaha, salah satunya dengan kebijakan *sunset policy*. Kebijakan relaksasi ini dapat diikuti dengan peningkatan program pemberdayaan Usaha Mikro dan koperasi

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kota Madiun. Secara rinci, arah dan kebijakan keuangan Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kota Madiun Tahun 2022, terdapat beberapa perubahan arah kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan target pendapatan daerah dilakukan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian;
2. Penguatan kondisi ekonomi daerah sebagai dampak COVID19 membutuhkan berbagai insentif fiskal baik dari sisi pendapatan maupun belanja;

3. Peningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial daerah;
4. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
5. Peningkatan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
6. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
7. Peningkatan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
10. Peningkatan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
  - b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
    1. Meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem *online* di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
    2. Meningkatkan kapasitas aparatur PD penghasil dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem *rewards and punishment* untuk meningkatkan kinerja PD penghasil.
    3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Madiun.

- c. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang *social oriented* dan *profit oriented*. Untuk BUMD yang memiliki *profit oriented* diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

## 2. Pendapatan transfer

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Madiun akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas.

## 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

- a. Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur melalui hibah, bagi hasil pajak dari provinsi maupun bantuan keuangan.

Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik  
Kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui percepatan mekanisme/prosedur, waktu, dan kualitas pelayanan serta kepuasan masyarakat;
  - b. Meningkatkan kualitas SDM (aparatur daerah), khususnya yang berkaitan dengan pemungutan PAD;
  - c. Mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak swasta;
  - d. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.
2. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan transfer dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat, berkaitan dengan alokasi dana DAK dan DBH;
3. Upaya untuk meningkatkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat mengenai kepastian dana hibah; dana darurat; dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi, yang diperoleh Kota Madiun;
- b. Meningkatkan kerjasama antar OPD Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara intensif.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik orientasi *output* maupun *outcomenya*. Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2023 disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2023 didasarkan pada tujuh kebijakan utama, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
2. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program* prioritas);
3. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja (*performance based*), sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama Kota Madiun pada Tahun 2022
4. Optimalisasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah.
6. Belanja daerah difokuskan dapat memenuhi *mandatory spending* atau belanja-belanja yang sudah di- *earmark*, seperti pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM);

7. Belanja daerah lainnya dalam rangka recovery dan penanganan dampak atas pandemi COVID-19 pada semua bidang. Dalam kondisi pandemi COVID-19 belum berakhir di tahun 2020, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas tahunan maupun program non prioritas yang telah direncanakan, dapat difocusing dan realokasi untuk penanganan pandemi COVID 19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, arah kebijakan belanja daerah diuraikan pada masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

- a. Alokasi Belanja Pegawai diproyeksikan sebesar 50,58 persen dari Belanja operasi, dengan mempertimbangkan penerimaan tenaga P3K dan pemberian TPP bagi ASN sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. belanja Barang dan Jasa yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan pelayanan publik.
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Namun pada RKPD Kota Madiun 2022, belanja subsidi tidak dianggarkan.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.



## 2. Belanja Modal

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Naumn dalam RKPD 2022, kebutuhan belanja ini tidak dianggarka;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan dipos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force major*, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

1. Belanja Bantuan Keuangan adalah diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Belanja Hibah adalah belanja Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selisih dari keduanya disebut sebagai pembiayaan netto, yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Madiun Tahun 2023 terdiri atas empat kebijakan utama. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah yang diambil yaitu dengan Peningkatan pembiayaan kreatif, melalui kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pentingnya pembiayaan non-APBD disebabkan karena terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, kebutuhan belanja daerah dalam penyediaan sarana publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Sehingga, hanya kebutuhan prioritas yang dibiayai oleh pemerintah. Melalui kerjasama dengan pihak swasta, diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa ter-*cover* oleh pemerintah daerah.

### **3.2.4 Kerangka Pendanaan 2022**

Kerangka pendanaan memiliki hubungan yang sejalan dengan kondisi indikator ekonomi makro. Proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun mengalami perubahan signifikan di seluruh komponen pendapatan, mulai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya sebagian pendapatan masyarakat, serta penurunan tingkat konsumsi dan produksi selama pandemi COVID-19. Selain itu, penurunan Pendapatan Daerah juga disebabkan adanya kebijakan relaksasi berbagai jenis pajak dan retribusi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dampak pandemi COVID-19 membawa dampak luar biasa pada pendapatan nasional, sehingga berpengaruh terhadap dana transfer ke daerah.

Secara umum, Pendapatan Daerah Kota Madiun sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami perubahan dari Rp983.489.327.133 menjadi Rp1.002.786.858.454, meningkat sebesar Rp19.297.531.321. Pendapatan Asli Daerah dan beberapa komponennya diproyeksikan mengalami penurunan dari APBD 2022 yaitu berubah menjadi Rp11.794.447.038. pajak daerah dan ritribusi daerah mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp4.811.000.000 dan Rp213.852.200. sedangkan komponen PAD lainnya mengalami penurunan yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Transfer yang diterima mengalami peningkatan baik untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan nilai masing-masing sebesar Rp7.009.154.000 dan Rp24.082.824.359. sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan.

Sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah tahun 2022, belanja daerah diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp1.158.489.327.133 menjadi Rp1.298.723.526.272 dengan perubahan defisit yang mengalami selisih penurunan Rp120.936.667.818. belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp38.986.664.071 dengan komponen belanja pegawai dan hibah yang mengalami penurunan hingga Rp8.084.890.602 dan Rp1.524.735.000. sedangkan komponen belanja dalam operasi lainnya mengalami peningkatan seperti belanja barang dan jasa, subsidi, dan bantuan sosial.

Belanja Modal mengalami peningkatan dari Rp169.091.131.325 menjadi Rp246.114.907.548. seluruh komponen dalam belanja modal mengalami peningkatan kecuali belanja modal tanah. Belanja Tidak Terduga yang sebelumnya dianggarkan sebesar 8.782.065.139 meningkat menjadi Rp32.990.703.984. Sedangkan Belanja Transfer tidak mengalami perubahan. Proyeksi perubahan Kerangka Pendanaan dalam Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 secara spesifik dapat dilihat pada **Tabel dibawah.**

**Tabel 3. 3**  
**Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Madiun 2022**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah/(Berkurang)</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>250.325.014.082</b>	<b>238.530.567.044</b>	<b>(11.794.447.038)</b>
4.1.01	Pajak Daerah	86.255.000.000	91.066.000.000	<b>4.811.000.000</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	17.841.947.807	18.055.800.007	<b>213.852.200</b>
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.216.268.562	15.158.702.324	<b>(57.566.238)</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	131.011.797.713	114.250.064.713	<b>(16.761.733.000)</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>733.164.313.051</b>	<b>764.256.291.410</b>	<b>31.091.978.359</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	671.774.862.000	678.784.016.000	<b>7.009.154.000</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak	24.161.094.000	25.087.327.000	<b>926.233.000</b>
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	49.596.509.000	52.754.915.000	<b>3.158.406.000</b>
	Dana Bagi Hasil Cukai	18.922.855.000	21.847.370.000	<b>2.924.515.000</b>
	Dana Alokasi Umum	465.495.171.000	465.495.171.000	<b>0</b>
	Dana Alokasi Khusus	93.630.455.000	93.630.455.000	<b>0</b>
	Dana Insentif Daerah	19.968.778.000	19.968.778.000	<b>0</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61.389.451.051	85.472.275.410	<b>24.082.824.359</b>
	Pendapatan Bagi Hasil	61.234.672.051	84.656.513.410	<b>23.421.841.359</b>

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah/(Berkurang)</b>
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	154.779.000	815.762.000	<b>660.983.000</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	<b>0</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>983.489.327.133</b>	<b>1.002.786.858.454</b>	<b>19.297.531.321</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>980.616.130.669</b>	<b>1.019.617.914.740</b>	<b>39.001.784.071</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	493.730.745.957	485.660.975.355	<b>(8.069.770.602)</b>
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	444.965.688.854	488.951.780.065	<b>43.986.091.211</b>
5.1.04	Belanja Subsidi	0	81.500.000	<b>81.500.000</b>
5.1.05	Belanja Hibah	16.823.187.778	15.298.452.778	<b>(1.524.735.000)</b>
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	25.096.508.080	29.625.206.542	<b>4.528.698.462</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>169.091.131.325</b>	<b>246.114.907.548</b>	<b>77.023.776.223</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.500.000.000	0	<b>(2.500.000.000)</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.760.942.083	67.509.082.397	<b>37.748.140.314</b>
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.453.116.310	68.506.407.085	<b>19.053.290.775</b>
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.822.087.152	107.029.721.886	<b>22.207.634.734</b>

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah/(Berkurang)</b>
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.554.985.780	3.069.696.180	<b>514.710.400</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>8.782.065.139</b>	<b>32.990.703.984</b>	<b>24.208.638.845</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.782.065.139	32.990.703.984	<b>24.208.638.845</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.298.723.526.272</b>	<b>140.234.199.139</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(175.000.000.000)</b>	<b>(295.936.667.818)</b>	<b>(120.936.667.818)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>295.936.667.818</b>	<b>120.936.667.818</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.000.000.000	295.936.667.818	<b>120.936.667.818</b>
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>295.936.667.818</b>	<b>120.936.667.818</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>295.936.667.818</b>	<b>120.936.667.818</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.298.723.526.272</b>	<b>140.234.199.139</b>

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2022

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kota Madiun menjelaskan keterkaitan dengan visi dan misi dalam dokumen RPJMD tahun 2019-2024. Visi Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**. Terdapat dua pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kota Madiun 2019-2024. Pilar pertama adalah mewujudkan Pemerintahan Kota Madiun Bersih dan berwibawa. Kota Madiun berusaha untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih berwibawa, profesional dan melayani masyarakat. Dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, proses dan jalannya pembangunan diharapkan akan lebih cepat dan terlaksana serta mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Pilar selanjutnya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Kota Madiun berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera yang dicirikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, serta masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang Maha Esa.



**Gambar 4. 1**  
**Hubungan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun 2019-2024**



Terdapat empat misi pembangunan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019–2024. Keempat misi tersebut adalah 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance); 2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun; dan 4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Dalam rangka pencapaian misi ditas diperlukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Dalam**  
**Perubahan RPJMD 2019-2024**

<b>Tujuan dan Sasaran</b>		
<b>1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>		
<b>T1</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	<b>IT1.1. Indeks Reformasi Briokrasi</b>
S1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun IS1.2. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IS1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
S2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun IS2.2. Indeks Inovasi Daerah
<b>2. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan</b>		
<b>T2</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	<b>IT2.1. livable city</b>
S3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1. Indeks Infrastruktur
S4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
<b>3. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun</b>		
<b>T3</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	<b>IT3.1. Indeks Pembangunan Manusia</b> <b>IT3.2. Indeks Pembangunan Gender</b>
S5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1. Harapan Lama Sekolah IS5.2. Rata-rata Lama Sekolah
S6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1. Angka Harapan Hidup
S7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1. Indeks Pemberdayaan Gender
<b>4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pemerataan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun</b>		
<b>T4</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	<b>IT4.1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>
S8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	IS8.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tujuan dan Sasaran		
S9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS9.1 Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
		IS9.2. Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa
T5	<b>Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	<b>IT5.1. Indeks Ketentraman</b>
		<b>IT5.2. Indek Gini</b>
S10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1. Angka Kemiskinan
S11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1. Indeks Kerukunan
		IS11.2. Indeks rasa aman

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022

Indikator kinerja pembangunan daerah dapat dipetakan ke dalam tiga aspek utama yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, Indeks Gini, Indeks Reformasi Birokrasi, dan lain sebagainya. Aspek Pelayanan Umum meliputi empat fokus yaitu Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Aspek Daya Saing Daerah meliputi empat fokus yaitu Kemampuan Ekonomi Daerah, Iklim Berinvestasi, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi terkini. Adapun rincian mengenai indikator dan target Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kota Madiun pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah**  
**pada Perubahan RKPD Tahun 2022**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target	
				RPJMD 2022	Penyesuaian Perubahan RKPD 2022
1	<b>T1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	(B) 66,26	(B) 68	(B) 68
2	<b>T2. Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	Livable City	89,40	88,19	89,40

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target	
				RPJMD 2022	Penyesuaian Perubahan RKPD 2022
3	<b>T3. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,25	81,70	81,70
		Indeks Pembangunan Gender	94,38	94,44	94,44
4	<b>T4. Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	6,87	6,40	6,88
5	<b>T5. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	Indeks Ketentraman	78,74	77,05	77,05
		Indeks Gini	0,345	0,37	0,345

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022

#### 4.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022

Perumusan prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2022 di dasarkan pada sinkronisasi prioritas pembangunan nasional di level nasional dan provinsi. Selain itu, prioritas pembangunan mangacu pada startegi dana rah kebijakan serta program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2020. Selanjutnya, perumusan prioritas pembangunan juga melihat permasalahan dan isu strategis yang berkembang, serta pokok pikiran anggota dewan perwakilan daerah. Telaah terhadap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019–2024 dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 4. 3**  
**Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2019-2024**

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perhubungan)</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</li> <li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li> <li>• Program Pengembangan Umkm</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> <li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>• Program Hubungan Industrial</li> <li>• Program Pengembangan Umkm</li> <li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan lingkungan, dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)</li> </ul>
Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan)</li> <li>● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Dan Kb)</li> <li>● Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>● Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>● Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> <li>● Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan</li> <li>● Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>● Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>● Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>● Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li> <li>● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat)</li> <li>● Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</li> </ul>
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Program Kepegawaian Daerah</li> <li>● Pendidikan Dan Pelatihan</li> <li>● Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Aplikasi Informatika</li> <li>● Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum Sekretariat Daerah)</li> <li>● Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li> <li>● Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengendalian Dan Evaluasi</li> </ul>

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</li> <li>• Program Informasi Dan Komunikasi Publik</li> <li>• Program Aplikasi Informatika</li> </ul>

Telah selanjutnya dalam proses perumusan prioritas pembangunan adalah dari hasil Pokok-pokok pikiran DPRD, yang dilaksanakan melalui serap aspirasi masyarakat baik lewat mekanisme Reses masa sidang maupun Kunjungan kerja. Kemudian, hasilnya dituangkan dalam POKIR DPRD yang mencakup beberapa aspek yang mendukung pada prioritas pembangunan. Selain itu terdapat berbagai usulan dari anggota dewan berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4. 4**  
**Beberapa Usulan Anggota Dewan Berdasarkan Serap Aspirasi Masyarakat**

No	Urusan	Usulan	OPD Tujuan
1	Lingkungan Hidup	Bantuan Peralatan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
2	Sosial	Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Sekretariat Daerah	Papan Nama RT RW	Sekretariat Daerah
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Paving Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan / Perbaikan Pagar Makam	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan / Perbaikan Trotoar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan RTH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Air / Gorong – Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Lampu Jalan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Saluran Air / Gorong – Gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Pertanian	Rehab saluran pengairan sawah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Penentuan prioritas pembangunan selanjutnya di dasarkan pada hasil penelaahan permasalahan pembangunan dan perumusan Isu Strategis. Beberapa isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kota tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan pariwisata daerah
- b. Peningkatan pembangunan infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu
- c. Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya kondusi masyarakat yang aman dan tentram
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik



**Gambar 4. 2**  
**Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2022**

Secara detail, isu strategis serta masalah Kota Madiun Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Isu Strategis dan Masalah Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022**

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
<p><b>Isu Strategis 1: Percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan pariwisata daerah</b></p>	Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan mengalami perbaikan pada tahun 2021 jika kasus Covid19 menurun dan vaksinasi berhasil
	Kontribusi sektor unggulan belum optimal
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat, namun belum dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja baru
	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system
	Masih rendahnya peningkatan PAD
	Masih rendahnya jejaring pasar perdagangan antar produsen
	Kurangunya mutu produk industri kecil
	Rendahnya keterampilan industri kecil dalam melakukan diversifikasi dan inovasi dalam pengolahan komoditas hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
	Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki industri kecil untuk mendapatkan sertifikat SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industry
	Beberapa pelaku usaha setelah mendapatkan izin usaha-nya belum mengurus izin komersial-nya, sehingga izin usahanya belum efektif dan belum dapat melakukan usaha, akibatnya nilai investasinya tidak bisa di masukkan sebagai realisasi investasi
	Masih terbatasnya pemahaman dunia usaha untuk menggunakan OSS
	Masih rendahnya kontribusi BUMD
	Masih terbatasnya kontribusi PAD
	Infrastruktur pendukung investasi belum memadai
	Kurangunya cakupan data perdagangan di Kota Madiun
	Masih terbatasnya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun
	Kurang optimalnya pengelolaan pasar yang menciptakan perbaikan dan pembaruan pasar sebagai wisata pasar rakyat di Kota Madiun
	Masih terbatasnya fasilitas sarana prasarana seni budaya untuk masyarakat seni Kota Madiun
	Masih sedikitnya destinasi wisata yang ada di Kota Madiun
Produksi, pengolahan , budaya/regenerasi petani peternak, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian, dan daya saing sektor pertanian (peternakan dan kesehatan hewan) belum optimal	
Produksi, pengolahan , budaya/regenerasi petani pembudidaya ikan, dan daya saing sektor perikanan belum optimal	
Pengangguran yang meningkat.	

<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
<p><b>Isi Strategis 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu</b></p>	<p>Kurang optimalnya penyusunan dokumen kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kota</p>
	<p>Kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang</p>
	<p>Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang</p>
	<p>Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah</p>
	<p>Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang</p>
	<p>banyaknya parkir di tepi jalan dan meningkatnya pengguna jalan dengan kendaraan pribadi membuat penurunan kinerja ruas jalan</p>
	<p>Permukiman kumuh di Kota Madiun yang sebelumnya 0% setelah dilakukan konversi ke 16 parameter sebagaimana ditentukan dalam Permen PUPR No.14 Tahun 2018 masih terdapat 64,2 ha yang tersebar di beberapa kelurahan dengan status kumuh ringan dan masih terdapat beberapa area yang mendekati kumuh. Untuk mencegah berkembangnya permukiman kumuh serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman maka terhadap komponen-komponen pembentuk permukiman kumuh perlu penanganan secara terus menerus</p>
	<p>Rumah tinggal yang bersanitasi di Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai 99,00%. Namun demikian jika diteliti lebih jauh kondisi sanitasi rumah tinggal belum semua kondisinya layak dan memadai sesuai standar bangunan sanitasi yang sehat dan aman bagi lingkungan sekitarnya terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sanitasi yang layak dan memadai</p>
	<p>Masih terdapat kekurangan kebutuhan rumah baik backlog kependhunian dan backlog kepemilikan.</p>
	<p>Belum optimalnya penyediaan PSU dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</p>
	<p>Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman</p>
	<p>Belum optimalnya sarana dan prasarana 83 makam aset Pemerintah Kota Madiun</p>
	<p>Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat</p>
	<p>Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana</p>
	<p>Pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan akan risiko bencana masih rendah</p>
	<p>Dokumen atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan belum tersusun</p>
<p>Belum adanya SOP Penanganan Bencana</p>	
<p>Jumlah pegawai penanggulangan bencana yang terbatas</p>	



ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
<p><b>Isu Strategis 3: Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya kondusi masyarakat yang aman dan tentram</b></p>	Belum optimalnya SPM dan SNP. Belum terstandarnya SNP sarpras sekolah
	Masih kurangnya sarana dan prasarana pada lembaga PAUD, lembaga swasta SD dan SMP (khususnya gedung dan bangunan)
	Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (sertifikasi dan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan)
	Kurangnya kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran abad 21 khususnya dalam penggunaan teknologi dan informasi
	Kurangnya tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. (kurangnya jumlag guru pendidikan dasar dan pengawas sekolah)
	Jumlah dan kompetensi tenaga pendidik tidak merata di setiap sekolah
	Belum banyaknya prestasi nasional yang diraih oleh peserta didik di bidang sains dan kesenian.
	Akses Internet yang kurang memadai
	Kuarangnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sarana prasarana, dan guru.
	Belum berkembangnya metode kurikulum daring
	Kegemaran membaca buku belum menjadi kebutuhan utama
	Perlunya penambahan ruang penunjang fungsi perpustakaan
	Jumlah tenaga pengelola perpustakaan belum memenuhi standard nasional perpustakaan
	Belum semua tenaga pengelola perpustakaan yang ada memiliki komptensi tenaga pengelola perpustakaan sesuai SNP
	Layanan berbasis TIK belum mengikuti perkembangan iptek dan kebutuhan
	Belum optimalnya Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	Keterlambatan pembayaran Klaim oleh BPJS namun pelayanan tetap harus optimal
	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kecukupan Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Umum dan Tenaga Fungsional seperti Apoteker, Rekam Medis, Analis Kesehatan, Elektromedik, Fisikawan Medik, Radiografer, Nutrisionis, Dietesien, Tenaga Terapi Okupasi, Tenaga Teknik Kefarmasian, Tenaga Teknis Transfusi Darah, Perawat Terampil bersertifikat keahlian khusus (Untuk kebutuhan Pelayanan Anaestesi, Hemodialisis, dan ICU) dan akuntan
	Implementasi SIMRS belum optimal, yang terkoneksi ke seluruh unit terutama billing system
	Terbatasnya jangkauan pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan
Meningkatnya kunjungan pasien geriatri menjadi peluang rumah sakit untuk mengembangkan layanan unggulan di bidang tersebut	

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	<p>Perkembangan tingkat sosial ekonomi, teknologi dan informasi mengakibatkan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit</p> <p>Kemajuan Teknologi dan Informasi, mengharuskan rumah sakit untuk menuju digitalisasi layanan kesehatan sehingga tidak tertinggal</p> <p>Semakin banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan persaingan dalam industri kesehatan di Kota Madiun semakin tinggi</p> <p>Tidak semua perempuan mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam kewirausahaan dan menurunnya pendapatan perempuan terutama perempuan sebagai kepala keluarga pada pelaku usaha Mikro akibat pandemi Covid-19</p> <p>Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p> <p>Masih terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Masih terdapatnya perkawinan anak</p> <p>Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</p> <p>Kurangnya sosialisasi Perda dan peraturan perundang-undangan</p> <p>SDM Satlinmas yang belum memenuhi kualifikasi sesuai Perwal Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Kurangnya SDM ASN Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat sehingga faktor kelalaian manusia yang banyak menyebabkan kejadian kebakaran</p> <p>Belum adanya manajemen inspeksi peralatan proteksi kebakaran</p>
<p><b>Isu Strategis 4: Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik</b></p>	<p>Distribusi dan penempatan pegawai sesuai formasi berdasarkan Anjab dan ABK belum optimal</p> <p>Partisipasi ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masih kurang</p> <p>Pelayanan kepegawaian berbasis IT belum optimal</p> <p>Belum adanya dokumen evaluasi jabatan untuk jabatan administrator, pengawas dan pelaksana</p> <p>Evaluasi internal belum berjalan optimal</p> <p>Jadwal pelaksanaan Diklat dan jenis Diklat harus menyesuaikan Instansi Vertikal</p> <p>Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait kewenangan urusan pada perangkat daerah dalam penyusunan SOTK maupun Tata Kerja Perangkat Daerah</p> <p>Kurangnya Pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang kelembagaan</p> <p>Kurangnya Informasi tentang Standart Pelayanan dari penyelenggara layanan ke masyarakat</p> <p>Belum sinkronnya antar dokumen SAKIP</p>

ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN
	Belum terintegrasinya antara aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan
	Penyusunan Anggaran belum berdasarkan Cascading maupun Proses Bisnis
	Perbedaan pemahaman terkait Permendagri 90 Tahun 2020 terkait perencanaan, penganggaran yang berpengaruh terhadap dokumen SAKIP
	Kurangnya pengetahuan SDM Perangkat Daerah tentang Anjab, ABK, Evaluasi Jabatan, dan Kompetensi Jabatan

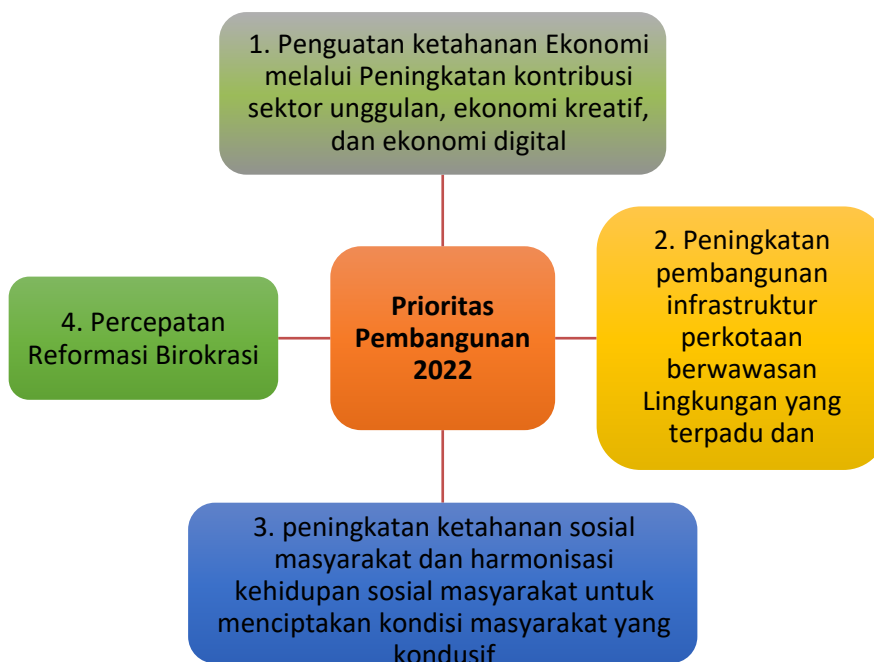
Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021

Sesuai dengan berbagai telaahan RPJMD, Pokir DPRD, permasalahan pembangunan dan isu strategis, diperlukan suatu langkah strategis melalui berbagai arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut

**Tabel 4. 6**  
**Isu Strategis, Strategi, Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022**

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022
Isu Strategis 1: Percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi daerah yang inklusif dan pengembangan kawasan pariwisata daerah	Meningkatkan iklim berusaha yang kondusif dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif terutama pada sektor unggulan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif melalui pengembangan perdagangan, industri, pariwisata, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif	<b>Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital</b>
Isi Strategis 2: Peningkatan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan secara terpadu	Optimalisasi pengelolaan transportasi, Infrastruktur perkotaan dan Pengendalian lingkungan hidup	Pembangunan/ pemeliharaan Infrastruktur perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup, manajemen dan rekayasa transportasi	<b>Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan</b>
Isu Strategis 3: Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta terciptanya kondusi masyarakat yang aman dan tentram	Meningkatnya pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam kehidupan sosial, keamanan, ketertiban dan pelestarian budaya	<b>Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif</b>
Isu Strategis 4: Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan profesional melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (e-government) secara terpadu	Peningkatan Profesionalisme ASN, penyediaan data dan informasi yang valid dan mutakhir, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	<b>Percepatan reformasi birokrasi</b>

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat empat prioritas pembangunan Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



**Gambar 4. 3**  
**Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2022**

Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi yang sudah berjalan serta prognosis terhadap kondisi yang akan datang, tema pembangunan di dalam RKPD Kota Madiun Tahun 2022 dipandang masih cukup relevan dengan kondisi global, nasional. dan regional. Sehingga tema pembangunan tahun 2022 tidak mengalami perubahan yaitu: **“Peningkatan ketahanan ekonomi dan sosial menuju masyarakat sejahtera melalui keunggulan lokal”**. Dengan 4 (empat) prioritas didalamnya yang juga tidak berubah karena masih relevan.

**Tabel 4. 7**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun Tahun 2022**

Nasional	Provinsi Jawa Timur	RKPD Kota Madiun 2022	Perubahan RKPD 2022
Prioritas Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
Prioritas Pembangunan 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Penguatan Konektivitas Antarwilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	<b>Prioritas Pembangunan 2:</b> Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan

<b>Nasional</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>RKPD Kota Madiun 2022</b>	<b>Perubahan RKPD 2022</b>
Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i>	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif
Prioritas Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif
Prioritas Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar	<b>Prioritas Pembangunan 5:</b> Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	<b>Prioritas Pembangunan 1:</b> Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 6:</b> Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	<b>Prioritas Pembangunan 3:</b> peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<b>Prioritas Pembangunan 7:</b> Peningkatan Ketertarikan Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Percepatan Reformasi Birokrasi	<b>Prioritas Pembangunan 4:</b> Percepatan Reformasi Birokrasi

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022

Nilai pendanaan tiap-tiap prioritas setelah perubahan ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 8**  
**Nilai Pendanaan Per Prioritas Pembangunan**

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)
1	2	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	49.336.454.100	51.303.623.506	72.819.707.848	21.516.084.342	5,61
Prioritas 2	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	209.654.512.491	215.865.690.409	254.935.837.998	39.070.147.589	19,63
Prioritas 3	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	577.089.032.489	589.041.794.209	616.097.598.094	27.055.803.885	47,44
Prioritas 4	Percepatan Reformasi Birokrasi	293.919.754.830	302.278.219.009	354.870.382.332	52.592.163.323	27,32
<b>TOTAL</b>		<b>1.129.999.753.910</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.298.723.526.272</b>	<b>140.234.199.139</b>	<b>100</b>

Total Belanja prioritas diproyeksikan naik 12,10% persen dari Rp. 1.158.489.327.133,- menjadi Rp. 1.298.723.526.272,-

Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas, serta Pagu Indikatif Program Kota Madiun pada Perubahan RKPD Tahun 2022 pada Perubahan RKPD Tahun 2022, terangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 9**  
**Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran Pembangunan dan Program Prioritas, serta Pagu Indikatif Program Kota Madiun**  
**pada Perubahan RKPD Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)		
			RPJMD	Penyesuaian							
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9		
<b>PRIORITAS 1 : Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital</b>											
<b>T.4</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	<b>IT4.1</b>	<b>Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>	<b>Indeks</b>	<b>6,40</b>	<b>6,88</b>					
S.9	Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	IS8.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	2,44	10,16	36.000.912.985	36.396.390.391	54.688.515.800	18.292.125.409	4,06
		IS8.2	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	0,76	11,32	13.335.541.115	14.907.233.115	18.131.192.048	3.223.958.933	1,35
<b>PRIORITAS 1</b>							<b>49.336.454.100</b>	<b>51.303.623.506</b>	<b>72.990.300.896</b>	<b>21.686.677.390</b>	<b>5,40</b>
<b>PRIORITAS 2 : Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan</b>											
<b>T.2</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan infrastruktur Kota yang Maju, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	<b>IT2.1</b>	<b>Indeks Kenyamanan Kota (livable city)</b>	<b>Indeks</b>	<b>88,19</b>	<b>89,40</b>					
S.3	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	IS3.1	Indeks infrastruktur	Indeks	98,25	98,25	185.318.405.576	188.280.332.694	224.313.812.803	36.033.480.109	17,27
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IS4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	57,77	57,77	24.336.106.915	27.585.357.715	30.622.025.195	3.036.667.480	2,36
<b>PRIORITAS 2</b>							<b>209.654.512.491</b>	<b>215.865.690.409</b>	<b>254.935.837.998</b>	<b>39.070.147.589</b>	<b>19,63</b>

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)		
			RPJMD	Penyesuaian							
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9		
<b>PRIORITAS 3 : Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif</b>											
<b>T.4</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan ekonomi inklusif</b>	<b>IT4.1</b>	<b>Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif</b>	<b>Indeks</b>	<b>6,40</b>	6,88					
S.8	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	S9.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,74	7,47	8.136.843.807	8.367.827.847	10.213.797.087	1.845.969.240	0,79
<b>T.3</b>	<b>Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>	<b>IT.3.1</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Indeks</b>	<b>81,70</b>	<b>81,70</b>					
		<b>IT.3.2</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>	<b>Indeks</b>	<b>94,44</b>	<b>94,44</b>					
S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS5.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,41	278.477.635.322	284.076.994.251	274.558.904.067	- 9.518.090.184	21,14
		IS5.2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,15	11,39					
S.6	Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat	IS6.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,83	72,83	230.228.357.991	234.500.058.151	262.029.509.779	27.529.451.628	20,18
S.7	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	IS7.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	77,18	77,18	2.700.506.802	3.211.598.513	2.921.223.354	- 290.375.159	0,22
<b>T.5</b>	<b>Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Stabilitas Kehidupan Sosial Masyarakat</b>	<b>IT5.1</b>	<b>Indeks Ketentraman</b>	<b>Indeks</b>	<b>77,05</b>	<b>77,05</b>					
		<b>IT5.2</b>	<b>Indek Gini</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,37</b>	<b>0,344</b>					
S.10	Pengurangan Kemiskinan	IS10.1	Angka Kemiskinan	%	4,87	4,92	30.855.472.003	31.153.910.733	34.793.974.353	3.640.063.620	2,68



Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)
					RPJMD	Penyesuaian					
1		2		3	4	5	6	7	8	8	9
S.11	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	IS11.1	Indeks Kerukunan	Indeks	B skor 74,40 (Harmonis)	B skor 74,40 (Harmonis)	7.347.363.564	7.914.931.714	8.614.931.714	700.000.000	0,66
		IS11.2	Indeks rasa aman	Indeks	76,2	76,2	26.690.216.564	27.731.404.714	31.580.189.454	3.848.784.740	2,43
<b>PRIORITAS 3</b>							<b>577.089.032.489</b>	<b>589.041.794.209</b>	<b>616.097.598.094</b>	<b>27.055.803.885</b>	<b>47,44</b>
<b>PRIORITAS 4 : Percepatan Reformasi Birokrasi</b>											
<b>T.1</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis smart cities</b>	<b>IT1.1</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>(B) 68</b>	<b>(B) 68</b>					
S.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	IS1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun (AKIP)	Skor	BB (76)	BB (71)	79.409.845.652	81.754.536.225	101.969.440.576	20.214.904.351	7,85
		IS1.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	127.681.888.674	135.282.651.865	145.982.366.962	31.822.527.559	11,24
		IS1.3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,85 (BAIK)	2,85 (BAIK)	23.174.377.000	23.171.677.000	28.447.781.458	5.276.104.458	2,19
S.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IS2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	83 (baik)	86,50 (baik)	62.783.609.748	61.194.616.162	77.739.755.132	- 4.577.673.492	5,99

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2022		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)
				RPJMD	Penyesuaian					
1	2		3	4	5	6	7	8	8	9
	IS2.2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	1900	55,6	870.033.756	874.737.757	731.038.204	- 143.699.553	0,06
<b>PRIORITAS 4</b>						<b>293.919.754.830</b>	<b>302.278.219.009</b>	<b>354.870.382.332</b>	<b>52.592.163.323</b>	<b>27,32</b>
						<b>1.129.999.753.910</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.298.723.526.272</b>	<b>140.234.199.139</b>	<b>100,00</b>

*Penyesuaian di lakukan untuk merespon perkembangan capaian realisasi tahun 2021*

*Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022*

**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**Dalam pencapaian target indikator kinerja prioritas pembangunan Tahun 2022, maka diperlukan implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan.** Rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Melalui program prioritas yang direncanakan dan dijalankan pada Tahun 2022, diharapkan target indikator kinerja pembangunan dapat terpenuhi. Selain itu, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan swasta serta lembaga yang ada di Kota Madiun dapat mendukung pelaksanaan program tersebut. Program prioritas Kota Madiun Tahun 2022 dilaksanakan oleh **25** Organisasi Perangkat Daerah dan **3** Kecamatan. Program-program tersebut disertai dengan indikator kinerja sasaran dan target serta indikator kinerja program dan target.

Rincian perubahan anggaran dan perubahan pagu per urusan dalam APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
**Pagu Anggaran Perubahan per Urusan Pemerintahan 2022**

No	Urusan Pemerintahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>					
1	Pendidikan	272.372.742.875	277.772.636.404	<b>267.387.332.190</b>	-10.385.304.214	20,59
2	Kesehatan	226.223.133.161	229.858.649.817	<b>257.594.558.015</b>	27.735.908.198	19,83
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.187.727.320	125.252.224.617	<b>153.008.097.557</b>	27.755.872.940	11,78
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	37.918.652.656	42.876.419.277	<b>50.877.884.929</b>	8.001.465.652	3,92
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	15.542.853.000	16.016.773.000	<b>19.115.557.740</b>	3.098.784.740	1,47
		3.800.000.000	3.799.700.000	<b>3.849.700.000</b>	50.000.000	0,30
6	Sosial	24.778.401.003	24.543.931.733	<b>27.889.302.353</b>	3.345.370.620	2,15
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>					
7	Tenaga Kerja	8.136.843.807	8.367.827.847	<b>10.213.797.087</b>	1.845.969.240	0,79

No	Urusan Pemerintahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)
1	2	3	4	5	6	7
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.700.506.802	3.211.598.513	<b>2.921.223.354</b>	-290.375.159	0,22
9	Pangan	6.077.071.000	6.609.979.000	<b>6.904.672.000</b>	294.693.000	0,53
10	Pertanahan	434.000.000	466.101.600	<b>399.551.080</b>	-66.550.520	0,03
11	Lingkungan Hidup	23.902.106.915	27.119.256.115	<b>30.222.474.115</b>	3.103.218.000	2,33
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.885.228.540	6.800.409.540	<b>7.858.147.540</b>	1.057.738.000	0,61
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.005.224.830	4.641.408.334	<b>4.434.951.764</b>	-206.456.570	0,34
14	Perhubungan	20.212.025.600	20.151.688.800	<b>20.427.830.317</b>	276.141.517	1,57
15	Komunikasi dan Informatika	22.324.377.000	22.322.427.000	<b>27.891.484.578</b>	5.569.057.578	2,15
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.158.338.800	1.034.330.800	<b>886.801.960</b>	-147.528.840	0,07
17	Penanaman Modal	7.203.016.150	7.203.016.150	<b>7.930.516.150</b>	727.500.000	0,61
18	Kepemudaan dan Olahraga	3.209.615.445	4.909.615.445	<b>6.451.654.114</b>	1.542.038.669	0,50
19	Statistik	500.000.000	499.250.000	<b>290.000.000</b>	-209.250.000	0,02
20	Persandian	350.000.000	350.000.000	<b>266.296.880</b>	-83.703.120	0,02
21	Kebudayaan	7.529.586.820	7.526.286.820	<b>9.254.774.164</b>	1.728.487.344	0,71
22	Perpustakaan	6.104.892.447	6.304.357.847	<b>7.171.571.877</b>	867.214.030	0,55
23	Kearsipan	800.916.000	800.916.000	<b>722.097.171</b>	-78.818.829	0,06
<b>B</b>	<b>Urusan Pilihan</b>					
24	Kelautan dan Perikanan	<b>925.000.000</b>	<b>897.732.000</b>	<b>721.132.600</b>	-176.599.400	0,06
25	Pariwisata	<b>1.423.150.050</b>	<b>1.422.150.050</b>	<b>1.523.111.810</b>	100.961.760	0,12
26	Pertanian	<b>2.593.999.000</b>	<b>2.810.259.000</b>	<b>3.113.156.200</b>	302.897.200	0,24
27	Perdagangan	<b>15.347.800.000</b>	<b>16.456.062.400</b>	<b>18.433.367.401</b>	1.977.305.001	1,42
28	Perindustrian	<b>862.483.665</b>	<b>955.349.185</b>	<b>1.521.981.291</b>	566.632.106	0,12
29	Transmigrasi	<b>14.850.000</b>	<b>14.850.000</b>	<b>14.850.000</b>	0	0,00
<b>C</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
1	Unsur Sekretariat Daerah	<b>57.262.138.860</b>	<b>59.034.853.233</b>	<b>77.186.220.878</b>	18.151.367.645	5,94

No	Urusan Pemerintahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	Proporsi (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Unsur Sekretariat DPRD	42.653.913.443	41.213.913.217	40.485.433.270	-728.479.947	3,12
<b>D</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
1	Unsur Perencanaan	10.835.768.792	10.827.373.792	12.372.730.088	1.545.356.296	0,95
2	Unsur Keuangan	61.688.581.005	65.190.905.885	89.429.948.840	24.239.042.955	6,89
		11.112.372.000	11.158.046.000	11.507.917.000	349.871.000	0,86
3	Unsur Kepegawaian	8.817.848.375	8.753.674.015	9.381.414.227	627.740.212	0,72
4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	4.426.619.390	4.426.619.390	3.597.265.935	-829.353.455	0,28
5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	870.033.756	874.737.757	731.038.204	-143.699.553	0,06
<b>E</b>	<b>Unsur Pengawasan</b>					
1	Inspektorat	11.311.938.000	11.892.309.200	12.410.489.610	518.180.410	0,96
<b>F</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>					
1	Kecamatan	21.339.602.289	22.389.602.289	29.988.688.674	7.599.086.385	2,31
		20.371.740.946	21.448.997.574	26.016.814.401	4.567.816.827	2,00
		21.437.290.604	22.368.155.773	27.702.757.194	5.334.601.421	2,13
<b>G</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>					
1	Kesatuan bangsa dan Politik	7.347.363.564	7.914.931.714	8.614.931.714	700.000.000	0,66
	<b>TOTAL USULAN ANGGARAN</b>	<b>1.129.999.753.910</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.298.723.526.272</b>	<b>140.234.199.139</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022

Adapun rekapitulasi perubahan pagu anggaran per Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5. 2**  
**Pagu Anggaran Perubahan per Perangkat Daerah 2022**

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)				Proporsi (%)
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pendidikan	<b>272.372.742.875</b>	<b>277.772.636.404</b>	<b>267.387.332.190</b>	- 10.385.304.214	20,59
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<b>230.228.357.991</b>	<b>234.500.058.151</b>	<b>262.029.509.779</b>	27.529.451.628	20,18
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<b>127.187.727.320</b>	<b>125.252.224.617</b>	<b>153.008.097.557</b>	27.755.872.940	11,78
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<b>38.352.652.656</b>	<b>43.342.520.877</b>	<b>51.277.436.009</b>	7.934.915.132	3,95
5	Satuan Polisi Pamong Praja	<b>15.542.853.000</b>	<b>16.016.773.000</b>	<b>19.115.557.740</b>	3.098.784.740	1,47
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<b>3.800.000.000</b>	<b>3.799.700.000</b>	<b>3.849.700.000</b>	50.000.000	0,30
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<b>27.478.907.805</b>	<b>27.755.530.246</b>	<b>30.810.525.707</b>	3.054.995.461	2,37
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	<b>10.157.666.272</b>	<b>10.357.507.832</b>	<b>12.622.580.338</b>	2.265.072.506	0,97
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<b>9.596.070.000</b>	<b>10.317.970.000</b>	<b>10.738.960.800</b>	420.990.800	0,83
10	Dinas Lingkungan Hidup	<b>23.902.106.915</b>	<b>27.119.256.115</b>	<b>30.222.474.115</b>	3.103.218.000	2,33

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)				Proporsi (%)
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.885.228.540	6.800.409.540	7.858.147.540	1.057.738.000	0,61
12	Dinas Perhubungan	20.212.025.600	20.151.688.800	20.427.830.317	276.141.517	1,57
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.174.377.000	23.171.677.000	28.447.781.458	5.276.104.458	2,19
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.217.866.150	7.217.866.150	7.945.366.150	727.500.000	0,61
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	12.162.352.315	13.858.052.315	17.229.540.088	3.371.487.773	1,33
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.905.808.447	7.105.273.847	7.893.669.048	788.395.201	0,61
17	Dinas Perdagangan	15.347.800.000	16.456.062.400	18.433.367.401	1.977.305.001	1,42
18	Sekretariat Daerah	57.262.138.860	59.034.853.233	77.186.220.878	18.151.367.645	5,94
19	Sekretariat DPRD	42.653.913.443	41.213.913.217	40.485.433.270	- 728.479.947	3,12
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.705.802.548	11.702.111.549	13.103.768.292	1.401.656.743	1,01
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	61.688.581.005	65.190.905.885	89.429.948.840	24.239.042.955	6,89
22	Badan Pendapatan Daerah	11.112.372.000	11.158.046.000	11.507.917.000	349.871.000	0,89
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.244.467.765	13.180.293.405	12.978.680.162	- 201.613.243	1,00

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN (Rp.)				Proporsi (%)
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD-P 2022	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7
24	Inspektorat	11.311.938.000	11.892.309.200	12.410.489.610	518.180.410	0,96
25	Kecamatan Kartoharjo	20.371.740.946	21.448.997.574	26.016.814.401	4.567.816.827	2,00
26	Kecamatan Manguharjo	21.437.290.604	22.368.155.773	27.702.757.194	5.334.601.421	2,13
27	Kecamatan Taman	21.339.602.289	22.389.602.289	29.988.688.674	7.599.086.385	2,31
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.347.363.564	7.914.931.714	8.614.931.714	700.000.000	0,66
<b>TOTAL</b>		<b>1.129.999.753.910</b>	<b>1.158.489.327.133</b>	<b>1.298.723.526.272</b>	<b>140.234.199.139</b>	100,00

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2022



**Tabel. 5.3**  
**Perubahan Kerangka Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Beserta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**  
**Perangkat Daerah Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 0 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				228.910.187.774	234.310.174.903	<b>225,825,254,541</b>							299,995,353,841	
1 0 0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	200.130.881.282	205.213.092.252	<b>195,966,796,500</b>							A Skor	208,992,186,241
1 0 0 1 1 2	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks RB	65 Skor	65 Skor	7.739.590.464	7.678.390.464	8.806.764.500							65 Skor	7,925,625,000
1 0 0 1 1 2 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 Doku men	6 Doku men	7.739.590.464	7.678.390.464	8.806.764.500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Dinas Pendidikan	6 Dok umen	7,925,625,000	Dinas Pendidikan
									Dana Transfer Umum- Dana	Meningkatka n Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Alokasi Umum	Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks RB	65 Skor	65 Skor	184.218.676.428	189.482.568.348	<b>182,168,664,500</b>						65 Skor	192,853,768,241	
						Indeks RB	65 Skor	65 Skor									65 Skor		
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	184.218.676.428	189.482.568.348	182,168,664,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	ASN Dinas Pendidikan	100 %	192,853,768,241	Dinas Pendidikan
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks RB	65 Skor	65 Skor	7.493.389.290	7.372.908.340	<b>4,256,332,000</b>						65 Skor	6,412,793,000	
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	7.212.439.290	7.091.958.340	3,775,782,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	ASN di Dinas Pendidikan	100 %	6,112,793,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 %	100 %	280.950.000	280.950.000	480.550.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	ASN di Dinas Pendidikan	100 %	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks RB	65 Skor	65 Skor	679.225.100	679.225.100	735.035.500						65 Skor	800,000,000	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	100 %	147.242.800	147.242.800	139.403.600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Pendidikan	100 %	150,000,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	382.278.000	382.278.000	436.476.100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Pendidikan	100 %	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	149.704.300	149.704.300	159.155.800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	Dinas Pendidikan	100 %	150,000,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	100 %	23.640.998.746	23.958.775.023	25.315.322.171						100 %	82,944,518,600	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	5.290.657.751	5.608.635.126	7.240.371.123						100 %	32,174,022,000	
1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga yang direhab	7 Lem baga	7 Lem baga	4.201.213.200	4.321.694.150	6.091.048.668	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	7 Lem baga	31,163,500,000	Dinas Pendidikan
													DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	519.630.000	518.730.000	446.373.078	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	14 Bidang Kreatifitas	519,630,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	73 Lembaga	73 Lembaga	569.814.551	768.210.976	702.949.377	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	73 Lembaga	490,892,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				8.886.049.180	8.885.848.082	10.082.639.433							26,707,755,000	
1	0	0	2	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Lembaga yang direhab	2 Lembaga	2 Lembaga	4.590.763.000	4.590.763.000	5.942.736.800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		2 Lembaga	22,373,800,000	Dinas Pendidikan
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
1	0	0	2	2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Siswa yang menerima perlengkapan sekolah	5.96 Siswa	5.96 Siswa	3.384.371.000	3.384.371.000	3.352.673.800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		5.96 Siswa	3,384,371,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah lembaga yang melaksanakan standart penilaian dan evaluasi satuan pendidikan	25 Lembaga	25 Lembaga	227.974.415	227.812.475	194.077.940	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		25 Lembaga	197,553,000	Dinas Pendidikan
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	0	0	2	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah prestasi siswa yang diraih	14 Bidang Kreatifitas	14 Bidang Kreatifitas	582.173.405	582.134.405	522.180.891	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi		14 Bidang Kreatifitas	651,264,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	0	0	2	4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang memenuhi SPM dan SNP	25 Lembaga	25 Lembaga	100.767.360	100.767.202	70.970.002	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		25 Lembaga	100,767,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD yang Terakreditasi	100 %	100 %	8.563.920.185	8.563.920.185	7.514.701.865						100 %	21,573,523,000	
1	0	0	2	1	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga yang terpenuhi anggaran pengelolaannya	1 Lembaga	1 Lembaga	319.425.865	319.425.865	319.425.865	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lembaga	316,089,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah tenaga pendidik yang memahami kurikulum PAUD dan pendidikan kesetaraan SD SMP	1000 Orang	1000 Orang	3.600.000.000	3.600.000.000	3.600.000.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	1000 Orang	3,600,000,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Prosentase lembaga paud yang berizin	30 %	30 %	4.644.494.320	4.644.494.320	88.036.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	30 %	5,716,014,000	Dinas Pendidikan
													DAK Non Fisik - BOP PAUD						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Dana BOP PAUD	null		153 null	-	-	3.507.240.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	153 null	4,497,000,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Lembaga Non Formal yang Terakreditasi	100 %	100 %	900.371.630	900.371.630	477.609.750						100 %	2,489,218,600	
1	0	0	2	1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Lulus Ujian	175 siswa	175 siswa	900.371.630	900.371.630	172.709.750	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	175 siswa	917,348,600	Dinas Pendidikan
													DAK Non Fisik -						



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													BOP Pendidikan Kesetaraan							
1	0	0	2	1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	null		4 null	-	-	304.900.000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	4 null	785,935,000	Dinas Pendidikan	
1	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	100 %	100 %	3.480.307.746	3.480.307.628	3.119.336.300						100 %	5,283,711,000		
1	0	0	2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	8 Standart Pendidikan pada Kualitas Standart Proses dan Penilaian Pendidikan	100 %	100 %	2.885.323.588	2.885.323.470	2.582.555.582						100 %	4,408,158,000		
1	0	0	2	0	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	100 %	1.244.648.568	1.244.648.568	1.120.991.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Guru di Dinas Pendidikan	100 %	2,296,273,000	Dinas Pendidikan	
1	0	0	2	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	100 %	924.010.610	924.010.610	830.580.450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Guru di Dinas Pendidikan	100 %	1,014,007,000	Dinas Pendidikan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	0	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	100 %	716.664.410	716.664.292	630.984.132	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Guru di Dinas Pendidikan	100 %	1,097,878,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	594.984.158	594.984.158	536.780.718						100 %	875,553,000	
1	0	0	2	0	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Prosentase tenaga pendidik yang memahami kurikulum SNP	100 %	100 %	594.984.158	594.984.158	536.780.718	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Guru di Dinas Pendidikan	100 %	875,553,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	20 %	65 %	1.658.000.000	1.658.000.000	<b>1,423,799,570</b>						65 %	2,774,938,000	
1	0	0	2	1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Guru, Kasek dan Pengawas Berkompetensi	100 %	100 %	1.658.000.000	1.658.000.000	<b>1,423,799,570</b>						100 %	2,774,938,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase guru berprestasi	100 %	100 %	1.292.000.000	1.292.000.000	1,068,038,650	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	1,740,875,000	Dinas Pendidikan
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	0	0	2	0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase sekolah yang memiliki guru berprestasi min 10%	100 %	100 %	366.000.000	366.000.000	355.760.920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	1,034,063,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				699.060.445	699.060.445	686.792.395							772,896,000	
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan	100 %	100 %	699.060.445	699.060.445	686.792.395						100 %	772,896,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama													
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	699.060.445	699.060.445	686.792.395						100 %	772,896,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	360.480.445	360.480.445	359.102.395	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lem baga	465,096,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	338.580.000	338.580.000	327.690.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lem baga	307,800,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				183.106.723	183.106.723	<b>233,816,333</b>							214,650,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	100 %	183.106.723	183.106.723	<b>233,816,333</b>						100 %	214,650,000		
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	183.106.723	183.106.723	<b>233,816,333</b>						100 %	214,650,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	136.576.723	136.576.723	136,605,708	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lem baga	172,350,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	46.530.000	46.530.000	97.210.625	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lem baga	42,300,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG														

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				268.565.500	268.565.500	179,102,610							292,220,000		
1	0	0	1	2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	100 %	268.565.500	268.565.500	179,102,610							100 %	292,220,000	
1	0	0	2	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	268.565.500	268.565.500	179,102,610							100 %	292,220,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	208.175.500	208.175.500	128,959,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lembaga	237,320,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	60.390.000	60.390.000	50,143,610	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	1 Lembaga	54,900,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				630.085.150	630.085.150	627.115.150							708,731,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	100 %	630.085.150	630.085.150	627.115.150						100 %	708,731,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	630.085.150	630.085.150	627.115.150						100 %	708,731,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	285.565.150	285.565.150	285.565.150	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lembaga	395,531,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	344.520.000	344.520.000	341.550.000	Kota Madiun, Semua	DAK Non Fisik - Daya	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	1 Lembaga	313,200,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1								Kecamatan, Semua Kelurahan	BOS Reguler	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduktif				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				294.635.638	294.635.638	295.625.638							339,329,000	
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	100 %	294.635.638	294.635.638	295.625.638						100 %	339,329,000	
1	0 1	0 2	2 .	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	294.635.638	294.635.638	295.625.638						100 %	339,329,000	
1	0 1	0 2	2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	167.915.638	167.915.638	167.915.638	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	1 Lem baga	224,129,000	Dinas Pendidikan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	126.720.000	126.720.000	127.710.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lembaga	115,200,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				654.503.000	654.503.000	<b>653,633,000</b>							723,525,000	
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar dan Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	100 %	100 %	654.503.000	654.503.000	<b>653,633,000</b>						100 %	723,525,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Sekolah yang Memenuhi SNP	100 %	100 %	654.503.000	654.503.000	<b>653,633,000</b>						100 %	723,525,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	310.973.000	310.973.000	322,973,000	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	1 Lembaga	411,225,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0 1	Ujian bagi Peserta Didik								Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0 1	0 2	2 9 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	343.530.000	343.530.000	330.660.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Lem baga	312,300,000	Dinas Pendidikan	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				216.735.965	216.735.965	213.765.965							238,593,000		
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				216.735.965	216.735.965	213.765.965							238,593,000		
1	0 1	0 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				216.735.965	216.735.965	213.765.965							238,593,000		
1	0 1	0 2	2 3 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	128.625.965	128.625.965	128.625.965	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	158,493,000	Dinas Pendidikan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	88.110.000	88.110.000	85.140.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	80,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				548.947.320	548.947.320	549.937.320							620,112,000	
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				548.947.320	548.947.320	549.937.320							620,112,000	
1	1	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				548.947.320	548.947.320	549.937.320							620,112,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	297.487.320	297.487.320	297.487.320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	391,512,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	251.460.000	251.460.000	252.450.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk		1 Lem baga	228,600,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				214.966.400	214.966.400	<b>214,966,400</b>							242,706,000		
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				214.966.400	214.966.400	<b>214,966,400</b>							242,706,000		
1	0	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				214.966.400	214.966.400	<b>214,966,400</b>						242,706,000		
1	0	0	1	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	154,506,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	1	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga				Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	88,200,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG															

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				206.654.250	206.654.250	182,981,522							223,305,000		
1	0	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				206.654.250	206.654.250	182,981,522							223,305,000		
1	1	2	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				206.654.250	206.654.250	182,981,522							223,305,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	154.184.250	154.184.250	130,511,522	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	175,605,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	52.470.000	52.470.000	52,470,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	47,700,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			290.651.450	290.651.450	284.711.450							320,052,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				290.651.450	290.651.450	284.711.450							320,052,000						
1	0	0	2.0	Pengelolaan				290.651.450	290.651.450	284.711.450							320,052,000						
1	1	2	1	Pendidikan Sekolah Dasar				290.651.450	290.651.450	284.711.450							320,052,000						
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	212.441.450	212.441.450	212.441.450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	248,952,000	Dinas Pendidikan				
1	1	2	0	1	2	2	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	78.210.000	78.210.000	72.270.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	71,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			366.851.885	366.851.885	353.981.885							398,237,000						
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			366.851.885	366.851.885	353.981.885							398,237,000						
1	0	0	2		Pengelolaan			366.851.885	366.851.885	353.981.885							398,237,000						
1	1	2	0	1	Pendidikan Sekolah Dasar			366.851.885	366.851.885	353.981.885							398,237,000						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	204.491.885	204.491.885	204.491.885	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	250,637,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	162.360.000	162.360.000	149.490.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	147,600,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				443.350.533	443.350.533	435.430.533							500,339,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				443.350.533	443.350.533	435.430.533							500,339,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				443.350.533	443.350.533	435.430.533							500,339,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	280.000.533	280.000.533	280.000.533	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk		1 Lem baga	351,839,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	163.350.000	163.350.000	155.430.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	148,500,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				152.896.200	152.896.200	146.116.200							183,248,000	
1	0	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				152.896.200	152.896.200	146.116.200							183,248,000	
1	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				152.896.200	152.896.200	146.116.200							183,248,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	118.396.200	118.396.200	118.396.200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	151,748,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	34.500.000	34.500.000	27.720.000	Kota Madiun,	DAK Non Fisik -	Meningkatkan Sumber	peningkatan ketahanan sosial		1 Lem baga	31,500,000	Dinas Pendidikan



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BOS Reguler	Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				562.698.250	562.698.250	565.668.250							677,805,000	
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				562.698.250	562.698.250	565.668.250							677,805,000	
1	0 1	0 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				562.698.250	562.698.250	565.668.250							677,805,000	
1	0 1	0 2	2 0 1	2 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	361.728.250	361.728.250	361.728.250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	495,105,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2 0 1	2 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	200.970.000	200.970.000	203.940.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi		1 Lem baga	182,700,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				338.946.200	338.946.200	325.086.200							380,548,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				338.946.200	338.946.200	325.086.200							380,548,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				338.946.200	338.946.200	325.086.200							380,548,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	175.596.200	175.596.200	175.596.200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	232,048,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	163.350.000	163.350.000	149.490.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	148,500,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG														

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				203.829.218	203.829.218	208.779.218							244,551,000		
1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				203.829.218	203.829.218	208.779.218							244,551,000		
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				203.829.218	203.829.218	208.779.218							244,551,000		
			1																
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	120.669.218	120.669.218	120.669.218	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	168,951,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	83.160.000	83.160.000	88.110.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	75,600,000	Dinas Pendidikan
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				339.158.240	339.158.240	335.198.240						391,924,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				339.158.240	339.158.240	335.198.240							391,924,000		
1	0	0	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				339.158.240	339.158.240	335.198.240							391,924,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	167.888.240	167.888.240	167.888.240	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	236,224,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	171.270.000	171.270.000	167.310.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	155,700,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			585.656.000	585.656.000	570.817.200							657,590,000		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			585.656.000	585.656.000	570.817.200							657,590,000		
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			585.656.000	585.656.000	570.817.200							657,590,000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	299.546.000	299.546.000	299.546.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	397,490,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	286.110.000	286.110.000	271.271.200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	260,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				569.326.113	569.326.113	559.486.113							629,119,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				569.326.113	569.326.113	559.486.113							629,119,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				569.326.113	569.326.113	559.486.113							629,119,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	268.426.113	268.426.113	268.426.113	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk		1 Lem baga	355,519,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	300.900.000	300.900.000	291.060.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	273,600,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				277.137.800	277.137.800	283.077.800							308,996,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				277.137.800	277.137.800	283.077.800							308,996,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				277.137.800	277.137.800	283.077.800							308,996,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	150.417.800	150.417.800	150.417.800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	193,796,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	126.720.000	126.720.000	132.660.000	Kota Madiun, Semua	DAK Non Fisik - Daya	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan		1 Lembaga	115,200,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0 1									Kecamatan, Semua Kelurahan	BOS Reguler	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				282.101.300	282.101.300	273.191.300							299,502,000		
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				282.101.300	282.101.300	273.191.300							299,502,000		
1	0 1	0 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				282.101.300	282.101.300	273.191.300							299,502,000		
1	0 1	0 2	2 0 1	2 3 0 1 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	166.271.300	166.271.300	166.271.300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	194,202,000	Dinas Pendidikan	
1	0 1	0 2	2 0 1	2 9 0 1 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	115.830.000	115.830.000	106.920.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	105,300,000	Dinas Pendidikan	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				225.748.495	225.748.495	206.938.495							263,649,000		
1	0	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				225.748.495	225.748.495	206.938.495							263,649,000		
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				225.748.495	225.748.495	206.938.495							263,649,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	108.928.495	108.928.495	108.928.495	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	157,449,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	116.820.000	116.820.000	98.010.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	106,200,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.072.681.875	1.072.681.875	1.087.531.875							1,203,777,000	
1	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.072.681.875	1.072.681.875	1.087.531.875							1,203,777,000	
1	0	1	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.072.681.875	1.072.681.875	1.087.531.875							1,203,777,000	
1	0	1	2.2	2.2 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	579.661.875	579.661.875	579.661.875	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	755,577,000	Dinas Pendidikan
1	0	1	2.2.0	2.2.9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	493.020.000	493.020.000	507.870.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	448,200,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				630.516.200	630.516.200	608.736.200							690,748,000	
1	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				630.516.200	630.516.200	608.736.200							690,748,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2														690,748,000		
	1	2	.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				630.516.200	630.516.200	608.736.200									
		0	1																
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	296.886.200	296.886.200	296.886.200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	387,448,000	Dinas Pendidikan
	1	2	.	0															
		0	1																
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	333.630.000	333.630.000	311.850.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	303,300,000	Dinas Pendidikan
	1	2	.	0															
		0	1																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				853.173.500	853.173.500	853.173.500						900,590,000		
		1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				853.173.500	853.173.500	853.173.500						900,590,000		
		0	1																
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				853.173.500	853.173.500	853.173.500						900,590,000		
	1	2	.	0															
		0	1																

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	407.673.500	407.673.500	407.673.500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	495,590,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	445.500.000	445.500.000	445.500.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	405,000,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				390.861.553	390.861.553	<b>442,440,553</b>							423,242,000	
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				390.861.553	390.861.553	<b>442,440,553</b>							423,242,000	
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				390.861.553	390.861.553	<b>442,440,553</b>							423,242,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	267.111.553	267.111.553	267,111,553	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk		1 Lembaga	310,742,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	123.750.000	123.750.000	175.329.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	112,500,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				243.797.225	243.797.225	<b>199,797,225</b>							253,972,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				243.797.225	243.797.225	<b>199,797,225</b>							253,972,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				243.797.225	243.797.225	<b>199,797,225</b>							253,972,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	151.727.225	151.727.225	107,727,225	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	170,272,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	92.070.000	92.070.000	92.070.000	Kota Madiun, Semua	DAK Non Fisik - Daya	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan		1 Lembaga	83,700,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1								Kecamatan, Semua Kelurahan	BOS Reguler	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				620.161.395	620.161.395	608.330.215							654,682,000	
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				620.161.395	620.161.395	608.330.215							654,682,000	
1	0 1	0 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				620.161.395	620.161.395	608.330.215							654,682,000	
1	0 1	0 2	2 0 1	2 3 0 1 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	296.431.395	296.431.395	296.431.395	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	360,382,000	Dinas Pendidikan
1	0 1	0 2	2 0 1	2 9 0 1 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	323.730.000	323.730.000	311.898.820	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	294,300,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				252.001.715	252.001.715	252.001.715							278,841,000	
1	0	0	1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				252.001.715	252.001.715	252.001.715							278,841,000	
1	0	0	2 1 2 . 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				252.001.715	252.001.715	252.001.715							278,841,000	
1	0	0	2 1 2 . 0 1	2 Penyelenggaraan 3 Proses Belajar dan 0 Ujian bagi Peserta 1 Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	125.281.715	125.281.715	125.281.715	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	163,641,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2 1 2 . 0 1	2 Pengelolaan Dana 9 BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	126.720.000	126.720.000	126.720.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	115,200,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				569.843.986	569.843.986	567.863.986							633,152,000	
1	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				569.843.986	569.843.986	567.863.986							633,152,000	
1	0	1	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				569.843.986	569.843.986	567.863.986							633,152,000	
1	0	1	2.2	2.3 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	247.103.986	247.103.986	247.103.986	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	339,752,000	Dinas Pendidikan
1	0	1	2.2	2.9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	322.740.000	322.740.000	320.760.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	293,400,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				185.809.750	185.809.750	185.809.750							201,815,000	
1	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				185.809.750	185.809.750	185.809.750							201,815,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				185.809.750	185.809.750	185.809.750							201,815,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	132.349.750	132.349.750	132.349.750	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	153,215,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	53.460.000	53.460.000	53.460.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	48,600,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			261.375.600	261.375.600	<b>276,345,600</b>							283,024,000		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			261.375.600	261.375.600	<b>276,345,600</b>							283,024,000		
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			261.375.600	261.375.600	<b>276,345,600</b>							283,024,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan			102.975.600	102.975.600	114,975,600	Kota Madiun,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	peningkatan ketahanan sosial			139,024,000	Dinas Pendidikan	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1	Ujian bagi Peserta Didik							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0 1	0 2	2 9 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	158.400.000	158.400.000	161.370.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	144,000,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				553.145.150	553.145.150	526.415.150							605,456,000	
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				553.145.150	553.145.150	526.415.150							605,456,000	
1	0 1	0 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				553.145.150	553.145.150	526.415.150							605,456,000	
1	0 1	0 2	2 3 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	250.205.150	250.205.150	250.205.150	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi		1 Lem baga	330,056,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	302.940.000	302.940.000	276.210.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	275,400,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				224.603.350	224.603.350	<b>215,129,389</b>							235,659,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				224.603.350	224.603.350	<b>215,129,389</b>							235,659,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				224.603.350	224.603.350	<b>215,129,389</b>							235,659,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	152.333.350	152.333.350	154,622,219	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	169,959,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	72.270.000	72.270.000	60,507,170	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	65,700,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				629.981.468	629.981.468	<b>359,769,457</b>							645,977,000	
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				629.981.468	629.981.468	<b>359,769,457</b>							645,977,000	
1	0	0	1	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				629.981.468	629.981.468	<b>359,769,457</b>							645,977,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga											
1	1	2	0	1					330.011.468	330.011.468	183,779,577	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	373,277,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga											
1	1	2	0	1					299.970.000	299.970.000	175,989,880	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	272,700,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				307.734.705	307.734.705	307.734.705							355,013,000		
1	0	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				307.734.705	307.734.705	307.734.705							355,013,000		
1	0	0	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				307.734.705	307.734.705	307.734.705							355,013,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	136.464.705	136.464.705	136.464.705	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	199,313,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	171.270.000	171.270.000	171.270.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	155,700,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				794.830.863	794.830.863	786.910.863							872,459,000		
1	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				794.830.863	794.830.863	786.910.863							872,459,000		
1	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			794.830.863	794.830.863	786.910.863							872,459,000		
1	0	1	2	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	364.180.863	364.180.863	364.180.863	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	1 Lembaga	480,959,000	Dinas Pendidikan
1	0	1	2	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	430.650.000	430.650.000	422.730.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	1 Lembaga	391,500,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			211.937.585	211.937.585	211.937.585							238,458,000		
1	0	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			211.937.585	211.937.585	211.937.585							238,458,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				211.937.585	211.937.585	211.937.585							238,458,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	135.707.585	135.707.585	135.707.585	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	169,158,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	76.230.000	76.230.000	76.230.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	69,300,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			330.608.350	330.608.350	309.818.350							356,179,000		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			330.608.350	330.608.350	309.818.350							356,179,000		
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			330.608.350	330.608.350	309.818.350							356,179,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	224.678.350	224.678.350	224.678.350	Kota Madiun,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	peningkatan ketahanan sosial		1 Lembaga	259,879,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1	Ujian bagi Peserta Didik							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0 1	0 2	2 9 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	105.930.000	105.930.000	85.140.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	96,300,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				597.925.983	597.925.983	<b>583,195,983</b>							658,714,000	
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				597.925.983	597.925.983	<b>583,195,983</b>							658,714,000	
1	0 1	0 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				597.925.983	597.925.983	<b>583,195,983</b>							658,714,000	
1	0 1	0 2	2 3 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	262.315.983	262.315.983	274,315,983	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi		1 Lem baga	353,614,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	335.610.000	335.610.000	308.880.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	305,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				710.079.950	710.079.950	710.079.950							735,623,000	
1	0	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				710.079.950	710.079.950	710.079.950							735,623,000	
1	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				710.079.950	710.079.950	710.079.950							735,623,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	392.289.950	392.289.950	392.289.950	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	446,723,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	317.790.000	317.790.000	317.790.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Reguler	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi		1 Lembaga	288,900,000	Dinas Pendidikan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				810.678.770	810.678.770	787.908.770							888,319,000	
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				810.678.770	810.678.770	787.908.770							888,319,000	
1	0	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				810.678.770	810.678.770	787.908.770						888,319,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	394.878.770	394.878.770	394.878.770	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	510,319,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	415.800.000	415.800.000	393.030.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	378,000,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				304.014.700	304.014.700	304.014.700							337,088,000		
1	0	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				304.014.700	304.014.700	304.014.700							337,088,000		
1	0	0	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				304.014.700	304.014.700	304.014.700							337,088,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	202.044.700	202.044.700	202.044.700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	244,388,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	101.970.000	101.970.000	101.970.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	92,700,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				929.257.865	929.257.865	915.397.865							1,019,539,000	
1	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				929.257.865	929.257.865	915.397.865							1,019,539,000	
1	0	1	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				929.257.865	929.257.865	915.397.865							1,019,539,000	
1	0	1	2.01	2.2 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	422.377.865	422.377.865	422.377.865	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	558,739,000	Dinas Pendidikan
1	0	1	2.01	2.2.9 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	506.880.000	506.880.000	493.020.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	460,800,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				632.330.660	632.330.660	625.400.660							719,363,000	
1	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				632.330.660	632.330.660	625.400.660							719,363,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				632.330.660	632.330.660	625.400.660							719,363,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	297.710.660	297.710.660	297.710.660	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	415,163,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	334.620.000	334.620.000	327.690.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	304,200,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			552.977.263	552.977.263	554.957.263							598,482,000		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			552.977.263	552.977.263	554.957.263							598,482,000		
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			552.977.263	552.977.263	554.957.263							598,482,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	256.967.263	256.967.263	256.967.263	Kota Madiun,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	peningkatan ketahanan sosial		1 Lembaga	329,382,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1	Ujian bagi Peserta Didik							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0 1	0 2	2 9 0 1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	296.010.000	296.010.000	297.990.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	269,100,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				342.826.620	342.826.620	345.772.101							406,713,000	
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				342.826.620	342.826.620	345.772.101							406,713,000	
1	0 1	0 2	2 0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				342.826.620	342.826.620	345.772.101							406,713,000	
1	0 1	0 2	2 3 0 1	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	178.486.620	178.486.620	178.462.101	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi		1 Lem baga	257,313,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	164.340.000	164.340.000	167.310.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	149,400,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				453.504.983	453.504.983	445.584.983							548,044,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				453.504.983	453.504.983	445.584.983							548,044,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				453.504.983	453.504.983	445.584.983							548,044,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	261.444.983	261.444.983	261.444.983	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	373,444,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	192.060.000	192.060.000	184.140.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Reguler	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi		1 Lembaga	174,600,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				280.972.075	280.972.075	272.062.075							305,838,000		
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				280.972.075	280.972.075	272.062.075							305,838,000		
1	0	0	1	2	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			280.972.075	280.972.075	272.062.075							305,838,000		
1	0	0	2	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	149.302.075	149.302.075	149.302.075	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	186,138,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	131.670.000	131.670.000	122.760.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lem baga	119,700,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN															

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				305.131.800	305.131.800	300.181.800							339,392,000		
1	0	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				305.131.800	305.131.800	300.181.800							339,392,000		
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				305.131.800	305.131.800	300.181.800							339,392,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	143.761.800	143.761.800	143.761.800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	192,692,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	161.370.000	161.370.000	156.420.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 Lembaga	146,700,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				396.349.700	396.349.700	392.389.700							419,838,000		



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				396.349.700	396.349.700	392.389.700							419,838,000		
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				396.349.700	396.349.700	392.389.700							419,838,000		
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	219.139.700	219.139.700	219.139.700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	258,738,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga	1 Lem baga	1 Lem baga	177.210.000	177.210.000	173.250.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 Lem baga	161,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				324.150.750	324.150.750	<b>336,150,750</b>						372,455,000		
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				324.150.750	324.150.750	<b>336,150,750</b>						372,455,000		
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				324.150.750	324.150.750	<b>336,150,750</b>						372,455,000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	1															
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb				Kota	Dana	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	214,955,000	Dinas
	1	2	.	3	Proses Belajar dan		aga	aga	150.900.750	150.900.750	162,900,750	Madiun,	Transfer	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
			0		Ujian bagi Peserta							Semua	Umum-	Daya	masyarakat dan				
			1		Didik							Kecamatan,	Dana	Manusia	harmonisasi				
												Semua	Alokasi	Berkualitas	kehidupan sosial				
												Kelurahan	Umum	dan Berdaya	masyarakat untuk				
														Saing	menciptakan kondisi				
															masyarakat yang				
															kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	173.250.000	173.250.000	173.250.000	Kota	DAK Non	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	157,500,000	Dinas
	1	2	.	9	BOS Sekolah Dasar		aga	aga				Madiun,	Fisik -	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
			0									Semua	BOS	Daya	masyarakat dan				
			1									Kecamatan,	Reguler	Manusia	harmonisasi				
												Semua		Berkualitas	kehidupan sosial				
												Kelurahan		dan Berdaya	masyarakat untuk				
														Saing	menciptakan kondisi				
															masyarakat yang				
															kondusif				
1					URUSAN														
					PEMERINTAHAN														
					WAJIB YANG														
					BERKAITAN DENGAN														
					PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN				204.348.200	204.348.200	191.478.200							231,528,000	
	1				PEMERINTAHAN														
					BIDANG PENDIDIKAN														
1	0	0			PROGRAM				204.348.200	204.348.200	191.478.200							231,528,000	
	1	2			PENGELOLAAN														
					PENDIDIKAN														
1	0	0	2		Pengelolaan				204.348.200	204.348.200	191.478.200							231,528,000	
	1	2	.		Pendidikan Sekolah														
			0		Dasar														
			1																
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	116.238.200	116.238.200	116.238.200	Kota	Dana	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	151,428,000	Dinas
	1	2	.	3	Proses Belajar dan		aga	aga				Madiun,	Transfer	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
			0		Ujian bagi Peserta							Semua	Umum-	Daya	masyarakat dan				
			1		Didik							Kecamatan,	Dana	Manusia	harmonisasi				

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	88.110.000	88.110.000	75.240.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	80,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				208.683.850	208.683.850	194.823.850							226,429,000	
1	0	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				208.683.850	208.683.850	194.823.850							226,429,000	
1	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				208.683.850	208.683.850	194.823.850							226,429,000	
1	0	1	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	156.213.850	156.213.850	156.213.850	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	178,729,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	52.470.000	52.470.000	38.610.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	47,700,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				254.308.001	254.308.001	254.308.001							283,782,000	
1	0	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				254.308.001	254.308.001	254.308.001							283,782,000	
1	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				254.308.001	254.308.001	254.308.001							283,782,000	
1	0	0	2	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	178.078.001	178.078.001	178.078.001	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	214,482,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	76.230.000	76.230.000	76.230.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk		1 lembaga	69,300,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.694.318.858	1.694.225.258	1.612.746.670							1.895,740,000		
1	0	0	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.694.318.858	1.694.225.258	1.612.746.670							1.895,740,000		
1	0	0	1	2	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.694.318.858	1.694.225.258	1.612.746.670							1.895,740,000		
1	0	0	2	3	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	771.088.858	771.088.858	689.610.270	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	1,056,440,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	4	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	923.230.000	923.136.400	923.136.400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	839,300,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG															

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.938.218.150	1.938.218.150	1.680.109.920							2,068,651,000		
1	0	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.938.218.150	1.938.218.150	1.680.109.920							2,068,651,000		
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.938.218.150	1.938.218.150	1.680.109.920							2,068,651,000		
1	0	0	2	3 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1.007.728.150	1.007.728.150	749.619.920	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif			1 lembaga	1,222,751,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	4 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	930.490.000	930.490.000	930.490.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif			1 lembaga	845,900,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.210.063.100	1.210.063.100	1.141.598.940							1,327,714,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.210.063.100	1.210.063.100	1.141.598.940							1,327,714,000	
1	0	0	2	Pengelolaan				1.210.063.100	1.210.063.100	1.141.598.940							1,327,714,000	
	1	2	.	Pendidikan Sekolah														
		0		Menengah Pertama														
	2																	
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	532.463.100	532.463.100	466.418.940	Kota	Dana	Meningkatka	peningkatan	1 lemb	711,714,000	Dinas
	1	2	.	6	Proses Belajar dan		aga	aga				Madiun,	Transfer	n Sumber	ketahanan sosial	aga		Pendidikan
		0			Ujian bagi Peserta							Semua	Umum-	Daya	masyarakat dan			
		2			Didik							Kecamatan,	Dana	Manusia	harmonisasi			
												Semua	Alokasi	Berkualitas	kehidupan sosial			
												Kelurahan	Umum	dan Berdaya	masyarakat untuk			
														Saing	menciptakan kondisi			
															masyarakat yang			
															kondusif			
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	677.600.000	677.600.000	675.180.000	Kota	DAK Non	Meningkatka	peningkatan	1 lemb	616,000,000	Dinas
	1	2	.	2	BOS Sekolah		aga	aga				Madiun,	Fisik -	n Sumber	ketahanan sosial	aga		Pendidikan
		0			Menengah Pertama							Semua	BOS	Daya	masyarakat dan			
		2										Kecamatan,	Reguler	Manusia	harmonisasi			
												Semua		Berkualitas	kehidupan sosial			
												Kelurahan		dan Berdaya	masyarakat untuk			
														Saing	menciptakan kondisi			
															masyarakat yang			
															kondusif			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.675.788.950	1.675.788.950	1.635.614.470						1,857,883,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.675.788.950	1.675.788.950	1.635.614.470						1,857,883,000	
1	0	0	2		Pengelolaan				1.675.788.950	1.675.788.950	1.635.614.470						1,857,883,000	
	1	2	.		Pendidikan Sekolah													
					Menengah Pertama													

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	2															
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	689.638.950	689.638.950	592.594.470	Kota	Dana	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	961,383,000	Dinas
	1	2	.	6	Proses Belajar dan		aga	aga				Madiun,	Transfer	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
			0		Ujian bagi Peserta							Semua	Umum-	Daya	masyarakat dan				
			2		Didik							Kecamatan,	Dana	Manusia	harmonisasi				
												Semua	Alokasi	Berkualitas	kehidupan sosial				
												Kelurahan	Umum	dan Berdaya	masyarakat untuk				
														Saing	menciptakan kondisi				
															masyarakat yang				
															konduusif				
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	986.150.000	986.150.000	1.043.020.000	Kota	DAK Non	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	896,500,000	Dinas
	1	2	.	2	BOS Sekolah		aga	aga				Madiun,	Fisik -	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
			0		Menengah Pertama							Semua	BOS	Daya	masyarakat dan				
			2									Kecamatan,	Reguler	Manusia	harmonisasi				
												Semua		Berkualitas	kehidupan sosial				
												Kelurahan		dan Berdaya	masyarakat untuk				
														Saing	menciptakan kondisi				
															masyarakat yang				
															konduusif				
1					URUSAN														
					PEMERINTAHAN														
					WAJIB YANG														
					BERKAITAN DENGAN														
					PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN				1.146.726.505	1.146.726.505	1.056.482.345							1,298,908,000	
	1				PEMERINTAHAN														
					BIDANG PENDIDIKAN														
1	0	0			PROGRAM				1.146.726.505	1.146.726.505	1.056.482.345							1,298,908,000	
	1	2			PENGELOLAAN														
					PENDIDIKAN														
1	0	0	2.0		Pengelolaan				1.146.726.505	1.146.726.505	1.056.482.345							1,298,908,000	
	1	2	2		Pendidikan Sekolah														
					Menengah Pertama														
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	614.326.505	614.326.505	548.282.345	Kota	Dana	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	814,908,000	Dinas
	1	2	.	6	Proses Belajar dan		aga	aga				Madiun,	Transfer	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
			0		Ujian bagi Peserta							Semua	Umum-	Daya	masyarakat dan				
			2		Didik							Kecamatan,	Dana	Manusia	harmonisasi				
												Semua		Berkualitas	kehidupan sosial				



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	532.400.000	532.400.000	508.200.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	484,000,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.450.186.545	1.450.186.545	1.343.431.345							1,566,869,000	
1	0	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.450.186.545	1.450.186.545	1.343.431.345							1,566,869,000	
1	0	1	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.450.186.545	1.450.186.545	1.343.431.345							1,566,869,000	
1	0	1	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	681.836.545	681.836.545	599.281.345	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	868,369,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	768.350.000	768.350.000	744.150.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	698,500,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			1.567.385.650	1.567.385.650	1.463.629.410							1,677,001,000		
1	0	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.567.385.650	1.567.385.650	1.463.629.410							1,677,001,000		
1	0	1	2	2.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.567.385.650	1.567.385.650	1.463.629.410							1,677,001,000		
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	685.295.650	685.295.650	587.589.410	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	875,101,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	882.090.000	882.090.000	876.040.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi		1 lembaga	801,900,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.060.406.760	1.060.406.760	971.671.560							1,237,535,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.060.406.760	1.060.406.760	971.671.560							1,237,535,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.060.406.760	1.060.406.760	971.671.560							1,237,535,000	
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	411.846.760	411.846.760	330.371.560	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	647,935,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	648.560.000	648.560.000	641.300.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	589,600,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG														

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.143.099.255	1.143.099.255	1.110.053.350							1,377,586,000		
1	0	0	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.143.099.255	1.143.099.255	1.110.053.350							1,377,586,000		
1	0	0	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.143.099.255	1.143.099.255	1.110.053.350							1,377,586,000		
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	638.529.255	638.529.255	605.483.350	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	918,886,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	504.570.000	504.570.000	504.570.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	458,700,000	Dinas Pendidikan
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.469.389.545	1.469.389.545	1.375.096.905							1,650,042,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.469.389.545	1.469.389.545	1.375.096.905							1,650,042,000		
1	0	0	2	Pengelolaan				1.469.389.545	1.469.389.545	1.375.096.905							1,650,042,000		
	1	2	.	Pendidikan Sekolah															
		0		Menengah Pertama															
	2																		
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	855.919.545	855.919.545	761.626.905	Kota	Dana	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	1,092,342,000	Dinas
	1	2	.	6	Proses Belajar dan		aga	aga				Madiun,	Transfer	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
		0			Ujian bagi Peserta							Semua	Umum-	Daya	masyarakat dan				
		2			Didik							Kecamatan,	Dana	Manusia	harmonisasi				
												Semua	Alokasi	Berkualitas	kehidupan sosial				
												Kelurahan	Umum	dan Berdaya	masyarakat untuk				
														Saing	menciptakan kondisi				
															masyarakat yang				
															kondusif				
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana	jumlah lembaga	1 lemb	1 lemb	613.470.000	613.470.000	613.470.000	Kota	DAK Non	Meningkatka	peningkatan		1 lemb	557,700,000	Dinas
	1	2	.	2	BOS Sekolah		aga	aga				Madiun,	Fisik -	n Sumber	ketahanan sosial		aga		Pendidikan
		0			Menengah Pertama							Semua	BOS	Daya	masyarakat dan				
		2										Kecamatan,	Reguler	Manusia	harmonisasi				
												Semua		Berkualitas	kehidupan sosial				
												Kelurahan		dan Berdaya	masyarakat untuk				
														Saing	menciptakan kondisi				
															masyarakat yang				
															kondusif				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.374.779.867	1.374.779.867	1.347.057.727							1,568,400,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.374.779.867	1.374.779.867	1.347.057.727							1,568,400,000	
1	0	0	2.0		Pengelolaan				1.374.779.867	1.374.779.867	1.347.057.727							1,568,400,000	
	1	2	2		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lemb aga	1 lemb aga	599.169.867	599.169.867	565.397.727	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 lemb aga	863,300,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lemb aga	1 lemb aga	775.610.000	775.610.000	781.660.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 lemb aga	705,100,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.464.914.350	1.464.914.350	1.321.590.250							1,593,416,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.464.914.350	1.464.914.350	1.321.590.250							1,593,416,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.464.914.350	1.464.914.350	1.321.590.250							1,593,416,000	
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lemb aga	1 lemb aga	697.774.350	697.774.350	616.160.250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas masyarakat untuk	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk		1 lemb aga	896,016,000	Dinas Pendidikan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	767.140.000	767.140.000	705.430.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	697,400,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.429.619.233	1.429.619.233	1.367.856.113							1,538,971,000	
1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.429.619.233	1.429.619.233	1.367.856.113							1,538,971,000	
1	0	0	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.429.619.233	1.429.619.233	1.367.856.113							1,538,971,000	
1	0	0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	575.359.233	575.359.233	526.906.113	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif		1 lembaga	762,371,000	Dinas Pendidikan
1	0	0	2	4	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lembaga	1 lembaga	854.260.000	854.260.000	840.950.000	Kota Madiun, Semua	DAK Non Fisik - Daya	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan		1 lembaga	776,600,000	Dinas Pendidikan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0 2									Kecamatan, Semua Kelurahan	BOS Reguler	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				841.440.818	841.440.818	735.466.658							979,063,000		
1	0 1	0 2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				841.440.818	841.440.818	735.466.658							979,063,000		
1	0 1	0 2	2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				841.440.818	841.440.818	735.466.658							979,063,000		
1	0 1	0 2	2 3 6 0 2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	jumlah lembaga	1 lemb aga	1 lemb aga	415.520.818	415.520.818	349.476.658	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 lemb aga	591,863,000	Dinas Pendidikan	
1	0 1	0 2	2 4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	jumlah lembaga	1 lemb aga	1 lemb aga	425.920.000	425.920.000	385.990.000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif		1 lemb aga	387,200,000	Dinas Pendidikan	
TOTAL								272.372.742.875	277.772.636.404	267,387,332,19							348,188,950,841		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1																	
1	0						85,807,770,213	82,707,355,424	99,996,625,129					92,131,833,530			
	2																
1	0	0															
	2	1					33,356,884,556	36,149,465,896	46,822,762,048					A Skor	34,994,386,000		
1	0	0	2														
	2	1	.				307,609,000	307,609,000	227,308,120					100 %	322,990,000		
			0														
			1														
1	0	0	2	0													
	2	1	.	6			307,609,000	307,609,000	227,308,120	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	11 dokumen	322,990,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2														
	2	1	.	0			29,866,091,556	32,651,806,176	43,253,539,098					100 %	31,359,397,000		
			2														
1	0	0	2	0													
	2	1	.	1			29,866,091,556	32,651,806,176	43,253,539,098	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	0	100 %	31,359,397,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													Khusus Fisik	dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					Keluarga Berencana
1	0	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	2,643,040,000	2,649,906,720	2,394,389,830						100 %	2,744,847,000		
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	2,103,680,000	2,110,546,720	1,740,949,830	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	2,178,519,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	539,360,000	539,360,000	653,440,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	566,328,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	0	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	540,144,000	540,144,000	947,525,000						100 %	567,152,000		
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	100 %	339,210,000	339,210,000	411,319,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	0	100 %	356,171,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					atau Kendaraan Dinas Jabatan									dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	16,019,000	16,019,000	123,835,350	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	100 %	16,820,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	184,915,000	184,915,000	412,370,450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	100 %	194,161,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 In dek	0,41 In dek	50,882,156,157	43,559,159,528	50,548,671,041						0,41 In dek	54,628,262,530	
1	0	0	2		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	100 %	5,550,848,389	5,463,922,830	5,333,771,853						100 %	5,894,509,800	
1	0	0	2	1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	2 kegia tan	2 kegia tan	2,262,483,464	2,144,069,364	1,815,342,668	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyara kat Kota Madiun	2 kegia tan	2,375,608,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah jenis alat kesehatan yang mendapatkan pemeliharaan kalibrasi	24 jenis	24 jenis	101,444,000	106,092,000	106,092,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	24 jenis	104,076,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah paket pengadaan obat dan vaksin	1 paket	1 paket	2,334,796,000	2,486,947,630	2,685,523,349	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	1 paket	2,451,536,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis pengadaan yang dilaksanakan	2 kegiatan	2 kegiatan	852,124,925	726,813,836	658,256,836	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyarakat Kota Madiun	2 kegiatan	894,732,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															masyarakat yang kondusif					
1	0	0	2	2	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	null		0	0	0	68,557,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	0	0	68,557,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	100 %	45,331,307,768	38,095,236,698	45,214,899,188						100 %	48,733,752,730		
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	100 %	341,250,020	450,537,020	321,931,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	358,313,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	100 %	59,001,600	61,848,500	61,848,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	61,952,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	100 %	22,630,000	55,068,750	55,068,750	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	23,762,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	100 %	100 %	204,380,050	235,565,550	250,059,150	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	214,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	26,899,000	79,719,000	115,602,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	28,244,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	222,209,500	222,209,500	222,209,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	548,320,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	100 %	100 %	52,593,100	71,483,000	66,844,600	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	100 %	55,223,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0			mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	9,477,000	9,477,000	9,477,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	9,951,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	29,020,000	29,020,000	29,020,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	30,471,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	100 %	171,966,200	171,966,200	109,066,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	180,565,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	100 %	220,133,900	220,133,900	220,133,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	0	100 %	242,148,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	100 %	327,297,000	327,297,000	223,106,250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	343,662,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	100 %	100 %	680,429,000	241,376,000	397,827,630	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	397,827,630	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	9.5 %	9.5 %	16,852,900	59,009,860	177,449,880	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	9.5 %	217,696,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pekerja yang dilayani	41 %	41 %	86,024,400	96,391,700	427,411,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	41 %	90,326,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat	61 %	61 %	553,124,540	1,127,991,310	624,438,950	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	61 %	240,581,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam	100 %	100 %	132,280,000	114,780,000	114,780,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	138,894,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	100 %	100 %	162,910,950	162,910,950	59,555,950	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	171,057,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target	100 %	100 %	213,562,000	213,562,000	256,104,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	224,241,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat Kota Madiun yang	87520 orang	87520 orang	38,558,233,280	29,368,633,280	34,508,320,600		Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	87520 orang	42,102,474,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0 2		menjadi peserta JKN							Dana Alokasi Umum	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif				an Penduduk dan Keluarga Berencana	
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							
1	0 2	0 2	2 0 2	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Kelurahan yang melaksanakan tatanan kelurahan sehat	52 %	52 %	155,779,200	691,002,050	688,802,050	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	52 %	163,569,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 0 2	3 4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan yang melaksanakan survei IKM	100 %	6 Fasil itas Keseha tan	1,778,847,328	2,778,847,328	4,956,624,628	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	6 Fasil itas Keseha tan	1,509,645,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung akreditasi puskesmas	100 %	100 %	489,298,000	489,298,000	468,396,950	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	100 %	513,763,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pelaksanaan pelayanan gawat darurat	100 %	100 %	817,108,800	817,108,800	842,316,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	857,965,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		30562 Keluar ga	0	0	8,503,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	30562 Keluar ga	8,503,100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	91 %	91 %	218,691,500	279,413,000	265,299,800						91 %	270,676,000	
						Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	-	85%									91%		
1	0	0	2	3	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Tambahan Tenaga Medis di Puskesmas Rawat Inap Standart	1 Dokter	1 Dokter	48,750,000	48,750,000	45,000,000						1 Dokter	51,188,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah ketersediaan tambahan tenaga medis di puskesmas rawat inap standar	1 dokt er	1 dokt er	48,750,000	48,750,000	45,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerinta h Daerah Provinsi	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	1 dokt er	51,188,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Teregistrasi	91 %	91 %	169,941,500	230,663,000	220,299,800						91 %	219,488,000	
1	0	0	2	0	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang teregistrasi	91 %	90 %	169,941,500	230,663,000	220,299,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	90 %	219,488,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi dan IRTP sesuai Standart	86 %	86 %	226,563,000	226,563,000	97,249,200						86 %	237,892,000	
						Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	-	87,88 %									88%		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi sesuai Standar	86 %	86 %	196,057,000	196,057,000	74,168,200					86 %	205,860,000		
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasi sesuai standar	86 %	86 %	196,057,000	196,057,000	74,168,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	86 %	205,860,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) Baru yang mendapat Sertifikat Produksi Pangan dan Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang mendapat NoP-IRT	86 %	86 %	30,506,000	30,506,000	23,081,000					86 %	32,032,000		
1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Produksi Pangan PIRT, dan sertifikat Depot Air Minum (DAM)	86 %	73 %	30,506,000	30,506,000	23,081,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	73 %	32,032,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Penduduk dan Keluarga Berencana

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata	62 %	62 %	1,123,475,000	2,492,754,000	2,262,643,040						62 %	2,000,617,000		
1	0	0	2	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	100 %	100 %	354,582,000	351,315,000	316,160,100						100 %	245,231,000		
1	0	0	2	0	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah jenis media promosi yang dihasilkan	6 jenis	6 jenis	354,582,000	351,315,000	316,160,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	6 jenis	245,231,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
					Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	3 kegia tan	3 kegia tan										3 kegia tan		
1	0	0	2	0	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase UKBM aktif	42.86 %	42.86 %	768,893,000	2,141,439,000	1,946,482,940						42.86 %	934,419,000	
1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif berstrata puri		21 Kel uraha n	768,893,000	2,141,439,000	1,946,482,940	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	21 Kel uraha n	934,419,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															masyarakat yang kondusif					
						Jumlah Posbindu PTM berstrata puri		109 Posbindu PTM										109 Posbindu PTM		
						Jumlah Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) berstrata puri		22 Poskeskel										22 Poskeskel		
						Jumlah Poskestren berstrata puri		5 Poskestren										5 Poskestren		
						Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) berstrata puri		6 Pos UKK										6 Pos UKK		
						Jumlah Posyandu Balita berstrata puri		133 Posyandu										133 Posyandu		
						Puskesmas membina UKBM sesuai standar	62 %	62 %										62 %		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4,005,224,830	4,641,408,334	4,434,951,764							212,550,731,320		
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya Angka UKP (Usia Kawin Pertama) < 20 tahun	≤ 4.7 %	≤ 4.7 %	520,081,430	755,101,420	787,223,300							≤ 4.7 %	628,704,820	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	1	0	2	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Prosentase Sekolah SSK yang membuat PRP Kependudukan	100 %	100 %	21,621,200	110,146,200	243,182,100						100 %	60,913,270		
2	1	0	2	0	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah SSK baru yang dibentuk	5 sekolah	3 ssk	21,621,200	110,146,200	218,427,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	3 ssk	33,683,320	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	1	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	9 Laporan	0	0	24,754,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	9 Laporan	27,229,950	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	0	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Keluarga	100 %	100 %	498,460,230	644,955,220	544,041,200						100 %	567,791,550	
2	1	0	2	1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	27 kelurahan	27 kelurahan	498,460,230	644,955,220	503,670,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	0	27 kelurahan	523,384,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					Keluarga Berencana
2	1	0	2	1	Pengolahan dan Pelaporan Data	Jumlah Dokumen		3 Dokumen	0	0	40,370,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	3 Dokumen	44,407,550	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	1	0	4	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	< 7.9 %	< 8 %	2,806,958,000	2,554,439,400	2,203,600,800						< 7.9 %	3,449,870,500		
2	1	0	4	3	0	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	100 %	340,290,000	309,395,000	408,302,450						100 %	1,886,824,500	
2	1	0	4	3	0	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	45 Organisasi	0	0	5,455,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	45 Organisasi	6,000,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	4	3	0	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan	1 Dokumen	0	0	25,000,000	Kota Madiun, Semua	DAK Non Fisik - Daya	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	1 Dokumen	27,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	1	Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						Kecamatan, Semua Kelurahan	BOKKB - BOKB	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				an Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	0	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah jenis sarana KIE Program KKBPK	4 Jenis	4 Jenis	120,042,000	187,895,000	20,640,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	4 Jenis	120,042,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	0	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Dokumen	0	0	50,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan		6 Laporan	0	0	185,707,450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	6 Laporan	95,480,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Keluarga Berencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									masyarakat yang kondusif				
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						
2	1	0	2	0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kelompok yang terpapar Program Bangga Kencana (BKB, BKR, PIK R, UPPKS, BKL, IMP, PKB, PUS)	8 kelompok	6 kelompok	220,248,000	121,500,000	121,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	6 kelompok	1,582,802,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	4	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Kader yang Melakukan Updating Data	100 %	100 %	129,600,000	128,520,000	142,920,000						100 %	145,440,000	
2	1	0	2	4	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		3 unit	0	0	14,400,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	3 unit	15,840,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang melakukan updating data	148 Kader	148 Kader	129,600,000	128,520,000	128,520,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, BOKB	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	0	148 Kader	129,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2		Pengendalian dan Pendistribusian Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka Drop Out (Kurang Dari)	19.5 %	19.5 %	2,184,956,000	1,995,774,400	1,531,628,350						19.5 %	1,265,494,000	
2	4	3	0	3	Pengendalian dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka Drop Out (Kurang Dari)	19.5 %	19.5 %	2,184,956,000	1,995,774,400	1,531,628,350						19.5 %	1,265,494,000	
2	1	0	2	0	Pengendalian dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah faskes yang mendapatkan distribusi alokon dan sarana penunjang pelayanan KB	22 Fas kes	22 Fas kes	51,766,000	30,000,000	16,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	22 Fas kes	17,820,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	4	3	0	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah aseptor yang mendapatkan pelayanan KB baru MKJP	651 aseptor	661 Aseptor	1,224,894,000	797,070,400	539,696,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	661 Aseptor	1,219,886,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB						

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	1	0	2	0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket pengadaan	2 pake t	5 pake t	908,296,000	1,168,704,000	961,932,350	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	5 pake t	12,608,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	0	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		4 Lapo ran	0	0	13,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	4 Lapo ran	15,180,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Poktan, IMP dan Pokja Kampung KB yang Menerima Pembinaan Kesertaan ber KB	100 %	100 %	152,112,000	120,750,000	120,750,000					100 %	152,112,000		
2	1	0	2	0	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	3 kegia tan	3 kegia tan	152,112,000	120,750,000	120,750,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	0	3 kegia tan	152,112,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	4	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Meningkatnya Kepesertaan	71 %	81 %	678,185,400	1,331,867,514	1,444,127,664					71 %	208,472,156,000		

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Anggota Tribina PUS yang ber-KB													
2	1	0	2	4	4	0			678,185,400	1,331,867,514	1,444,127,664						61 %	208,472,156,000	
2	1	0	2	4	4	0		12 Unit	0	0	206,771,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	12 Unit	206,771,650,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	4	4	0		2 kegiatan	75,399,550	818,750,514	85,072,050	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	2 kegiatan	79,170,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1	0	2	4	4	0		54 Orang	0	0	818,760,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	54 Orang	900,636,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
2	1	0	2	0	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 kegiatan	3 kegiatan	602,785,850	513,117,000	333,523,964	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	3 kegiatan	720,700,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				118,778,629,068	124,336,799,513	137,586,450,686							213,344,862,382	
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	?	A Skor	A Skor	100,999,252,852	108,022,697,372	111,965,991,923							A Skor	127,534,282,014
					Nilai SAKIP			A Skor											A Skor
1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	23,209,552,852	25,236,792,852	26,695,251,250							100 %	25,530,508,137
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %	23,209,552,852	25,236,792,852	26,695,251,250	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	ASN di RSUD Kota Madiun	100 %	25,530,508,137	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Penduduk dan Keluarga Berencana
													Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang	100 %	100 %	1,239,700,000	1,239,700,000	1,239,700,000						100 %	1,296,540,000	
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,239,700,000	1,239,700,000	1,239,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Tenaga Kontrak Pemkot di RSUD Kota Madiun	100 %	1,296,540,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100 %	100 %	76,550,000,000	81,546,204,520	84,031,040,673						100 %	100,707,233,877	
1	0	0	2	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	100 %	100 %	76,550,000,000	81,546,204,520	84,031,040,673	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Pelanggan/pasien RSUD Kota Madiun	100 %	100,707,233,877	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	?	0,41 In dek	0,41 In dek	17,779,376,216	16,314,102,141	25,620,458,763						0,41 In dek	85,810,580,368	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
					Indeks Keluarga Sehat		0.41 In deks									0.41 In deks			
					Persentase UKBM yang Mengalami Kenaikan Strata		62 %									62 %			
1	0	0	2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	92.42 %	92.42 %	17,779,376,216	16,314,102,141	25,620,458,763						92.42 %	85,810,580,368		
1	0	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab dan dipelihara	3 unit	3 unit	2,758,714,000	3,704,902,925	3,708,059,005	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Pelangga n/pasien RSUD Kota Madiun	3 unit	846,270,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	5 jenis	4 jenis	2,285,228,971	3,662,542,171	2,470,438,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Pelangga n/pasien RSUD Kota Madiun	4 jenis	65,743,228,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	17 jeni s	27 jeni s	4,068,801,445	3,887,685,500	3,712,526,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Pelangga n/pasien RSUD Kota Madiun	27 jeni s	2,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk dan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Daerah Kabupaten/Kota														
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100 %	0	0	15,926,700	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	14,006,960	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100 %	0	0	150,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	165	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100 %	0	0	8,163,950	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	3,425,125	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100 %	0	0	6,264,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	5,900,400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	15,328,400	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	17,408,930	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	2,580,400	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	12,873,014	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100 %	0	0	11,675,500	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	12,843,050	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100 %	0	0	2,197,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	2,416,700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100 %	0	0	3,684,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	4,052,400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	100 %	100 %	513,002,000	699,043,000	437,322,500	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	517,640,200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	10 %	14 %	266,050,000	266,050,000	366,063,700	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	14 %	354,019,930	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat		61 %	0	0	53,518,650	Kota Madiun, Manguharjo	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	0	61 %	119,197,375	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayan Promosi Kesehatan	Jumlah Kegiatan Pelayan promosi kesehatan		10 kegiatan	0	0	268,764,470	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	10 kegiatan	244,638,768	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam		100 %	0	0	29,145,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	41,039,845	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target		100 %	0	0	84,139,410	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	88,593,351	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	89 %	89 %	2,864,596,000	2,864,596,000	2,049,931,320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	89 %	2,254,942,452	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana	
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		5767 Keluarga	0	0	5,550,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	5767 Keluarga	5,550,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,082,393,000	3,267,269,000	2,733,942,200							3,508,139,500		
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	0,41 Indeks	3,082,393,000	3,267,269,000	2,733,942,200							0,41 Indeks	3,047,288,620	
1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase Penyediaan Layanan	100 %	100 %	3,082,393,000	3,267,269,000	2,733,942,200							100 %	3,047,288,620	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0 2	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan untuk UKM dan UKP														
1	0 2	0 2	2 .	0 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100 %	0	0	37,366,250	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	41,102,875	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 .	0 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100 %	0	0	13,693,750	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	15,063,125	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 .	0 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100 %	0	0	550,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	605	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 .	0 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100 %	0	0	10,057,500	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	11,063,250	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	6,999,970	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	13,576,827	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100 %	0	0	1,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	1,100,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100 %	0	0	12,111,800	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	13,322,980	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	100 %	100 %	509,810,000	694,686,000	439,131,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	535,675,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik -						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	12 %	12 %	212,330,000	212,330,000	379,094,220	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	12 %	396,824,142	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat		61 %	0	0	44,011,500	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	61 %	99,808,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan		16 kegiatan	0	0	192,658,150	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	16 kegiatan	143,160,765	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam		100 %	0	0	10,629,500	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	0	100 %	11,692,450	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target		100 %	0	0	173,657,360	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	173,201,611	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	88 %	85.5 %	2,360,253,000	2,360,253,000	1,405,481,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	85.5 %	1,546,029,320	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
														DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi		1809 Keluarga	0	0	7,500,000	Kota Madiun, Manguharjo	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	0	1809 Keluarga	7,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,635,957,000	3,833,609,000	3,574,272,000							4,512,218,600		
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 In dek	0,41 In dek	3,635,957,000	3,833,609,000	3,574,272,000							0,41 In dek	3,939,926,600	
1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	100 %	3,635,957,000	3,833,609,000	3,574,272,000							100 %	3,939,926,600	
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100 %	0	0	24,013,750	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	9,915,125	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100 %	0	0	6,335,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial	0	100 %	6,308,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100 %	0	0	15,551,400	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	17,106,540	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100 %	0	0	7,528,750	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	3,687,750	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	9,643,100	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	22,213,620	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	15,952,250	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	100 %	13,191,750	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100 %	0	0	3,729,250	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	4,102,175	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100 %	0	0	7,591,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100 %	0	0	2,800,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	3,080,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB	100 %	100 %	545,040,000	742,692,000	569,655,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	626,620,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	7.9 %	9.5 %	281,900,000	281,900,000	478,014,480	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	9.5 %	529,028,478	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 Dokumen	0	0	14,977,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	2 Dokumen	14,977,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat		61 %	0	0	44,858,750	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	61 %	93,495,996	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan		13 kegiatan	0	0	102,115,170	Kota Madiun, Kartoharjo,	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	0	13 kegiatan	99,052,316	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan		Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam		100 %	0	0	283,586,550	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	83,245,415	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penangangan penyakit menular dan tidak menular mencapai target		100 %	0	0	13,611,250	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	232,958,605	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	89.4 %	88 %	2,809,017,000	2,809,017,000	1,972,708,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	88 %	2,169,979,680	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		4645 Keluarga	0	0	1,600,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	4645 Keluarga	1,600,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,421,643,000	3,626,277,000	2,765,041,000							3,608,336,400		
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	0,41 Indeks	3,421,643,000	3,626,277,000	2,765,041,000							0,41 Indeks	3,015,826,400	
1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	100 %	3,421,643,000	3,626,277,000	2,765,041,000							100 %	3,015,826,400	
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100 %	0	0	11,591,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	0	100 %	12,750,650	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100 %	0	0	2,613,250	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	2,874,575	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100 %	0	0	3,100,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	3,410,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100 %	0	0	26,514,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	29,165,400	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	16,453,100	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	19,416,430	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	27,974,350	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	86,444,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100 %	0	0	11,950,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	13,145,550	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100 %	0	0	5,976,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	6,573,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100 %	0	0	2,200,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	2,420,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada	Persentase penemuan dan penanganan	100 %	100 %	564,295,000	768,929,000	442,300,820	Kota Madiun, Kartoharjo,	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	100 %	486,530,902	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 2		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	penyakit pada kondisi KLB						Semua Kelurahan		Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				an Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0 2	0 2	2 0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	9.5 %	9.5 %	249,475,000	249,475,000	307,101,850	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	9.5 %	320,094,610	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0 2	0 2	2 0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU sehat		61 %	0	0	41,957,750	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	61 %	51,244,325	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan		16 kegiatan	0	0	154,331,200	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	16 kegiatan	120,677,535	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Respon KLB < 24 jam		100 %	0	0	92,313,250	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	104,844,575	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target		100 %	0	0	84,577,930	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	58,135,473	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	90 %	89 %	2,607,873,000	2,607,873,000	1,527,335,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	89 %	1,680,069,050	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													Khusus Fisik							
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		3803 Keluarga	0	0	6,750,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	3803 Keluarga	6,750,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4,281,393,000	4,491,951,000	4,068,078,000							2,498,101,918		
1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	0,41 Indeks	4,281,393,000	4,491,951,000	4,068,078,000							0,41 Indeks	1,912,437,118	
1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	100 %	4,281,393,000	4,491,951,000	4,068,078,000							100 %	1,912,437,118	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100 %	0	0	39,966,780	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	32,049,028	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100 %	0	0	7,437,600	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	8,181,360	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100 %	0	0	800,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	880	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	akupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100 %	0	0	12,226,660	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	8,580,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang		100 %	0	0	45,533,500	Kota Madiun, Taman,	DAK Non Fisik - Daya	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	100 %	52,652,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 2		pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						Semua Kelurahan	BOKKB - BOK	Manusia dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				an Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 6 0 2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	300,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	23,196,250	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100 %	0	0	1,200,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	1,320,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100 %	0	0	12,504,800	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	13,755,280	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi		100 %	0	0	8,658,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	0	100 %	9,523,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						dini HIV sesuai standar								dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan	Persentase	100 %	100 %	580,632,000	791,190,000	415,791,000	Kota	DBH CHT	Meningkatka	peningkatan	0	100 %	457,370,100	Dinas
	2	2	.	3	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	penemuan dan penanganan penyakit pada kondisi KLB						Madiun, Taman, Semua Kelurahan		n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan	Prevalensi kasus	11.5 %	11.5 %	346,215,000	346,215,000	732,118,770	Kota	DBH CHT	Meningkatka	peningkatan	0	11.5 %	806,265,647	Dinas
	2	2	.	5	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	stunting						Madiun, Taman, Semua Kelurahan		n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	1	Pengelolaan	Persentase TTU		61 %	0	0	43,950,000	Kota	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatka	peningkatan	0	61 %	69,958,625	Dinas
	2	2	.	7	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	sehat						Madiun, Taman, Semua Kelurahan		n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi				Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan		13 kegiatan	0	0	113,345,520	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	13 kegiatan	120,178,498	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam		100 %	0	0	43,747,760	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	48,122,536	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target		100 %	0	0	249,544,260	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	249,384,036	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	85 %	85 %	3,354,546,000	3,354,546,000	2,334,953,350	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	85 %	3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK							
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		5550 Keluarga	0	0	6,000,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	5550 Keluarga	6,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3,571,699,880	3,765,699,880	3,509,744,000							4,392,092,400		
1	0	0	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat	0,41 Indeks	0,41 Indeks	3,571,699,880	3,765,699,880	3,509,744,000							0,41 Indeks	3,895,184,400	
1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	100 %	3,571,699,880	3,765,699,880	3,509,744,000							100 %	3,895,184,400	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Daerah Kabupaten/Kota														
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100 %	0	0	13,627,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	14,989,700	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		100 %	0	0	504,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	554,4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100 %	0	0	8,490,650	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	9,339,715	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar		100 %	0	0	41,653,650	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	45,819,015	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100 %	0	0	45,918,050	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	62,977,255	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100 %	0	0	6,843,600	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	7,527,960	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100 %	0	0	6,738,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	7,411,800	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100 %	0	0	1,670,500	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	1,837,550	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada	Persentase penemuan dan penanganan	100 %	100 %	535,000,000	729,000,000	400,730,000	Kota Madiun, Taman,	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	0	100 %	440,803,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 2		Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	penyakit pada kondisi KLB						Semua Kelurahan		Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				an Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0 2	0 2	2 0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi kasus stunting	11 %	11 %	326,000,000	326,000,000	487,866,050	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	11 %	536,652,655	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0 2	0 2	2 0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 Dokumen	0	0	27,966,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	2 Dokumen	27,966,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0 2	0 2	2 0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase TTU Sehat		61 %	0	0	28,780,900	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	0	61 %	56,674,640	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				Keluarga Berencana
1	0	0	2	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan		15 kegiatan	0	0	149,758,800	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	15 kegiatan	136,899,565	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase respon KLB < 24 jam		100 %	0	0	24,956,450	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	27,452,095	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan tidak menular mencapai target		100 %	0	0	204,597,270	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	100 %	182,750,997	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	0	0	2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	80 %	85 %	2,710,699,880	2,710,699,880	2,053,143,080	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	85 %	2,258,457,388	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
													DAK Non Fisik - BOKKB - BOK						
1	0	0	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmasnull		8988 Keluarga	0	0	6,500,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	0	8988 Keluarga	6,500,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TOTAL									230,228,357,991	234,500,058,151	262,029,509,779							540,786,982,550	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				127,187,727,320	125,252,224,617	153,008,097,557							141,029,734,242	
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	10,580,000,000	10,888,336,546	13,204,343,298						A Skor	11,894,734,242	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	3	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	14,138,640					100 %	40,000,000		
1	3	1	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	14,138,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 %	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	6,000,000,000	6,138,831,500	8,466,667,900						100 %	7,000,000,000	
1	3	1	2	0	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	6,000,000,000	6,138,831,500	8,466,667,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 %	7,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	240,000,000	240,000,000	240,000,000						100 %	250,000,000	
1	3	1	2	0	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	60 kali	60 kali	240,000,000	240,000,000	240,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan	0	60 kali	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan					Penataan Ruang
1	3	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	90,000,000	89,800,000	445,041,866						100 %	600,000,000		
1	3	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras yang terpenuhi	5 jenis	5 jenis	90,000,000	89,800,000	445,041,866	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pegawai Dinas PUPR Kota Madiun	5 jenis	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	3,480,000,000	3,649,955,046	3,244,531,772						100 %	3,254,734,242		
1	3	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	3,480,000,000	3,649,955,046	3,244,531,772	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	10 jenis	3,254,734,242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang yang layak digunakan	100 %	100 %	730,000,000	729,750,000	793,963,120					100 %	750,000,000		
1	3	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	59 buah	59 buah	340,000,000	340,000,000	322,108,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	59 buah	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 buah	1 buah	390,000,000	389,750,000	471,855,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	1 buah	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rawan Banjir	14 %	19,09 %	16,199,043,440	8,369,843,440	12,114,718,000					14 %	14,850,000,000		
1	3	2	2		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas daerah genangan	15 %	15 %	16,199,043,440	8,369,843,440	12,114,718,000					15 %	14,850,000,000		
1	3	2	2	1	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung yg dibangun	2 pintu	2 pintu	4,561,050,400	3,559,900,400	3,326,904,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan	Masyarakat Kota Madiun	2 pintu	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	n Ekonomi dan Pelayanan dasar	Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan				
1	3	2	2	2	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa banjir yg direhab	1 stasiun	1 stasiun	3,992,153,000	470,353,000	1,887,953,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 stasiun	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2	4	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yg dinormalisasikan	1.5 km	1.5 km	6,547,050,040	3,241,050,040	5,653,201,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1.5 km	11,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	2	5	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	100 persen	100 persen	1,098,790,000	1,098,540,000	1,246,660,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	100 persen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelanggan yang Terlayani Kebutuhan Air Minum	100 %	100 %	101,669,000	101,669,000	100,569,000						100 %	60,000,000	
1	3	3	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Persentase pelanggan yang terlayani	100 %	100 %	101,669,000	101,669,000	100,569,000						100 %	60,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			01	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	kebutuhan air minum														
1	3	3	201	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	101,669,000	101,669,000	100,569,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Daerah Banjir	0	0	24,111,567,050	20,731,396,010	23,631,909,810						0	4,950,000,000		
					Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik	-	80,06 %												
1	3	6	201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kondisi baik	19.433 km	19.433 km	24,111,567,050	20,731,396,010	23,631,909,810							19.433 km	4,950,000,000	
1	3	6	201	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	8 dokumen	8 dokumen	997,400,000	992,400,000	1,583,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemerintah Kota madiun	8 dokumen	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3	6	2	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang drainase yg dibangun	1.5 km	1.5 km	20,513,921,040	17,141,500,000	19,623,725,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemerintah Kota Madiun	1.5 km	1,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	2	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi drainase yang dipelihara	3 kecamatan	3 kecamatan	2,600,246,010	2,597,496,010	2,424,283,910	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemerintah Kota Madiun	3 kecamatan	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	15,287,156,000	18,746,270,000	22,964,988,800						100 %	23,250,000,000	
1	3	8	2		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	15,287,156,000	18,746,270,000	22,964,988,800						100 %	23,250,000,000	
1	3	8	2	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,	Persentase jumlah permohonan yang ditindaklanjuti	50 pe mohon	50 pe mohon	220,000,000	220,000,000	220,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemerintah Kota Madiun	50 pe mohon	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					serta Implementasi SIMBG														
1	3	8	2	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang ditindaklanjuti	5 gedung	5 gedung	15,067,156,000	18,526,270,000	22,744,988,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemerintah Kota Madiun	5 gedung	23,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	13,026,307,970	14,499,606,270	17,758,619,030						100 %	20,000,000,000	
1	3	9	2		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	13,026,307,970	14,499,606,270	17,758,619,030						100 %	20,000,000,000	
1	3	9	2	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi	30 lokasi	30 lokasi	13,026,307,970	14,499,606,270	17,758,619,030	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemerintah Kota Madiun	30 lokasi	20,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	95 %	95 %	45,461,983,860	49,495,103,351	60,815,610,250						95 %	63,150,000,000	
1	3	#	2		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	95 %	95 %	45,461,983,860	49,495,103,351	60,815,610,250						95 %	63,150,000,000	
1	3	#	2	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan	Jumlah dokumen yg ditindaklanjuti	10 dokumen	10 dokumen	1,206,950,000	1,045,332,800	3,041,182,800	Kota Madiun,	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur	Peningkatan pembangunan		10 dokumen	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1	Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana, Alokasi Umum	untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan				Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2 . 0 1	2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas lahan yang dibebaskan	5 hektar	5 hektar	5,031,500,000	2,544,642,130	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan		5 hektar	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2 . 0 1	4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	408,530,000	406,947,400	398,947,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan		2 dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2 . 0 1	5 Pembangunan Jalan	Panjang jalan yg dibangun	1000 meter	1000 meter	16,338,318,240	18,828,238,840	18,956,523,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan		1000 meter	32,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2 . 0 1	7 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah ruas yang ditambah lajunya	1 ruas	1 ruas	3,713,780,000	4,581,271,000	9,170,298,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan		1 ruas	3,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	n Ekonomi dan Pelayanan dasar	Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan				
1	3	#	2	1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	6 km	6 km	13,384,620,420	13,847,015,981	19,458,524,250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan		6 km	17,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2	1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	28 ruas	28 ruas	2,525,135,200	5,373,885,200	6,652,665,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan		28 ruas	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2	1	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	1 jembatan	1 jembatan	2,627,550,000	2,639,450,000	2,912,814,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan		1 jembatan	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2	1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	10 jembatan	10 jembatan	225,600,000	228,320,000	224,655,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan		10 jembatan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														Pelayanan dasar						
1	3	#			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konsultasi yang Memenuhi Standart Kompetensi	95 %	62,83 %	540,000,000	540,000,000	820,000,000						77,98 %	575,000,000		
1	3	#	2		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	200 orang	200 orang	270,000,000	270,000,000	550,000,000						200 orang	275,000,000		
1	3	#	2	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta	200 orang	200 orang	270,000,000	270,000,000	550,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pelaku Jasa Konstruksi	200 orang	275,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	#	2		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah rekomendasi IUJK	200 orang	200 orang	270,000,000	270,000,000	270,000,000						200 orang	300,000,000		
1	3	#	2	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta	50 BU JK	50 BU JK	270,000,000	270,000,000	270,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pelaku Jasa Konstruksi Kota Madiun	50 BU JK	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	#			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RT/RW	100 %	100 %	1,880,000,000	1,880,000,000	1,597,339,369						100 %	2,300,000,000		

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	3	#	2	0	1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	1,110,000,000	1,110,000,000	973,210,320					1 dokumen	1,500,000,000			
1	3	#	2	0	1	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	180,000,000	180,000,000	179,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 dokumen	900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	#	2	0	1	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	850,000,000	850,000,000	713,710,320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	#	2	0	1	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah terlaksananya sosialisasi peraturan daerah di bidang penataan ruang	3 kali	3 kali	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	3 kali	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	#	2	0	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	330,000,000	330,000,000	281,814,139							1 dokumen	350,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3	#	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	330,000,000	330,000,000	281,814,139	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	100 %	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	#	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	1 dokumen	1 dokumen	440,000,000	440,000,000	342,314,910					1 dokumen	450,000,000		
1	3	#	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase penanganan pelanggaran penataan ruang	100 %	100 %	440,000,000	440,000,000	342,314,910	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	100 %	450,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL									127,187,727,320	125,252,224,617	153,008,097,557						141,029,734,242		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				37,918,652,656	42,876,419,277	50,877,884,929						37,707,410,400		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	10,713,951,926	12,021,276,047	14,195,301,459						A Skor	8,197,410,400	
1	4	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan,peng endalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	45,000,000	45,000,000	16,673,400						100 %	45,000,000	
1	4	1	2	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dok umen	20 dok umen	45,000,000	45,000,000	16,673,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemenu han dokume n perencan aan,peng endalian dan evaluasi perangk at daerah	20 dok umen	45,000,000	Dinas Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permukim an
1	4	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	6,135,000,000	6,135,000,000	7,695,440,320						100 %	5,061,000,000	
1	4	1	2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	6,074,000,000	6,074,000,000	7,634,440,320	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemenu han dokume n administ rasi keuanga n	100 %	5,000,000,000	Dinas Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permukim an

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	4	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	61,000,000	61,000,000	61,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemenuhan dokumen administrasi keuangan	13 dokumen	61,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	130,010,000	130,010,000	137,860,000						100 %	130,000,000	
1	4	1	2	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	100 %	120,010,000	120,010,000	127,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	120,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	4	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	183,880,000	183,880,000	382,362,950					100 %	183,880,000		
1	4	1	2	906	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	183,880,000	183,880,000	382,362,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	183,880,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	108,791,650	1,621,321,550	2,297,685,537						100 %	570,000,000	
1	4	1	2	107	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan/jabatan	100 %	100 %	1,892,300	1,437,487,500	1,968,346,060	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pengadaan kendaraan operasional dan sarana prasarana kantor	100 %	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2	107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	106,899,350	183,834,050	329,339,477	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pengadaan kendaraan operasional dan sarana	100 %	70,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Pelayanan dasar		prasarana kantor			
1	4	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2,174,500,844	1,969,295,065	1,837,459,220						100 %	140,000,000	
1	4	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	2,174,500,844	1,969,295,065	1,837,459,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan (rutin)	100 %	140,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	1,936,769,432	1,936,769,432	1,827,820,032						100 %	2,067,530,400	
1	4	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	1,470,961,432	1,470,961,432	1,420,652,032	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100 %	1,560,360,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan	Pemeliharaan Sarana Prasarana	100 %	35,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	n Ekonomi dan Pelayanan dasar	Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional				Permukiman
1	4	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	425,808,000	425,808,000	367,168,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional	100 %	472,170,400	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pengembangan Perumahan	100 %	100 %	2,171,611,000	2,745,911,000	3,132,833,210						100 %	4,790,000,000		
1	4	2	2		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	87,500,000	261,850,000	261,850,000						1 dokumen	100,000,000		
1	4	2	2	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah dokumen data rumah yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	87,500,000	261,850,000	261,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Pendataan rumah	1 dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														dan Pelayanan dasar	terpadu dan berkelanjutan					Permukiman
1	4	2	2	03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	1 lokasi	1 lokasi	1,334,111,000	1,334,111,000	1,682,733,210						1 lokasi	1,690,000,000		
1	4	2	2	03	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lingkungan perumahan pada relokasi program kota yang terpelihara	1 lokasi	1 lokasi	1,334,111,000	1,334,111,000	1,682,733,210	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Operasional rusunawa	1 lokasi	1,690,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	2	2	05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	100 %	100 %	750,000,000	1,149,950,000	1,188,250,000						100 %	3,000,000,000		
1	4	2	2	05	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	100 %	100 %	750,000,000	1,149,950,000	1,188,250,000			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Fasilitasi pengelolaan rusunawa	100 %	3,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	99 %	99 %	4,757,500,000	5,618,815,000	6,184,190,010						99 %	2,720,000,000		



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	4	3	2	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi pelaksanaan pembangunan permukiman permukiman kumuh	3 lokasi	3 lokasi	2,985,000,000	3,850,425,000	4,404,346,010	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	3 lokasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	100 %	20,275,589,730	22,490,417,230	27,365,560,250						100 %	22,000,000,000	
1	4	5	2		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100 %	100 %	20,275,589,730	22,490,417,230	27,365,560,250						100 %	22,000,000,000	
1	4	5	2	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi prasarana,sarana dan utilitas umum yang disediakan	3 lokasi	3 lokasi	20,275,589,730	22,490,417,230	27,365,560,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Penyediaan/Pemeliharaan PSU RTH,Pertamanan, PJU dan Perumahan	3 lokasi	22,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				434,000,000	466,101,600	399,551,080							40,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	2		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %	100 %	17,800,000	349,901,600	347,501,600						100 %	15,000,000	
2	#	2	2	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	100 %	100 %	17,800,000	349,901,600	347,501,600						100 %	15,000,000	
2	#	2	2	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah sesuai ketentuan	100 %	100 %	17,800,000	349,901,600	347,501,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatka n Bencana dan Perubhan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyara kat Kota Madiun	100 %	15,000,000	Dinas Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permukim an
2	#	4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %	36,200,000	36,200,000	36,200,000						100 %	25,000,000	
2	#	4	2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah	100 %	100 %	36,200,000	36,200,000	36,200,000						100 %	25,000,000	
2	#	4	2	1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa, konflik perkara pertanahan yang tertangani	100 %	100 %	36,200,000	36,200,000	36,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatka n Bencana dan Perubhan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyara kat Kota Madiun	100 %	25,000,000	Dinas Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permukim an
2	#	#		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase Penatagunaan Tanah	100 %	100 %	380,000,000	80,000,000	15,849,480						100 %	0	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	#	2	0	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100 %	100 %	380,000,000	80,000,000	15,849,480					100 %	0		
2	#	#	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan urusan pertanahan	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	15,849,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	100 %	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	#	#	2	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data yang dapat disajikan	1 dokumen	1 dokumen	300,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	1 dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
TOTAL								38,352,652,656	43,342,520,877	51,277,436,009							37,747,410,400		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			15,542,853,000	16,016,773,000	19,115,557,740							22,574,909,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	9,609,780,000	9,609,780,000	13,266,064,280						A Skor	12,728,287,000	
1	5	1	2	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	112,721,000	112,721,000	101,790,280						100 %	112,721,000	
1	5	1	2	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dok umen	12 Do kumen	112,721,000	112,721,000	101,790,280	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Kantor Satpol PP dan Damkar	12 Do kumen	112,721,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	5,458,061,000	5,458,061,000	8,249,600,000						100 %	6,548,510,000	
1	5	1	2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %	5,458,061,000	5,458,061,000	8,249,600,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Anggota Satpol PP dan Damkar	100 %	6,548,510,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN Yang Tercapai	100 %	100 %	495,842,000	495,842,000	579,916,000						100 %	466,513,000	
1	5	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 %	100 %	495,842,000	495,842,000	579,916,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Anggota Satpol PP dan Damkar	100 %	466,513,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	100 %	100,585,000	100,585,000	200,585,000						100 %	250,000,000	
1	5	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas	100 %	100 %	100,585,000	100,585,000	200,585,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Anggota Satpol PP dan Damkar	100 %	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	4,965,000	4,965,000	419,000,000						100 %	500,000,000	
1	5	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	1 Jenis	4,965,000	4,965,000	419,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Kantor Satpol PP dan Damkar	1 Jenis	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	5	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2,870,506,000	2,870,506,000	2,812,331,000						100 %	4,115,543,000	
1	5	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Representatif	100 %	100 %	2,870,506,000	2,870,506,000	2,812,331,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Kantor dan Anggota Satpol PP dan Damkar	100 %	4,115,543,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah Yang Layak Digunakan	100 %	100 %	567,100,000	567,100,000	902,842,000						100 %	735,000,000	
1	5	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Yang Layak Digunakan	100 %	100 %	467,100,000	467,100,000	707,647,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Kantor Satpol PP Dan Damkar	100 %	550,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Gedung Yang Layak Digunakan	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	99,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Kantor Satpol PP Dan Damkar	100 %	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	5	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Yang Layak Digunakan	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	96,195,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Kantor Satpol PP Dan Damkar	100 %	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Ketertiban Umum) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	97 %	97 %	4,643,545,000	5,117,465,000	4,575,743,460						97 %	7,587,413,000	
1	5	2	2		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	97 %	97 %	4,226,549,000	4,579,629,000	4,183,711,100						97 %	6,678,876,000	
1	5	2	2	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Persentase Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	100 %	100 %	2,063,016,000	1,544,016,000	1,642,740,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	276,041,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pengamanan, dan Pengawasan														
1	5	2	2	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	97 %	97 %	1,247,315,000	1,247,315,000	752,071,020	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	97 %	1,800,925,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	90 %	90 %	152,772,000	152,772,000	177,119,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	90 %	162,772,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan	92 %	92 %	403,895,000	1,275,975,000	1,249,670,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	92 %	3,882,544,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam	80 %	80 %	359,551,000	359,551,000	362,111,080	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyara kat Kota Madiun	80 %	556,594,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kebakaran Yang Berkompeten									masyarakat yang kondusif				
1	5	2	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %	100 %	382,545,000	503,385,000	392,032,360						100 %	761,192,000	
1	5	2	2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Yang Paham Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %	100 %	167,168,000	167,168,000	90,655,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	100 %	253,179,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
													DBH CHT						
1	5	2	2	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Yang Tertangani	100 %	100 %	215,377,000	336,217,000	301,376,960	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	100 %	508,013,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
													DBH CHT						
1	5	2	2		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Berkompeten	100 %	100 %	34,451,000	34,451,000	0						100 %	147,345,000	
1	5	2	2	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase PPNS Yang Berkompeten	100 %	100 %	34,451,000	34,451,000	0	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100 %	147,345,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	1,289,528,000	1,289,528,000	1,273,750,000						100 %	2,259,209,000	
1	5	4	2	0	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1,218,406,000	1,218,406,000	1,109,250,000						100 %	2,161,187,000	
1	5	4	2	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	80 %	80 %	918,928,000	918,928,000	862,850,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	80 %	1,650,492,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	299,478,000	299,478,000	246,400,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	510,695,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	4	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	90 %	71,122,000	71,122,000	164,500,000						90 %	98,022,000		
1	5	4	2	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran Yang Didata	100 %	100 %	71,122,000	71,122,000	164,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	98,022,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
TOTAL								15,542,853,000	16,016,773,000	19,115,557,740							22,574,909,000		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3,800,000,000	3,799,700,000	3,849,700,000							4,225,000,000		
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	2,082,695,000	2,082,695,000	2,348,103,000						A Skor	2,280,000,000		
1	5	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	480,000						100 %	20,000,000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						evaluasi perangkat daerah													
1	5	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	20,000,000	20,000,000	480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	BPBD Kota Madiun	12 dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	1,276,195,000	1,276,195,000	1,610,800,000						100 %	1,325,000,000	
1	5	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	1,276,195,000	1,276,195,000	1,610,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Karyawan Dan Karyawan BPBD Kota Madiun	100 %	1,325,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	5	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000	120,000,000						100 %	70,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Karyawan Dan Karyawan ti BPBD Kota Madiun	100 %	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	510,000,000	510,000,000	339,728,000						100 %	560,000,000	
1	5	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	510,000,000	510,000,000	339,728,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Karyawan Dan Karyawan ti BPBD Kota Madiun	100 %	560,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	216,500,000	216,500,000	277,095,000						100 %	255,000,000	
1	5	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	100 %	100 %	175,000,000	175,000,000	177,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Karyawan Dan Karyawan ti BPBD Kota Madiun	100 %	195,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	25,000,000	25,000,000	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Karyawan Dan Karyawan BPBD Kota Madiun	100 %	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	1	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	16,500,000	16,500,000	24,175,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Karyawan Dan Karyawan BPBD Kota Madiun	100 %	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Ditangani	100 %	100 %	1,717,305,000	1,717,005,000	1,501,597,000						100 %	1,945,000,000		
1	5	3	2	0	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	210,565,000	210,415,000	155,867,000							100 %	225,000,000	
1	5	3	2	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100 %	100 %	85,000,000	85,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan	100 %	100 %	125,565,000	125,415,000	105,867,000	Semua Kab/Kota, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	140,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1	Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	bencana yang memperoleh informasi rawan bencana						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Bencana Daerah
1	5	3	2 . 0 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	1,411,740,000	1,411,740,000	1,252,364,000						100 %	1,615,000,000	
1	5	3	2 . 0 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah aparatur dan penduduk yang ikut pelatihan	100 %	100 %	141,350,000	141,350,000	194,218,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	155,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2 . 0 2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase jumlah penduduk yang ikut pelatihan	100 %	100 %	90,000,000	90,000,000	60,021,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2 . 0 2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase dokumen yang disusun	100 %	100 %	95,000,000	95,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyarakat Kota Madiun	100 %	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
1	5	3	2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan bencana	100 %	100 %	1,085,390,000	1,085,390,000	948,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	1,250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	95,000,000	94,850,000	93,366,000						100 %	105,000,000	
1	5	3	2	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi	100 %	100 %	95,000,000	94,850,000	93,366,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 %	105,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL									3,800,000,000	3,799,700,000	3,849,700,000							4,225,000,000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24,778,401,003	24,543,931,733	<b>27,889,302,353</b>							26,412,432,369	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	6,923,449,755	6,830,143,535	8,197,978,598						A Skor	7,414,344,116		
1	6	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	89,831,480	89,831,480	90,031,480						100 persen	89,831,480		
1	6	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	89,831,480	89,831,480	90,031,480	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12 dokumen	89,831,480	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	100 persen	4,397,131,311	4,397,131,311	5,593,129,055						100 persen	4,666,973,836	
1	6	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	4,357,416,261	4,357,416,261	5,498,553,305	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 persen	4,619,315,836	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	39,715,050	39,715,050	94,575,750	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13 dokumen	47,658,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 persen	100 persen	35,774,400	35,774,400	35,774,400						100 persen	54,356,000	
1	6	1	2	105	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100 persen	100 persen	35,774,400	35,774,400	35,774,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Pangan	100 persen	54,356,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	228,901,000	194,901,000	194,901,000						100 persen	247,500,000	
1	6	1	2	906	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	100 persen	228,901,000	194,901,000	194,901,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 persen	247,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	6	1	2	0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen	100 persen	296,550,000	295,533,980	921,157,408					100 persen	59,791,600		
1	6	1	2	0	7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 persen	0 persen	0	0	424,281,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 persen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	0	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	100 persen	296,550,000	295,533,980	496,876,408	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 persen	59,791,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	1,479,495,914	1,421,745,914	925,522,655						100 persen	1,860,693,580	
1	6	1	2	0	8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen	100 persen	1,149,315,914	1,091,565,914	594,782,655	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	100 persen	1,535,883,580	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif	ngan Anak			
1	6	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji non ASN perangkat daerah	100 persen	100 persen	330,180,000	330,180,000	330,740,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 persen	324,810,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	100 persen	395,765,650	395,225,450	437,462,600						100 persen	435,197,620	
1	6	1	2	109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas / jabatan yang layak digunakan	100 persen	100 persen	170,634,200	170,594,000	212,831,150	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 persen	187,697,620	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	100 persen	140,131,450	139,631,450	139,631,450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 persen	154,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana yang layak digunakan	100 persen	100 persen	85,000,000	85,000,000	85,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 persen	93,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	an dan Perlindungan Anak			n dan Perlindungan Anak
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PSKS yang Berperan Aktif dalam Pemberdayaan Sosial	91 %	50 %	3,846,611,695	3,860,177,515	4,174,489,850						58 %	5,515,165,528	
1	6	2	2	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase PSKS yang dibina	91 persen	91 persen	3,846,611,695	3,860,177,515	4,174,489,850						91 persen	5,515,165,528	
1	6	2	2	103	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang terlatih	135 orang	135 orang	288,333,700	445,400,350	519,878,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	135 orang	350,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2	203	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Klien PMKS yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	80 orang	80 orang	77,014,000	61,443,400	47,823,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	80 orang	95,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	2	2	303	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	1 lembaga	1 lembaga	321,677,500	304,029,250	188,638,150	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyarakat Kota Madiun	1 lembaga	387,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															masyarakat yang kondusif				Perlindungan Anak	
1	6	2	2	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Mendapat Pembinaan	Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang Mendapat Pembinaan	5 Lembaga	5 Lembaga	3,159,586,495	3,049,304,515	3,418,150,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	5 Lembaga	4,683,165,528	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	19 %	19 %	1,742,901,123	1,742,901,123	<b>2,673,729,247</b>						19 %	2,000,000,000		
					Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	-	100%													
1	6	4	2	0	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tertangani	100 persen	100 persen	1,295,044,666	1,295,044,666	<b>2,288,452,130</b>					100 persen	1,580,000,000		
1	6	4	2	0	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi	160 orang	160 orang	213,655,500	213,655,500	213,655,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	160 orang	485,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kebutuhan pangannya													
1	6	4	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang tercukupi kebutuhan sandangnya	50 ora ng	50 ora ng	50,505,771	50,505,771	31,734,271	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	50 ora ng	50,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan alat bantu	10 ora ng	10 ora ng	44,173,250	44,173,250	42,663,212	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	10 ora ng	55,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga	15 ora ng	15 ora ng	42,300,000	42,300,000	42,300,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	15 ora ng	45,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	60 ora ng	60 ora ng	66,700,000	66,700,000	26,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	Masyarakat Kota Madiun	60 ora ng	40,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	286 orang	286 orang	745,285,475	745,285,475	1,675,490,145	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	286 orang	820,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang menerima layanan kedaruratan	40 orang	40 orang	132,424,670	132,424,670	255,909,002	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	40 orang	85,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Prosentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang tertangani	100 persen	100 persen	447,856,457	447,856,457	<b>385,277,117</b>						100 persen	420,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6	4	2	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan layanan kedaruratan	15 ora ng	15 ora ng	199,014,605	199,014,605	157,824,605	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	15 ora ng	140,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan pangannya	150 ora ng	150 ora ng	89,275,500	89,275,500	99,493,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	150 ora ng	85,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	4	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang tercukupi kebutuhan sandangnya	105 ora ng	105 ora ng	20,646,890	20,646,890	20,646,890	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	105 ora ng	45,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	7 ora ng	7 ora ng	10,400,830	10,400,830	10,400,830	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan	Masyarakat Kota Madiun	7 ora ng	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberday

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	2		(PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan alat bantu						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				aan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan perbekalan kesehatan	20 ora ng	20 ora ng	7,971,592	7,971,592	7,971,592	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	20 ora ng	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	132 ora ng	132 ora ng	102,347,040	102,347,040	75,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	132 ora ng	120,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	4	2	1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS	10 ora ng	10 ora ng	18,200,000	18,200,000	13,740,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyara kat Kota Madiun	10 ora ng	20,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						dan Napza di luar panti sosial yang menerima pelayanan reunifikasi keluarga									masyarakat yang kondusif				Perlindungan Anak
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	90 %	93 %	11,313,296,100	11,312,409,780	<b>11,931,241,350</b>						99,66 %	10,723,661,850	
1	6	5	2		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	90 persen	90 persen	7,840,000	7,840,000	6,840,000						90 persen	8,668,000	
1	6	5	2	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang didata	24 orang	24 orang	3,600,000	3,600,000	3,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	24 orang	3,960,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	24 orang	24 orang	4,040,000	4,040,000	3,640,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	24 orang	4,488,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	24 orang	24 orang	200,000	200,000	200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	Masyarakat Kota Madiun	24 orang	220	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Perlindungan Anak
1	6	5	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	11,305,456,100	11,304,569,780	<b>11,924,401,350</b>						100 persen	10,714,993,850	
1	6	5	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang di data	14042 orang	14042 orang	1,231,132,150	1,231,132,150	1,674,171,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	14042 orang	1,161,228,200	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan DTKS	27 kelurahan	27 kelurahan	851,783,150	851,125,630	588,234,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	27 kelurahan	907,005,550	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	3892 K K	3892 K K	9,120,538,000	9,120,309,200	9,562,828,050	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	3892 K K	8,509,303,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	5	2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan	10 KU BE	10 KU BE	102,002,800	102,002,800	99,167,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana Manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	Masyarakat Kota Madiun	10 KU BE	137,457,100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						pengembangan ekonomi						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana	100 %	100 %	766,036,250	628,979,400	696,896,928						100 %	667,041,550	
1	6	6	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana yang mendapat bantuan	100 persen	100 persen	161,799,100	91,862,500	49,353,500						100 persen	183,250,000	
1	6	6	2	1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan makanan	3300 orang	3300 orang	40,269,900	34,333,300	22,708,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	3300 orang	40,150,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang	1000 orang	1000 orang	15,178,000	15,178,000	15,178,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	1000 orang	10,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan	300 orang	300 orang	106,351,200	42,351,200	11,467,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial	Masyarakat Kota Madiun	300 orang	133,100,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						dukungan psikososial						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				n dan Perlindungan Anak
1	6	6	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase kelurahan yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	100 persen	100 persen	604,237,150	537,116,900	647,543,428						100 persen	483,791,550	
1	6	6	2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi kampung siaga bencana	60 orang	60 orang	130,627,400	120,455,100	154,290,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	60 orang	14,707,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	6	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tagana yang mendapatkan pembinaan	26 orang	26 orang	473,609,750	416,661,800	493,253,328	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	26 orang	469,084,550	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	186,106,080	169,320,380	214,966,380						100 %	92,219,325	
1	6	7	2		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	100 persen	186,106,080	169,320,380	214,966,380						100 persen	92,219,325	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	6	7	2	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang tersedia dalam kondisi baik	1 paket	1 paket	186,106,080	169,320,380	214,966,380	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Taman Makam Pahlawan	1 paket	92,219,325	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,700,506,802	3,211,598,513	2,921,223,354						2,915,960,361		
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	15 %	15 %	846,501,000	846,501,000	781,965,670						15 %	930,276,589	
2	8	2	2		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase program yang di ARG	10 persen	10 persen	303,301,000	303,301,000	253,559,080						10 persen	332,756,589	
2	8	2	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen program yang di ARG	34 dokumen	34 dokumen	135,718,050	135,718,050	135,718,050	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyarakat Kota Madiun	34 dokumen	220,099,682	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				Perlindungan Anak
2	8	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor PUG	375 orang	375 orang	57,775,550	57,775,550	57,775,550	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	375 orang	63,553,105	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta pelatihan PPRG	70 orang	70 orang	100,090,620	100,090,620	50,348,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	70 orang	39,289,855	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi PUG dan PPRG	75 orang	75 orang	9,716,780	9,716,780	9,716,780	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	75 orang	9,813,947	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase partisipasi perempuan pada lembaga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan di	12.5 persen	12.5 persen	173,850,000	173,850,000	176,867,070						12.5 persen	191,235,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi													
2	8	2	2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	180 orang	180 orang	67,100,000	67,100,000	67,100,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	180 orang	73,810,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta pelatihan peningkatan partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	116 orang	116 orang	106,750,000	106,750,000	109,767,070	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	116 orang	117,425,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	50 persen	50 persen	369,350,000	369,350,000	351,539,520						50 persen	406,285,000	
2	8	2	2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang mendapatkan pendampingan layanan pemberdayaan perempuan	15 lembaga	15 lembaga	65,216,000	65,216,000	65,466,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	15 lembaga	71,737,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8	2	2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	80 ora ng	80 ora ng	102,046,150	102,046,150	83,985,670	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	80 ora ng	112,250,765	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindung an Anak
2	8	2	2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pengembangan KIE	32 lem baga	32 lem baga	202,087,850	202,087,850	202,087,850	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	32 lem baga	222,296,635	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindung an Anak
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	0.003	250,155,865	419,590,865	373,259,905						0.003	327,752,000	
2	8	3	2		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	67.39 persen	67.39 persen	53,143,795	104,643,795	90,284,475						67.39 persen	112,700,000	
2	8	3	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	50 ora ng	50 ora ng	33,619,285	85,119,285	70,759,965	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	50 ora ng	72,500,000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindung an Anak

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Daerah Kabupaten/Kota														
2	8	3	2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	50 ora ng	50 ora ng	19,524,510	19,524,510	19,524,510	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	50 ora ng	40,200,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2	2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase klien yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	56 persen	56 persen	162,140,250	259,655,250	265,495,930						56 persen	167,360,000	
2	8	3	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	40 ora ng	40 ora ng	162,140,250	259,655,250	265,495,930	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	40 ora ng	167,360,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	2	2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 persen	100 persen	34,871,820	55,291,820	17,479,500						100 persen	47,692,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	8	3	2	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah klien perempuan yang mendapatkan pendampingan dalam situasi darurat	20 klien	20 klien	24,659,820	45,079,820	7,567,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	20 klien	30,200,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	3	2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	30 orang	30 orang	10,212,000	10,212,000	9,912,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	30 orang	17,492,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang Memiliki Data Keluarga Berkualitas	10 %	10 %	836,784,054	835,086,470	780,466,550						10 %	667,703,740		
2	8	4	2		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang memahami kesetaraan gender dan hak anak	80 persen	80 persen	191,270,900	189,761,150	189,761,150							80 persen	169,891,920	
2	8	4	2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendampingan dan pelatihan data kualitas keluarga	111 orang	111 orang	56,247,400	56,100,200	56,100,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	111 orang	21,366,070	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8	4	2	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah RT yang memiliki data Kualitas Keluarga	108 RT	108 RT	60,880,000	59,869,000	59,869,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	108 RT	66,968,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pengembangan dan peningkatan kualitas keluarga	81 orang	81 orang	74,143,500	73,791,950	73,791,950	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	81 orang	81,557,850	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang aktif dalam peningkatan kualitas keluarga dan hak anak	100 persen	100 persen	457,573,954	457,565,650	475,187,650						100 persen	291,078,700	
2	8	4	2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor peningkatan kualitas keluarga	100 orang	100 orang	20,950,000	20,949,900	20,949,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 orang	23,045,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8	4	2	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	14 lembaga	14 lembaga	97,510,000	97,501,900	73,941,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	14 lembaga	107,261,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pertemuan penguatan jejaring peningkatan kualitas keluarga	102 orang	102 orang	339,113,954	339,113,850	380,295,850	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	102 orang	160,772,700	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	2	0	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan hak anak	100 persen	100 persen	187,939,200	187,759,670	115,517,750						100 persen	206,733,120	
2	8	4	2	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang terlayani dalam peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak	81 orang	81 orang	187,939,200	187,759,670	115,517,750	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	81 orang	206,733,120	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Data Terpilah Gender dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	229,549,120	229,549,120	211,302,480						1 Dokumen	252,504,032	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	8	5	2		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen	100 persen	229,549,120	229,549,120	211,302,480						100 persen	252,504,032	
2	8	5	2	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek data gender dan anak	65 orang	65 orang	85,116,770	85,116,770	48,920,130	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota madiun	65 orang	93,628,447	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	2	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rakor dan monev data gender dan anak	65 orang	65 orang	144,432,350	144,432,350	162,382,350	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota madiun	65 orang	158,875,585	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang Aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	12.5 %	12.5 %	409,276,685	470,265,980	386,281,631						12.5 %	551,086,000	
2	8	6	2		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	12.55 persen	12.55 persen	59,659,865	59,659,865	45,300,095						12.55 persen	61,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	8	6	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak	100 orang	100 orang	59,659,865	59,659,865	45,300,095	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 orang	61,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang dibina dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak	12.55 persen	12.55 persen	349,616,820	410,606,115	340,981,536						12.55 persen	490,086,000	
2	8	6	2	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan pernikahan dini	105 orang	105 orang	93,427,695	93,427,695	35,029,686	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	105 orang	101,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang didampingi dalam peningkatan kualitas hidup anak	67 orang	67 orang	116,036,705	177,276,000	177,257,805	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	67 orang	197,450,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	78,233,250	78,233,250	67,024,875	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	1 dokumen	80,685,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Semua Kelurahan	Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				n dan Perlindungan Anak
2	8	6	2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi sekolah ramah anak	90 ora ng	90 ora ng	61,919,170	61,669,170	61,669,170	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	90 ora ng	110,951,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kasus Kekerasan terhadap Anak	0.003	0.003	128,240,078	410,605,078	387,947,118						0.003	186,638,000	
						Persentase kasus kekerasan terhadap anak	-	0,04%									0,04%		
2	8	7	2		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sekolah yang terlibat dalam perlindungan anak	40.74 persen	40.74 persen	52,185,560	113,635,560	70,557,600						40.74 persen	77,102,000	
2	8	7	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapatkan pelatihan pencegahan kekerasan terhadap anak	30 sek olah	30 sek olah	52,185,560	113,635,560	70,557,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat kota Madiun	30 sek olah	77,102,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Prosentase anak yang mendapatkan layanan	48 per sen	48 per sen	54,881,439	219,410,439	219,410,439						48 per sen	71,421,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perlindungan khusus													
2	8	7	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendamping yang menangani perlindungan anak	10 ora ng	10 ora ng	3,850,000	3,850,000	168,379,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	10 ora ng	1,890,000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindung an Anak
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
2	8	7	2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan konvensional anak	40 ora ng	40 ora ng	51,031,439	215,560,439	51,031,439	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyara kat Kota Madiun	40 ora ng	69,531,000	Dinas Sosial, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindung an Anak
2	8	7	2	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase lembaga yang terlibat dalam perlindungan khusus anak	100 pe rsen	100 pe rsen	21,173,079	77,559,079	97,979,079						100 pe rsen	38,115,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8	7	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota		1 dokumen	0	0	76,806,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	1 dokumen	0	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	7	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi penyedia layanan perlindungan khusus anak	60 ora ng	60 ora ng	21,173,079	77,559,079	21,173,079	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	60 ora ng	38,115,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TOTAL								27,478,907,805	27,755,530,246	<b>30,810,525,707</b>							29,328,392,730	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8,136,843,807	8,367,827,847	10,213,797,087						10,617,081,162	
2	7	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	5,009,446,755	5,238,330,795	6,816,322,195					A Skor	7,063,977,680	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2	7	1	2	0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	71,280,000	71,280,000	123,740,000						100 %	138,542,800	
2	7	1	2	6 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 doku men	6 doku men	71,280,000	71,280,000	123,740,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	OPD	6 doku men	138,542,800	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2	0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	3,597,300,000	3,867,573,000	5,034,610,640						100 %	5,219,111,176	
2	7	1	2	1 0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemuhan kebutuhan gaji Asn perangkat Dearah	100 %	100 %	3,597,300,000	3,867,573,000	5,034,610,640	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	OPD	100 %	5,219,111,176	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Khusus Non Fisik						
2	7	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	49,964,100						100 %	0	
2	7	1	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan cukai	100 or ang	100 or ang	100,000,000	100,000,000	49,964,100		DBH CHT	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Kota Madiun	100 or ang	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	1,119,850,000	1,078,611,040	650,013,520						100 %	891,130,642	
2	7	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perleng kapan kantor yang representatif	100 %	100 %	885,850,000	844,611,040	393,435,520	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	OPD	100 %	634,757,642	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	234,000,000	234,000,000	256,578,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	OPD	100 %	256,373,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	7	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	5,716,755	5,716,755	843,593,935					100 %	700,000,000		
2	7	1	2	07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas/operasional	100 %	100 %	2,673,000	2,673,000	31,244,835	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	OPD	100 %	700,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	3,043,755	3,043,755	812,349,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	OPD	100 %	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	115,300,000	115,150,000	114,400,000					100 %	115,193,062		
2	7	1	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	100 %	48,550,000	48,550,000	48,550,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	OPD	100 %	48,716,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	39,250,000	39,100,000	38,350,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	OPD	100 %	39,097,025	Dinas Tenaga Kerja,

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0		dan Bangunan Lainnya							Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase peralatan gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	27,500,000	27,500,000	27,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	OPD	100 %	27,380,037	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi		25 %	862,016,290	862,016,290	1,126,236,770						25 %	1,141,836,770	
2	7	3	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi		40 orang	812,016,290	812,016,290	1,095,031,650						40 orang	1,105,631,650	
2	7	3	2	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan	220 orang	75 orang	812,016,290	812,016,290	1,095,031,650	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat	75 orang	1,105,631,650	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
													DBH CHT						
2	7	3	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPTKS yang berijin	20 %	20 %	50,000,000	50,000,000	31,205,120						20 %	36,205,120	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	7	3	2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPTKS)	4 pem binaan	4 pem binaan	50,000,000	50,000,000	31,205,120	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	LPTKS	4 pem binaan	36,205,120	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja		10 %	545,866,522	548,266,522	591,982,762						10 %	472,732,762	
2	7	4	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	225 orang	225 orang	545,866,522	548,266,522	591,982,762						225 orang	472,732,762	
2	7	4	2	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersediannya aplikasi dan data ketenagakerjaan yang aktual	1 aplikasi dan dokumen	1 aplikasi dan dokumen	217,347,107	187,176,952	171,997,912	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	1 aplikasi dan dokumen	171,997,912	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	4	2	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan sosialisasi bursa kerja	175 orang	200 orang	128,245,575	361,089,570	419,984,850	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	200 orang	300,734,850	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	7	4	2	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	50 ora ng	50 ora ng	200,273,840	0	0	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyara kat	50 ora ng	0	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan		16 %	1,719,514,240	1,719,214,240	1,679,255,360						16 %	1,938,533,950	
2	7	5	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	25 %	50 per usaha an	268,952,240	268,652,240	250,212,800						50 per usaha an	251,712,800	
2	7	5	2	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah dokumen peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan	15 dok umen	15 dok umen	47,615,000	47,615,000	47,615,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	perusah aan	15 dok umen	47,615,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	7	5	2	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah Perusahaan yang terdata dan mendapatkan Sosialisasi Sarana HI	200 pe rusaha an	200 pe rusaha an	221,337,240	221,037,240	202,597,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	perusah aan	200 pe rusaha an	204,097,800	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Tenaga Kerja serta Pengupahan									dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					Kecil Dan Menengah
2	7	5	2	.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	75 %	1,450,562,000	1,450,562,000	1,429,042,560						75 %	1,686,821,150		
2	7	5	2	2	Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Industri yang Diselesaikan melalui PB	15 Kasus Terselamatkan	15 Kasus Terselamatkan	107,768,440	107,768,440	90,829,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Perusahaan	15 Kasus Terselamatkan	90,829,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	7	5	2	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan SIAGAKITA	4000 orang	4000 orang	1,342,793,560	1,342,793,560	1,338,213,560	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Perusahaan	4000 orang	1,595,992,150	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1,158,338,800	1,034,330,800	886,801,960							950,741,960		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK		75 %	624,176,900	500,318,900	436,569,500						75 %	436,569,500	
2	#	5	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	135 Koperasi	30 Koperasi	624,176,900	500,318,900	436,569,500						30 Koperasi	436,569,500	
2	#	5	2	1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang dibina	156 koperasi	139 koperasi	624,176,900	500,318,900	436,569,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	(2022)Penguatan Ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan Kontribusi Sektor unggulan, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Koperasi	139 koperasi	436,569,500	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	#	6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah		2.5 %	224,161,900	224,161,900	180,850,700						2.5 %	106,850,700	
2	#	6	2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	50 Koperasi	5 Koperasi	224,161,900	224,161,900	180,850,700						5 Koperasi	106,850,700	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	6	2	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina	156 ko perasi	139 ko perasi	224,161,900	224,161,900	180,850,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Koperasi	139 ko perasi	106,850,700	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2	#	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro dibina yang beromzet naik		7 %	310,000,000	309,850,000	269,381,760					7 %	407,321,760		
2	#	8	2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik		4 oran g	310,000,000	309,850,000	269,381,760					4 oran g	407,321,760		
2	#	8	2	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina dan dipromosikan	50 ora ng	50 ora ng	310,000,000	309,850,000	269,381,760	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	UMKM	50 ora ng	407,321,760	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				862,483,665	955,349,185	1,521,981,291							986,037,291	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	#	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat		5 0	365,380,370	364,324,050	855,404,236					5 0	472,710,236		
3	#	2	2		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	2 doku men	20 IK M	365,380,370	364,324,050	855,404,236					20 IK M	472,710,236		
3	#	2	2	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi Standarisasi	20 IKM	20 IK M	84,269,040	84,654,960	366,680,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	20 IK M	45,603,600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	#	2	2	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Peserta Bimbingan Teknik dan pengembangan sarana standar pengawasan mutu diversifikasi produk	40 IKM	40 IK M	55,713,160	55,713,160	116,080,160	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	40 IK M	55,713,160	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	#	2	2	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	65 IKM	65 IK M	225,398,170	223,955,930	372,643,476	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	65 IK M	371,393,476	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
3	#	4			PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk		12,5 %	497,103,295	591,025,135	666,577,055					12,8 %	513,327,055		



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
3	#	4	2	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	4 kegiatan	40 IKM	497,103,295	591,025,135	666,577,055						40 IKM	513,327,055	
3	#	4	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Publikasi Produk IKM berbasis SIINas	4 kali publikasi	4 kali publikasi	497,103,295	591,025,135	666,577,055	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	IKM	4 kali publikasi	513,327,055	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
TOTAL								10,157,666,272	10,357,507,832	12,622,580,338							12,553,860,413	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				6,077,071,000	6,609,979,000	6,904,672,000							7,218,644,000	
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	5,307,071,000	5,339,979,000	5,740,443,000						A Skor	5,630,644,000	
2	9	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan	100 %	100 %	136,000,000	136,000,000	169,545,500						100 %	137,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Evaluasi Perangkat Daerah													
2	9	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	20 dokumen	20 dokumen	136,000,000	136,000,000	169,545,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Seluruh stake holder, pegawai ASN dan non ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun	20 dokumen	137,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	3,892,000,000	3,892,000,000	4,435,212,000						100 %	3,892,000,000	
2	9	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	3,892,000,000	3,892,000,000	4,435,212,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	ASN dan non ASN Dinas	100 %	3,892,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	149,071,000	181,979,000	200,029,000						100 %	186,644,000	
2	9	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	149,071,000	181,979,000	200,029,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial	ASN dan non ASN Dinas	100 %	186,644,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					
2	9	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1,000,000	6,500,000	118,905,000						100 %	150,000,000		
2	9	1	2	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 %	100 %	1,000,000	6,500,000	118,905,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 %	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	1	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	968,350,000	968,350,000	612,243,000						100 %	1,100,000,000		
2	9	1	2	08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan / perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	968,350,000	968,350,000	612,243,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 %	1,100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	9	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase tercukupinya	100 %	100 %	160,650,000	155,150,000	204,508,500						100 %	165,000,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			09	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah yang layak digunakan													
2	9	1	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan / jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	65,000,000	65,000,000	62,462,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 %	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	45,650,000	45,650,000	54,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 %	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	1	209	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	50,000,000	44,500,000	87,896,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100 %	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Angka Kecukupan Energi	100 %	100 %	595,000,000	1,095,000,000	1,040,105,000						100 %	1,337,000,000	
2	9	3	201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai	Prosentase ketersediaan pangan utama	100 %	100 %	300,000,000	300,000,000	340,145,000						100 %	332,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan														
2	9	3	2	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen (NBM, Prognosa Kebutuhan, Neraca Pangan Strategis)	3 Dokumen	3 Dokumen	60,000,000	60,000,000	22,704,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	3 Dokumen	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tertanganinya Kerawanan Pangan	27 Kelompok	27 Kelompok	180,000,000	180,000,000	276,089,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	27 Kelompok	190,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen stok Pasokan dan harga Pangan (tingkat grosir, tingkat eceran, tingkat produsen, rekapitulasi)	4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	60,000,000	41,352,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	4 Dokumen	82,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2	0	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi / AKE	2100 kkal/ka pita	2100 kkal/ka pita	295,000,000	795,000,000	699,960,000						2100 kkal/ka pita	1,005,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	9	3	2	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	45,000,000	26,352,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	2 Dokumen	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	3	2	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksanannya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	2 kali	2 kali	200,000,000	700,000,000	660,904,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	2 kali	810,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	9	3	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/ tahun	1 kali	1 kali	50,000,000	50,000,000	12,704,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	1 kali	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Pangan Segar Aman yang Teruji	80 %	80 %	175,000,000	175,000,000	124,124,000						80 %	251,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	9	5	2		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 kali	8 kali	175,000,000	175,000,000	124,124,000					8 kali	251,000,000		
2	9	5	2	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penguatan Kelembagaan	200 Orang	200 Orang	100,000,000	100,000,000	68,572,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	200 Orang	137,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	9	5	2	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pangan segar asal tumbuhan yang diperiksa	45 Sampel	45 Sampel	75,000,000	75,000,000	55,552,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	masyarakat	45 Sampel	114,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	2	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				925,000,000	897,732,000	721,132,600						1,760,000,000		
3	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	280 Ton	280 Ton	395,000,000	395,000,000	344,650,000						280 Ton	1,050,000,000	
3	2	4	2		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh	245 orang	245 orang	395,000,000	395,000,000	344,650,000						245 orang	1,050,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 4			kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)													
3	2 5	4	2 . 0 4	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana yang diperbaiki	2 unit /tahun	2 unit /tahun	150,000,000	150,000,000	148,550,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	masyarakat pembudidaya ikan	2 unit /tahun	600,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2 5	4	2 . 0 4	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana yang tersedia	4 paket	4 paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	masyarakat pembudidaya ikan	4 paket	150,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2 5	4	2 . 0 4	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring Pembudidaya Ikan	3 Dokumen	3 Dokumen	225,000,000	225,000,000	176,100,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	masyarakat pembudidaya ikan	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	2	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	89 Ton	89 Ton	80,000,000	80,000,000	40,360,000						89 Ton	110,000,000		
3	2	5	2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 orang	435 orang	80,000,000	80,000,000	40,360,000						435 orang	110,000,000		
3	2	5	2	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Monitoring Perikanan Tangkap	2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	80,000,000	40,360,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	masyarakat penangkapan ikan	2 Dokumen	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	5	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan	15.7 Kg/Kapita/Tahun	15.7 Kg/Kapita/Tahun	450,000,000	422,732,000	336,122,600						15.7 Kg/Kapita/Tahun	600,000,000	
						Tingkat Konsumsi Makan Ikan		16 Kg/Kapita											16,1 Kg/Kapita

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						(kg/kapita/tahun)		/Tahun									ta/Tahun		
3	2	6	2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolahan dan pemasaran ikan yang dibina	50 orang	50 orang	150,000,000	141,540,000	71,441,600						50 orang	200,000,000	
3	2	6	2	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring Pengolah dan Pemasar Ikan	3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	141,540,000	71,441,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	masyarakat pengolahan dan pemasaran ikan	3 Dokumen	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	6	2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	24 ton	24 ton	300,000,000	281,192,000	264,681,000						24 ton	400,000,000	
3	2	6	2	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang mendapat Fasilitas	10 UM KM	10 UM KM	300,000,000	281,192,000	264,681,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	masyarakat pengolahan ikan (UMKM)	10 UM KM	400,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2,593,999,000	2,810,259,000	3,113,156,200							8,700,350,000	
3	2	7	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Efektifitas Sarana Pertanian	55 %	55 %	1,781,771,600	1,781,771,600	2,002,746,000						55 %	5,498,150,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN														
3	2	2	2	0	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	75 %	75 %	1,581,771,600	1,581,771,600	1,837,425,000						75 %	5,140,000,000	
3	2	2	2	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah monitoring dan evaluasi penggunaan sarana pertanian	39 lokasi	39 lokasi	50,000,000	50,000,000	342,895,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	kelompok tani kota madiun	39 lokasi	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	2	2	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang diberikan	2 Paket	2 Paket	1,531,771,600	1,531,771,600	1,494,530,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	kelompok tani kota madiun	2 Paket	5,040,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	2	2	0	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	75 %	200,000,000	200,000,000	165,321,000						75 %	358,150,000	
3	2	2	2	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Sampel Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman yang diawasi	12 lokasi	12 lokasi	200,000,000	200,000,000	165,321,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi	kota Madiun	12 lokasi	358,150,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Dan Pelayanan Dasar	dan ekonomi digital				
3	2	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan Baik	50 %	50 %	321,000,000	542,900,000	541,200,000						50 %	1,950,000,000	
3	2	3	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	50 %	50 %	200,000,000	0	0						50 %	300,000,000	
3	2	3	2	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Penyusunan laporan/peta/pe raturan daerah tentang LP2B, KP2B dan LCP2B kota Madiun	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	kota madiun	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	3	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/dipelihara	25 %	25 %	121,000,000	542,900,000	541,200,000						25 %	1,650,000,000	
3	2	3	2	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah JIUT dibangun/direhabilitasi/dipelihara	1 Unit	1 Unit	22,000,000	0	0	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	1 Unit	750,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	2	3	2	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah JUT dibangun/direhab/dipelihara	1 Unit	1 Unit	44,000,000	542,900,000	541,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	1 Unit	600,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	3	2	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	1 Unit	1 Unit	55,000,000	0	0	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	1 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	10 %	10 %	175,000,000	175,000,000	252,100,700						10 %	372,200,000		
3	2	4	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	80 %	100,000,000	100,000,000	193,374,900							80 %	210,500,000	
3	2	4	2	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Hewan yang mendapat Pelayanan kesehatan Hewan	2850 Ekor	2850 Ekor	100,000,000	100,000,000	193,374,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	2850 Ekor	210,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														Pelayanan Dasar						
3	2	4	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	80 %	75,000,000	75,000,000	58,725,800						80 %	161,700,000		
3	2	4	2	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah sampel produk asal hewan yang diperiksa	200 sampel	200 sampel	75,000,000	75,000,000	58,725,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	kota Madiun	200 sampel	161,700,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	2	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian	72 %	74 %	111,750,000	111,750,000	198,236,000						74 %	300,000,000		
3	2	5	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	1750 ha/thn	1750 ha/thn	111,750,000	111,750,000	198,236,000							1750 ha/thn	300,000,000	
3	2	5	2	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan yang aman dari gangguan OPT dengan penerapan budidaya ramah lingkungan	10 ha	10 ha	111,750,000	111,750,000	198,236,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun	10 ha	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	2	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase Kelompok Tani yang Memiliki Izin Usaha Pertanian	10 %	10 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						10 %	50,000,000		
3	2	6	2	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 jenis	2 jenis	50,000,000	50,000,000	50,000,000						2 jenis	50,000,000		
3	2	6	2	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Petani yang produksinya lolos uji layak mutu	4 Oran g	4 Oran g	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	kota Madiun	4 Oran g	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	2	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih	20 %	20 %	154,477,400	148,837,400	68,873,500						20 %	530,000,000		
3	2	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	78 ora ng	78 ora ng	154,477,400	148,837,400	68,873,500						78 ora ng	530,000,000	
3	2	7	2	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	1 pake t	1 pake t	42,905,000	42,905,000	16,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	kota Madiun	1 pake t	230,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	7	2	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Pelatihan dan sekolah lapang yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	111,572,400	105,932,400	52,373,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	kota Madiun	1 Jenis	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
TOTAL									9,596,070,000	10,317,970,000	10,738,960,800							17,678,994,000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				23,902,106,915	27,119,256,115	30,222,474,115							75,835,150,000	
2	#	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	16,120,269,915	16,042,269,915	<b>18,075,708,978</b>						A Skor	23,576,150,000	
2	#	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	75,000,000	75,000,000	75,350,000						100 persen	110,000,000	
2	#	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 dokumen	6 dokumen	75,000,000	75,000,000	75,350,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang	0	6 dokumen	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Perubahan Iklim	terpadu dan berkelanjutan				
2	#	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	presentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan daerah	100 persen	100 persen	8,856,372,010	8,856,372,010	10,312,341,430						100 persen	12,595,000,000	
2	#	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	100 persen	8,856,372,010	8,856,372,010	10,312,341,430	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	12,595,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	#	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen	201,000,000	201,000,000	211,170,000						100 persen	375,500,000	
2	#	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	presentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya (perhitungan = realisasi/target kebutuhan)	100 persen	100 persen	125,000,000	125,000,000	134,820,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	255,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	presentase peningkatan kapasitas pegawai	100 persen	100 persen	76,000,000	76,000,000	76,350,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan	0	100 persen	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	n Bencana dan Perubahan Iklim	berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan				
2	#	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	137,883,000	137,883,000	<b>359,863,000</b>						100 persen	211,750,000	
2	#	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (perhitungan = realisasi / target perjalanan dinas)	100 persen	100 persen	137,883,000	137,883,000	359,863,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	211,750,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	5,696,195	5,696,195	<b>175,978,978</b>						100 persen	220,000,000	
2	#	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	presentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	100 persen	5,696,195	5,696,195	175,978,978	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 persen	100 persen	5,446,280,610	5,368,280,610	<b>4,903,627,670</b>						100 persen	7,946,400,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	1,230,240,610	1,230,240,610	712,967,670	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	2,475,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	presentase pemenuhan gaji non ASN perangkat daerah	100 persen	100 persen	4,216,040,000	4,138,040,000	4,190,660,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	5,471,400,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	1	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	100 persen	1,398,038,100	1,398,038,100	<b>2,037,377,900</b>						100 persen	2,117,500,000	
2	#	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	presentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 persen	100 persen	1,205,994,200	1,205,994,200	1,785,404,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	1,512,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	presentase peralatan dan mesin yang layak digunakan	100 persen	100 persen	92,125,000	92,125,000	152,055,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	100 persen	99,918,900	99,918,900	99,918,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	100 persen	440,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	71.79 %	71.79 %	430,000,000	419,892,000	<b>404,087,000</b>						71.79 %	583,000,000	
2	#	2	2		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	255,000,000	242,274,000	<b>227,319,000</b>						1 dokumen	390,500,000	
2	#	2	2	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	255,000,000	242,274,000	227,319,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	1 dokumen	390,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	2	2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	175,000,000	177,618,000	176,768,000						1 dokumen	192,500,000	
2	#	2	2	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	175,000,000	177,618,000	176,768,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	1 dokumen	192,500,000	Dinas Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Titik Sampel Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	49 %	49 %	1,165,137,000	1,161,745,000	1,577,702,254						49 %	1,760,000,000	
2	#	3	2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan/Usaha yang dipantau pencegahan pencemarannya	20 kali	20 kali	770,637,000	770,237,000	1,179,731,780						20 kali	1,254,000,000	
2	#	3	2	1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	15 kali	15 kali	412,850,000	412,450,000	524,750,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	15 kali	814,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	3	2	2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian pencemaran	3 kegiatan	3 kegiatan	357,787,000	357,787,000	654,981,780	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	3 kegiatan	440,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	3	2	0 2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang sudah melakukan pengolahan limbah cair	15 usaha/kegiatan	15 usaha/kegiatan	394,500,000	391,508,000	397,970,474						15 usaha/kegiatan	506,000,000	
2	#	3	2	1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	10 kali	10 kali	250,000,000	247,008,000	236,775,590	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Membangun Lingkungan Hidup,	Peningkatan pembangunan infrastruktur	0	10 kali	319,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0	Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	penghentian sumber pencemaran							Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan				
2	#	3	2	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	144,500,000	144,500,000	161,194,884	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	2 kegiatan	187,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase Jumlah Spesies KEHATI Lokal Daerah	94.32 %	94.32 %	56,500,000	56,500,000	56,000,000						94.32 %	200,000,000	
2	#	4	2		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI lokal daerah	332 jenis	332 jenis	56,500,000	56,500,000	56,000,000						332 jenis	200,000,000	
2	#	4	2	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen yang di susun	1 dokumen	1 dokumen	56,500,000	56,500,000	56,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	1 dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun(limbah B3)	71,5 %	71,5 %	41,500,000	41,500,000	23,472,000						71,5 %	200,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	5	2		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Memenuhi Syarat	16 lokasi	16 lokasi	41,500,000	41,500,000	23,472,000					16 lokasi	200,000,000		
2	#	5	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan/Usaha yang mengurus izin	5 kegiatan/usaha	5 kegiatan/usaha	41,500,000	41,500,000	23,472,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan	0	5 kegiatan/usaha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase Pelaku Usaha / Kegiatan yang Taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	64.7 %	64.7 %	390,000,000	681,549,200	<b>565,245,775</b>					64.7 %	532,000,000		
2	#	6	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 perusahaan	15 perusahaan	390,000,000	681,549,200	<b>565,245,775</b>					15 perusahaan	532,000,000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	6	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah wajib usaha/kegiatan yang taat dan belum taat pemenuhan pelaporan dokumen perizinan	3 perusahaaan	3 perusahaaan	260,000,000	551,549,200	438,797,775	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	3 perusahaaan	357,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	6	2	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat membuat laporan	15 wajib usaha	15 wajib usaha	130,000,000	130,000,000	126,448,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	15 wajib usaha	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	670,000,000	670,000,000	603,117,500						100 %	950,000,000	
2	#	8	2		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	15 kegiatan	670,000,000	670,000,000	603,117,500						15 kegiatan	950,000,000	
2	#	8	2	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan yang peduli dan berwawasan	4 kegiatan	4 kegiatan	670,000,000	670,000,000	603,117,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan	0	4 kegiatan	950,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						lingkungan hidup						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	n Bencana dan Perubahan Iklim	berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan				
2	#	#			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	94,000,000	94,000,000	100,000,000						100 %	106,000,000	
2	#	#	2		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang diselesaikan	5 kasus	5 kasus	94,000,000	94,000,000	100,000,000						5 kasus	106,000,000	
2	#	#	2	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabipaten/Kota	10 kasus	10 kasus	39,000,000	39,000,000	60,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	10 kasus	45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	#	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah kader sadar hukum lingkungan yang terbentuk	50 kader	50 kader	55,000,000	55,000,000	40,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan n Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	50 kader	61,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	#		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	73 %	73 %	4,934,700,000	7,951,800,000	<b>8,817,140,608</b>						73 %	47,928,000,000		
2	#	#	2	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang di kelola	43777 ton	43777 ton	4,843,700,000	7,860,800,000	<b>8,353,084,100</b>						43777 ton	47,790,000,000		
2	#	#	2	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah tempat/lokasi pelaksanaan pengurangan sampah yang ditangani DLH	2 lokasi	2 lokasi	235,600,000	235,600,000	234,400,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	2 lokasi	435,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	#	2	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah volume sampah yang masuk TPA	32280 ton	32280 ton	2,998,400,000	2,939,200,000	2,138,721,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	32280 ton	3,355,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	#	2	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah jenis penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah	3 jenis	3 jenis	1,609,700,000	4,686,000,000	5,979,962,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	3 jenis	44,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	#	#	2		Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah pihak swasta pengelola	35 kelompok	35 kelompok	91,000,000	91,000,000	<b>464,056,508</b>						35 kelompok	138,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			03	Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	sampah yang dibina dan diawasi													
2	#	#	203	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kecamatan dalam penilaian kinerja Pengelolaan Sampah (ADIPURA)	3 kecamatan	3 kecamatan	91,000,000	91,000,000	464,056,508	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan pembangunan infrastruktur perkotaan berwawasan Lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan	0	3 kecamatan	138,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL								23,902,106,915	27,119,256,115	30,222,474,115							75,835,150,000	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6,885,228,540	6,800,409,540	<b>7,858,147,540</b>							8,175,014,564	
2	#	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	5,886,374,935	5,801,555,935	6,985,141,540						A Skor	7,064,405,840	
2	#	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	340,018,360	255,199,360	308,924,000						100 %	380,616,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	100 %	100 %	84,819,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanmind uk	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	84,819,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen pengendalian SKPD	100 %	100 %	61,767,360	61,767,360	15,313,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	62,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya koordinasi dan penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	193,432,000	193,432,000	293,611,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	233,797,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	3,030,000,000	3,030,000,000	3,842,533,540						100 %	4,293,193,634	
2	#	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	3,030,000,000	3,030,000,000	3,842,533,540	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	ASN	100 %	4,293,193,634	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik							

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	1	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	100 %	194,811,000	194,811,000	322,572,000					100 %	140,760,000		
2	#	1	2	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	194,811,000	194,811,000	322,572,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	140,760,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	1,270,609,278	1,270,609,278	1,200,581,000						100 %	1,462,777,446	
2	#	1	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	1,117,648,278	1,117,648,278	1,016,260,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	1,283,817,326	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	152,961,000	152,961,000	184,321,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	178,960,120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	92,784,238	510,784,238	818,010,000						100 %	270,000,000	
2	#	1	2	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan sarana	100 %	100 %	92,784,238	510,784,238	818,010,000	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas dan Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	270,000,000	Dinas Kependudukan dan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			07	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prasarana gedung kantor						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					Pencatatan Sipil
2	#	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	202,620,000	202,620,000	163,900,000						100 %	226,808,760	
2	#	1	208	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	100 %	100 %	202,620,000	202,620,000	163,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	100 %	226,808,760	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	755,532,059	337,532,059	328,621,000						100 %	290,250,000	
2	#	1	209	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	27,500,000	27,500,000	27,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	30,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	209	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	592,124,500	174,124,500	234,469,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	1	209	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	135,907,559	135,907,559	66,652,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD	100 %	160,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Publik					
2	#	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84 %	96,50 %	233,627,050	233,627,050	312,108,000						97 %	276,059,264	
2	#	2	2	01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	17000 %	17000 %	233,627,050	233,627,050	312,108,000						17000 %	276,059,264	
2	#	2	2	01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah perekamana KTP EL	2500 data	2500 data	133,074,125	133,074,125	271,702,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	2500 data	154,444,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	2	2	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah penerbitan KIA	1000 dokumen	1000 dokumen	100,552,925	100,552,925	40,406,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	1000 dokumen	121,615,164	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94.25 %	94.25 %	402,719,632	402,719,632	325,423,000						94.25 %	413,773,160	
2	#	3	2	01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	1600 dokumen	1600 dokumen	402,719,632	402,719,632	325,423,000						1600 dokumen	413,773,160	
2	#	3	2	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akta kelahiran dan akta kematian	1500 dokumen	1500 dokumen	110,536,272	110,536,272	107,787,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	1500 dokumen	121,589,800	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	3	2	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan dan	100 dokumen	100 dokumen	292,183,360	292,183,360	217,636,000	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas dan Polhukam	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	100 dokumen	292,183,360	Dinas Kependudukan dan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			01		Akta Perceraian Non Muslim							Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					Pencatatan Sipil
2	#	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi Database Kependudukan	99.1 %	99.45 %	362,506,923	362,506,923	235,475,000						99.46 %	420,776,300	
2	#	4	2		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	77 %	77 %	362,506,923	362,506,923	235,475,000						77 %	420,776,300	
2	#	4	2	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah penyusunan laporan	13 laporan	13 laporan	308,105,990	308,105,990	224,370,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Madiun dan pengguna database kependudukan terkait	13 laporan	358,699,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	4	2	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama dan inovasi	10 dokumen	10 dokumen	54,400,933	54,400,933	11,105,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Madiun dan pengguna database kependudukan terkait	10 dokumen	62,076,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL								6,885,228,540	6,800,409,540	7,858,147,540							8,175,014,564		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				20,212,025,600	20,151,688,800	20,427,830,317							21,708,882,000	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	11,030,976,600	10,972,689,800	12,059,852,097						A Skor	11,245,250,000		
2	#	1	2	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	140,200,000	140,200,000	75,455,040						100 %	140,200,000		
2	#	1	2	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	6 Dok umen	6 Dok umen	140,200,000	140,200,000	75,455,040	Kota Madiun, Manguharjo , Manguharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	6 Dok umen	140,200,000	Dinas Perhubung an	
2	#	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	6,514,480,000	6,514,480,000	7,237,598,928							100 %	7,400,000,000	
2	#	1	2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	6,514,480,000	6,514,480,000	7,237,598,928	Kota Madiun, Manguharjo , Manguharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	7,400,000,000	Dinas Perhubung an	
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	1	2	05	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Presentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	221,261,000	221,011,000	288,220,104					100 %	300,400,000		
2	#	1	2	05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 %	100 %	125,000,000	124,750,000	123,515,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	1	2	05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	100 %	100 %	96,261,000	96,261,000	164,705,104	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	100,400,000	Dinas Perhubungan
2	#	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000	246,558,000						100 %	20,000,000	
2	#	1	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000	246,558,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	20,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	300,000,000	300,000,000	417,169,050						100 %	200,000,000	
2	#	1	2	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	300,000,000	300,000,000	417,169,050	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	200,000,000	Dinas Perhubungan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Alokasi Umum						
2	#	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2,570,385,600	2,512,648,800	2,033,227,975						100 %	1,700,000,000	
2	#	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	2,570,385,600	2,512,648,800	2,033,227,975	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	1,700,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	1,084,650,000	1,084,350,000	1,761,623,000						100 %	1,484,650,000	
2	#	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	650,000,000	650,000,000	904,406,400	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	650,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	284,650,000	284,350,000	707,216,600	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	684,650,000	Dinas Perhubungan
2	#	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	150,000,000	Dinas Perhubungan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	#	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta Fasilitasi Perlengkapan Lalu Lintas	88 %	88 %	9,181,049,000	9,178,999,000	8,367,978,220						88 %	10,463,632,000			
2	#	2	2	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase terlaksanannya kebijakan	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000						100 %	50,000,000			
2	#	2	2	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	100 %	50,000,000	Dinas Perhubungan	
2	#	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang berfungsi baik	75 %	75 %	3,639,975,000	3,639,975,000	4,355,196,928						75 %	4,687,600,000		
2	#	2	2	2	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang	100 %	100 %	1,490,575,000	1,490,575,000	2,038,471,150	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	100 %	2,398,500,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	persentase perlengkapan jalan yang dipelihara	100 %	100 %	2,149,400,000	2,149,400,000	2,316,725,778	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	100 %	2,289,100,000	Dinas Perhubungan	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	2	2	0	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Presentasi fasilitas parkir yang memiliki ijin	100 %	100 %	38,250,000	38,250,000	330,800,000					100 %	94,350,000		
2	#	2	2	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	persentase fasilitas terminal yang layak	100 %	100 %	38,250,000	38,250,000	330,800,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	100 %	94,350,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	0	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Presentase fasilitas parkir yang memiliki ijin	100 %	100 %	868,469,000	868,019,000	597,712,616						100 %	780,100,000	
2	#	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Presentase pengurusan ijin	100 %	100 %	168,469,000	168,469,000	136,769,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	100 %	103,500,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase monev penyelenggaraan parkir	100 %	100 %	700,000,000	699,550,000	460,943,616	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	100 %	676,600,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	0	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Lulus Uji	100 %	100 %	745,480,000	744,780,000	438,866,480						100 %	828,300,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	2	2	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	100 %	100 %	155,550,000	155,200,000	154,350,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota madiun	100 %	188,550,000	Dinas Perhubungan	
2	#	2	2	05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase pemohon yang paham	100 %	100 %	48,395,000	48,395,000	48,395,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota madiun	100 %	94,000,000	Dinas Perhubungan	
2	#	2	2	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi	100 %	100 %	105,950,000	105,600,000	104,750,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota madiun	100 %	105,950,000	Dinas Perhubungan	
2	#	2	2	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase laporan	100 %	100 %	435,585,000	435,585,000	131,371,480	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota madiun	100 %	439,800,000	Dinas Perhubungan	
2	#	2	2	06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	100 %	100 %	140,200,000	140,200,000	125,653,500							100 %	215,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	2	2	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen MRLL	6 kegiatan	6 kegiatan	80,000,000	80,000,000	65,453,500	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	6 kegiatan	92,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jumlah uji coba dan sosialisasi	100 %	100 %	60,200,000	60,200,000	60,200,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	100 %	123,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	0	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengurusan rekomendasi Andalalin	100 %	100 %	368,035,000	368,035,000	305,110,040						100 %	318,000,000	
2	#	2	2	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	persentase pemenuhan rekomendasi	100 %	100 %	368,035,000	368,035,000	305,110,040	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	masyarakat kota madiun	100 %	318,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan keselamatan	100 %	100 %	1,495,880,000	1,495,880,000	938,886,720						100 %	1,582,382,000	
2	#	2	2	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Peserta	100 %	100 %	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang	0	100 %	60,000,000	Dinas Perhubungan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Terpadu dan Berkelanjutan				
2	#	2	2	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	persentase Jumlah kegiatan	100 %	100 %	1,386,880,000	1,386,880,000	834,686,720	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	100 %	1,480,000,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	persentase Jumlah kegiatan	100 %	100 %	49,000,000	49,000,000	44,200,000	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	0	100 %	42,382,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	0	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	100 %	100 %	1,834,760,000	1,833,860,000	1,225,751,936						100 %	1,907,900,000	
2	#	2	2	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kendaraan yang melayani	41 kend	28 kend	1,011,860,000	1,010,960,000	439,451,936	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Masyarakat Kota Madiun	28 kend	1,831,100,000	Dinas Perhubungan
2	#	2	2	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan	jumlah kendaraan barang	23000 kend	23000 kend	822,900,000	822,900,000	786,300,000	Kota Madiun, Manguharjo	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Infrastruktur Untuk	(2022) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	Masyarakat Kota Madiun	23000 kend	76,800,000	Dinas Perhubungan



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			09	Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							Manguharjo	Dana Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Perkotaan Berwawasan Lingkungan yang Terpadu dan Berkelanjutan					
TOTAL								20,212,025,600	20,151,688,800	20,427,830,317							21,708,882,000		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22,324,377,000	22,322,427,000	27,891,484,578							26,077,498,000		
2	#	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	6,946,939,000	6,946,339,000	8,841,488,768						A Skor	6,789,738,000		
2	#	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	115,000,000	115,000,000	3,670,640							100 %	115,000,000	
2	#	1	2	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20 dokumen	20 dokumen	115,000,000	115,000,000	3,670,640	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun		20 dokumen	115,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
												Dana Transfer							

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	#	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	3,783,741,000	3,783,741,000	5,446,382,124						100 %	3,733,400,000	
2	#	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	3,783,741,000	3,783,741,000	5,446,382,124	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	100 %	3,733,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	100 %	1,000,000,000	999,400,000	1,390,537,900						100 %	500,000,000	
2	#	1	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	999,400,000	1,390,537,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo dan Masyarakat Kota Madiun	1 Paket	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000	300,000,000						100 %	200,000,000	
2	#	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000	300,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	100 %	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	1,228,338,000	1,228,338,000	1,049,271,454						100 %	1,208,838,000	
2	#	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/ perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	1,228,338,000	1,228,338,000	1,049,271,454	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	100 %	1,208,838,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	619,860,000	619,860,000	651,626,650						100 %	1,032,500,000	
2	#	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	100 %	150,500,000	150,500,000	188,176,650	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	100 %	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	132,500,000	132,500,000	130,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	100 %	632,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase peralatan sarana dan prasarana gedung dan kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	336,860,000	336,860,000	332,950,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	100 %	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	2		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang Memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	77 %	77 %	4,789,955,000	4,788,605,000	5,580,504,230						77 %	7,773,155,000		
2	#	2	2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4,789,955,000	4,788,605,000	5,580,504,230						100 %	7,773,155,000		
2	#	2	2	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pemberitaan di media massa yang dianalisa	1200 b erita	1200 b erita	2,289,955,000	2,288,755,000	3,060,071,080	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyara kat Kota Madiun	1200 b erita	3,873,155,000	Dinas Komunika si dan Informatik a
2	#	2	2	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi yang dikelola Pemerintah Daerah	5 medi a	5 medi a	1,500,000,000	1,438,697,000	1,591,212,490	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyara kat Kota Madiun	5 medi a	2,500,000,000	Dinas Komunika si dan Informatik a
2	#	2	2	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	250,000,000	249,850,000	228,260,320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyara kat Kota Madiun	100 %	350,000,000	Dinas Komunika si dan Informatik a
2	#	2	2	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Aktif	27 Kel ompok	27 Kel ompok	300,000,000	361,303,000	340,463,320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyara kat Kota Madiun	27 Kel ompok	400,000,000	Dinas Komunika si dan Informatik a

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Publik					
2	#	2	2	1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	100,000,000	78,360,320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	1 Paket	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	2	2	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah tema informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	6 Tema informasi	6 Tema informasi	350,000,000	350,000,000	282,136,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Madiun	6 Tema informasi	450,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	100 %	10,587,483,000	10,587,483,000	13,469,491,580						100 %	11,514,605,000	
2	#	3	2		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100 %	100 %	5,100,000,000	5,100,000,000	4,970,829,940						100 %	6,700,000,000	
2	#	3	2	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain.id di wilayah Kota Madiun	238 domain	238 domain	100,000,000	100,000,000	90,259,830	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	238 domain	1,400,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	3	2	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Wifi gratis bagi masyarakat	1750 titik	1750 titik	5,000,000,000	5,000,000,000	4,880,570,110	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	1750 titik	5,300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	3	2	02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5,487,483,000	5,487,483,000	8,498,661,640						100 %	4,814,605,000	
2	#	3	2	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola	1 paket	1 paket	3,978,005,000	3,978,000,000	4,664,156,640	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	1 paket	2,600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	3	2	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik Client	180 titik	180 titik	400,000,000	400,000,000	1,100,350,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	180 titik	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	3	2	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	460,000,000	460,000,000	1,089,190,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	7 Aplikasi	460,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	3	2	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah pemeliharaan aplikasi integrasi	1 paket	1 paket	302,553,000	302,558,000	768,570,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	1 paket	350,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	3	2	9	Pengembangan dan Pengelolaan	Persentase perangkat	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	154,095,000	Kota Madiun,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat	100 %	404,605,000	Dinas Komunika

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	daerah yang mendukung smart city						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana, Alokasi Umum	Polhukanham dan Transformasi Publik		Daerah Pemerintah Kota Madiun			si dan Informatika
2	#	3	2	102 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah komunitas yang mendapatkan pelatihan TIK	4 Komunitas	4 Komunitas	186,000,000	186,000,000	186,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	4 Komunitas	275,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	#	3	2	101 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Sarana Information Center	1 unit	1 unit	60,925,000	60,925,000	536,300,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Pemerintah Kota Madiun	1 unit	225,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				500,000,000	499,250,000	290,000,000							500,000,000	
2	#	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	500,000,000	499,250,000	290,000,000						100 %	500,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
2	#	2	2	0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	500,000,000	499,250,000	290,000,000					1 dokumen	500,000,000			
2	#	2	2	0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik	1 dokumen	1 dokumen	295,000,000	294,850,000	200,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	1 dokumen	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	#	2	2	0	1	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Kegiatan	1 paket	1 paket	55,000,000	55,000,000	50,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	1 paket	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	#	2	2	0	1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	149,400,000	40,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo Kota Madiun	1 dokumen	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	#					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				350,000,000	350,000,000	266,296,880							500,000,000		
2	#	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100 %	100 %	350,000,000	350,000,000	266,296,880							100 %	500,000,000	
2	#	2	2	0	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Jumlah OPD yang mengimplementasikan tanda	7 OPD	7 OPD	350,000,000	350,000,000	266,296,880							7 OPD	500,000,000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Daerah Kabupaten/Kota	tangan elektronik (TTE)														
2	#	2	2	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi keamanan informasi	7 OPD	7 OPD	50,000,000	50,000,000	108,250,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangk at Daerah Pemerint ah Kota Madiun	7 OPD	200,000,000	Dinas Komunika si dan Informatik a	
2	#	2	2	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah berita sandi yang diamankan	900 be rita	900 be rita	300,000,000	300,000,000	158,046,880	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangk at Daerah Pemerint ah Kota Madiun	900 be rita	300,000,000	Dinas Komunika si dan Informatik a	
TOTAL									23,174,377,000	23,171,677,000	28,447,781,458							27,077,498,000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7,203,016,150	7,203,016,150	7,930,516,150							7,402,941,665		
2	#	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah		80.02 skor	5,420,298,000	5,420,298,000	6,686,770,220							80.02 skor	5,851,386,800	
2	#	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 pe rsen	100 pe rsen	47,370,000	47,370,000	16,486,320							100 pe rsen	62,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	47,370,000	47,370,000	16,486,320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	DPMPTS P	6 dokumen	62,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	1	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	100 persen	3,900,000,000	3,834,001,000	4,714,847,900						100 persen	4,202,386,800	
2	#	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	100 persen	3,900,000,000	3,834,001,000	4,714,847,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Karyawan/Karyawati DPMPPTS P	100 persen	4,202,386,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	1	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	100 persen	1,132,310,000	1,132,310,000	933,820,000						100 persen	1,197,000,000	
2	#	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	932,310,000	932,310,000	683,044,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Karyawan/Karyawati DPMPPTS P	100 persen	997,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	100 persen	200,000,000	200,000,000	250,776,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi	Karyawan/Karyawati DPMPPTS P	100 persen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas dan Berkeadilan	kreatif, dan ekonomi digital					Terpadu Satu Pintu
2	#	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	108,600,000	108,600,000	533,578,000						100 persen	190,000,000		
2	#	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 persen	100 persen	108,600,000	108,600,000	533,578,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	DPMPPTS P	100 persen	190,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	#	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	232,018,000	298,017,000	488,038,000						100 persen	200,000,000		
2	#	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 persen	100 persen	45,000,000	45,000,000	49,415,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	DPMPPTS P	100 persen	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	#	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	100 persen	132,018,000	198,017,000	387,068,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor	DPMPPTS P	100 persen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital				Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	1	2	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 persen	100 persen	55,000,000	55,000,000	51,553,900	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	DPMPTS P	100 persen	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	100 %	100 %	161,250,000	161,250,000	183,865,600						100 %	64,312,500	
2	#	2	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 paket	1 paket	161,250,000	161,250,000	183,865,600						1 paket	64,312,500	
2	#	2	2	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RUPM yang telah direvisi	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	99,150,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Investor di Kota Madiun	1 dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	2	2	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah peta investasi yang memerlukan pemeliharaan	1 paket	1 paket	61,250,000	61,250,000	84,715,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Investor di Kota Madiun	1 paket	64,312,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	3		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang Merealisasikan Investasinya	26 %	26 %	294,755,750	294,755,750	158,125,650						26 %	300,650,865	
2	#	3	2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah investor baru	20 investor	20 investor	294,755,750	294,755,750	158,125,650						20 investor	300,650,865	
2	#	3	2	2 Pelaksanan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan promosi penanaman modal	5 kegiatan	5 kegiatan	294,755,750	294,755,750	158,125,650	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Investor di Kota Madiun	5 kegiatan	300,650,865	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan Terselenggarakan	85 %	85 %	626,851,000	626,851,000	365,970,640						85 %	535,300,000	
2	#	4	2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pemohon izin	1600 izin	3000 izin	626,851,000	626,851,000	365,970,640						3000 izin	535,300,000	
2	#	4	2	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan Elektronik	80 orang	100 orang	240,442,000	240,442,000	116,408,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat pemohon izin	100 orang	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	4	2	2 Pemantauan Pemenuhan	persentase pemenuhan	15 persen	10 persen	236,409,000	236,409,000	191,624,000	Kota Madiun,	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui	Masyarakat	10 persen	246,500,000	Dinas Penanama

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			0		Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	komitmen berusaha yang dievaluasi						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana, Alokasi Umum	Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	pemohon izin			n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	4	2	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah layanan konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	55 kali	55 kali	150,000,000	150,000,000	57,938,640	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat pemohon izin	55 kali	38,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	110 Perusahaan	110 Perusahaan	525,800,000	525,800,000	454,884,000						110 Perusahaan	568,291,500	
2	#	5	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dibina	110 perusahaan	300 perusahaan	525,800,000	525,800,000	454,884,000						300 perusahaan	568,291,500	
2	#	5	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	30 perusahaan	30 perusahaan	50,815,000	50,815,000	0	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Perusahaan di Kota Madiun	30 perusahaan	54,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	5	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang memahami ketentuan pelaksanaan penanaman modal	50 perusahaan	300 perusahaan	454,985,000	454,985,000	416,791,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Perusahaan di Kota Madiun	300 perusahaan	417,291,500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berkeadilan					
														Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
2	#	5	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah perusahaan yang telah memenuhi kewajiban pelaksanaan penanaman modal	30 per usaha	30 per usaha	20,000,000	20,000,000	38,092,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Perusahaan di Kota Madiun	30 per usaha	97,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	#	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Jenis Izin yang Diproses Secara Elektronik	100 %	100 %	174,061,400	174,061,400	80,900,040						100 %	83,000,000	
2	#	6	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis izin yang di proses menggunakan sistem elektronik	70 jenis izin	70 jenis izin	174,061,400	174,061,400	80,900,040						70 jenis izin	83,000,000	
2	#	6	2	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah jenis izin yang terintegrasi menggunakan sistem elektronik	35 izin	35 izin	174,061,400	174,061,400	80,900,040	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Pemohon Izin	35 izin	83,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				14,850,000	14,850,000	14,850,000							16,335,000			
3	#	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Prosentase Penduduk yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	20 %	20 %	14,850,000	14,850,000	14,850,000						20 %	16,335,000			
3	#	3	2	0	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi penataan persebaran	100 orang	40 orang	14,850,000	14,850,000	14,850,000					40 orang	16,335,000			
3	#	3	2	0	1	5	Penyuluhan Transmigrasi	jumlah sosialisasi ketransmigrasian	1 kegiatan	1 kegiatan	14,850,000	14,850,000	14,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat di Kota Madiun	1 kegiatan	16,335,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL									7,217,866,150	7,217,866,150	7,945,366,150							7,419,276,665			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	#					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3,209,615,445	4,909,615,445	6,451,654,114							10,201,605,200			



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Prestasi Pemuda	12 ora ng	12 ora ng	475,000,000	475,000,000	546,890,000						12 ora ng	847,000,000	
2	#	2	2	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah event kepemudaan yang diselenggarakan	1 event	1 event	475,000,000	475,000,000	546,890,000						1 event	847,000,000	
2	#	2	2	8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40 ora ng	40 ora ng	475,000,000	475,000,000	546,890,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	pemuda se Kota Madiun	40 ora ng	847,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Mendali yang diraih di Bidang Olahraga	35 me dali	35 me dali	2,734,615,445	4,434,615,445	5,904,764,114						35 me dali	9,354,605,200	
2	#	3	2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras olahraga yang terfasilitasi	3 sarpras olahra ga	3 sarpras olahra ga	1,203,197,370	1,203,197,370	1,794,354,539						3 sarpras olahra ga	2,750,000,000	
2	#	3	2	3 Koordinasi, Sinkronisasi dan	JUmlah sarana prasarana	3 sarpras	3 sarpras	1,203,197,370	1,203,197,370	1,794,354,539	Kota Madiun,	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui	Masyara kat dan	3 sarpras	2,750,000,000	Dinas Kebudayaan

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0 1	Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	olahraga yang terfasilitasi	olahraga	olahraga				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana, Alokasi Umum	Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	atlit di Kota Madiun	olahraga		n, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	3	2 . 0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event kejuaraan yang diselenggarakan	2 event	2 event	404,609,015	404,609,015	1,323,802,915						2 event	1,241,605,200	
2	#	3	2 . 0 2	2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	1 event	1 event	404,609,015	404,609,015	1,323,802,915	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat, pelajar dan atlit di Kota Madiun	1 event	1,241,605,200	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	3	2 . 0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 cabang	10 cabang	1,000,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000						10 cabang	5,000,000,000	
2	#	3	2 . 0 4	2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 cabang olahraga	10 cabang olahraga	1,000,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	KONI Kota Madiun	10 cabang olahraga	5,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	3	2 . 0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	1 festival	1 festival	126,809,060	126,809,060	86,606,660						1 festival	363,000,000	
2	#	3	2 . 0 5	1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	1 festival olahraga	1 festival olahraga	126,809,060	126,809,060	86,606,660	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi	Masyarakat dan atlit Kota Madiun	1 festival olahraga	363,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas dan Berkeadilan	kreatif, dan ekonomi digital				an dan Olah Raga	
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				7,529,586,820	7,526,286,820	9,254,774,164							11,742,603,230		
2	#	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	6,054,839,300	6,054,839,300	6,818,182,160						A Skor	7,326,103,230		
2	#	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	30,000,000							100 %	44,000,000	
2	#	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	6 dokumen	6 dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN pemerintah Kota Madiun	6 dokumen	44,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	
2	#	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	3,202,119,300	3,202,119,300	4,189,865,460							100 %	3,853,200,230	
2	#	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	3,202,119,300	3,202,119,300	4,189,865,460		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN Disbudparpora	100 %	3,853,200,230	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	299,700,000	299,700,000	299,700,000					100 %	299,700,000		
2	#	1	2	906	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	299,700,000	299,700,000	299,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN Disbudparpora	100 %	299,700,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase tercukupi pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100 %	100 %	20,790,000	20,790,000	155,790,000						100 %	220,000,000	
2	#	1	2	107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 %	100 %	20,790,000	20,790,000	155,790,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN Disbudparpora	100 %	220,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	1	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2,337,115,000	2,337,115,000	1,958,636,700						100 %	2,570,826,500	
2	#	1	2	308	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	2,337,115,000	2,337,115,000	1,958,636,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN Disbudparpora	100 %	2,570,826,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	165,115,000	165,115,000	184,190,000					100 %	338,376,500		
2	#	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	55,000,000	55,000,000	75,275,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN Disbudparpora	100 %	60,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	70,000,000	70,000,000	68,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN Disbudparpora	100 %	211,750,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	1	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	40,115,000	40,115,000	40,115,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	ASN Disbudparpora	100 %	66,126,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase Seni Budaya yang Dilestarikan	6 %	100%	1,259,314,150	1,256,014,150	2,221,158,634						100%	3,932,500,000	
2	#	2	2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	8 budaya	8 budaya	1,259,314,150	1,256,014,150	2,221,158,634						8 budaya	3,932,500,000	
2	#	2	2	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Obyek Pemajuan Budaya yang dimanfaatkan	8 budaya	8 budaya	1,067,529,815	1,064,529,815	1,836,127,544	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum- Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor	Masyarakat dan pelaku seni di	8 budaya	2,722,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Pemajuan Tradisi Budaya							Semua Kelurahan	Alokasi Umum	n Kebudayaan	unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun			Kepemudaan dan Olah Raga	
2	#	2	2	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah festival seni yang diselenggarakan	1 festival	1 festival	191,784,335	191,484,335	385,031,090	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat dan pelaku seni di Kota Madiun	1 festival	1,210,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah SDM, Lembaga dan Pranata yang Dibina	100 Orang	100 Orang	123,886,145	123,886,145	123,886,145						100 Orang	242,000,000	
2	#	3	2		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan	2 pelatihan	2 pelatihan	123,886,145	123,886,145	123,886,145						2 pelatihan	242,000,000	
2	#	3	2	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	20 orang	20 orang	123,886,145	123,886,145	123,886,145	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat, Pelajar dan pelaku seni di Kota Madiun	20 orang	242,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase Benda / Bangunan Cagar Budaya yang Dilestarikan	21 %	21 %	91,547,225	91,547,225	91,547,225						21 %	242,000,000	
2	#	5	2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 unit	20 unit	91,547,225	91,547,225	91,547,225						20 unit	242,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	5	2	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	20 unit	20 unit	91,547,225	91,547,225	91,547,225	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Benda dan bangunan yang diduga cagar budaya yang ada di Kota Madiun	20 unit	242,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1,423,150,050	1,422,150,050	1,523,111,810							2,087,250,000		
3	#	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	2 destinasi	2 destinasi	489,048,300	489,048,300	518,601,820							2 destinasi	453,750,000	
						Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Daerah	-	100%										100%		
3	#	2	2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 destinasi	2 destinasi	489,048,300	489,048,300	518,601,820							2 destinasi	453,750,000	
3	#	2	2	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi destinasi pariwisata yang dikembangkan	2 lokasi	2 lokasi	224,048,300	224,048,300	164,801,820	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat dan daya tarik wisata Kota Madiun	2 lokasi	302,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
3	#	2	2	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah lokasi yg memperoleh pemberdayaan masyarakat dan	2 lokasi	2 lokasi	265,000,000	265,000,000	353,800,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor	Masyarakat dan daya	2 lokasi	151,250,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata,	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pariwisata Kabupaten/Kota	pembinaan kemitraan usaha masyarakat						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	tarik wisata Kota Madiun			Kepemudaan dan Olah Raga
3	#	3		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di dalam Negeri	4 Even t	4 Even t	547,528,750	546,928,750	682,057,870						4 Even t	907,500,000	
					Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan		100%									100%		
3	#	3	2	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	2 prom osi	2 prom osi	547,528,750	546,928,750	682,057,870						2 prom osi	907,500,000	
3	#	3	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pariwisata	2 prom osi	2 prom osi	547,528,750	546,928,750	682,057,870	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyara kat dan pelaku usaha pariwisata di Kota Madiun	2 prom osi	907,500,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
3	#	5		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Pembekalan Sektor Kepariwisataan	19 %	19 %	386,573,000	386,173,000	322,452,120						19 %	726,000,000	
3	#	5	2	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor pariwisata	18 %	18 %	386,573,000	386,173,000	322,452,120						18 %	726,000,000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar														
3	#	5	2	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	1 event	1 event	386,573,000	386,173,000	322,452,120	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata Kota Madiun	1 event	726,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
TOTAL									12,162,352,315	13,858,052,315	17,229,540,088							24,031,458,430	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6,104,892,447	6,304,357,847	7,171,571,877							12,762,145,191	
2	#	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	4,543,547,447	4,542,772,847	5,716,419,693						A Skor	10,326,104,191	
2	#	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	55,000,000	54,700,000	53,700,000							100 %	55,000,000
2	#	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokumen	10 dokumen	55,000,000	54,700,000	53,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	Aparatur Pemerintah	10 dokumen	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														dan Berdaya Saing	menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
2	#	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	2,867,787,447	2,867,787,447	3,746,911,069						100 %	3,154,557,985	
2	#	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	2,867,787,447	2,867,787,447	3,746,911,069	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Aparatur Pemerintah	100 %	3,154,557,985	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	#	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	133,800,000						100 %	72,831,000	
2	#	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	80,000,000	80,000,000	133,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Aparatur Pemerintah	100 %	72,831,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	#	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase tercukupinya	100 %	100 %	527,860,000	527,385,400	1,000,309,783						100 %	6,040,155,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			07	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah														
2	#	1	207	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana prasarana gedung kantor	100 %	100 %	527,860,000	527,385,400	1,000,309,783	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Aparatur Pemerintah	100 %	1,364,440,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#	1	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	790,000,000	790,000,000	456,411,041							100 %	801,317,396	
2	#	1	208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	790,000,000	790,000,000	456,411,041	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Aparatur Pemerintah	100 %	801,317,396	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	222,900,000	222,900,000	325,287,800							100 %	202,242,810	
2	#	1	209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jaba	100 %	100 %	64,900,000	64,900,000	106,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi	Aparatur Pemerintah	100 %	57,042,810	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tan yang layak digunakan						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Berkualitas dan Berdaya Saing	kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif					
2	#	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	95,000,000	95,000,000	123,254,000	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Aparatur Pemerintah	100 %	75,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	63,000,000	63,000,000	95,833,800	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Aparatur Pemerintah	100 %	69,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standart Nasional Perpustakaan	5.59 %	5.95%	1,461,345,000	1,661,585,000	1,355,152,184						6 %	2,336,041,000		
2	#	2	2	0	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.3 %	4.3 %	729,060,000	929,300,000	776,221,900							4.3 %	1,503,391,000	
2	#	2	2	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara	72 Per pustak	72 Per pustak	506,386,000	774,226,000	621,997,960	Semua Kab/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyara kat Kota Madiun	72 Per pustak	717,991,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															masyarakat yang kondusif				
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	#	2	2	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak dan terekam atau digital yang diadakan	3500 e kemplar	3500 e kemplar	155,324,000	155,074,000	154,223,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	3500 e kemplar	385,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	#	2	2	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	4100 e kemplar	4100 e kemplar	67,350,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	4100 e kemplar	400,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	#	2	2	0	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca	20 kali	20 kali	732,285,000	732,285,000	578,930,284						20 kali	832,650,000	
2	#	2	2	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2500 orang	2500 orang	732,285,000	732,285,000	578,930,284	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Masyarakat Kota Madiun	2500 orang	832,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															masyarakat yang kondusif					
2	#	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	36 %	36 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000						36 %	100,000,000		
2	#	3	2	01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	168 eksemplar	168 eksemplar	100,000,000	100,000,000	100,000,000						168 eksemplar	100,000,000		
2	#	3	2	101	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	4 kegiatan	4 kegiatan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	4 kegiatan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				800,916,000	800,916,000	722,097,171							1,050,000,000		
2	#	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang - Undang No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan)	42 %	86 skor	651,625,000	651,625,000	605,608,579							88 skor	900,000,000	
2	#	2	2	01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	28 %	28 %	342,140,000	342,140,000	359,961,208						28 %	450,000,000		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	#	2	2	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara dan disusutkan	912 meter linier	912 meter linier	342,140,000	342,140,000	359,961,208	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Polhukanham dan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	912 meter linier	450,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	#	2	2	2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dikelola	250 nomor arsip	250 nomor arsip	309,485,000	309,485,000	245,647,371						250 nomor arsip	450,000,000	
2	#	2	2	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah berkas arsip statis yang diakuisisi, diolah, dipreservasi dan layanan akses arsip	250 berkas	250 berkas	309,485,000	309,485,000	245,647,371	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Polhukanham dan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	250 berkas	450,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	#	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	8.4 Nilai	8.4 Nilai	149,291,000	149,291,000	116,488,592						8.4 Nilai	150,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	#	3	2		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	0.01 %	0.01 %	149,291,000	149,291,000	116,488,592					0.01 %	150,000,000		
2	#	3	2	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip in aktif yang dinilai	917 no mor berkas	917 no mor berkas	70,390,000	70,390,000	59,405,752	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	917 no mor berkas	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	#	3	2	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pelaksanaan pemusnahan arsip	1 kali	1 kali	78,901,000	78,901,000	57,082,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	1 kali	75,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
TOTAL									6,905,808,447	7,105,273,847	7,893,669,048						13,812,145,191		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15,347,800,000	16,456,062,400	18,433,367,401							21,141,000,000	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	#	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	9,499,396,897	9,549,876,897	11,250,817,702						A Skor	11,518,000,000	
3	#	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	54,007,200	54,007,200	875,250						100 %	99,000,000	
3	#	1	2	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	6 doku men	6 doku men	54,007,200	54,007,200	875,250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	6 doku men	99,000,000	Dinas Perdagang an
3	#	1	2	0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	7,616,000,000	7,616,000,000	9,429,904,240						100 %	8,500,000,000	
3	#	1	2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	7,616,000,000	7,616,000,000	9,429,904,240	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	100 %	8,500,000,000	Dinas Perdagang an
3	#	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	174,699,000	174,299,000	173,699,000						100 %	225,000,000	
3	#	1	2	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian	100 %	100 %	174,699,000	174,299,000	173,699,000	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan	0	100 %	225,000,000	Dinas Perdagang an

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			05		dinas beserta perlengkapannya						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital					
3	#	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	201,010,800	201,010,800	405,330,800					100 %	386,000,000		
3	#	1	209		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	201,010,800	201,010,800	405,330,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	100 %	386,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,016,681,807	1,067,561,807	728,512,562						100 %	1,150,000,000	
						Persentase terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %									100 %		
3	#	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	1,016,681,807	1,067,561,807	728,512,562	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	100 %	1,150,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentasi Tercukupinya	100 %	100 %	436,998,090	436,998,090	512,495,850						100 %	1,158,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			09	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang layak guna													
					Persentasi Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak guna	100 %	100 %									100 %		
3	#	1	209	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	260,515,740	260,515,740	233,991,660	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	100 %	360,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	1	209	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	49,978,750	49,978,750	182,574,670	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	100 %	602,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	1	209	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	126,503,600	126,503,600	95,929,520	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	100 %	196,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perusahaan yang Memperbarui Perijinan	100 %	100 %	107,083,000	107,083,000	267,723,000						100 %	0	
3	#	2		2 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	Prosentase ijin yang diterbitkan	100 %	100 %	107,083,000	107,083,000	267,723,000						100 %	0	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			01	Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan														
3	#	2	21	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi perijinan yang dikeluarkan	75 surat	75 surat	107,083,000	107,083,000	267,723,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	75 surat	0	Dinas Perdagangan
3	#	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	100 %	5,202,899,418	6,261,231,818	5,949,292,774						100 %	8,070,000,000	
3	#	3	201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 Pasar	17 Pasar	1,275,495,040	1,794,828,040	2,073,216,556						17 Pasar	3,256,000,000	
3	#	3	201	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	3 pasar	1 pasar	213,350,000	733,783,000	1,177,783,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	1 pasar	1,783,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	3	201	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 pasar	17 pasar	1,062,145,040	1,061,045,040	895,433,556	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	17 pasar	1,473,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	3	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan	3200000000	100 %	3,927,404,378	4,466,403,778	3,876,076,218						100 %	4,814,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			02	Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rupiah													
3	#	3	21	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian yang dilaksanakan	2 kali	2 kali	670,330,383	670,130,383	385,663,183	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	2 kali	932,000,000	Dinas Perdagangan	
3	#	3	22	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah orang yang melaksanakan pengelolaan pasar	118 orang	118 orang	3,257,073,995	3,796,273,395	3,490,413,035	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	118 orang	3,882,000,000	Dinas Perdagangan	
3	#	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Bahan Pokok dan Barang Penting	100 %	100 %	77,500,800	77,500,800	263,411,200						100 %	100,000,000		
3	#	4	202	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	100 %	75,089,600	75,089,600	250,300,000							100 %	90,000,000	
3	#	4	21	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemantauan	3 kali	3 kali	75,089,600	75,089,600	250,300,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	3 kali	90,000,000	Dinas Perdagangan	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	#	4	2		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersalurnya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100 %	100 %	2,411,200	2,411,200	13,111,200						100 %	10,000,000	
3	#	4	2	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan	2 kali	2 kali	2,411,200	2,411,200	13,111,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	2 kali	10,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP dan BDKT yang Telah Melakukan Tera dan Pengawasan BDKT	100 %	100 %	216,946,035	216,946,035	318,133,875						100 %	287,000,000	
3	#	6	2		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi Legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	12 bulan	216,946,035	216,946,035	318,133,875						12 bulan	287,000,000	
3	#	6	2	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang sudah ditera/tera ulang	7000 uttp	7000 uttp	204,753,055	204,753,055	314,899,855	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	7000 uttp	262,000,000	Dinas Perdagangan
3	#	6	2	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan produk dalam kemasan yang telah diawasi	9 lokasi	9 lokasi	12,192,980	12,192,980	3,234,020	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	9 lokasi	25,000,000	Dinas Perdagangan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
														dan Berkeadilan						
3	#	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Perdagangan yang Dipromosikan	100 %	100 %	243,973,850	243,423,850	383,988,850						100 %	1,166,000,000		
3	#	7	2		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	4 kali	4 kali	243,973,850	243,423,850	383,988,850						4 kali	1,166,000,000		
3	#	7	2	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya promosi produk perdagangan	4 kali	4 kali	135,387,400	135,087,400	171,312,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	4 kali	566,000,000	Dinas Perdagangan	
3	#	7	2	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem Informasi baik baru dan pemeliharannya	2 jenis	2 jenis	108,586,450	108,336,450	212,676,450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	2 jenis	600,000,000	Dinas Perdagangan	
TOTAL									15,347,800,000	16,456,062,400	18,433,367,401							21,141,000,000		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				3,137,043,250	3,137,043,250	3,381,051,100							3,521,157,500		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	934,234,250	934,234,250	1,296,743,580							A Skor	1,056,157,500	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				DAERAH KABUPATEN/KOTA														
4	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	8,522,500	8,522,500	998,400						100 %	10,000,000	
4	1	1	2	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja	6 doku men	6 doku men	8,522,500	8,522,500	998,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerint ahan	6 doku men	10,000,000	Sekretariat Daerah
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	499,157,500	499,157,500	824,778,080						100 %	499,157,500	
4	1	1	2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %	499,157,500	499,157,500	824,778,080	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerint ahan	100 %	499,157,500	Sekretariat Daerah
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi						



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Khusus Fisik						
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	200,000,000						100 %	200,000,000	
4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	200,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerintahan	100 %	200,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik daerah urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1,163,250	1,163,250	1,163,250						100 %	0	
4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin	100 %	100 %	1,163,250	1,163,250	1,163,250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerintahan	100 %	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	285,891,000	285,891,000	226,882,600						100 %	300,000,000	
4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	285,891,000	285,891,000	226,882,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerintahan	100 %	300,000,000	Sekretariat Daerah
													Dana Transfer Khusus -						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Dana Alokasi Khusus Fisik						
4	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	39,500,000	39,500,000	42,921,250						100 %	47,000,000	
4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	100 %	20,000,000	20,000,000	23,421,250	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerintahan	100 %	20,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerintahan	100 %	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	prosentase sarana/prasarana gedung yang representatif	100 %	100 %	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Pemerintahan	100 %	12,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	2,202,809,000	2,202,809,000	2,084,307,520						0	2,465,000,000	
4	1	2	2.0	1	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	1,769,469,000	1,769,469,000	1,651,879,500						100 %	2,020,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	2	2.0	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	jumlah pembinaan administrasi pemerintahan	10 kali	10 kali	1,379,469,000	1,379,469,000	1,288,851,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD terkait	10 kali	1,700,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.0	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah dokumen rupa bumi	2 dokumen	2 dokumen	90,000,000	90,000,000	103,028,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD terkait	2 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.0	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah laporan pelaksanaan otonomi daerah	5 dokumen	5 dokumen	300,000,000	300,000,000	260,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD terkait	5 dokumen	320,000,000	Sekretariat Daerah
													Bantuan Keuangan						
4	1	2	2.0	4	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	100 %	100 %	433,340,000	433,340,000	432,428,020						100 %	445,000,000	
4	1	2	2.0	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	433,340,000	433,340,000	432,428,020	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	OPD Terkait	5 kali	445,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				2,610,646,998	2,610,646,998	2,825,246,998							3,203,342,736	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	2,610,646,998	2,610,646,998	2,825,246,998						A Skor	3,203,342,736	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	15,000,000						100 %	15,000,000	
4	1	1	2.0 1	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	6 Dokumen	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	437,447,500	437,447,500	792,010,500						100 %	795,134,736	
4	1	1	2.0 2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	437,447,500	437,447,500	792,010,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	795,134,736	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	82.75 Indeks	82.75 Indeks	167,326,280	167,326,280	167,326,280						82.75 Indeks	192,500,000	
4	1	1	2 0 6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 %	100 %	167,326,280	167,326,280	167,326,280	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	192,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	212,847,108	212,847,108	113,069,468						100 %	189,400,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	212,847,108	212,847,108	113,069,468	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	189,400,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	33,873,000	33,873,000	259,176,000					100 %	37,500,000		
4	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100 %	100 %	18,963,000	18,963,000	29,666,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	20,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	1,680,000	1,680,000	216,280,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	2,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana/Prasarana Gedung Yang Representatif	100 %	100 %	13,230,000	13,230,000	13,230,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	15,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1 3		Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.2 Indeks	28.2 Indeks	1,744,153,110	1,744,153,110	1,478,664,750						28.2 Indeks	1,973,808,000	
4	1	1	2.1 3	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang besar dan urusan kewenangannya	100 %	100 %	450,000,000	450,000,000	367,073,280	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	500,000,000	Sekretariat Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Alokasi Umum	Transformasi Publik					
4	1	1	2.1 3	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2.85 In deks	2.85 In deks	745,153,110	745,153,110	663,164,350	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	2.85 In deks	861,808,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kecukupan dokumen kinerja yang disusun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	80 %	549,000,000	549,000,000	448,427,120	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	80 %	612,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				2,584,597,920	2,584,597,920	2,610,963,120							2,701,836,600	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	1,642,838,620	1,642,838,620	1,846,225,120							A Skor	1,748,300,800
4	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	38,923,200	38,923,200	1,000,000							100 persen	38,923,200
4	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan	100 persen	100 persen	38,923,200	38,923,200	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 persen	38,923,200	Sekretariat Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Evaluasi Perangkat Daerah						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Publik						
4	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	100 persen	1,119,923,300	1,119,923,300	1,225,988,000						100 persen	1,197,330,000		
4	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	100 persen	1,119,923,300	1,119,923,300	1,225,988,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Hukum	100 persen	1,197,330,000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	100 persen	130,000,000	130,000,000	130,000,000						100 persen	130,000,000		
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	100 persen	130,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Hukum	100 persen	130,000,000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	6,500,000	6,500,000	6,500,000							100 persen	30,000,000	
4	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	100 persen	100 persen	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0		100 persen	30,000,000	Sekretariat Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
4	1	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	305,551,400	305,551,400	241,844,000						100 persen	310,000,000			
4	1	1	2.0	3	8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen	100 persen	305,551,400	305,551,400	241,844,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 persen	310,000,000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	100 persen	41,940,720	41,940,720	240,893,120						100 persen	42,047,600			
4	1	1	2.0	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 persen	100 persen	20,547,600	20,547,600	24,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Hukum	100 persen	20,547,600	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakandigunakan	100 persen	100 persen	2,500,000	2,500,000	197,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Hukum	100 persen	2,500,000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.0	1	9	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 persen	100 persen	18,893,120	18,893,120	18,893,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Hukum	100 persen	19,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Indeks Kepuasan Masyarakat di	0	0	941,759,300	941,759,300	764,738,000						0	953,535,800			



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				KESEJAHTERAAN RAKYAT	Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat													
4	1	2	2.0	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk hukum yang tersusun	100 persen	100 persen	941,759,300	941,759,300	764,738,000						100 persen	953,535,800	
4	1	2	2.0	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Perda/Raperda	20 Perda/Raperda	20 Perda/Raperda	388,850,000	388,850,000	222,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Madiun	20 Perda/Raperda	427,735,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.0	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pembinaan dan Bantuan Hukum	3 kegiatan	3 kegiatan	282,928,800	282,928,800	215,852,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Madiun	3 kegiatan	306,820,800	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.0	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Publikasi Produk Hukum Daerah	3 jenis	3 jenis	269,980,500	269,980,500	325,986,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Madiun	3 jenis	218,980,000	Sekretariat Daerah
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1			SEKRETARIAT DAERAH				3,195,171,000	3,195,171,000	3,314,421,181							3,011,429,503	
4	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	2,594,471,000	2,594,471,000	2,975,083,221						A Skor	2,172,561,370	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	41,636,000	41,636,000	11,553,300						100 %	37,491,630	
4	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	21 dokumen	21 dokumen	41,636,000	41,636,000	11,553,300	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	21 dokumen	37,491,630	Sekretariat Daerah
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
4	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	1,233,270,000	1,233,270,000	1,578,038,054						100 %	1,596,391,040	
4	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	1,233,270,000	1,233,270,000	1,578,038,054	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	1,596,391,040	Sekretariat Daerah
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	98,194,000	98,194,000	183,194,000						100 %	100,000,000	
4	1	1	2.0 6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	98,194,000	98,194,000	183,194,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	4,300,000	4,300,000	119,647,368						100 %	80,000,000	
4	1	1	2.0 7	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	4,300,000	4,300,000	119,647,368	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	80,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	363,091,000	363,091,000	224,363,060						100 %	300,000,000	
4	1	1	2.0 8	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkap an kantor yang representatif	100 %	100 %	363,091,000	363,091,000	224,363,060	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	300,000,000	Sekretariat Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	853,980,000	853,980,000	858,287,439						100 %	58,678,700	
4	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	15,321,000	15,321,000	23,452,180	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	15,703,700	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	826,000,000	826,000,000	822,176,259	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	12,659,000	12,659,000	12,659,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	12,975,000	Sekretariat Daerah
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	600,700,000	600,700,000	339,337,960						A Skor	838,868,133	
4	1	3	2.0 2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik	100 %	100 %	130,300,000	130,300,000	104,515,360						100 %	188,868,133	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						keuangannya >79% dari target													
4	1	3	2.0	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	28,500,000	28,500,000	28,500,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	1 dokumen	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.0	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pembangunan yang terealisasi sesuai target	12 dokumen	12 dokumen	101,800,000	101,800,000	76,015,360	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	12 dokumen	158,868,133	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.0	3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	100 %	100 %	470,400,000	470,400,000	234,822,600						100 %	650,000,000	
4	1	3	2.0	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tender/seleksi yang dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan perundang-undangan	100 %	100 %	185,850,000	185,850,000	148,664,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.0	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase tender/seleksi yang terumumkan di sistem LPSE	100 %	100 %	284,550,000	284,550,000	86,157,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	400,000,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				7,810,741,095	9,275,036,818	12,071,813,993							0	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1,207,275,500	1,207,275,500	1,768,608,140							0		
4	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,000,000	20,000,000	20,000,000								0	
4	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	21 dok umen	21 dok umen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		21 dok umen	0	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				559,825,500	559,825,500	1,025,442,780								0	
4	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	559,825,500	559,825,500	1,025,442,780	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	0	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah				180,000,000	180,000,000	240,000,000								0	
4	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	180,000,000	180,000,000	240,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	0	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,000,000	2,000,000	164,000,000								0	
4	1	1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan sarana	100 %	100 %	2,000,000	2,000,000	164,000,000	Kota Madiun,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	0	Sekretariat Daerah	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana, Alokasi Umum	Polhukanham dan Transformasi Publik						
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				385,500,000	385,500,000	259,215,360								0	
4	1	1	2.08	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	385,500,000	385,500,000	259,215,360	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %		0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				59,950,000	59,950,000	59,950,000								0	
4	1	1	2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %		0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	28,750,000	28,750,000	28,750,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %		0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	9,200,000	9,200,000	9,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana, Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %		0	Sekretariat Daerah
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN				5,737,465,595	7,201,761,318	9,509,966,578								0	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					KESEJAHTERAAN RAKYAT														
4	1	2	2.0	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				5,737,465,595	7,201,761,318	9,509,966,578								0
4	1	2	2.0	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah fasilitasi bina mental spiritual	15 kegiatan	15 kegiatan	5,737,465,595	7,201,761,318	9,509,966,578	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		15 kegiatan	0	Sekretariat Daerah
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				866,000,000	866,000,000	793,239,275								0
4	1	3	2.0	1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				571,000,000	571,000,000	338,769,600								0
4	1	3	2.0	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	3 kegiatan	3 kegiatan	370,000,000	370,000,000	247,984,960	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		3 kegiatan	0	Sekretariat Daerah
													DBH CHT						
4	1	3	2.0	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	2 kegiatan	2 kegiatan	201,000,000	201,000,000	90,784,640	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 kegiatan	0	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.0	4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				295,000,000	295,000,000	454,469,675								0
4	1	3	2.0	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	prosentase kegiatan yang telah dilaksanakan	100 %	100 %	295,000,000	295,000,000	454,469,675	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	0	Sekretariat Daerah



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							Semua Kelurahan		Transformasi Publik					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				37,923,938,597	38,232,357,247	52,982,724,486							34,735,534,962	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	37,923,938,597	38,232,357,247	52,982,724,486						A Skor	34,735,534,962	
4	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	145,008,000	145,008,000	705,600						100 %	145,008,000	
4	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	145,008,000	145,008,000	705,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	145,008,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	10,739,383,967	10,739,383,967	12,528,735,102						100 %	10,739,383,967	
4	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	10,739,383,967	10,739,383,967	12,528,735,102	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	ASN Sekretariat Daerah	100 %	10,739,383,967	Sekretariat Daerah
													Dana Transfer						

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
4	1	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	4,905,645,120	4,905,645,120	4,887,255,049						100 %	8,203,870,120	
4	1	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 %	100 %	4,905,645,120	4,905,645,120	4,887,255,049	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawan ti Pemkot Madiun	100 %	8,203,870,120	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	2,238,407,600	2,238,407,600	2,830,332,380						100 %	2,250,000,000	
4	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	250,000,000	250,000,000	277,769,980	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 %	100 %	1,988,407,600	1,988,407,600	2,552,562,400			Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	7,652,365,000	7,732,845,000	20,421,943,550						100 %	1,150,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lainnya yang layak digunakan	100 %	100 %	7,500,000,000	7,498,300,000	19,943,102,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang layak digunakan	100 %	100 %	2,365,000	85,150,000	217,877,700	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak digunakan	100 %	100 %	150,000,000	149,395,000	260,963,850	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5,001,104,785	5,196,731,035	4,711,849,825						100 %	5,000,000,000	
4	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	5,001,104,785	5,196,731,035	4,711,849,825	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	5,000,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	2,229,816,895	2,229,816,895	2,684,005,050						100 %	2,235,065,645	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Perorangan/Jabatan yang Layak Digunakan	100 %	100 %	1,479,816,895	1,479,816,895	1,679,405,050	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	1,485,065,645	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	500,000,000	500,000,000	714,600,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	250,000,000	250,000,000	290,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1	1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000						100 %	1,000,000,000	
4	1	1	2.1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	400,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	600,000,000	Sekretariat Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1	1	2.1 2	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	1,735,240,850	1,871,503,250	1,995,556,750						100 %	1,735,240,850	
4	1	1	2.1 2	1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi	100 %	100 %	874,529,750	1,010,792,150	1,020,192,550	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	874,529,750	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1 2	2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	persentase kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi	100 %	100 %	550,000,000	550,000,000	663,153,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	550,000,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1 2	3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah tercukupi	100 %	100 %	310,711,100	310,711,100	312,211,100	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bagian Umum Sekretariat Daerah	100 %	310,711,100	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan pimpinan	100 %	100 %	2,276,966,380	2,173,016,380	1,922,341,180						100 %	2,276,966,380	
4	1	1	2.1 4	1 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah fasilitasi keprotokolan pimpinan Pemerintah Daerah	500 kali	500 kali	2,276,966,380	2,173,016,380	1,922,341,180	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	500 kali	2,276,966,380	Sekretariat Daerah
TOTAL								57,262,138,860	59,034,853,233	77,186,220,878							47,173,301,301	
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	2			SEKRETARIAT DPRD				42,653,913,443	41,213,913,217	40,485,433,270							51,083,447,848	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	27,510,475,233	26,626,426,832	26,962,367,766						A Skor	31,544,668,583	
4	2	1	2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	52,080,201	181,303,736	72,483,016						100 %	43,081,493	
4	2	1	2.0 1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja/RKA/PK)	6 Dok umen	6 Dok umen	52,080,201	181,303,736	72,483,016	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		6 Dok umen	43,081,493	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2,495,474,176	2,495,474,176	3,286,915,686						100 %	2,630,464,179	
4	2	1	2.0 2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji ASN Sekretariat DPRD	100 %	100 %	2,495,474,176	2,495,474,176	3,286,915,686	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	2,630,464,179	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %	100 %	31,686,562	31,686,336	31,686,336						100 %	32,966,464	
4	2	1	2.0 5	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	100 %	29,700,000	29,700,000	29,700,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	30,899,880	Sekretariat DPRD

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	2	1	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang paham	100 %	100 %	1,986,562	1,986,336	1,986,336	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	2,066,584	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	100 %	2,167,006,000	736,655,000	978,816,000						100 %	1,209,250,678	
4	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional ASN	100 %	100 %	2,167,006,000	736,655,000	978,816,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	1,209,250,678	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	100 %	167,144,698	124,750,000	318,943,532						100 %	394,887,591	
4	2	1	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Terpenuhi	100 %	100 %	167,144,698	124,750,000	318,943,532	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	394,887,591	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	100 %	3,225,254,353	2,485,552,892	2,239,676,920						100 %	3,026,251,050	
4	2	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	3,225,254,353	2,485,552,892	2,239,676,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	3,026,251,050	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan/Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	100 %	721,614,245	838,466,180	859,705,226						100 %	1,197,036,803	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas yang layak digunakan	100 %	100 %	319,217,070	296,474,810	286,603,810	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	332,888,017	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Peralatan Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100 %	100 %	252,391,900	252,354,600	272,105,496	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	231,376,533	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Gedung Kantor yang Layak Digunakan	100 %	100 %	150,005,275	289,636,770	300,995,920	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	632,772,253	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1	5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	100 %	12,747,186,328	15,980,033,562	15,988,960,562						100 %	15,364,055,804	
4	2	1	2.1	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terpenuhinya Hak Keuangan DPRD	12 Bulan	12 Bulan	12,313,774,636	15,591,621,870	15,554,923,870	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		12 Bulan	14,893,475,878	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut yang dicukupi	5 Jenis	5 Jenis	283,411,692	283,411,692	329,036,692	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		5 Jenis	289,079,926	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan DPRD	1 kali/orang	1 kali/orang	150,000,000	105,000,000	105,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 kali/orang	181,500,000	Sekretariat DPRD



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan		Transformasi Publik					
4	2	1	2.1	6	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	5,903,028,670	3,752,504,950	3,185,180,488						100 %	7,646,674,521	
4	2	1	2.1	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi	4 Dokumen	4 Dokumen	38,496,150	37,327,950	20,118,488	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	40,051,394	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.1	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perjalanan Dinas /Operasional DPRD	100 %	100 %	5,864,532,520	3,715,177,000	3,165,062,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	7,606,623,127	Sekretariat DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD atas Tugas dan Fungsi DPRD	80 Skor	80 Skor	15,143,438,210	14,587,486,385	13,523,065,504						80 Skor	19,538,779,265	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	-	80 skor									85 skor		
4	2	2	2.0	1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase tercapainya fungsi pembentukan perda DPRD	100 %	100 %	6,318,890,000	5,483,315,700	5,969,361,370						100 %	6,950,779,000	
4	2	2	2.0	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	15 raperda	24 raperda	5,396,770,000	3,732,587,100	3,949,322,770	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		24 raperda	5,936,447,000	Sekretariat DPRD

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Publik					
4	2	2	2.0	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan yang dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen	922,120,000	1,750,728,600	2,020,038,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		3 dokumen	1,014,332,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	100 %	956,825,000	1,391,589,000	1,102,009,780						100 %	800,280,000	
4	2	2	2.0	3	Pembahasan APBD	Pembahasan KUA-PPAS, KUPA-PPASP dan APBD , PAPBD sesuai jadwal/tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	956,825,000	1,391,589,000	1,102,009,780	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		4 Dokumen	800,280,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1,310,741,500	1,296,299,875	664,545,639						100 %	1,268,975,000	
4	2	2	2.0	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Rekomendasi DPRD atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	1 Dokumen	1 Dokumen	389,350,000	398,977,750	294,597,468	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	388,350,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pembahasan LKPJ dan LPJ yang tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	921,391,500	897,322,125	369,948,171	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	880,625,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	100 %	5,481,186,390	5,284,244,140	4,615,786,780						100 %	9,467,386,265	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	2	2	2.0	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	6 bimbingan	6 bimbingan	2,945,594,500	2,878,004,500	2,271,194,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		6 bimbingan	5,352,886,265	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	1,485,881,410	1,367,704,160	1,306,056,800	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		50 Kegiatan	2,114,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	1,049,710,480	1,038,535,480	1,038,535,480	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	2,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.0	5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang masuk RKPD	100 %	100 %	1,075,795,320	1,132,037,670	1,171,361,935						100 %	1,051,359,000	
4	2	2	2.0	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap	90 Dokumen	90 Dokumen	1,075,795,320	1,132,037,670	1,171,361,935	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		90 Dokumen	1,051,359,000	Sekretariat DPRD
TOTAL									42,653,913,443	41,213,913,217	40,485,433,270							51,083,447,848	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1				PERENCANAAN				10,835,768,792	10,827,373,792	12,372,730,088							11,349,000,000	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,686,779,907	7,622,714,907	9,714,082,737							8,307,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			88,215,400	88,215,400	24,710,400							95,000,000		
5	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	66,979,200	66,979,200	12,619,200	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		7 dokumen	72,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	11,050,600	11,050,600	10,665,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		12 dokumen	12,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	10,185,600	10,185,600	1,425,600	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 dokumen	11,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,680,875,000	5,512,308,190	<b>6,672,335,685</b>							5,845,000,000		
5	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	5,550,950,000	5,382,383,190	6,659,580,685	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	5,700,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	129,925,000	129,925,000	12,755,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		13 dokumen	145,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				335,438,767	335,438,767	547,053,767							357,000,000	
5	1	1	2.0 5	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase peningkatan kapasitas pegawai	100 %	100 %	176,934,957	176,934,957	388,549,957	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	1	2.0 5	1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang memahami	100 %	100 %	158,503,810	158,503,810	158,503,810	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	177,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				401,934,000	401,934,000	862,874,000							450,000,000	
5	1	1	2.0 6	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	401,934,000	401,934,000	862,874,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	450,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	1	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket		2 pake t	6,023,940	6,023,940	634,967,925						2 pake t	196,000,000	
5	1	1	2.0 7	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	6,023,940	6,023,940	634,967,925	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Bapelitb angda Kota Madiun	100 %	196,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				948,971,045	1,003,631,045	696.977.395bada n perencanaan							1,035,000,000	
5	1	1	2.0 8	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan kebutuhan jasa	100 %	100 %	656,918,405	711,578,405	399,691,005	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	880,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						peralatan dan perlengkapan kantor						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan pelayanan umum kantor	100 %	100 %	292,052,640	292,052,640	297,286,390	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	155,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				225,321,755	275,163,565	275,163,565							329,000,000	
5	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	55,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	100,000,190	149,842,000	149,842,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	199,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	75,321,565	75,321,565	75,321,565	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	75,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,263,338,885	1,317,008,885	1,117,110,925							1,820,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	1	2	2.0	1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			954,338,885	1,019,338,885	962,009,425							1,410,000,000		
5	1	2	2.0	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Publik	1 kali	1 kali	109,009,600	134,009,600	122,989,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 kali	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	2	2.0	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	jumlah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas PD	1 kali	1 kali	149,725,500	174,725,500	132,720,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 kali	180,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	2	2.0	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan musrenbang kota	1 kali	1 kali	239,344,350	254,344,350	315,850,450	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 kali	420,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	2	2.0	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan	1 doku men	1 doku men	456,259,435	456,259,435	390,448,975	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 doku men	710,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5	1	2	2.0	3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				309,000,000	297,670,000	155,101,500							410,000,000	
5	1	2	2.0	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2 doku men	2 doku men	99,000,000	87,670,000	81,445,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 doku men	220,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang an Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	1	2	2.0	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi OPD	4 dokumen	4 dokumen	210,000,000	210,000,000	73,656,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		4 dokumen	190,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,885,650,000	1,887,650,000	1,541,536,426							1,222,000,000	
5	1	3	2.0	1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				542,000,000	544,000,000	361,693,120							622,000,000	
5	1	3	2.0	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pemerintahan	100 %	100 %	115,000,000	165,000,000	72,864,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	110,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	jumlah dokumen	14 dokumen	14 dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		14 dokumen	22,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang pembangunan manusia	100 %	100 %	400,581,500	352,581,500	262,410,620	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	270,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
5	1	3	2.0	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6,418,500	6,418,500	6,418,500	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	220,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				588,800,000	588,800,000	471,390,186							300,000,000	
5	1	3	2.0	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	153,800,000	153,800,000	170,523,466	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian	1 dokumen	1 dokumen	435,000,000	435,000,000	300,866,720	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				754,850,000	754,850,000	708,453,120							300,000,000	
5	1	3	2.0	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	182,000,000	182,000,000	276,150,000	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	394,296,000	394,296,000	324,963,360	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen hasil koordinasi bidang kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	98,521,000	98,521,000	82,321,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	0	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.0	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen	80,033,000	80,033,000	25,018,760	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	90,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				870,033,756	874,737,757	731,038,204							1,295,000,000	
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				870,033,756	874,737,757	731,038,204							1,295,000,000	
5	5	2	2.0	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan				552,300,610	562,695,610	571,715,195							720,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan														
5	5	2	2.0	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	jumlah dokumen penelitian/kajian	2 dokumen	2 dokumen	428,403,460	428,403,460	472,525,045	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 dokumen	490,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.0	1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	jumlah dokumen data kelitbangan	1 dokumen	1 dokumen	123,897,150	134,292,150	99,190,150	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1 dokumen	230,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.0	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				317,733,146	312,042,147	159,323,009							575,000,000	
5	5	2	2.0	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	4 dokumen	4 dokumen	317,733,146	312,042,147	159,323,009	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		4 dokumen	575,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
TOTAL									11,705,802,548	11,702,111,549	13,103,768,292							12,644,000,000	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN				61,688,581,005	65,190,905,885	<b>89,429,948,840</b>							63,139,131,965	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	52,081,379,246	51,820,233,266	<b>52,236,899,046</b>							A Skor	52,441,379,246
5	2	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan	100 %	100 %	21,032,000	21,032,000	2,000,000							100 %	21,032,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						evaluasi Perangkat daerah													
5	2	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	21,032,000	21,032,000	2,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	BKAD	100 persen	21,032,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
5	2	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan	100 %	100 %	34,938,345,046	34,938,345,046	<b>36,907,540,046</b>						100 %	35,298,345,046	
5	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN Perangkat Daerah	100 %	100 %	34,938,345,046	34,938,345,046	36,907,540,046	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai BKAD	100 %	35,298,345,046	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	200,000,000	200,000,000	<b>450,000,000</b>						100 %	200,000,000	
5	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	100 persen	200,000,000	200,000,000	450,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	BKAD	100 persen	200,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	2	1	2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	187,077,000	187,077,000	<b>187,177,000</b>						100 %	187,077,000	
5	2	1	2.0 7	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas	100 persen	100 persen	187,077,000	187,077,000	187,177,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	BKAD	100 persen	187,077,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	16,557,925,200	16,235,779,220	<b>14,451,982,000</b>						100 %	16,557,925,200	
5	2	1	2.0 8	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	100 persen	16,557,925,200	16,235,779,220	14,451,982,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	BKAD	100 persen	16,557,925,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	177,000,000	238,000,000	<b>238,200,000</b>						100 %	177,000,000	
5	2	1	2.0 9	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Jumlah kendaraan Dinas perorangan/jabatan digunakan	100 persen	100 persen	40,000,000	80,000,000	101,200,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	BKAD	100 persen	40,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	2	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 persen	100 persen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	BKAD	100 persen	50,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	100 persen	87,000,000	108,000,000	87,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	BKAD	100 persen	87,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang Memenuhi Target	100 %	100 %	7,770,012,719	11,270,987,599	<b>35,116,573,814</b>						100 %	7,490,012,719	
5	2	2	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahaan Perda APBD tepat waktu	100 %	100 %	928,400,460	927,300,460	<b>1,005,199,090</b>						100 %	928,400,460	
5	2	2	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	104,549,510	72,797,510	51,739,910	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	2 Dokumen	104,549,510	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	78,704,510	78,704,510	56,794,910	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	2 dokumen	78,704,510	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA yang terfasilitasi	34 Dokumen	34 Dokumen	38,786,940	37,184,940	16,877,340	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	34 Dokumen	38,786,940	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0	6	Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah DPA yang terfasilitasi	34 Dokumen	34 Dokumen	35,949,600	34,347,600	23,640,000	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	34 Dokumen	35,949,600	Badan Keuangan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	262,262,120	256,906,120	193,633,320	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	2 Dokumen	262,262,120	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	210,418,580	176,924,410	114,401,610	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	2 Dokumen	210,418,580	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	197,729,200	270,435,370	548,112,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	2 Dokumen	197,729,200	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							
5	2	2	2.0	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan	100 %	100 %	265,243,000	265,243,000	47,050,000							100 %	265,243,000	
5	2	2	2.0	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen administrasi kasda	55 Dokumen	55 Dokumen	145,243,000	145,243,000	41,950,000	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Khusus -	Memperkuat Stabilitas Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	55 Dokumen	145,243,000	Badan Keuangan	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Fisik	dan Transformasi Publik						dan Aset Daerah
5	2	2	2.0	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Pengeluaran kas	3 Dokumen	3 Dokumen	120,000,000	120,000,000	5,100,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	3 Dokumen	120,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan keuangan yang terfasilitasi	100 %	100 %	1,296,629,000	1,296,379,000	<b>1,073,620,740</b>						100 %	1,016,629,000		
5	2	2	2.0	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Produk Hukum	2 Dokumen	2 Dokumen	280,000,000	280,000,000	118,029,440	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	2 Dokumen	0	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.0	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan keuangan	2 buku	2 buku	40,000,000	40,000,000	57,500,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	2 buku	40,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik							
5	2	2	2.0	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,000,000	100,000,000	65,176,480	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas dan	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	3 Dokumen	100,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah							Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Publik						
5	2	2	2.0	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi dan pendampingan OPD	500 orang	500 orang	876,629,000	876,379,000	832,914,820	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	500 orang	876,629,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.0	4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Bantuan Tidak Terduga	100 %	100 %	5,279,740,259	8,782,065,139	<b>32,990,703,984</b>							100 %	5,279,740,259	
5	2	2	2.0	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Pengajuan BTT	100 %	100 %	5,279,740,259	8,782,065,139	32,990,703,984	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	100 %	5,279,740,259	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	100 %	100 %	1,837,189,040	2,099,685,020	<b>2,076,475,980</b>							100 %	3,207,740,000	
5	2	3	2.0	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	7 dokumen	7 dokumen	1,837,189,040	2,099,685,020	<b>2,076,475,980</b>							7 dokumen	3,207,740,000	
						Jumlah Dokumen BMD yang dipelihara	5 Dokumen	5 Dokumen										5 Dokumen		
5	2	3	2.0	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen BMD	5 Dokumen	5 Dokumen	157,740,000	157,740,000	211,670,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	5 Dokumen	157,740,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.0	7	Pengamanan Barang Milik Daerah				1,629,449,040	1,891,945,020	1,823,205,980	Kota Madiun, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas dan Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD			3,000,000,000	Badan Keuangan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					dan Aset Daerah
5	2	3	2.0	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jenis dan tipe barang yang sudah terstandart	18 Dokumen	18 Dokumen	50,000,000	50,000,000	41,600,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	18 Dokumen	50,000,000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
													Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
TOTAL									61,688,581,005	65,190,905,885	<b>89,429,948,840</b>							63,139,131,965	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2				KEUANGAN				11,112,372,000	11,158,046,000	<b>11,507,917,000</b>							12,590,042,000	
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	10,009,082,000	9,957,607,000	10,226,171,000							A Skor	11,283,907,000
5	2	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	20 dokumen	20 dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000							20 dokumen	13,068,000
5	2	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	20 dokumen	20 dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	20 dokumen	13,068,000	Badan Pendapatan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	2	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	9,309,082,000	9,309,082,000	9,554,783,000					100 %	10,199,552,000		
5	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pemenuhan Gaji ASN Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	9,309,082,000	9,309,082,000	9,554,783,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 Persen	10,199,552,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	75,000,000					100 %	60,500,000		
5	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 persen	100 persen	30,000,000	30,000,000	75,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 persen	60,500,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	500,000,000	442,250,000	347,181,000					100 %	585,832,000		
5	2	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 persen	100 persen	500,000,000	442,250,000	347,181,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 persen	585,832,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	100 %	100 %	165,000,000	171,275,000	244,207,000					100 %	274,845,000		

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
5	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 persen	100 persen	40,000,000	40,000,000	42,054,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 persen	53,845,000	Badan Pendapatan Daerah														
5	2	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100 persen	100 persen	75,000,000	81,275,000	157,095,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 persen	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah														
5	2	1	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase peralatan gedungkantor yang layak digunakan	100 persen	100 persen	50,000,000	50,000,000	45,058,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 persen	121,000,000	Badan Pendapatan Daerah														
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	10 %	1,103,290,000	1,200,439,000	<b>1,281,746,000</b>						10 %	1,306,135,000															
						Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	-	16%									42%																
5	2	4	2.0	1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	100 %	100 %	1,103,290,000	1,200,439,000	<b>1,281,746,000</b>						100 %	1,306,135,000															
5	2	4	2.0	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	JUmlah dokumen penyusunan perencanaan , pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4,600,000	4,600,000	14,827,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen	6,900,000	Badan Pendapatan Daerah														
5	2	4	2.0	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Wajib Pajak Yang Menerima Reword dan Wajib	450 Wajib Pajak	450 Wajib Pajak	560,987,000	560,987,000	379,984,000	Kota Madiun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas dan Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi		450 Wajib Pajak	560,987,000	Badan Pendapatan Daerah														

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Kebijakan Pajak Daerah	Pajak Yang Menerima Sosialisasi						Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					
5	2	4	2.0	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	125 obyek Pajak	125 obyek Pajak	15,000,000	16,250,000	16,250,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		125 obyek Pajak	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Modul Aplikasi Yang di Kembangkan	2 aplikasi	2 aplikasi	250,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 aplikasi	500,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Laporan Penilaian NJOP	2 Laporan	2 Laporan	87,298,000	264,442,000	264,442,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2 Laporan	20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penetapan	10 %	10 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		10 %	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Yang Terlayani	2500 WP	2500 WP	37,200,000	48,847,000	279,357,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		2500 WP	42,200,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersedianya laporan pajak daerah tepat waktu	100 %	100 %	56,716,000	85,540,000	85,540,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Dana	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	77,678,000	Badan Pendapatan Daerah

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Publik					
5	2	4	2.0	1	Pengalihan Pajak Daerah	Tercapainya pelaksanaan pengalihan pajak daerah	100 %	100 %	35,070,000	49,503,000	71,076,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	11,700,000	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.0	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Wajib Pajak yang pembayarannya sesuai dengan potensi	100 %	100 %	6,419,000	10,270,000	10,270,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		100 %	11,670,000	Badan Pendapatan Daerah
TOTAL									11,112,372,000	11,158,046,000	<b>11,507,917,000</b>							12,590,042,000	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3				KEPEGAWAIAN				8,817,848,375	8,753,674,015	9,381,414,227							8,765,079,536	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	6,109,101,755	6,109,101,755	7,224,734,975							A Skor	5,982,162,576
5	3	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	78,213,600	78,213,600	0							100 persen	77,162,576
5	3	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	78,213,600	78,213,600	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Program Pendukung	6 Dokumen	77,162,576	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																			Daya Manusia
5	3	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	100 persen	4,408,048,155	4,408,048,155	5,801,079,975						100 persen	4,200,000,000	
5	3	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	45 ASN	45 ASN	4,408,048,155	4,408,048,155	5,801,079,975	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Program Pendukung	45 ASN	4,200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi koordinasi dan konsultasi	100 persen	100 persen	307,840,000	307,840,000	340,470,000						100 persen	440,000,000	
5	3	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	80 kali	80 kali	307,840,000	307,840,000	340,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Program Penunjang	80 kali	440,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	100 persen	950,000,000	950,000,000	619,115,000						100 persen	1,100,000,000	
5	3	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Jasa Peralatan Kantor	18 Jenis	18 Jenis	950,000,000	950,000,000	619,115,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas dan Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi	Program peninjangan	18 Jenis	1,100,000,000	Badan Kepegawaian dan

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
												Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik						Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	100 persen	365,000,000	365,000,000	464,070,000						100 persen	165,000,000		
5	3	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	19 kendaraan	19 kendaraan	15,000,000	15,000,000	27,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Program penunjang	19 kendaraan	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	2 Gedung	2 Gedung	300,000,000	300,000,000	386,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Program penunjang	2 Gedung	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarpras	8 Jenis	8 Jenis	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Program penunjang	8 Jenis	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	IKM Perangkat Daerah	88,2 Score	88,2 Score	2,708,746,620	2,644,572,260	2,156,679,252						88,2 Score	2,782,916,960		
						Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	-	87,6									87,7			



1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
5	3	2	2.0	1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Data	100	100	10	10	0	0	1,476,253,060	1,412,078,700	999,866,952													100	100	0	1,556,400,000		
5	3	2	2.0	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi ASN	250	for	250	for	masi	masi	1,019,913,060	955,738,700	836,816,072	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Formasi, pemberhentian dan data kepegawaian	250	for	masi	1,100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
5	3	2	2.0	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah realisasi pemberhentian ASN	212	AS	212	AS	N	N	53,940,000	53,940,000	53,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Formasi, pemberhentian dan data kepegawaian	212	AS	N	54,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
5	3	2	2.0	1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Update data kepegawaian	3000	d	3000	d	okume	okume	402,400,000	402,400,000	109,110,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Formasi, pemberhentian dan data kepegawaian	3000	d	okume	402,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
5	3	2	2.0	2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100	pe	100	pe	rsen	rsen	468,089,560	468,089,560	234,855,000													100	pe	rsen	464,612,960		
5	3	2	2.0	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pegawai Ditempatkan	209	AS	209	AS	N	N	374,409,560	374,409,560	139,175,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	penataaan dan kesejahteraan ASN	209	AS	N	371,742,960	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber								

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																			Daya Manusia
5	3	2	2.0	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK	475 dokumen	475 dokumen	93,680,000	93,680,000	95,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	penataan dan kesejahteraan ASN	475 dokumen	92,870,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0	3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan kompetensi ASN	100 persen	100 persen	694,904,000	694,904,000	844,707,300						100 persen	694,904,000	
5	3	2	2.0	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peserta	280 Peserta	280 Peserta	409,266,000	409,266,000	406,629,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kapasitas ASN	280 Peserta	409,266,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Peserta	40 Peserta	40 Peserta	285,638,000	285,638,000	438,077,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kapasitas ASN	40 Peserta	285,638,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.0	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase pelanggaran disiplin pegawai	0.3 persen	0.3 persen	69,500,000	69,500,000	77,250,000						0.3 persen	67,000,000	
5	3	2	2.0	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pegawai Dibina	515 pegawai	515 pegawai	69,500,000	69,500,000	77,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pembinaan Pegawai	515 pegawai	67,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																			Daya Manusia	
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				4,426,619,390	4,426,619,390	3,597,265,935							5,608,319,545		
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	12 %	15 %	4,426,619,390	4,426,619,390	3,597,265,935						20 %	5,608,319,545		
5	4	2	2.0	1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100 persen	100 persen	1,308,319,545	1,308,319,545	1,051,093,785							100 persen	1,408,319,545	
5	4	2	2.0	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta	226 Peserta	226 Peserta	1,308,319,545	1,308,319,545	1,051,093,785	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Kompetensi teknis ASN	226 Peserta	1,408,319,545	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	4	2	2.0	2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	85 persen	85 persen	3,118,299,845	3,118,299,845	2,546,172,150							85 persen	4,200,000,000	
5	4	2	2.0	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta	240 Peserta	240 Peserta	3,118,299,845	3,118,299,845	2,546,172,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Kompetensi Teknis, fungsional dan manajerial ASN	240 Peserta	4,200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
TOTAL									13,244,467,765	13,180,293,405	12,978,680,162							14,373,399,081		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
6																		
6	1				11,311,938,000	11,892,309,200	12,410,489,610							7,950,430,005				
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	8,935,922,000	9,516,293,200	11,042,293,789			A Skor	7,950,430,005			
6	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	85,105,000	85,105,000	1,527,030			100 Persen	0			
6	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	10 dokumen	10 dokumen	85,105,000	85,105,000	1,527,030	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Kantor Inspektora t Daerah Kota Madiun	10 dokumen	0	Inspektora t Daerah
6	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	7,773,908,000	7,773,908,000	8,447,400,524				100 Persen	7,773,908,000		
6	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 persen	100 persen	7,773,908,000	7,773,908,000	8,447,400,524	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Inspektora t Daerah Kota Madiun	100 persen	7,773,908,000	Inspektora t Daerah
6	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan	100 Persen	100 Persen	837,706,995	837,706,995	915,083,697				100 Persen	0		

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah													
6	1	1	2.0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	1 paket	1 paket	625,551,250	625,551,250	347,095,136	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Kantor Inspektora t KOta Madiun	1 paket	0	Inspektora t Daerah
6	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	1 paket	1 paket	212,155,745	212,155,745	567,988,561	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Kantor Inspektora t KOta Madiun	1 paket	0	Inspektora t Daerah
6	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan	100 Persen	100 Persen	176,522,005	540,822,205	1,371,377,138						100 Persen	176,522,005	
6	1	1	2.0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas perorangan / jabatan	100 %	100 %	92,301,000	92,301,000	184,602,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Inspektora t Kota Madiun	100 %	92,301,000	Inspektora t Daerah
6	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor yang dipenuhi	2 jenis	2 jenis	84,221,005	448,521,205	1,186,775,138	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Inspektora t Kota Madiun	2 jenis	84,221,005	Inspektora t Daerah
6	1	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak Digunakan	100 Persen	100 Persen	62,680,000	278,751,000	306,905,400						100 Persen	0	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	1 unit	1 unit	22,700,000	22,700,000	41,424,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Kantor Inspektora t Daerah	1 unit	0	Inspektora t Daerah	
6	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung	1 unit	1 unit	4,979,000	233,250,000	233,750,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Kantor Inspektora t Daerah	1 unit	0	Inspektora t Daerah	
6	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana	5 jenis	5 jenis	35,001,000	22,801,000	31,731,400	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Kantor Inspektora t Daerah	5 jenis	0	Inspektora t Daerah	
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya Level 3	35 %	35 %	1,237,019,000	1,237,019,000	455,597,821					35 %	0		
6	1	2	2.0	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan	29 Dokumen	29 Dokumen	957,688,000	957,688,000	425,544,521						29 Dokumen	0	
6	1	2	2.0	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	3 dokumen	3 dokumen	51,772,000	51,772,000	51,772,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Madiun	3 dokumen	0	Inspektora t Daerah	
6	1	2	2.0	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan	15 dokumen	15 dokumen	459,516,000	459,516,000	197,661,961	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Madiun	15 dokumen	0	Inspektora t Daerah	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	1	2	2.0	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil reviu	4 dokumen	4 dokumen	24,507,000	24,507,000	24,507,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Madiun	4 dokumen	0	Inspektora t Daerah	
6	1	2	2.0	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil reviu	3 dokumen	3 dokumen	402,728,000	402,728,000	132,438,560	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Madiun	3 dokumen	0	Inspektora t Daerah	
6	1	2	2.0	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil Monev	4 dokumen	4 dokumen	19,165,000	19,165,000	19,165,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kota Madiun	4 dokumen	0	Inspektora t Daerah	
6	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	279,331,000	279,331,000	30,053,300							100 Persen	0	
6	1	2	2.0	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	279,331,000	279,331,000	30,053,300	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah KOTA Madiun	1 dokumen	0	Inspektora t Daerah	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100 %	100 %	1,138,997,000	1,138,997,000	912,598,000							100 %	0	
6	1	3	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	6,623,000	6,623,000	6,623,000							2 Dokumen	0	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	1	3	2.0	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	6,623,000	6,623,000	6,623,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Madiun	2 dokumen	0	Inspektora t Daerah
6	1	3	2.0	2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	6 Dokumen	6 Dokumen	1,132,374,000	1,132,374,000	905,975,000						6 Dokumen	0	
6	1	3	2.0	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penilaian dan verifikasi	4 dokumen	4 dokumen	466,539,000	466,539,000	240,140,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah kota madiun	4 dokumen	0	Inspektora t Daerah
6	1	3	2.0	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen monev dan verifikasi	2 dokumen	2 dokumen	665,835,000	665,835,000	665,835,000	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah kota madiun	2 dokumen	0	Inspektora t Daerah
TOTAL									11,311,938,000	11,892,309,200	12,410,489,610							7,950,430,005	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				12,610,571,820	12,878,616,020	15,490,612,825							14,320,542,887	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Skor	A Skor	11,536,794,226	11,536,794,226	14,541,614,281							A Skor	12,701,833,766
7	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	68,784,000	68,784,000	15,000,000							100 %	72,223,200



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Paerah	20 dokumen	20 dokumen	68,784,000	68,784,000	15,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	20 dokumen	72,223,200	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen adminisrasi keuangan	100 %	100 %	9,479,554,103	9,508,666,943	12,327,792,383						100 %	10,381,218,510	
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	9,477,554,103	9,506,666,943	12,325,792,383	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	10,379,118,510	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	13 Dokumen	2,100,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	7,200,000	7,200,000	7,200,000						100 %	7,560,000	
7	1	1	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	presentase peserta yang paham	100 %	100 %	7,200,000	7,200,000	7,200,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	7,560,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	140,715,000	128,715,000	168,915,000						100 %	143,751,000	
7	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan	100 %	100 %	140,715,000	128,715,000	168,915,000	Kota Madiun, Manguharjo	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	143,751,000	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						kebutuhan perjalanan dinas							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					
7	1	1	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	149,029,500	149,029,500	784,879,534						100 %	350,000,000		
7	1	1	2.0	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %	100 %	16,632,000	16,632,000	16,632,000	Kota Madiun, Manguharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	50,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.0	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang representatif	100 %	100 %	125,000,000	125,000,000	122,999,800	Kota Madiun, Manguharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	100,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.0	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	100 %	100 %	7,397,500	7,397,500	645,247,734	Kota Madiun, Manguharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	200,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1,487,886,720	1,470,773,880	900,512,406							100 %	1,562,281,056	
7	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengkapan	100 %	100 %	1,487,886,720	1,470,773,880	900,512,406	Kota Madiun, Manguharjo	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	1,562,281,056	Kecamatan Manguharjo	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						pan kantor yang representatif						Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Transformasi Publik						
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	203,624,903	203,624,903	337,314,958						100 %	184,800,000		
7	1	1	2.0	9	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas operasional/lapangan yang layak digunakan	100 %	100 %	59,559,200	59,559,200	59,559,200	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	64,500,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	98,765,703	98,765,703	192,613,743	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	75,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	1	2.0	9	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	45,300,000	45,300,000	85,142,015	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	45,300,000	Kecamatan Manguharjo	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	62,205,440	62,205,440	5,000,000						90,50 skor	65,315,712		
7	1	2	2.0	3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	62,205,440	62,205,440	5,000,000							100 %	65,315,712	
7	1	2	2.0	3	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam	Jumlah koordinasi/pertemuan	8 kali	8 kali	62,205,440	62,205,440	5,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	8 kali	65,315,712	Kecamatan Manguharjo	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								Alokasi Umum	Transformasi Publik					
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	269,600,360	282,113,460	224,908,020						18 Usulan	283,080,378	
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	269,600,360	282,113,460	224,908,020						100 %	283,080,378	
7	1	3	2.0	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Prosentase usulan musrenbang Manguharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	12 %	12 %	269,600,360	282,113,460	224,908,020	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	12 %	283,080,378	Kecamatan Manguharjo
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	100 %	560,045,300	815,576,400	611,658,110						100 %	1,079,290,212	
7	1	4	2.0	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	324,385,300	324,385,300	177,672,450						100 %	831,847,212	
7	1	4	2.0	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/pertemuan	12 Kali	12 Kali	324,385,300	324,385,300	177,672,450	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	12 Kali	831,847,212	Kecamatan Manguharjo
7	1	4	2.0	2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	Persentase Hasil Koordinasi Yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	235,660,000	491,191,100	433,985,660						100 %	247,443,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Peraturan Kepala Daerah														
7	1	4	2.0	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/pertemuan	14 Kali	14 Kali	235,660,000	491,191,100	433,985,660	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	14 Kali	247,443,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	100 %	181,926,494	181,926,494	107,432,414						100 %	191,022,819	
7	1	5	2.0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbauan Kepala daerah yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	181,926,494	181,926,494	107,432,414						100 %	191,022,819	
7	1	5	2.0	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Sosialisasi	2 kali	2 kali	111,926,494	111,926,494	37,432,414	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	2 kali	117,522,819	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Kesatuan Republik Indonesia														
7	1	5	2.0	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100 %	100 %	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	57,750,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	5	2.0	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 doku men	2 doku men	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	2 doku men	15,750,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				1,009,172,787	1,111,781,427	1,606,042,293							1,058,438,570	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	659,172,787	944,241,927	788,549,877							90,50 skor	750,938,570
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	659,172,787	944,241,927	788,549,877							100 %	750,938,570
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan Manguharjo sesuai ketentuan	100 %	100 %	659,172,787	944,241,927	788,549,877	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	750,938,570	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Jumlah Usulan Prioritas	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	167,539,500	817,492,416							18 Usulan	307,500,000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD														
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	167,539,500	817,492,416					100 %	307,500,000		
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	40 %	40 %	302,000,000	67,539,500	708,581,316	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembang-kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	40 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	40 %	40 %	48,000,000	100,000,000	108,911,100	Kota Madiun, Manguharjo, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembang-kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	40 %	157,500,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				943,902,300	1,270,401,405	1,290,553,933						1,021,121,717		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	593,902,300	737,064,585	585,752,113						90,50 skor	671,121,717	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	593,902,300	737,064,585	585,752,113						100 %	671,121,717	

1					2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	593,902,300	737,064,585	585,752,113	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanhmandan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	671,121,717	Kecamatan Manguharjo		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	533,336,820	704,801,820							18 Usulan	350,000,000		
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	533,336,820	704,801,820							100 %	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket	3 paket	175,900,000	322,785,800	494,250,800	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	3 paket	200,000,000	Kecamatan Manguharjo		
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	35 %	35 %	174,100,000	210,551,020	210,551,020	Kota Madiun, Manguharjo, Sogaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	35 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN				907,251,628	950,050,833	953,822,283									981,740,417	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	557,251,628	680,050,833	536,231,883								90,50 skor	631,740,417	



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Terselenggaranya yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	557,251,628	680,050,833	536,231,883					100 %	631,740,417		
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	557,251,628	680,050,833	536,231,883	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	631,740,417	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	270,000,000	417,590,400					18 Usulan	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	270,000,000	417,590,400					100 %	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket	3 paket	222,500,000	129,000,000	276,590,400	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	3 paket	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	30 %	30 %	127,500,000	141,000,000	141,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Patihan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi	0	30 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Alokasi Umum	dan Menjamin Pemerataan	kreatif, dan ekonomi digital				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				879,846,609	938,524,130	1,521,115,990							950,900,237	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	529,846,609	721,326,580	535,335,300							90,50 skor	600,900,237
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Tersesainya rekomendasi dikelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	529,846,609	721,326,580	535,335,300							100 %	600,900,237
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase tersesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	529,846,609	721,326,580	535,335,300	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	600,900,237	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	217,197,550	985,780,690							18 Usulan	350,000,000
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	217,197,550	985,780,690							100 %	350,000,000
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket	3 paket	175,000,000	48,850,000	817,433,140	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Transfer Umum-Dana	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi	0	3 paket	200,000,000	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
													Alokasi Umum	dan Menjamin Pemerataan	dan kreatif, dan ekonomi digital					
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	30 %	30 %	175,000,000	168,347,550	168,347,550	Kota Madiun, Manguharjo, Ngegong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	30 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				1,014,426,063	918,822,235	857,906,723							1,111,351,724		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	664,426,063	755,447,545	550,232,033							90,50 skor	761,351,724	
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	664,426,063	755,447,545	550,232,033							100 %	761,351,724	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase terselenggaranya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	664,426,063	755,447,545	550,232,033	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	761,351,724	Kecamatan Manguharjo	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	163,374,690	307,674,690							18 Usulan	350,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	163,374,690	307,674,690					100 %	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 pake t	3 pake t	197,088,320	48,106,905	192,406,905	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	3 pake t	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	40 %	40 %	152,911,680	115,267,785	115,267,785	Kota Madiun, Manguharjo, Winongo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	40 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				997,414,045	1,084,596,000	1,550,506,198							1,079,558,375	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	647,414,045	837,376,000	634,453,310						90,50 skor	729,558,375	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	647,414,045	837,376,000	634,453,310						100 %	729,558,375	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	prosentase terselesaikannya permohonan	100 %	100 %	647,414,045	837,376,000	634,453,310	Kota Madiun, Manguharjo	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	729,558,375	Kecamatan Manguharjo

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rekomendasi di Kelurahan							Madiun Lor	Alokasi Umum	Transformasi Publik					
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	247,220,000	916,052,888						18 Usulan	350,000,000		
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	247,220,000	916,052,888						100 %	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket	3 paket	225,600,000	106,120,000	786,952,888	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	3 paket	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	40 %	40 %	124,400,000	141,100,000	129,100,000	Kota Madiun, Manguharjo, Madiun Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	40 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN			900,740,057	900,724,579	1,262,140,791							974,412,635		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	550,740,057	720,672,579	537,463,619						90,50 skor	624,412,635	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya	100 %	100 %	550,740,057	720,672,579	537,463,619						100 %	624,412,635	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan													
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	550,740,057	720,672,579	537,463,619	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	624,412,635	Kecamatan Manguharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	180,052,000	724,677,172						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	180,052,000	724,677,172						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket	3 paket	220,385,000	51,939,800	599,591,492	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	3 paket	200,000,000	Kecamatan Manguharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	35 %	35 %	129,615,000	128,112,200	125,085,680	Kota Madiun, Manguharjo, Pangongangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	35 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1			KECAMATAN				1,123,160,291	1,216,229,000	2,012,084,000							1,269,726,689		
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	773,160,291	905,300,000	713,622,000							90,50 skor	919,726,689	
7	1	2	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	773,160,291	905,300,000	713,622,000							100 %	919,726,689	
7	1	2	2.0	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	773,160,291	905,300,000	713,622,000	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0		100 %	919,726,689	Kecamatan Manguharjo
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	310,929,000	1,298,462,000							18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	310,929,000	1,298,462,000							100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket	3 paket	310,000,000	253,920,000	1,247,541,000	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0		3 paket	200,000,000	Kecamatan Manguharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan	30 %	30 %	40,000,000	57,009,000	50,921,000	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Lor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	30 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				1,050,805,004	1,098,410,144	1,157,972,158							1,143,287,905		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	92,05 skor	90,50 skor	700,805,004	826,072,739	624,596,903							90,50 skor	793,287,905	
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	700,805,004	826,072,739	624,596,903							100 %	793,287,905	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	700,805,004	826,072,739	624,596,903	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	0	100 %	793,287,905	Kecamatan Manguharjo	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	272,337,405	533,375,255							18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	350,000,000	272,337,405	533,375,255							100 %	350,000,000	



1					2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi	3 paket	3 paket	175,000,000	97,337,405	358,375,255	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	3 paket	200,000,000	Kecamatan Manguharjo															
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	45 %	45 %	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Madiun, Manguharjo, Nambangan Kidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	0	45 %	150,000,000	Kecamatan Manguharjo															
TOTAL									21,437,290,604	22,368,155,773	27,702,757,194							23,911,081,156																
7					UNSUR KEWILAYAHAN																													
7	1				KECAMATAN				11,584,274,828	11,817,498,668	13,861,684,706							17,105,304,833																
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	10,480,915,838	10,620,493,313	12,971,163,511							A Skor	15,525,793,358															
7	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80 Skor	80 Skor	65,762,400	68,913,300	15,129,300							80 Skor	69,050,520															
7	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	57,776,800	57,776,800	3,992,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi dan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	6 dokumen	23,016,840	Kecamatan Kartoharjo															
7	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen pengendalian perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	3,992,800	7,027,000	7,027,000	Kota Madiun, Kartoharjo	Dana Transfer Umum -	Memperkuat Stabilitas dan Polhukam	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	12 dokumen	23,016,840	Kecamatan Kartoharjo															

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik		Kecamatan Kartoharjo			
7	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	3,992,800	4,109,500	4,109,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	2 dokumen	23,016,840	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	100 %	8,381,822,530	8,381,822,530	11,067,196,370						100 %	11,880,912,500	
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	100 %	8,379,822,530	8,379,822,530	11,065,196,370	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	11,878,912,500	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	13 dokumen	2,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	7,000,000	7,192,555	12,936,720						100 %	7,350,000	
7	1	1	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase peserta yang paham	100 %	100 %	7,000,000	7,192,555	12,936,720	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	7,350,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	112,996,000	124,246,000	124,596,000						100 %	138,900,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas (penghitungan = realisasi/target perjalanan dinas)	100 %	100 %	112,996,000	124,246,000	124,596,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	138,900,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	375,341,000	387,509,000	668,212,563						100 %	1,400,000,000	
7	1	1	2.0 7	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase gedung kantor yang representatif	100 %	100 %	200,000,000	199,300,000	198,600,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	1,200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan peralatan gedung kantor	100 %	100 %	175,341,000	188,209,000	469,612,563	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1,400,630,163	1,499,143,928	926,124,158						100 %	1,906,369,338	
7	1	1	2.0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase pemenuhan jasa peralatan/perlengkapan kantor yang representatif	100 %	100 %	1,400,630,163	1,499,143,928	926,124,158	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	1,906,369,338	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													Alokasi Umum	Transformasi Publik					
7	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	137,363,745	151,666,000	156,968,400						100 %	123,211,000	
						Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %									100 %		
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyang layak digunakan	100 %	100 %	25,251,000	25,251,000	27,253,800	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	25,251,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak digunakan	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	12,949,600	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	10,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase gedung yang layak digunakan	100 %	100 %	67,152,745	74,800,000	75,150,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	53,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	persentase sarana prasarana gedung	100 %	100 %	34,960,000	41,615,000	41,615,000	Kota Madiun, Kartoharjo,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukanham	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai Kecamatan Kartoharjo	100 %	34,960,000	Kecamatan Kartoharjo

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kantor atau Bangunan Lainnya	yang layak digunakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	dan Transformasi Publik					
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	62,205,440	64,632,000	7,426,560						87,75 skor	65,315,712	
7	1	2	2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	62,205,440	64,632,000	7,426,560						100 %	65,315,712	
7	1	2	2.0 3	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi / pertemuan	3 pertemuan	3 pertemuan	62,205,440	64,632,000	7,426,560	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	3 pertemuan	65,315,712	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	259,875,650	259,000,770	201,795,330						18 Usulan	315,000,000	
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	259,875,650	259,000,770	201,795,330						100 %	315,000,000	
7	1	3	2.0 2	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase usulan musrenbang Kartoharjo yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	100 %	100 %	259,875,650	259,000,770	201,795,330	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	100 %	315,000,000	Kecamatan Kartoharjo

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	100 %	608,688,850	700,192,835	585,145,155						100 %	967,860,487	
7	1	4	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	382,507,140	409,312,440	351,470,200						100 %	730,370,487	
7	1	4	2.0 1	2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/ Pertemuan	24 pert emuan	24 pert emuan	382,507,140	409,312,440	351,470,200	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	24 pert emuan	730,370,487	Kecamatan Kartoharjo
7	1	4	2.0 2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	226,181,710	290,880,395	233,674,955						100 %	237,490,000	
7	1	4	2.0 2	1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi / pertemuan	8 perte muan	8 perte muan	226,181,710	290,880,395	233,674,955	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	8 perte muan	237,490,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	100 %	172,589,050	173,179,750	96,154,150						100 %	231,335,276	
7	1	5	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Persentase Himbauan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	172,589,050	173,179,750	96,154,150						100 %	231,335,276	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					Penugasan Kepala Daerah															
7	1	5	2.0	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Sosialisasi	1 kegiatan	1 kegiatan	31,446,650	31,968,050	31,968,050	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	1 kegiatan	100,000,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	5	2.0	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase konflik yang terselesaikan	100 %	100 %	56,872,800	56,249,100	56,249,100	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	100 %	86,245,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	5	2.0	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Buku Profil Kelurahan dan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen	84,269,600	84,962,600	7,937,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun	2 dokumen	45,090,276	Kecamatan Kartoharjo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				920,556,690	1,119,631,810	1,919,377,936							1,036,443,842		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	672,956,040	786,013,300	572,600,020							87,75 skor	686,443,842	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	672,956,040	786,013,300	572,600,020						100 %	686,443,842	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	672,956,040	786,013,300	572,600,020	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	100 %	686,443,842	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	247,600,650	333,618,510	1,346,777,916						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	247,600,650	333,618,510	1,346,777,916						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	217,437,500	300,655,360	1,314,564,766	Kota Madiun, Kartoharjo, Oro-oro Ombo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan	100 %	100 %	30,163,150	32,963,150	32,213,150	Kota Madiun, Kartoharjo,	Dana Transfer Umum-Dana	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor	Masyarakat Kelurahan Oro - oro Ombo	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						pemberdayaan masyarakat						Oro-oro Ombo	Alokasi Umum	Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				910,181,546	1,030,844,771	1,284,967,324							350,000,568		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	560,181,546	700,869,400	488,956,120							87,75 skor	568	
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	560,181,546	700,869,400	488,956,120							100 %	568	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	560,181,546	700,869,400	488,956,120	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan masyarakat Kelurahan Sukosari	100 %	568	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	329,975,371	796,011,204							18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	350,000,000	329,975,371	796,011,204							100 %	350,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	316,340,000	296,115,371	762,901,204	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat kelurahan Sukosari	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	33,660,000	33,860,000	33,110,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Sukosari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat kelurahan Sukosari	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				1,091,948,355	1,202,451,881	1,665,667,584							1,109,507,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	741,948,355	852,451,881	645,224,181							87,75 skor	759,507,000	
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	741,948,355	852,451,881	645,224,181							100 %	759,507,000	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	741,948,355	852,451,881	645,224,181	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan masyarakat Kelurahan Klegan	100 %	759,507,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	350,000,000	1,020,443,403						18 Usulan	350,000,000		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD														
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	350,000,000	350,000,000	1,020,443,403						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	322,000,000	317,161,400	988,354,803	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Klegen	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	28,000,000	32,838,600	32,088,600	Kota Madiun, Kartoharjo, Klegen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Klegen	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				1,078,815,767	1,144,105,915	1,260,350,235							1,095,100,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	728,815,767	794,105,915	609,180,235						87,75 skor	745,100,000	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87.75 skor	87.75 skor	728,815,767	794,105,915	609,180,235						87.75 skor	745,100,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %									100 %		
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	728,815,767	794,105,915	609,180,235	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	100 %	745,100,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	350,000,000	651,170,000						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	350,000,000	350,000,000	651,170,000						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	200,000,000	200,000,000	502,720,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	150,000,000	150,000,000	148,450,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Rejomulyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Rejomulyo	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Menjamin Pemerataan					
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				978,459,777	957,381,082	947,799,088							981,250,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	628,459,777	759,142,972	576,868,879							87,75 skor	631,250,000
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	87.75 skor	87.75 skor	628,459,777	759,142,972	576,868,879							87.75 skor	631,250,000
						Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %										100 %	
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	628,459,777	759,142,972	576,868,879	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Pilangbango	100 %	631,250,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usu lan	18 Us ulan	350,000,000	198,238,110	370,930,209							18 Us ulan	350,000,000
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	350,000,000	198,238,110	370,930,209							100 %	350,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	316,116,410	159,954,930	333,397,029	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Pilangbango	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	33,883,590	38,283,180	37,533,180	Kota Madiun, Kartoharjo, Pilangbango	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Pilangbango	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				858,640,051	969,728,895	807,869,715							974,895,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	584,340,251	693,000,000	533,590,820							87,75 skor	624,895,000	
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	584,340,251	693,000,000	533,590,820							100 %	624,895,000	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	584,340,251	693,000,000	533,590,820	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	100 %	624,895,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang	18 Usulan	18 Usulan	274,299,800	276,728,895	274,278,895							18 Usulan	350,000,000	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD														
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	274,299,800	276,728,895	274,278,895					100 %	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	219,299,800	225,750,000	224,050,000	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	55,000,000	50,978,895	50,228,895	Kota Madiun, Kartoharjo, Tawangrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Tawangrejo	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				1,006,194,395	1,093,288,310	1,693,480,200						1,113,875,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	662,294,395	805,261,435	590,609,515						87,75 skor	763,875,000	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	662,294,395	805,261,435	590,609,515						100 %	763,875,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100 %	100 %	662,294,395	805,261,435	590,609,515	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Kanigoro	100 %	763,875,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	343,900,000	288,026,875	1,102,870,685						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	343,900,000	288,026,875	1,102,870,685						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	250,000,000	238,494,375	1,054,088,185	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	93,900,000	49,532,500	48,782,500	Kota Madiun, Kartoharjo, Kanigoro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Kanigoro	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				973,764,935	1,069,339,992	1,367,072,867							994,714,217	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	623,772,900	736,288,852	551,052,361						87,75 skor	644,714,217	



1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya yang tidak rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	623,772,900	736,288,852	551,052,361						100 %	644,714,217	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100 %	100 %	623,772,900	736,288,852	551,052,361	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	100 %	644,714,217	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	349,992,035	333,051,140	816,020,506						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	349,992,035	333,051,140	816,020,506						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	2 paket	2 paket	298,419,280	299,119,280	782,838,646	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo Kota Madiun	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan	100 %	100 %	51,572,755	33,931,860	33,181,860	Kota Madiun, Kartoharjo, Kartoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor	Masyarakat Kelurahan Kartoharjo	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						pemberdayaan masyarakat							Alokasi Umum	Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Kota Madiun				
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				968,904,602	1,044,726,250	1,208,544,746							979,700,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87,75 skor	87,75 skor	618,904,602	711,089,645	517,632,605							87,75 skor	629,700,000	
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	618,904,602	711,089,645	517,632,605							100 %	629,700,000	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terselesaikannya permohonan rekomendasi	100 %	100 %	618,904,602	711,089,645	517,632,605	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat Kelurahan Kelun	100 %	629,700,000	Kecamatan Kartoharjo	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	350,000,000	333,636,605	690,912,141							18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	350,000,000	333,636,605	690,912,141							100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana	2 paket	2 paket	312,709,500	290,181,755	648,207,291	Kota Madiun,	Dana Transfer Umum-	Mengembangkan Wilayah untuk	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan	Masyarakat Kelurahan Kelun	2 paket	200,000,000	Kecamatan Kartoharjo	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						kelurahan yang terpenuhi						Kartoharjo, Kelun	Dana Alokasi Umum	Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital					
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	37,290,500	43,454,850	42,704,850	Kota Madiun, Kartoharjo, Kelun	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat Kelurahan Kelun	100 %	150,000,000	Kecamatan Kartoharjo	
TOTAL									20,371,740,946	21,448,997,574	26,016,814,401							25,740,790,460		
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				12,458,524,277	12,524,103,097	15,095,305,350							15,720,522,024		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	A Skor	11,329,439,485	11,329,439,485	14,165,847,894						A Skor	14,259,943,624		
7	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	78,787,547	78,787,547	5,183,387							100 %	58,967,520	
7	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	78,787,547	78,787,547	5,183,387	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kecamatan Taman	12 dokumen	58,967,520	Kecamatan Taman	
7	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen	100 %	100 %	9,850,172,584	9,850,172,584	12,406,038,104							100 %	12,406,038,104	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						administrasi keuangan													
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN	100 %	100 %	9,850,172,584	9,850,172,584	12,406,038,104	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati se Kecamatan Taman	100 %	12,406,038,104	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	100 %	18,151,972	18,151,972	18,151,972						100 %	18,152,000	
7	1	1	2.0	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta yang memahami	100 %	100 %	18,151,972	18,151,972	18,151,972	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati se Kecamatan Taman	100 %	18,152,000	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	1,195,184,282	1,195,184,282	959,308,042						100 %	1,116,838,000	
7	1	1	2.0	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	1,096,612,282	1,096,612,282	881,074,042	Kota Madiun, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Kecamatan Taman	100 %	1,019,045,000	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	98,572,000	98,572,000	78,234,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Kecamatan Taman	100 %	97,793,000	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang	100 %	100 %	2,195,100	2,195,100	562,218,389						100 %	475,000,000	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						milik daerah urusan pemerintahan													
7	1	1	2.0	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	11 Unit	11 Unit	357,600	357,600	357,600	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati se Kecamatan Taman	11 Unit	275,000,000	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor/Bangunan	2 Paket	2 Paket	1,837,500	1,837,500	561,860,789	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati se Kecamatan Taman	2 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	184,948,000	184,948,000	214,948,000						100 %	184,948,000	
7	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %	100 %	48,448,000	48,448,000	48,448,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	karyawan Karyawati Kecamatan Taman	100 %	48,448,000	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	100,000,000	100,000,000	130,000,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	karyawan Karyawati Kecamatan Taman	100 %	100,000,000	Kecamatan Taman
7	1	1	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	36,500,000	36,500,000	36,500,000	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	karyawan Karyawati Kecamatan Taman	100 %	36,500,000	Kecamatan Taman

1				2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	83,408,827	83,408,827	26,203,387								88,398 skor	83,440,970	
7	1	2	2.0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	83,408,827	83,408,827	26,203,387								100 %	83,440,970	
7	1	2	2.0 3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Pertemu an	3 kali	3 kali	83,408,827	83,408,827	26,203,387	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman		3 kali	83,440,970	Kecamatan Taman	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usu lan	18 Us ulan	291,351,905	291,351,905	248,343,809								18 Us ulan	274,611,840	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	291,351,905	291,351,905	248,343,809								100 %	274,611,840	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase usulan musrenbang taman yang diprioritaskan dalam musrenbang kota	100 %	100 %	291,351,905	291,351,905	248,343,809	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Stakeholder dan Masyarakat		100 %	274,611,840	Kecamatan Taman	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Hasil Pengkoordinasian Ketentraman dan	100 %	100 %	597,606,270	663,185,090	565,609,600								100 %	962,605,940	

1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketertiban Umum di Kecamatan													
7	1	4	2.0	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	437,352,670	304,789,150	272,419,100						100 %	792,235,440	
7	1	4	2.0	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	24 kali	24 kali	437,352,670	304,789,150	272,419,100	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Taman terutama Toga dan Tomas	24 kali	792,235,440	Kecamatan Taman
7	1	4	2.0	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	160,253,600	358,395,940	293,190,500						100 %	170,370,500	
7	1	4	2.0	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Pertemuan	8 kali	8 kali	160,253,600	358,395,940	293,190,500	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kecamatan Taman dan 3 Pilar	8 kali	170,370,500	Kecamatan Taman
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan PD lain	100 %	100 %	156,717,790	156,717,790	89,300,660						100 %	139,919,650	
7	1	5	2.0	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbuan kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	156,717,790	156,717,790	89,300,660						100 %	139,919,650	
7	1	5	2.0	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Sosialisasi	1 kali	1 kali	91,906,300	91,906,300	51,989,500	Kota Madiun,	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati	1 kali	57,293,130	Kecamatan Taman

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								Taman, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukamham dan Transformasi Publik					Kecamatan dan Toga Tomas	
7	1	5	2.0	5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Konflik yang terselesaikan	100 %	100 %	28,272,000	28,272,000	35,348,950	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kecamatan dan Toga Tomas	100 %	56,813,560		Kecamatan Taman	
7	1	5	2.0	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah buku profil kelurahan dan monografi kecamatan dan kelurahan	2 doku men	2 doku men	36,539,490	36,539,490	1,962,210	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kecamatan dan Toga Tomas	2 doku men	25,812,960		Kecamatan Taman	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN				1,002,591,085	1,081,791,085	1,647,827,368									1,074,653,550	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	724,653,550	803,853,550	702,356,533									88,398 skor	724,653,550
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase terselesaikannya	100 %	100 %	724,653,550	803,853,550	702,356,533									100 %	724,653,550



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan													
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Tersesainya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	724,653,550	803,853,550	702,356,533	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan	100 %	724,653,550	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	277,937,535	277,937,535	945,470,835						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	277,937,535	277,937,535	945,470,835						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	205,000,000	205,000,000	863,812,500	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	72,937,535	72,937,535	81,658,335	Kota Madiun, Taman, Mojorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN				1,289,044,130	1,383,844,295	1,506,452,065							1,049,676,380	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	699,676,380	794,476,545	573,232,065						88,398 skor	699,676,380	
7	1	2	2.0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	699,676,380	794,476,545	573,232,065							100 %	699,676,380
7	1	2	2.0	3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	699,676,380	794,476,545	573,232,065	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan	100 %	699,676,380	Kecamatan Taman
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	589,367,750	589,367,750	933,220,000							18 Usulan	350,000,000
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	589,367,750	589,367,750	933,220,000							100 %	350,000,000
7	1	3	2.0	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	515,764,750	515,764,750	861,117,000	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Menjamin Pemerataan					
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	73,603,000	73,603,000	72,103,000	Kota Madiun, Taman, Pandean	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				908,000,000	1,017,082,000	1,409,158,490							987,877,740	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	658,000,000	767,082,000	551,817,520							88,398 skor	637,877,740
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	658,000,000	767,082,000	551,817,520							100 %	637,877,740
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	658,000,000	767,082,000	551,817,520	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan	100 %	637,877,740	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	250,000,000	250,000,000	857,340,970							18 Usulan	350,000,000
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam	100 %	100 %	250,000,000	250,000,000	857,340,970							100 %	350,000,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kegiatan pemberdayaan masyarakat													
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	175,000,000	175,000,000	783,090,970	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	74,250,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				709,236,197	765,325,000	1,368,198,470							817,500,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	436,111,197	526,312,500	518,810,070							88,398 skor	467,500,000
7	1	2	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	436,111,197	526,312,500	518,810,070							100 %	467,500,000
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	436,111,197	526,312,500	518,810,070	Kota Madiun, Taman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan	100 %	467,500,000	Kecamatan Taman

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	273,125,000	239,012,500	849,388,400						18 Usulan	350,000,000		
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	273,125,000	239,012,500	849,388,400						100 %	350,000,000		
7	1	3	2.0 2	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	200,125,000	200,125,000	810,500,900	Kota Madiun, Taman, Kuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.0 2	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	73,000,000	38,887,500	38,887,500	Kota Madiun, Taman, Kuncen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman	
7				UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1			KECAMATAN				1,041,742,260	1,219,994,648	1,970,612,549							1,116,742,260		
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	766,742,260	944,994,648	748,876,594							88,398 skor	766,742,260	
7	1	2	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Persentase terselesaikannya rekomendasi di	100 %	100 %	766,742,260	944,994,648	748,876,594							100 %	766,742,260	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kelurahan sesuai ketentuan													
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terelesaiannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	766,742,260	944,994,648	748,876,594	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan	100 %	766,742,260	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	275,000,000	275,000,000	1,221,735,955						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	275,000,000	275,000,000	1,221,735,955						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	200,000,000	200,000,000	1,080,860,955	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	140,875,000	Kota Madiun, Taman, Manisrejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN														

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	1				KECAMATAN			953,554,140	1,055,757,228	1,467,596,479							1,035,722,740			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	685,722,740	787,925,828	725,800,521						88,398 skor	685,722,740		
7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di Kelurahan sesuai kententuan	100 %	100 %	685,722,740	787,925,828	725,800,521						100 %	685,722,740		
7	1	2	2.0 2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	685,722,740	787,925,828	725,800,521	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati dan Masyarakat Kelurahan	100 %	685,722,740	Kecamatan Taman	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usu lan	18 Us ulan	267,831,400	267,831,400	741,795,958							18 Us ulan	350,000,000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masayarakat	100 %	100 %	267,831,400	267,831,400	741,795,958							100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Pake t	3 Pake t	200,000,000	200,000,000	674,714,558	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Pake t	200,000,000	Kecamatan Taman	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	67,831,400	67,831,400	67,081,400	Kota Madiun, Taman, Kejuron	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				898,675,100	1,005,589,826	<b>1,589,923,333</b>							1,118,731,250		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	623,675,100	730,589,826	538,780,426							88,398 skor	768,731,250	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	623,675,100	730,589,826	538,780,426							100 %	768,731,250	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	623,675,100	730,589,826	538,780,426	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan	100 %	768,731,250	Kecamatan Taman	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	275,000,000	275,000,000	<b>1,051,142,907</b>							18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan	100 %	100 %	275,000,000	275,000,000	<b>1,051,142,907</b>							100 %	350,000,000	



1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						pemberdayaan masyarakat														
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	200,000,000	200,000,000	976,892,907	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Stakeholder dan Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman	
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	74,250,000	Kota Madiun, Taman, Josenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Stakeholder dan Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				936,735,100	1,041,106,410	2,077,329,630							973,675,100		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	623,675,100	728,046,410	722,303,770							88,398 skor	623,675,100	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase terselesaikannya rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100 %	100 %	623,675,100	728,046,410	722,303,770							100 %	623,675,100	
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terselesaikannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	623,675,100	728,046,410	722,303,770	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan	100 %	623,675,100	Kecamatan Taman	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	313,060,000	313,060,000	1,355,025,860						18 Usulan	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	313,060,000	313,060,000	1,355,025,860					100 %	350,000,000		
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	238,060,000	238,060,000	1,280,775,860	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	74,250,000	Kota Madiun, Taman, Demangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN			1,141,500,000	1,295,008,700	1,856,284,940							1,066,650,740		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	88,398 skor	88,398 skor	710,000,000	863,508,700	704,934,940						88,398 skor	716,650,740	
7	1	2	2.0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Persentase terselsaikannya rekomendasi di	100 %	100 %	710,000,000	863,508,700	704,934,940						100 %	716,650,740	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	kelurahan sesuai ketentuan													
7	1	2	2.0	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Terelesaiannya permohonan rekomendasi di Kelurahan	100 %	100 %	710,000,000	863,508,700	704,934,940	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukamham dan Transformasi Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Karyawan Karyawati Kelurahan Mojorejo	100 %	716,650,740	Kecamatan Taman
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan yang Terakomodir dalam RKPD	18 Usulan	18 Usulan	431,500,000	431,500,000	1,151,350,000						18 Usulan	350,000,000	
7	1	3	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	431,500,000	431,500,000	1,151,350,000						100 %	350,000,000	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terpenuhi	3 Paket	3 Paket	356,500,000	356,500,000	1,076,350,000	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	3 Paket	200,000,000	Kecamatan Taman
7	1	3	2.0	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Madiun, Taman, Taman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ketahanan Ekonomi melalui Peningkatan kontribusi sektor unggulan, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital	Masyarakat	100 %	150,000,000	Kecamatan Taman
TOTAL									21,339,602,289	22,389,602,289	<b>29,988,688,674</b>							24,961,751,784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
8																	
8	0						7,347,363,564	7,914,931,714	8,614,931,714						7,440,099,981		
8	0	0					3,852,158,697	3,852,008,697	4,694,363,427					A Skor	3,944,895,114		
8	0	0	2.0				30,750,000	30,600,000	30,600,000					100 %	30,750,000		
8	0	0	2.0	0			30,750,000	30,600,000	30,600,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Bakesbangpol	12 dokumen	30,750,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.0				2,987,145,114	2,987,145,114	3,888,556,234					100 %	2,987,145,114		
8	0	0	2.0	0			2,987,145,114	2,987,145,114	3,888,556,234	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi	Baksbangpol	100 %	2,987,145,114	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															masyarakat yang kondusif					
8	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	100 %	762,263,583	762,263,583	653,207,193						100 %	850,000,000		
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase pemenuhan kebutuhan dan peralatan kantor yang representatif	100 %	100 %	712,263,583	712,263,583	453,207,193	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Bakesbangp ol	100 %	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	200,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Bakesbangp ol	100 %	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	100 %	72,000,000	72,000,000	122,000,000						100 %	77,000,000		
8	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang layak digunakan	100 %	100 %	27,000,000	27,000,000	37,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Bakesbangp ol	100 %	27,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase gedung kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	30,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Bakesbangpol	100 %	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase sarana prasarana kantor yang layak digunakan	100 %	100 %	35,000,000	35,000,000	55,000,000	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Bakesbangpol	100 %	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	344,302,347	344,152,347	393,454,997						100 %	344,302,347	
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	150 orang	150 orang	344,302,347	344,152,347	393,454,997						150 orang	344,302,347	
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan	150 orang	150 orang	344,302,347	344,152,347	393,454,997	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	150 orang	344,302,347	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	0	0		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase pendidikan politik kepada Partai Politik	100 %	100 %	871,058,100	1,139,076,250	1,009,259,170						100 %	871,058,100		
8	0	0	2.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase kegiatan peendidikan politik kepada masyarakat	80 %	80 %	871,058,100	1,139,076,250	1,009,259,170						80 %	871,058,100		
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah peserta pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol	11 par pol	11 par pol	725,062,000	993,080,150	978,656,030	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembanguna n Kebudayaan	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Masyarakat Kota Maiun	11 par pol	725,062,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah														
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	125 orang	125 orang	145,996,100	145,996,100	30,603,140	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Maiun	125 orang	145,996,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Status Kelembagaan Orkemas yang Berbadan Hukum	71 %	71 %	222,985,000	222,985,000	254,712,640						71 %	222,985,000	
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan	75 %	75 %	222,985,000	222,985,000	254,712,640						75 %	222,985,000	
8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	109 orang	109 orang	222,985,000	222,985,000	254,712,640	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk	Ormas/LS M	109 orang	222,985,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah										menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif				
8	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	100 %	553,661,370	553,661,370	565,160,490						100 %	553,661,370	
8	0	0	2.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali	3 kali	553,661,370	553,661,370	565,160,490						3 kali	553,661,370	
8	0	0	2.0	0 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	100 orang	60,000,000	60,000,000	21,138,360	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	100 orang	60,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	0	0	2.0	0 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta pelatihan dan penyuluhan	200 orang	200 orang	493,661,370	493,661,370	544,022,130	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukanham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif	Masyarakat Kota Madiun	200 orang	493,661,370	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	0	0		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Konflik horisontal di dalam masyarakat	0 Konflik	0 Konflik	1,503,198,050	1,803,048,050	1,697,980,990						0 Konflik	1,503,198,050	
8	0	0	2.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konfl ik	0 konfl ik	1,503,198,050	1,803,048,050	1,697,980,990						0 konfl ik	1,503,198,050	
8	0	0	2.0	0 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah peserta rakor	1055 o rang	1055 o rang	1,503,198,050	1,803,048,050	1,697,980,990	Kota Madiun, Taman, Banjarejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan Transformasi Publik	peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang konduusif	Masyara kat Kota Madiun	1055 o rang	1,503,198,050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL								7,347,363,564	7,914,931,714	8,614,931,714							7,440,099,981	

**Tabel 5.4**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan**  
**Urusan Pemerintahan**

Nomor	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target RPJMD Tahun 2022	Penyesuaian Target RKP	Keterangan
					Tahun 2022*	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>					
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73	3,06-5,11	5,19	Indikator makro
2	PDRB Per Kapita	juta	74,65	60,01	77,65	Indikator makro
3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,87	6,4	6,88	Indikator Tujuan Kota
4	Indeks Gini	Indeks	0,345	0,37	0,332	Indikator Tujuan Kota
5	Angka Kemiskinan	%	5,09	4,87	4,92	Indikator sasaran kota
b	Fokus Kesejahteraan Sosial					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,25	81,7	81,70	Indikator Tujuan Kota
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>					
1	Persentase PMKS yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar minimal	%	91,07%	92%	92%	Indikator Tujuan PD
2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	99,66%	93%	93%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	-	90%	90%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	19%	19%	Indikator Sasaran PD
6	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	-	50%	50%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7
7	persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	99,66%	90%	93%	Indikator Program PD
9	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	-	100%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100%	100%	Lppd
14	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	Lppd
15	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3 layanan	3	3	Lppd
16	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1512 orang	820	820	Lppd
17	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	2 tim	2 (PPT, SLRT)	2 (PPT, SLRT)	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1512 orang	820	820	Lppd
19	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	4 unit	4	4	Lppd
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	orang	1512 orang	160	820	Lppd
21	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2 unit	2	2	Lppd
22	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	245 orang	50	245	Lppd
23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	1 orang	9	9	Lppd
24	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18 peralatan	7	18	Lppd
25	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1 paket	1	1	Lppd
26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	51 orang	165	165	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	27	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	1 orang	1	1	Lppd
	28	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	177 orang	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	Lppd
	29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan social	orang	120 orang	60	120	Lppd
	30	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	2 kegiatan	2	2	Lppd
	31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	6 orang	5	5	Lppd
	32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	107 orang	107	107	Lppd
	33	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	245 orang	222	222	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	34	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	245 orang	15	15	Lppd
	35	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	10 orang	62	64	Lppd
	36	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	5734 orang	3.300	3300	Lppd
	37	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	0	1.000	1.000	Lppd
	38	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	0	0	Lppd
	39	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		5734 paket	0	3300	Lppd
	40	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		4 orang	300	300	Lppd
	41	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		177 orang	176 (Peksos Profesional 2, TKSK 3, TKS 13, PSM 135, TAGANA 23)	177	Lppd
	42	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		107,53%	95	97	Spm
	43	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		137,42%	460	465	Spm
	44	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		204,44%	137	139	Spm
	45	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti		100%	92	94	Spm

1	2	3	4	5	6	7	
	46	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		173,76%	36	36	Spm
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,38	94,44	94,44	Indikator tujuan kota
	2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,18	77,18	77,18	Lanjutan indikator sasaran kota dan Indikator Tujuan PD
	4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	7,83%	13%	13%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	persentase anggaran sub kegiatan tahun N+1 yang di ARG melalui PPRG	%	-	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	persentase keluarga yang berkualitas	%	3%	6%	6%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Prevalensi kekerasan terhadap anak	nilai	-	0,003 nilai	3	Indikator Sasaran PD
	10	persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	%	14,25%	15%	15%	Indikator Program PD
	11	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	5%	10%	10%	Indikator Program PD
	12	Jumlah dokumen Data terpilah gender dan anak	Do kumen	-	1 dokumen	1 dokumen	Indikator Program PD
	13	persentase penanganan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak		-	0,003	0	Indikator Program PD



1	2	3	4	5	6	7
15	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	-	12,50%	12,50%	Indikator Program PD
16	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	-	0,04%	0,04%	Indikator Program PD
17	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14,25%	15%	15%	Lppd
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,002%	0,00%	0.03	Lppd
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)		8,7402%	0,00%	0,00%	Lppd
20	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		36 lembaga	63	63	Lppd
21	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		34 program	96	96	Lppd
22	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		2 media massa	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	4 (Madiun Today, RRI, Radar Madiun, Radio Suara Madiun)	Lppd
23	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		15 lembaga	15	15	Lppd
24	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100%	100%	100%	Lppd
25	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		15 lembaga	15	15	Lppd
26	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		14 lembaga	15	15	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	27	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		1 organisasi	20	25	Lppd
	28	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		45 orang	45	45	Lppd
	29	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		1 lembaga	10	15	Lppd
	30	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		20 lembaga	20	20	Lppd
	31	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		3 kebijakan	2	2	Lppd
	32	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		1 lembaga	1	1	Lppd
	33	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100%	100%	100%	Lppd
c.		Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
I		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>					
	2	Jumlah prestasi pemuda	Prestasi	171 prestasi	16 prestasi	171	Indikator Tujuan PD
	4	Jumlah pemuda/group ditingkat kota yang memenuhi standar kompetisi tingkat provinsi	Pemuda/group	-	30 pemuda/group	30 pemuda/group	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Kualitas Sarpras	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	
	7	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	-	20%	20%	Indikator Program PD
	8	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	-	10%	10%	Indikator Program PD
	9	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	43,10%	40,81%	43,10%	Lppd
	10	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,19%	45,49%	47,19%	Lppd
	11	Peningkatan prestasi olahraga	medali	97	33	70	Lppd
	12	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	135 orang	100	135	Lppd
	13	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang	135 orang	0	135	Lppd
	14	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	100 orang	100	100	Lppd
	15	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
	16	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	158 orang	158	158	Lppd
	17	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	2 event	3	3	Lppd
	18	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	orang	6 orang	7	7	Indikator Lama
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>					

1	2	3	4	5	6	7	
	2	Jumlah kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	-	32 objek	63	63	Indikator Tujuan PD
	4	Jumlah pelaku seni budaya yang melakukan pagelaran	Orang/ group	27 group/ 510 orang	42 orang/group	42 orang/group	Indikator Sasaran PD
	5	jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata		5 objek	5	5	Indikator Sasaran PD
	6	persentase seni budaya yang dilestarikan	%	6,8%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	persentase benda/bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	25%	100%	100%	Indikator Program PD
	9	Persentase SDM, Lembaga dan pranata kesenian yang dibina	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	10	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	Lppd
	11	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	32 obyek	366	366	Lppd
	12	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	32 obyek	366	366	Lppd
	13	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	32 obyek	366	366	Lppd
	14	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	65 orang	100	100	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
15	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	148 cagar budaya	148	148	Lppd
16	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek	20 cagar budaya	20	20	Lppd
17	Layanan perijinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data		0 cagar budaya	0	0	Lppd
18	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek	2 cagar budaya	2	2	Lppd
19	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	obyek	20 cagar budaya	20	20	Lppd
20	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	0	0	Lppd
21	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		0	0	0	Lppd
22	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	0	0	Lppd
23	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	0	6	6	Lppd
24	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota		11 tim	0	11	Lppd
25	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	26	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman		0	0	0	Lppd
	27	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota		0	0	0	Lppd
	28	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	Lppd
	29	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	Lppd
<b>II</b>		<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>					
a		Fokus Lelayanan Urusan Pemerintahan Wajib					
<b>1</b>		<b>Terkait Pelayanan Dasar</b>					
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>					
	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,39	11,15	11,39	Indikator sasaran kota
	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,41	14,41	14,41	Indikator sasaran kota
	3	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikat Pendidik	%	65%	65%	65%	Indikator Tujuan PD
	4	Angka Partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar	%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	5	APM Paud, SD, dan SMP	%	130%	100%	97,50%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Guru, kasek dan Pengawas berkompentensi	%	65%	65%	65%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase sekolah yang memenuhi SNP	%	85%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Wajib belajar 9 tahun	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7
10	Presentase Sekolah yang Berkurikulum SNP	%	84%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	%	65%	20%	65	Indikator Program PD
12	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		2.483	4.210	4.210	Lppd
13	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		13.908	16.750	16.750	Lppd
14	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		5.977	7.750	7.750	Lppd
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		176	195	195	Lppd
16	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	100	16	99	Lppd
17	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Anak	130	50	130	Lppd
18	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Anak	130	90	130	Lppd
19	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	01:15	01.14	1,15	Lppd
20	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	543	470	550	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
21	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	482	465	480	Lppd
22	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	30	10	30	Lppd
23	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembaga	70	70	70	Lppd
24	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.767	2.658	2352	Lppd
25	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2.886	3.284	3.284	Lppd
26	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	13.336	11.400	13.336	Lppd
27	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	9.648	10.500	10.500	Lppd
28	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:17	01.23	01.23	Lppd



1	2	3	4	5	6	7	
	29	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:14	01.28	01.28	Lppd
	30	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	1208	760	1208	Lppd
	31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	813	371	813	Lppd
	32	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	01:61	01.04	01.04	Lppd
	33	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	01:39	01.05	0105	Lppd
	34	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	332	171	171	Lppd
	35	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	119	80	80	Lppd
	36	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1233	648	1233	Lppd
	37	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	723	666	723	Lppd
	38	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	67	70	70	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	39	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	22	20	20	Lppd
	40	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	148	175	175	Lppd
	41	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	128	78	128	Lppd
	42	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	3	1	3	Lppd
	43	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	0	0	Lppd
	44	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	0	0	Lppd
	45	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	01:04	01.27	01.27	Lppd
	46	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	43	37	42	Lppd
	47	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	43	37	42	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	48	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Orang	67	70	70	Lppd
	49	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	7	6	7	Lppd
	50	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	94,04%	26.450	26.450	spm
	51	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	12,74%	210	210	spm
	52	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	96,17%	4.250	4.250	spm
	53	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	%	-	1	1	spm
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>					
	1	Angka Harapan Hidup	Skor	72,83	72,83	72,83	Indikator sasaran kota
	2	Persentase Keluarga Sehat	%	52%	52%	52%	Indikator tujuan PD
	5	Persentase rumah tangga sehat	%	69,43%	70,00%	70,00%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase rumah sehat	%	94,41%	88,00%	88,00%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	
	7	Persentase rata-rata upaya kesehatan bersumber masyarakat berstrata puri	%	59,67%	62,00%	62,00%	Indikator Sasaran PD
	8	Indeks Keluarga Sehat	%	0,51 indek	0,52	0,52	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase tenaga kesehatan yang teregristrasi	%	85,00%	90,00%	90,00%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase capaian aplikasi sarana prasarana kesehatan (ASPAK) Puskesmas	%	84,32%	84,60%	84,60%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase peningkatan sarana pelayanan kefarmasian yang beroperasi sesuai standart	%	85,00%	74,00%	86,00%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase masyarakat Kota Madiun yang memiliki jaminan kesehatan	%	93,63%	98,00%	98,00%	Indikator Sasaran PD
	13	Persentase rata-rata IKM puskesmas se-Kota Madiun	%	84,92%	86,20%	86,20%	Indikator Sasaran PD
	14	Rata - rata nilai PKP Puskesmas	%	86,63%	86,92%	86,92%	Indikator Sasaran PD
	15	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	58,33%	66,67%	66,67%	Indikator Program PD
	16	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	85%	90%	85%	Indikator Program PD
	17	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	%	87,88%	87%	87,88%	Indikator Program PD
	18	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	%	59,67%	62%	62%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7
19	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	skor	0,48%	0.48%	0.48%	Lppd
20	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100%	100%	100%	Lppd
21	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	Lppd
22	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	Lppd
23	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100%	100%	Lppd
24	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100%	100%	Lppd
25	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	89,26%	100%	100%	Lppd
26	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	Lppd
27	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99,33%	100%	100%	Lppd
28	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	54,99%	100%	100%	Lppd
29	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	Lppd
30	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	Lppd
31	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,68%	100%	100%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	32	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	Lppd
	33	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	tempat	8	8	8	Lppd
	34	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	tempat	8	8	8	Lppd
	35	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
	36	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	347	330	347	Lppd
	37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	305	291	305	Lppd
	39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	6 Jenis	6 Jenis	Lppd
	40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	305	289	305	Lppd
	41	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9 jenis	9 Jenis	9 Jenis	Lppd
	42	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1068	571	1068	Lppd
	43	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	2 jenis	5 Jenis	5 Jenis	Lppd
	44	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	380	371	380	Lppd
	45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	590	578	590	Lppd
	47	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	48	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1050	1286	1286	Lppd
	49	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	50	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	164	156	164	Lppd
	51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3 jenis	3 Jenis	3 Jenis	Lppd
	52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	178	169	178	Lppd
	53	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	54	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30	30	30	Lppd
	55	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6 jenis	7 Jenis	7 Jenis	Lppd
	56	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	300	748	748	Lppd
	57	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4 jenis	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	58	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	377	376	377	Lppd
	59	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	Spm
	60	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,29%	100%	100%	Spm

1	2	3	4	5	6	7	
	61	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	101,19%	100%	100%	Spm
	62	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	99,78%	100%	100%	Spm
	63	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	89,26%	100%	100%	Spm
	64	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	100%	100%	Spm
	65	Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	99,33%	100%	100%	Spm
	66	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	54,99%	100%	100%	Spm
	67	Persentase Penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	118,04%	100%	100%	Spm
	68	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	115,09%	100%	100%	Spm
	69	Persentase orang terduga Tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	52,68%	100%	100%	Spm
	70	Persentase orang dengan resiko terinfeksi ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	102,10%	100%	100%	Spm
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman,</b>					



1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>					
1	Indeks Ketentraman	Indeks	78,74	77,05	77,05	Lanjutan Indikator Tujuan Kota
2	Indeks Rasa Aman	Indeks	81,00	76,2	76,2	Lanjutan Indikator sasaran kota
4	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Skor	72,45	76,1	76,1	Indikator Tujuan PD
5	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	98,57%	97%	97%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	97%	97%	Indikator Program PD
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
9	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100%	97%	97%	Lppd
10	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100%	100%	100%	Lppd
11	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	Lppd
12	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15 menit	15 menit	15 menit	Lppd
13	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		2.876	2.000	2.000	Lppd
14	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1.348 orang	1.300 orang	1.300	Lppd
15	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		93 perda dan perwal	76	76	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
16	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	5 orang	5 orang	5 orang	Lppd
17	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada	35 SOP	35 SOP	Lppd
18	Tersedianya sarana prasarana minimal		Ada	12 bidang barang (685 barang)	12 bidang barang (685 barang)	Lppd
19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5 layanan	5 jenis	5 jenis	Lppd
20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	Ada	1 pos garasi Damkar	1 pos garasi Damkar	Lppd
21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Ada	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	Lppd
22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		1 pos	ada 1 pos garasi damkar	ada 1 pos garasi damkar	Lppd
23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		11 sarpras	34 Jenis (187 buah)	34 Jenis (187 buah)	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	22 orang	9 orang	7 Orang	Lppd
	25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	21 orang	22 orang	22 orang	Lppd
	26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	jenis	2 kegiatan	4 Jenis	4 Jenis	Lppd
	27	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	100%	100%	100%	Spm
	28	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	Spm
	30	Indeks Resiko Bencana	Indeks	130,84 indeks	114 indeks	114 indeks	Indikator Tujuan PD
	32	Persentase Korban Bencana yang tertangani	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	33	Persentase terlatihnya masyarakat dalam penanganan bencana	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	34	Persentase bantuan bencana kepada korban bencana	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	35	Persentase penyampaian informasi kebencanaan secara berkala	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	36	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	
	37	Jumlah Destana yang terbentuk	%	4 desa/ kelurahan	5 desa/ kelurahan	5 desa/ kelurahan	Indikator Sasaran PD
	39	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	40	Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana	%	100%	0%	0%	Indikator Program PD
	41	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	2.575 orang	845 orang	3.350	Lppd
	42	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	1.101 orang	50 orang	1.125	Lppd
	43	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	12 orang	400 orang	400 orang	Lppd
	44	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	0	100%	100%	Lppd
	45	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100%	100%	100%	Lppd
	46	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	Lppd
	47	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	0	0	0	Lppd
	48	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	44,50%	5%	47%	Lppd
	49	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	42,76%	5%	45%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	50	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100%	100%	100%	Lppd
	51	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	Lppd
	52	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	Lppd
	53	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100%	100%	100%	Lppd
	54	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100%	100%	100%	Lppd
	55	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100%	100%	100%	Lppd
	56	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100%	100%	100%	Spm
	57	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100%	100%	100%	Spm
	58	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100%	100%	100%	Spm
<b>2</b>		<b>Tidak Terkait Pelayanan Dasar</b>					
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>					
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	8,15	5,74	7,47	Lanjutan Indikator sasaran kota
	2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	79,15%	20%	60%	Indikator Tujuan PD

1	2	3	4	5	6	7
3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
7	persentase calon tenaga kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi	%	40%	40%	40%	Indikator Sasaran PD
8	persentase peningkatan pemberian informasi peluang kerja kepada pencari kerja	%	10%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
9	persentase perusahaan yang menerapkan perlindungan tenaga kerja	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	persentase peningkatan tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan jaminan sosial	%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
14	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	20%	25%	25%	Indikator Program PD
15	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	10%	10%	10%	Indikator Program PD
16	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	%	16%	16%	16%	Indikator Program PD
17	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	84,62%	76,92%	80%	Lppd
18	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,17%	68%	68,50%	Lppd
19	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		10.748.101.000	12.500.000.000	12.500.000.000	Lppd
20	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100%	71,50%	85%	Lppd
21	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	71,61%	51%	71,50%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	22	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	Ada	1	1	Lppd
	23	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		0	0	0	Lppd
	24	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.		0	10	10	Lppd
	25	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	44%	30%	40%	Lppd
	26	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	100%	30%	64%	Lppd
	27	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	100%	50%	85%	Lppd
	28	Persentase LPK yang terakreditasi	%	36%	38%	38%	Lppd
	29	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	92,86%	100%	100%	Lppd
	30	Jumlah penganggur yang dilatih	%	90 orang	230	230	Lppd
	31	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100%	100%	100%	Lppd
	32	Persentase penyerapan lulusan	%	100%	20%	86%	Lppd
	33	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	44,44%	20%	40,50%	Lppd
	34	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0%	25%	25%	Lppd
	35	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0%	25%	25%	Lppd
	36	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0%	1%	1%	Lppd
	37	Data tingkat produktivitas total	%	tidak ada	63%	63%	Lppd
	38	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	20,25%	25%	25%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	39	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	61,90%	30%	60%	Lppd
	40	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		21 SP/SB	23	23	Lppd
	41	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	8,96%	100%	100%	Lppd
	42	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100%	70%	95%	Lppd
	43	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2,52%	5%	5%	Lppd
	44	Jumlah mogok kerja		0	5	5	Lppd
	45	Jumlah penutupan perusahaan		3 perusahaan	10	10	Lppd
	46	Jumlah perselisihan kepentingan		0	15	15	Lppd
	47	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	1	1	Lppd
	48	Jumlah perselisihan PHK		8	15	8	Lppd
	49	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		14 orang	60	14	Lppd
	50	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0	50	50	Lppd
	51	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		tidak ada	1	1	Lppd
	52	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100%	70%	85%	Lppd



1	2	3	4	5	6	7	
	53	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		173	115	168	Lppd
	54	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang	546 orang	325	540	Lppd
	55	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		19 BKK	19	19	Lppd
	56	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		0	0	0	Lppd
	57	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		0	1	1	Lppd
	58	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		0	0	0	Lppd
	59	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.		46 perjanjian	50	50	Lppd
	60	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		0	0	0	Lppd
	61	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	78,26%	10%	78%	Lppd
	62	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		46 orang	50	50	Lppd
	63	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan		0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	64	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		0	0	0	Lppd
	65	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		0	0	0	Lppd
	66	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		0	0	0	Lppd
<b>II</b>		<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>					
	1	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	A-87,44	A-85	87,50	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	95,47%	92,45%	95,50	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	%	100%	70,00%	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	%	96,48%	84,00%	96,50	Indikator Program PD
	5	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	%	94,45%	94,25%	94,25%	Indikator Program PD
	6	Akurasi database kependudukan	%	99,44%	99,10%	99,45	Indikator Program PD
	7	Perekaman KTP elektronik	%	93,19%	98,50%	98,50%	Lppd
	8	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	84,68%	90,00%	90,00%	Lppd
	9	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,50%	99,00%	99,00%	Lppd
	10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		37,50%	39,39%	39,39%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	11	Penerbitan akta perkawinan	%	100%	99,10%	100.00	Lppd
	12	Penerbitan akta perceraian	%	100%	99,10%	100.00	Lppd
	13	Penerbitan akta kematian	%	100%	98,75%	100.00	Lppd
	14	Penyajian data kependudukan	%	100%	100%	100%	Lppd
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>					
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	80,84	80,84	80,84	Indikator Tujuan PD
	2	Skor Pola Pangan Harapan	skor	95,8 indeks	95,6	95,6	Indikator Sasaran PD
	3	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	102,9%	100	100	Indikator Program PD
	4	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	94%	80	80	Indikator Program PD
	5	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	-	-	-	Indikator Program PD
	6	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	181,01%	100	100	Lppd
	7	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	Ada	tidak	Ada/ 1	Lppd
	8	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	Lppd
	9	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	Tidak	tidak	tidak	Lppd
	10	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	Ada	ada	ada	Lppd
	11	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	Ada	1	1	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	12	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak	Ada	ada	ada	Lppd
	13	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak	Tidak	tidak	tidak	Lppd
	14	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak	Ada	ada	ada	Lppd
<b>IV</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	1	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%	69,80%	62,54%	62,54%	Indikator Sasaran PD
	3	Menurunnya Unmet Need	%	< 8 %	8,00%	8,00%	Indikator Program PD
	4	Meningkatnya kepesertaan anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	70%	81,00%	81,00%	Indikator Program PD
	5	Meningkatnya Jumlah SSK	SSK	4 SSK	7 SSK	7 SSK	Indikator Program PD
	6	Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	3 KAMPUNG KB	4 KAMPUNG KB	4 KAMPUNG KB	Indikator Program PD
	7	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,84%	72,78%	72,78%	Lppd
	8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11,90%	<7.9%	8,00%	Lppd
	9	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan		tidak	-	-	Lppd
	10	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		27 tahun	Wanita >21 tahun	24,8	Lppd
	11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	0,75	0,53	1,56	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	12	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100%	100%	100%	Lppd
	13	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	24	16	24	Lppd
	14	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	97,73%	97,78%	97,78%	Lppd
	15	Persentase Peserta KBAktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30,13%	51,00%	51,00%	Lppd
	16	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		56 KKBPK	56	56	Lppd
	17	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	48,46%	45,01%	48,48%	Lppd
	18	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	69,84%	64,96%	18,51%	Lppd
	19	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	100%	100%	100%	Lppd
<b>V</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika</b>					
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,06	2,85 (BAIK)	2,85	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	3,95	2,87	2,87	Indikator Tujuan PD
	3	Indeks Domain Manajemen SPBE		2,30	1,93	2,81	Indikator Tujuan PD
	4	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	97,33	91	91	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7
6	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	83%	77%	77%	Indikator Program PD
	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100%	73,00%	100%	Lppd
11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	81,71%	81,90%	81,90%	Lppd
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100%	100%	100%	Lppd
13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100%	100%	Lppd
14	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	Lppd
15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
16	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
17	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	100%	100%	100%	Lppd
18	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100%	100%	100%	Lppd
19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100%	100%	100%	Lppd
20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	100%	100%	100%	Lppd
21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	18,75%	15%	15%	Lppd
22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100%	100%	100%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	100%	82%	100%	Lppd
	24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100%	100%	100%	Lppd
	25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100%	100%	100%	Lppd
	26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100%	100%	100%	Lppd
	27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100%	100%	100%	Lppd
	28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100%	100%	100%	Lppd
	29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	Lppd
	30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
	31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	Lppd



1	2	3	4	5	6	7	
	32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100%	100%	100%	Lppd
	33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100%	100%	100%	Lppd
<b>VI</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>						
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1	1	1	Indikator Program PD
	3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	Lppd
	4	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
	5	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	1 survey	1	1	Lppd
	6	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	1 kompilasi	1	1	Lppd
	7	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	1 survey	1	1	Lppd
	8	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	0%	100%	100%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	9	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	0%	100%	100%	Lppd
<b>VI</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>					
	1	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	3	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	83,57%	67%	83.57%	Lppd
	4	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		0%	0	0	Lppd
	5	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	Lppd
	6	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100%	75%	100%	Lppd
	7	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100%	88,80%	100%	Lppd
<b>VI</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>					

1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	2,6	2,42	2,42	Indikator Tujuan PD
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	10,61	8,9	8,9	Indikator Sasaran PD
3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	6%	5,95%	5,95%	Indikator Program PD
4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	37%	37%	37%	Indikator Program PD
5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk		379,01%	1 penduduk : 3 Buku	1 penduduk : 3 Buku	Lppd
6	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	4,70%	4,30%	4,30%	Lppd
7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk		0,37%	3 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	3 tenaga perpustakaan : 369 penduduk	Lppd
8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	%	51,93%	57%	57%	Lppd
9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	56 naskah kuno	10 eksemplar	0	Lppd
10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		56 naskah kuno	NIHIL	0	Lppd
11	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		0	NIHIL	NIHIL	Lppd
<b>IX</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>					
1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	59	57	57	Indikator Tujuan PD
2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	9%	9%	9%	Indikator Sasaran PD
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan	Skor	100 skor	86%	86%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7
	pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	83,33%	8,4	8,4	Indikator Program PD
5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	9%	100%	Lppd
6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	9%	100%	Lppd
7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100%	6%	100%	Lppd
8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		belum dilaksanakan pemusnahan	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	belum dilaksanakan pemusnahan	1 kali	1 kali	Lppd
10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	22 arsip	28 daftar arsip yang diselamatkan	28 daftar arsip yang diselamatkan	Lppd
11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		1 arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	1 arsip	24 arsip hasil alih media	24 arsip hasil alih media	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	1 arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
	14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK		1 arsip	belum dilaksanakan	belum dilaksanakan	Lppd
<b>3</b>		<b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b>					
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>					
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	2	persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	%	-	20%	20%	Indikator Program PD
	3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	tidak ada kawasan transmigrasi	Lppd
	4	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	tidak ada pemukiman transmigrasi yang difasilitasi	Lppd
	5	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	tidak ada pemukiman transmigrasi yang dibina	Lppd
<b>4</b>		<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>					
<b>I</b>		<b>Sekretariat Daerah</b>					
	1	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Indeks	65,55%	(B) 68	(B) 68	Lanjutan Indikator Tujuan Kota

1	2	3	4	5	6	7	
	2	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Skor	70,97	BB (76)	BB (71)	Lanjutan indikator sasaran kota
	3	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komprehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	%	100%	100%	100%	Indikator Tujuan PD
	4	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi/ Sangat Tinggi	Sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	5	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	86,456 (baik)	83 (baik)	86,5	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	6	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	B	B	B	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan
	7	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	BB	A	A	Indikator Program Rutin Semua PD
	8	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	%	72%	72%	72%	Indikator Tujuan PD
	9	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	14	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	
	15	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	Lppd
	16	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	17,71%	21,60%	21,60%	Lppd
	17	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	32,66%	87,60%	87,60%	Lppd
<b>II</b>		<b>Sekretariat DPRD</b>					
	2	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	90,297	80		Indikator Tujuan PD
	4	Persentase Tertib Administrasi	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Kompetensi Sumber Daya Manusia	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Fasilitasi Penganggaran APBD yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan APBD yang Sesuai dengan Standart Pelayanan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Tugas dan Fungsi	Indeks	90,297	80	80	Indikator Program PD
<b>5</b>		<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
<b>III</b>		<b>Perencanaan</b>					
	2	Indeks Perencanaan	Indeks	34	34	34	Indikator Tujuan PD

1	2	3	4	5	6	7	
	5	Indeks Kualitas RPJMD	Indeks	35	33	35	Indikator Sasaran PD
	6	Indeks Kualitas RKPD	Indeks	35	33	35	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase capaian kinerja program RKPD	%	100%	92%	96%	Indikator Sasaran PD
	8	Nilai SAKIP pada komponen perencanaan	Skor	23,65	24,5	24,5	Indikator Sasaran PD
	9	persentase program penanganan covid-19 yang dilaksanakan	%	0	0	0	Indikator Sasaran PD
	10	persentase sasaran Perangkat Daerah yang berbasis outcome	%	92%	92%	92%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>IV</b>	<b>Keuangan</b>						
	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	Lanjutan Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
	3	Persentase pemanfaatan aset daerah	%	58,3%	96%	96%	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase tersusunnya Laporan BTT	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase Pengelolaan kas daerah yang akuntabel	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase Tersusunnya dokumen Perencanaan Penganggaran yang tepat waktu dan berkualitas	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD



1	2	3	4	5	6	7	
	8	Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase bidang tanah pemerintah kota yang bersertifikat	%	86,9%	80%	88%	Indikator Sasaran PD
	10	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	11	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	12	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,66%	21,20%	22.66%	Lppd
	13	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	1,81%	2,50%	2,50%	Lppd
	14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (expenditures)	%	78,03	60,90%	78,03%	Lppd
	15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,79%	80%	80%	Lppd
	16	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1,06%	95,50%	95,50%	Lppd
	17	Manajemen Aset	Ya/ tidak	ya	Ya	Ya	Lppd
	18	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	0,23%	20,10%	20,10%	Lppd
	20	Capaian Target Pajak Daerah	%	107%	100%	86.255.00 0.000	Indikator Tujuan PD
	21	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	7%	5%	7%	Indikator Tujuan PD
	23	persentase peningkatan objek pajak yang dipantau dengan IT	%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	24	persentase peningkatan pembayaran pajak melalui transaksi elektronik	%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	25	persentase Pencapaian Target Pajak daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah	%	7%	100%	7%	Indikator Sasaran PD
	26	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	7%	10%	7%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	
	27	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	16%	41%	16%	Indikator Program PD
<b>IV</b>	<b>Kepegawaian</b>						
	2	Indeks Sistem Merit	Indeks	238	190	243	Indikator Tujuan PD
	4	Prosentase Penempatan Pegawai dalam Jabatan sesuai dengan SKJ	%	71%	50%	62,53%	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase kesesuaian usulan pengadaan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase perencanaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase SKP ASN yang bernilai baik (lebih dari 75)	%	100%	90%	99%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	%	0,09%	0,25%	0,25%	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase terpenuhinya penggajian, penghargaan sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase data kepegawaian yang mutakhir	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	13	Persentase Pemberhentian ASN tepat waktu	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	14	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Indeks	87,51 skor	87,6	87,6	Indikator Program PD
	15	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	63%	222%	222%	Lppd
	16	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	9,72%	14%	14%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	17	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	71,54%	80%	80%	Lppd
<b>V</b>		<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>					
	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai PP 11 Thn 2017	%	39,76 %	33%	33%	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	%	23,07%	12%	15%	Indikator Program PD
<b>VI</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan</b>					
	1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	2693 (52,99)	1900	55,6	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Sasaran PD
	2	Indeks kualitas penelitian/kajian	Indeks	35	34	34	Indikator Sasaran PD
	3	persentase program SMART CITY yang dilaksanakan	%	80%	85%	85%	Indikator Sasaran PD
	4	persentase peningkatan jumlah usulan jenis data untuk diajukan rekomendasi	%	5%	5%	5%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>6</b>		<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>					
<b>VI I</b>		<b>Inspektorat Daerah</b>					
	2	Penilaian Mandiri SPIP	Skor	3.46	3.2	4,10	Indikator Tujuan PD
	5	Laporan keuangan tersampaikan tepat waktu	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	6	Nilai IKM Inspektorat	Indeks	89 indeks	89 indeks	89 indeks	Indikator Sasaran PD
	7	Nilai Survey Kepuasan atas Kinerja Inspektorat	Nilai	4.17	4.15	4.15	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7
8	Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terselesaikan dengan cepat dan tepat	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
9	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikat dan profesional	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
10	Persentase Laporan BMD yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
11	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pengawasan yang disusun sesuai dengan Etika dan Profesionalisme	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
12	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Administrasi Pengawasan yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
13	Persentase laporan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal yang tersampaikan secara tertib dan tepat waktu	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Ketaatan yang Dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD
15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7
16	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD
17	Persentase rekomendasi hasil reviu rencana keuangan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja keuangan daerah	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD
18	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Madiun	Nilai	-	71 nilai	71 nilai	Indikator Sasaran PD
19	Nilai rata - rata evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal dalam kategori Baik pada perangkat daerah Kota Madiun	Nilai	-	76,01	76,01	Indikator Sasaran PD
20	Penilaian mandiri maturitas SPIP Terintegrasi	Nilai	-	2.00	2.00	Indikator Sasaran PD
21	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Indeks	3.0	2.0	3.52	Indikator Sasaran PD
22	Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK	Unit	-	1 unit	1 unit	Indikator Sasaran PD
23	Persentase rekomendasi rencana aksi hasil koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD
24	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	
	25	Indeks persepsi pegawai Inspektorat atas Kepuasan Kinerja Inspektorat Kota Madiun	Indeks	-	3.50	3.50	Indikator Sasaran PD
	26	Persentase realisasi dukungan layanan manajemen pengawasan internal	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD
	27	Persentase realisasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Madiun	%	-	60%	60%	Indikator Sasaran PD
	28	persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	%	30%	35%	35%	Indikator Program PD
	29	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	30	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	skor	3	3	3	Lppd
	31	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Skor	2+	2+	2+	Lppd
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>						
<b>VI</b>	<b>Kecamatan</b>						
	2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	44%	44%	44%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	33%	44%	44%	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	11%	33%	33%	Indikator Sasaran PD
	5	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Indeks	3,08	3,08	3,08	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7	
	6	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Indeks	2,90	2,93	2,93	Indikator Sasaran PD
	7	Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks	3,25	3,3	3,3	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	13	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	14	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	90,490 skor	90,03	90.50	Indikator Program
	16	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	87,7 skor	87,75	87.75	Indikator Program
	17	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	88,117 skor	88,46	88.46	Indikator Program

1	2	3	4	5	6	7	
	18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	19	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	20	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	22	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%	100%	100%	100%	Indikator Program
	23	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%	100%	100%	100%	Indikator Program
<b>8</b>		<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>					
<b>IX</b>		<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>					
	1	Indeks Kerukunan	Indeks	74,36 (Harmonis)	B (74,40) (Harmonis)	B (74,40) (Harmonis)	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	persentase konflik yang tertangani	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu yang lolos verifikasi	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Peningkatan Orkemas yang Berbadan Hukum	organisasi	68,8%	1 organisasi	1 organisasi	Indikator Sasaran PD
	5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	Kejadian/konflik	-10	-10	-10	Indikator Sasaran PD



1	2	3	4	5	6	7	
	6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	8	persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	69%	69%	69%	Indikator Program PD
	9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	13	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
<b>III</b>		<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>					
<b>A</b>		<b>Kemampuan Ekonomi</b>					
<b>I</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>					
	3	persentase Usaha Mikro yang beromset naik	%	0,05%	0,08%	0,08%	Indikator Tujuan PD
	4	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	80%	83%	83%	Indikator Tujuan PD
	7	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Yang Bersertifikat Nik	%	3%	3%	3%	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase jumlah koperasi yang jenis usahanya bertambah	%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Yang Beromset Naik Setelah Dipromosikan	%	15%	15%	15%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase peningkatan Pelaku Usaha Mikro Yang Beromset Naik Setelah Pembinaan	%	10%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	7%	7%	7%	Indikator Program PD
	15	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan permohonan bersertifikat NIK	%	75,00%	75,00%	75,00%	Indikator Program PD
	16	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	2,50%	2,50%	2,50%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	
	17	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	83,33%	80,65%	83,00%	Lppd
	18	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	100%	0,43%	100%	Lppd
	19	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0,64%	80%	80%	Lppd
	20	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		0%	0	0	Lppd
	21	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	19,23%	16,13%	19%	Lppd
	22	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25,64%	19,35%	25.5%	Lppd
	23	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	96,15%	96,77%	96,77%	Lppd
	24	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	%	2,80%	2,35%	2,60	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	dalam daerah kabupaten/ kota					
25	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	22,44%	22,58%	22,58%	Lppd
26	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0,00%	1,29%	1,29%	Lppd
27	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	80,77%	81,29%	81,29%	Lppd
28	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	83,33%	80,65%	83,00%	Lppd
29	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,28%	1,29%	1,15%	Lppd
30	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	89,74%	78,71%	89,00%	Lppd
31	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah	%	1,28%	1,29%	1,29%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota					
32	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,34%	0,42%	0,42%	Lppd
33	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100%	100%	100%	Lppd
34	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,16%	0,14%	0,15	Lppd
35	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,02%	0,04%	0,04%	Lppd
36	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	0,14%	0,28%	0,28%	Lppd
37	Rasio usaha mikroyang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,76%	0,84%	0,84%	Lppd
38	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,19%	0,12%	0,17%	Lppd
<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>					
1	ICOR	Poin	0,42	4,79	4,79	Indikator Tujuan PD
2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	M	202 M	193 M	193	Indikator Sasaran PD
3	Persentase penerbitan ijin sesuai SP	%	99,86%	80%	100%	Indikator Sasaran PD
4	Jumlah Rekomendasi Terhadap peraturan daerah/peraturan walikota yang terkait dengan investasi	rekom	2 rekom	2 rekom	2 rekom	Indikator Sasaran PD
5	Persentase terpenuhinya informasi yang dibutuhkan investor	%	-	80%	80%	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7
6	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	-	100%	100%	Indikator Program PD
7	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	19%	26%	26%	Indikator Program PD
8	Persentase Pelayanan Perizinan terselesaikan	%	99,86%	85%	85%	Indikator Program PD
9	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	Indikator Program PD
10	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	%	-38,30%	1,05%	1,05%	Lppd
12	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dokumen	tidak ada insentif	1 dokumen	1 dokumen	Lppd
13	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Dokumen	tidak ada insentif	0	0	Lppd
14	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Dokumen	0	0	0	Lppd
15	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1 kegiatan	1 kali	1 kali	Lppd
16	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	0	0	0	Lppd
17	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	0	1 kali	1 kali	Lppd
18	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	206 konsultasi	275	275	Lppd
19	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Buah	2861	1600	3000	Lppd
20	Laporan realisasi penanaman modal	M	202.144.392.038,81	193 M	193	Lppd
21	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	21 aparatur	15 orang	21	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	22	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pe rusaha an	498 perusahaan	100 perusahaan	300	Lppd
	23	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1 buah	1 buah	Lppd
III		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>					
	1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,43%	1,25	1,25	Indikator Sasaran PD
	2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	277 ton	280	280	Indikator Program PD
	3	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/ kapita/ tahun	16,1 kg/ kapital/ tahun	15,7	16	Indikator Program PD
	4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	-	89	89	Indikator Program PD
	5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	367 ton	369	369	Lppd
	6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	435 RTP	435 RTP	435 RTP	Lppd
	7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	0	tidak ada	tidak ada	Lppd
	8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	0	tidak ada	tidak ada	Lppd
	9	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan	orang	180	245	245	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	penguatan kelembagaan)					
10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	450314 ekor	497,400 ekor	497,400 ekor	Lppd
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>					
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	351.554 orang	400.000	400.000	Indikator Tujuan PD
3	Jumlah destinasi wisata daerah yang berwawasan lingkungan	Destinasi	34 destinasi	20 destinasi	34	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif yang berkualitas	%	107%	10%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Peningkatan Destinasi Wisata Daerah	%	1600%	20%	100%	Indikator Program PD
8	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata yang diselenggarakan	%	50%	10%	100%	Indikator Program PD
10	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	%	18,68%	19,00%	19,00%	Indikator Program PD
11	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-96,01%	2%	2%	Lppd
12	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0,23%	7%	7%	Lppd
13	Tingkat hunian akomodasi	%	69,42%	100%	100%	Lppd
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	16,39%	5%	16,39%	Lppd
15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	265,90%	265,90%	265,90%	Lppd
16	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		34 sarpras	0	34	Lppd
17	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per		738 TDUP	704	738	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	sub jenis usaha di kabupaten/kota					
18	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	21 orang	900	900	Lppd
19	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali	6 kegiatan	5	6	Lppd
20	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		0	0	0	Lppd
21	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		0	2 kali	2 kali	Lppd
22	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	19,32%	19,00%	19,00%	Lppd
23	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	tempat	34 lokasi	3	34	Lppd
<b>V</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>					
2	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,4%	1,214	1,214	Indikator Sasaran PD
3	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,05	1,12	1,12	Indikator Sasaran PD
4	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	50%	55	60	Indikator Program PD
5	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	50%	50	75	Indikator Program PD
	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	10%	10	10	Indikator Program PD
8	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	89,5%	72	74	Indikator Program PD
9	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	-	10	10	Indikator Program PD



1	2	3	4	5	6	7
	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	15%	20	20	Indikator Program PD
11	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		17.776	7,22 ton/Ha	7	Lppd
12	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	1	2	2	Lppd
13	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	1 unit	3 jenis	3 jenis	Lppd
14	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	-	2	2	Lppd
15	Persentase prasarana yang digunakan	%	66,70%	75	75	Lppd
16	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	-	50	50	Lppd
17	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (%)	%	70,29%	50	50	Lppd
<b>VI</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>					
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	10,16	2,44	10.16	Lanjutan Indikator Sasaran Kota
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	11,32	0,76	11.32	Indikator Sasaran Kota
5	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		25,25	24,05	25.25	Indikator Tujuan PD
6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan	%	1,3%	0,6	0,6	Indikator Sasaran PD
7	Persentase Layanan UTP dan pengawasan BDKT yang terealisasi		-	100%	100%	Indikator Sasaran PD
8	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat		-	14,59%	14,59%	Indikator Sasaran PD
9	persentase perusahaan yang memperbarui perijinan	%	114%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
12	persentase UTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7	
	14	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	15	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	16	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	23,89%	100%	100%	Lppd
	17	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	53,09%	100%	100%	Lppd
	18	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	116,94%	100%	100%	Lppd
	19	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :					
		a. Pusat perbelanjaan	%	100%	100%	100%	Lppd
		b. Toko swalayan	%	75%	100%	100%	Lppd
	20	Persentase penerbitan TDG	%	33,33%	100%	100%	Lppd
	21	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	56,33%	100%	100%	Lppd
	22	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100%	100%	100%	Lppd
	23	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	100%	100%	Lppd
	24	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/tidak	tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
	25	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100%	50%	100%	Lppd
	26	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	27	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	79,44%	100%	100%	Lppd
	38	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	Lppd
<b>VI</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>					
	2	persentase IKM yang berstandarisasi	%	40%	42%	42%	Indikator Tujuan PD
	4	persentase komoditi makanan dan minuman yang memenuhi standarisasi	%	70%	75%	75%	Indikator Sasaran PD
	5	persentase pengajuan rekomendasi permodalan yang disetujui	%	90%	90%	90%	Indikator Sasaran PD
	6	persentase pengajuan perijinan NIB yang direkomendasi	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
	7	persentase peningkatan IKM terpublikasikan	%	9%	10%	10%	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	12,83%	10,00%	12,50	Indikator Program PD
	11	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	2,50%	5%	5%	Indikator Program PD
	12	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	3,85%	0,02%	3,75%	Lppd
	13	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0,00%	0,02%	0,02%	Lppd
	14	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	25%	85%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	15	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	0%	0%	Lppd
	16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0%	0%	0%	Lppd
	17	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	810%	45%	832	Lppd
	18	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0%	0%	0%	Lppd
	19	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	%	75%	100%	100%	Lppd
	20	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	14,29%	50%	50%	Lppd
	21	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	tidak ada	0%	0%	Lppd
	22	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	2,47%	1%	4,20%	Lppd
<b>B</b>		<b>Fasilitas Wilayah Infrastruktur</b>					
	1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	Indeks	89,40	88,19	89,40	Indikator Tujuan Kota

1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>					
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	97,99	98,25	98,25	Lanjutan Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
2	Persentase kawasan bebas banjir/genangan	%	80,70%	80,89%	80,89%	Indikator Sasaran PD
3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran dan Indikator Program PD
4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran PD
6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	94,03%	95,00%	95,00%	Indikator Sasaran PD
7	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	94,50%	95,00%	95,00%	Indikator Program PD
8	Persentase rawan banjir/genangan	%	19,30%	19,09	19,09	Indikator Program PD
9	Persentase pelaku jasa kontruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	95%	62,83%	62,83%	Indikator Program PD
10	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	98,14%	100%	100%	Indikator Program PD
11	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,03%	80,06%	80,06%	Indikator Program PD
12	Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
13	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
14	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	%	100%	79.47%	80,06%	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota					
15	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota		0	0	0	Lppd
16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		0	0	0	Lppd
17	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	98,14%	100%	100%	Lppd
18	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,02%	99%	99%	Lppd
19	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	99,52%	72,68	72,68	Lppd
20	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	99,06%	94,05%	95%	Lppd
21	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	95%	59.4%	62,83%	Lppd
22	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	6,7	3,5 Km	6,35	Lppd
23	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72.776	19.334 M	58.720	Lppd
24	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan		0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)					
25	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)		0	0	0	Lppd
26	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
27	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
28	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota		ada 6 pintu air, 4 pompa banjir, 9 kolam retensi	0	2	Lppd
29	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik		0	0	0	Lppd
30	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik		0	0	0	Lppd
31	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik		0	0	0	Lppd
32	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak)	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
33	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
34	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)		1 BUMD	1	1	Lppd
35	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM		0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	36	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	0	0	Lppd	
	37	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	0	0	Lppd	
	38	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	0	0	Lppd	
	39	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	0	0	Lppd	
	40	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0	Lppd	
	41	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	0	0	Lppd	
	42	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	0	0	Lppd	
	43	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	98,02	100	100	Lppd
	44	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		0	0	0	Lppd
	45	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		0	0	0	Lppd
	46	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		0	0	0	Lppd



1	2	3	4	5	6	7	
	47	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		0	0	0	Lppd
	48	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		0	0	0	Lppd
	49	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD		0	0	0	Lppd
	50	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		0	0	0	Lppd
	51	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	19,13%	98%	98%	Lppd
	52	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	171	415	415	Lppd
	53	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/ Gedung (ada/tidak)	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
	54	Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung (Ada/tidak)	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
	55	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20 unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
	56	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20 unit	20 Unit	20 Unit	Lppd
	57	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	Lppd
	58	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	23 unit	5 Unit	12	Lppd
	59	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala	km	433,485 Km	433,095 Km	433.095	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota					
60	Panjang jalan yang dibangun	km	1,888 Km	0,45 km	3,7	Lppd
61	Panjang jembatan yang dibangun	m	31,8 m	20 m	30	Lppd
62	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	2,391 km	3,5 km	3,5 km	Lppd
63	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0	0	0	Lppd
64	Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	km	8,563 km	5 km	6,2	Lppd
65	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	0	0	Lppd
66	Panjang jalan yang dipelihara	km	51 km	40 km	52	Lppd
67	Panjang jembatan yang dipelihara	Km	3,9 km	3,8 km	3,9	Lppd
68	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	Kali	2 orang	3	3	Lppd
69	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	495 orang	125	75	Lppd
70	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	236 orang	30	10	Lppd
71	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
72	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Lppd
73	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk	Ada/tidak	tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	tahun berjalan yang bersumber dari APBD					
	74 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Lppd
	75 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
	76 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	data	1	1	1	Lppd
	77 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Ada	Lppd
	78 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Ada	Lppd
	79 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja	Ada/tidak	ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota					
80	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
81	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Lppd
82	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Lppd
83	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Lppd
84	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	tidak	Ada	Ada	Lppd
85	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		165 badan usaha	122	100	Lppd
86	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7
	87	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	80 badan usaha	50	50	Lppd
	88	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	165 badan usaha	100	100	Lppd
	89	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	30	30	Lppd
	90	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	50	50	Lppd
	91	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0	0	Lppd
	92	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	100	100	Lppd
	93	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98,13%	100	100	SPM
	94	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,02%	90	90	SPM
<b>II</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>				

1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	89,22	90,14	90,14	Sebelumnya Indikator Sasaran Kota Menjadi Indikator Tujuan PD
2	Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,74%	99,68	99,68	Lanjutan Indikator Sasaran PD
3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permakaman	Indeks	76,47%	78,48	78,48	Lanjutan Indikator Sasaran PD
4	persentase Pengembangan Perumahan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	99,39%	99,00%	99,00%	Indikator Program PD
6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		0	0	0	lppd
8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kk	65	105 KK	105 KK	lppd
9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	68,32%	55,95%	55,95%	lppd
10	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	133	60 unit	100	lppd
11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	41	40	40	lppd
12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		0	0	0	lppd
13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		0	0	0	lppd

1	2	3	4	5	6	7
14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	lppd
15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	lppd
16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	lppd
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		0	0	0	lppd
18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		0	0	0	lppd
19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	0	0	lppd
20	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	lppd
21	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	lppd
22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	lppd
23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan	KK	65 rumah tangga	105 KK	105 KK	lppd

1	2	3	4	5	6	7
	rencana pemenuhan SPM					
24	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	0	0	lppd
25	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		0	0	0	lppd
26	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	64,49 Ha	28,41 ha	28,41 ha	lppd
27	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	133 unit	60 unit	100	lppd
28	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	31,98 Ha	12,08 ha	8,35	lppd
29	Jumlah rumah di kab/kota	unit	41.409 rumah	42.379	42.379	lppd
30	Jumlah unit PK RTLH	unit	133 rumah	60 unit	100	lppd
31	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	133 rumah	240 unit	240 unit	lppd
32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	lppd
33	Rasio rumah dan KK	%	125,98%	170%	170%	lppd
34	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	120 rumah	50	50	lppd
35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	unit	41 rumah	40	40	lppd
36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6096 rumah	5948 unit	6245	lppd
37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6096 rumah	5948 unit	6245	lppd
38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6096 rumah	5948 unit	6245	lppd
39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	unit	41 pengembang	5948 unit	5948 unit	lppd
40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6096 rumah	5948 unit	6245	lppd
41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	orang	41 pengembang	40	40	lppd
42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	Orang	41 pengembang	40	40	lppd



1	2	3	4	5	6	7	
	43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	orang	41 pengembang	40	40	lppd
	44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100%	100%	100%	Spm
	45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100%	100%	100%	spm
<b>III</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>					
	1	persentase Pengelolaan Izin Lokasi	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	2	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	3	persentase Penatagunaan Tanah	%	100%	100%	100%	Indikator Program PD
	4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100%	100%	100%	Lppd
	5	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	30,52	30,52 ha	30,52 ha	Lppd
	6	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.		100%	0	100	Lppd
	7	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	Lppd
	8	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	9	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	1	1	1	Lppd
	10	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Do kumen	100	1	100	Lppd
	11	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		tidak ada	0	0	Lppd
	12	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		tidak ada	0	0	Lppd
	13	Dokumen Izin membuka tanah		tidak ada	0	0	Lppd
	14	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		tidak ada	0	0	Lppd
<b>IV</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>					
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,99%	57,77	57,77	Lanjutan indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	52,61	51,3	51,3	Indikator sasaran PD
	3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,78	82,9	82,9	Indikator sasaran PD
	4	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	98,04%	98,50%	98,50%	Indikator sasaran PD
	5	persentase data Perencanaan LH yang tersedia	%	69,23%	71,79%	71,79%	Indikator Program PD
	6	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	%	55,90%	49%	49%	Indikator Program PD

1	2	3	4	5	6	7
7	persentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	%	94,32%	94,32%	94,32%	Indikator Program PD
8	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	%	72,5%	71,5	71,5	Indikator Program PD
9	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	54,65%	64,70%	64,70%	Indikator Program PD
10	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	90%	100%	100%	Indikator Program PD
11	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	140%	100%	100%	Indikator Program PD
12	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	73,98%	73%	73%	Indikator Program PD
13	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98,04%	98,50%	98,50%	Lppd
14	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0%	100%	100%	Lppd
15	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota		ada	ada	ada	Lppd
16	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,576	1,6035	1,6035	Lppd
17	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	5,99	5,983	5,983	Lppd

1	2	3	4	5	6	7	
	18	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd	
	19	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00%	64,70%	100%	Lppd
	20	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		tidak ada	belum ada PPLHD	belum ada PPLHD	Lppd
	21	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	22	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	23	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100%	100%	100%	Lppd
	24	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	%	100%	100%	100%	Lppd
<b>V</b>		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>					
	1	Kinerja ruas jalan	%	0,34	0,42	0,42	Indikator Tujuan PD
	2	Kecepatan lalu lintas	Km/jam	38,05 km/jam	39 km/jam	39 km/jam	Indikator Sasaran PD

1	2	3	4	5	6	7
3	Kinerja Angkutan Umum	%	40%	41%	41%	Indikator Sasaran PD
4	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	%	84%	88%	88%	Indikator Program PD
5	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0	-	-	Lppd
6	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,34%	0,42	0,42	Lppd
7	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100%	100%	100%	Lppd
8	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	106,63%	100%	100%	Lppd
9	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100%	100%	100%	Lppd
10	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100%	100%	100%	Lppd

2022\* merupakan target baru yang disesuaikan berdasarkan hasil realisasi tahun 2021

Sumber: Bappelitbangda Kota Madiun, 2021 dan BPS Kota Madiun, 2021

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.** RKPD-P tahun 2022 Kota Madiun disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Hal tersebut dimaksudkan bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, diperlukan perubahan perencanaan pembangunan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah.

Perubahan RKPD Kota Madiun Tahun 2022 memuat perubahan pendapatan dan belanja pada masing-masing urusan, yang terangkum dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta pagu indikatifnya. Berdasarkan ketentuan dan kebutuhan daerah akan sinkronisasi serta harmonisasi dokumen perencanaan dan penganggaran, maka Rancangan RKPD\_P Kota Madiun Tahun 2022 yang telah tersusun ini digunakan sebagai pedoman untuk:

1. Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2022 agar tercapai keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Kota Madiun Tahun 2022;
3. Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Madiun Tahun 2022;
4. Evaluasi dan monitoring capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Madiun Tahun 2022 secara berkala.

Dengan ditetapkannya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 ini diharapkan nantinya dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan. Selain itu, RKPD-P Kota Madiun Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai media evaluasi bagi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Walikota dapat terwujud dan terukur hasil kinerjanya sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009